SEJARAH PERLAWANAN terhadap IMPERIALISME dan KOLONIALISME di DAERAH JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1990

SEJARAH PERLAWANAN terhadap IMPERIALISME dan KOLONIALISME di DAERAH JAWA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1990

Tim Penulis:

Edi S. Ekadjati
Rosad Amidjaja
Didi Suryadi
Ena Sutarna

Cetakan Pertama	:	Tahun 1982
Cetakan Kedua	:	Tahun 1990
Penerbit	:	Proyek IDSN
Pencetak	:	CV. Tumaritis

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada di Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan, terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Nopember 1990
Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, antara lain menggarap penulisan kesejarahan perihal sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di berbagai wilayah di negara kita.

Bagi bangsa Indonesia yang memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya kembali pada tanggal 17 Agustus 1945, sesudah berjuang melalui berbagai perlawanan fisik, maka sejarah perlawanan itu sendiri menempati kedudukan utama dan mempunyai nilai tinggi. Sepanjang sejarah imperialisme dan kolonialisme di Indonesia, telah terjadi berbagai perlawanan, besar maupun kecil, sebagai reaksi terhadap sistem imperialisme dan kolonialisme bangsa asing. Pengalaman-pengalaman itu merupakan modal yang berharga dalam usaha mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tujuan dari penulisan ini ialah melakukan inventarisasi dan dokumentasi perlawanan itu sebagai kejadian sejarah

yang akan memberikan kesadaran akan jiwa kepahlawanan, terutama pada generasi muda, mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Nopember 1982

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku ini merupakan hasil cetak ulang dari hasil cetakan pertama yang diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun 1982. Dalam cetakan ini telah diadakan perbaikan sistimatika dan redaksional.

Buku Tentang Sejarah Perlawanan banyak diminati oleh masyarakat luas khususnya generasi muda. Atas dasar itu maka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional menganggap perlu menerbitkan kembali buku ini dalam rangka penyebaran informasi kesejahteraan pada masyarakat luas dengan tujuan memupuk kebanggaan nasional dan rasa cinta tanah air.

Sekalipun buku ini telah mengalami perbaikan, namun kami tidak menutup kemungkinan saran perbaikan dan penyempurnaan.

Jakarta, Nopember 1990
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

1.1.1 Latar Belakang

Adalah satu kenyataan universal, bahwa suatu bangsa dan negara pernah mengalami masa hitam dalam sejarahnya. Masa hitam sejarah indonesia dan Asia afrika pada umumnya dialami dengan berlangsungnya zaman kolonialisme dan imperialisme selama puluhan sampai ratusan tahun. Pada zaman kolonialisme dan imperialisme kebebasan dan kemerdekaan suatu bangsa di suatu daerah tertentu dirampas oleh bangsa lain. Pada umumnya bangsa yang terampas kebebasan dan kemerdekaannya mengalami penderitaan akibat penekanan dan pemerasan bangsa yang menjajah.

Kebebasan, kemerdekaan, dan keadilan adalah suatu nilai universal dan menjadi hak azasi manusia; oleh karena itu, bila hak-hak azasi tersebut dirampas oleh orang lain, maka cepat atau lambat manusia yang terampas hak-hak azasinya akan berusaha mendapatkan kembali hak-haknya, walaupun sampai mengorbankan jiwa-raganya.

Demikianlah, dalam sejarah kolonial di Indonesia pun tidak hanya diisi oleh pemerintahan dan kekuasaan bangsa penjajah dalam kerangka mengeduk kekayaan alam dan bangsa Indonesia, melainkan terisi pula oleh usaha-usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kehidupan mereka dan membebaskan tanah air mereka dari cengkraman kaum kolonial. Usaha-usaha tersebut dilakukan sepanjang berlangsungnya sejarah kolonial dalam bentuk perlawanan terhadap kaum kolonial dan kaki-tangan mereka dalam berbagai corak dan ukuran sesuai dengan kondisi zaman dan tempatnya. Corak-corak perlawanan itu misalnya, perbanditan sosial, gerakan protes terhadap keadaan atau peraturan yang tidak adil, gerakan revivalistis, gerakan nativistis, gerakan mesianistis, dan gerakan perang sabil.[1]

Jawa Barat yang merupakan bagian dari Indonesia tidak terlepas dari pengalaman zaman kolonial. Justru di wilayah inilah terletak pusat kekuasaan kolonial, tepatnya di Batavia atau Jakarta. Letak yang strategis, tanah yang subur dan luas, serta penduduknya yang cukup banyak agaknya merupakan faktor-faktor yang mendorong kaum kolonial memilih daerah ini sebagai pusat kegiatan dan kekuasaan mereka di Nusantara.

Sejarah menunjukkan, bahwa daerah Jawa Barat menarik perhatian kaum kolonial sejak awal kedatangan mereka di Nusantara (Portugis pada awal abad ke-16, Inggris pada akhir abad ke-16, dan Belanda pada awal abad ke-17 Masehi), oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila sejak itu daerah Jawa Barat menjadi incaran kaum kolonial untuk memperoleh tanah tempat berpijak; mula-mula tempat perwakilan dagang mereka, kemudian pusat kekuasaan mereka. Hal itu mengakibatkan sejak awal abad ke-17 daerah ini menjadi pusat kegiatan dan kekuasaan kaum kolonial. Wilayah kekuasaan mereka makin lama makin luas, sehingga pada akhir abad ke-17 wilayah pengaruh kekuasaan mereka secara formal telah sampai ke seluruh daerah

Jawa Barat, oleh karena itu, ungkapan yang menyatakan bahwa penjajahan di Indonesia berlangsung selama 350 tahun, kiranya untuk daerah Jawa Barat mengandung kebenaran, walaupun tidak seluruhnya benar.

Namun demikian tanah tempat berpijak dan wilayah pengaruh atau kekuasaan yang didapat oleh kaum kolonial itu, tegasnya orang Belanda tidak diperoleh dengan cara mudah, melainkan setelah melalui liku-liku usaha yang sulit dan sering melibatkan kekuatan bersenjata. Begitu pula sesudah daerah itu dikuasai mereka, tidak langsung tinggal memetik hasilnya dengan mudah dan tenang, sebab penduduk atau pemilik daerah itu terus-menerus berusaha dengan melancarkan perlawanan agar tanah air mereka kembali ke tangan mereka. Jadi, para pemimpin dan rakyat Jawa Barat tidak begitu saja menyerahkan tanah air mereka kepada orang asing yang akan menjajah mereka. Hanya dalam keadaan terpaksa dan terdesak mereka tunduk kepada kehendak penjajah, tetapi itu pun selanjutnya mereka perjuangkan kembali guna merebut kembali tanah tumpah darah mereka.

Perlawanan rakyat Jawa Barat terhadap penjajah tanah air mereka timbul-tenggelam sepanjang sejarah kolonial. Perjuangan itu baru berhasil secara formal pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Bentuk, sifat, isi, motif, dan tujuan perlawanan-perlawanan tersebut berbeda-beda sejalan dengan keadaan objektif masyarakatnya dnn faktor-faktor kondisional lainnya dari masyarakat itu pada kurun waktu tertentu. Demikianlah, misalnya bentuk dan sifat perlawanan yang dilancarkan pada abad ke-17 berbeda dengan bentuk dan sifat perlawanan yang dilakukan pada abad ke-19.

Pengetahuan mengenai berbagai bentuk dan corak perlawanan terhadap penjajahan di berbagai daerah di Indonesia penting untuk ilmu pengetahuan dan untuk bahan pendidikan

dalam pembinaan bangsa.[2] Dengan pengetahuan tersebut akan dapat diambil pelajaran yang bertalian dengan kegagalan dan keberhasilan usaha itu serta kekuatan sosial apa yang menjadi pendorong perlawanan untuk melepaskan diri dari kekuasaan asing. Unsur-unsur ketahanan, semangat berkorban, dan persatuan di kalangan kelompok-kelompok sosial yang berbeda latar belakang kebudayaan, pandangan politik, serta agama yang tercermin dan terujud dalam perlawanan-perlawanan itu merupakan nilai-nilai luhur yang memungkinkan tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air mereka.

1.1.2 Masalah

Sejauh ini sebelum dilakukan penelitian yang menyeluruh dan mendalam mengenai perlawanan rakyat di daerah Jawa Barat terhadap kaum kolonialisme dan imperialisme yang sebagaimana dikemukakan di atas mempunyai bentuk, sifat, motif, isi, dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zamannya dan keadaan objektif daerah dan masyarakatnya; padahal pengetahuan tentang perlawanan-perlawanan tersebut sangat penting baik ditinjau dari sudut kepentingan ilmu pengetahuan ataupun kepentingan pembinaan bangsa.

Masalahnya sekarang ialah, bagaimana bentuk, sifat, motif, isi, dan tujuan tiap-tiap gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan rakyat di daerah Jawa Barat itu ? Bagaimana pula menyampaikan pengetahuan tentang perlawanan tersebut kepada generasi masa kini dan generasi masa datang ?

Penelitian dan penulisan ini akan mengungkapkan dan menjawab masalah yang dipertanyakan tersebut di atas.

1.2 Tujuan Penelitian

(1) Menginventarisasi dan mendokumentasikan kejadian-kejadian historis;

(2) Memperoleh bahan-bahan penulisan sejarah yang akan dilakukan di waktu-waktu mendatang; dan

(3) memberikan kesadaran mengenai kesinambungan sejarah dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

1.3 Kerangka Teori yang Digunakan

Sesuai dengan pedoman penulisan yang ditetapkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, bahwa segala keinginan dan tindakan dari mereka yang mengibarkan panji-panji pembrontakan untuk membebaskan diri mereka dan kelompok yang mereka bela dari keadaan yang menekan merupakan hakekat dari perlawanan. Perlawanan yang dimaksud adalah reaksi terhadap sistem kolonialisme dan imperialisme bangsa asing, yakni Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jepang.

Sementara itu digunakan pula arti dan fungsi perlawanan sebagai berikut :

(1) mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia serta martabatnya;

(2) melanjutkan kehidupan lembaga-lembaga kebudayaan Indonesia, sebagai bentuk-bentuk khas dari kehidupannya ; dan

(3) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya serta suasana kebebasan hidup khususnya.[3]

Dalam penyusunannya digunakan metode deskriptif.

1.4 Prosedur Penelitian

Sejalan dengan metode sejarah pada umumnya, maka penelitian ini menempuh tingkat-tingkat kerja sebagai berikut:

(1) Pengumpulan sumber, dalam hal ini digunakan teknik-teknik:

(a) studi kepustakaan, di perpustakaan-perpustakaan dan penyimpanan arsip di Jakarta dan Bandung

(b) kerja lapangan, ke tempat-tempat terjadinya perlawanan (tidak seluruhnya didatangi)

(c) wawancara *(oral history)*, terhadap tokoh-tokoh yang ikut serta dalam gerakan perlawanan itu dan orang yang mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang peristiwa itu

(2) Kritik sumber untuk memperoleh kebenaran dan kejernihan data, baik kritik ekstern (tentang wujud sumber) ataupun kritik intern (tentang isi sumber) maupun melakukan perbandingan data yang berasal dari macam-macam sumber; dan

(3) Penulisan; dilakukan berdasarkan sumber data yang berhasil dikumpulkan dan lulus dalam seleksi (kritik) sumber.

Berhubung dengan penulisan hasil penelitian ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang terdiri atas empat orang, maka pelaksanaan penulisannya ditempuh prosedur sebagai berikut :

(1) Tiap-tiap anggota tim mendapat tugas mengerjakan bagian-bagian tertentu berdasarkan organisasi penulisan;

Dalam hal ini pembagian tugasnya adalah :

(a) Edi S. Ekadjati; mengerjakan Bab I Pendahuluan dan Bab II tentang Perlawanan pada Abad Ke-16 dan Abad Ke-17 Masehi, dan Bab V Penutup

(b) Ena Sutarna; mengerjakan Bab II tentang Perlawanan pada Abad Ke-18

(c) Rosad Amidjaja; mengerjakan Bab III tentang Perlawanan pada Abad Ke-19

(d) Didi Suryadi, mengerjakan Bab IV tentang Perlawanan pada Abad Ke-20

(2) Hasil kerja tiap anggota tim dibicarakan bersama untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan ; dan

(3) Keseluruhan hasilnya dikoreksi oleh Edi S. Ekadjati.

1.5 Organisasi Penulisan

Pada dasarnya penulisan ini disusun berdasarkan sistematika kerangka laporan yang ditetapkan oleh pedoman penulisan dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Berdasarkan ciri-ciri seluruh perlawanan yang terjadi di daerah Jawa Barat, organisasi isi laporan ini dibagi atas tiga priodisasi menurut perkembangan abad, yaitu *pertama* perlawanan pada abad ke-16, 17 dan 18 Masehi, *kedua* perlawanan pada abad ke-19 Masehi, dan *ketiga* perlawanan pada abad ke-20.

Perlawanan pada abad ke-16, 17, dan 18 Masehi terjadi anra dua negara, jika kaum kolonial dipandang sebagai sebuah negara. Selama periode tersebut di daerah Jawa Barat terdapat empat buah perlawanan. Keempat perlawanan itu ialah pertempuran di Kota Pelabuhan Kalapa (1527) antara pasukan Demak dan Cirebon melawan armada Portugis, pengepungan Kota Batavia (1628, 1629) yang menjadi pusat kekuasaan dan tempat kedudukan Belanda oleh pasukan Mataram dan pasukan Priangan, perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Kesultanan Banten (1658 – 1683) dari gangguan Kompeni Belanda, dan perlawanan Kiai Tapa (1730 – 1732) yang menentang pemerintahan Ratu Syarifah Fatimah yang dolim dan menentang kehadiran kekuasaan Belanda di Banten. Sesungguhnya masih ditemukan perlawanan di Jawa Barat yang dilancarkan pada abad ke-18 Masehi, yaitu perlawanan Barat yang dilancarkan pada akad ke-18 Masehi, yaitu perlawanan yang dipimpin oleh Prawatasari, seorang tokoh agama Islam. Ia mengobarkan perlawanan di daerah Priangan sekitar tahun 1707,[4] akan tetapi karena sumber sangat sedikit, maka tidak dimungkinkan untuk direkonstruksi peristiwanya secara cukup lengkap, sehingga tidak diungkapkan di sini .

Perlawanan yang terjadi pada abad ke-19 Masehi merupakan gerakan rakyat terhadap penguasa mereka baik penguasa kolonial yang waktu itu telah memasuki dengan mantap di daerah mereka ataupun penguasa pribumi yang telah menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial. Dalam periode ini dikemukakan enam corak perlawanan yang terjadi di Jawa Barat, yaitu perlawanan Bagus Rangin yang terjadi di Cirebon (1802 – 1818), perlawanan Raksapraja yang terjadi di Kabupaten Bandung (1842), Perlawanan Nyi Aciah (1870 – 1871), perlawanan-perlawanan sosial di tanah partikelir, perlawanan Hasan Maulani di Kuningan, dan perlawanan Haji Wasid di Banten (1888). Perlawanannya bersifat tradisional dengan cara menggunakan kekuatan senjata.

Dalam abad ke-20, sejalan dengan lahirnya pergerakan nasional, bentuk perlawanan rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme itu mulai bersifat modern. Gerakan-gerakannya didasarkan atas konsep-konsep ideologi baru, baik ideologi agama, kebangsaan, ataupun komunis. Pada masa ini perlawanan itu tidak disandarkan pada kekuatan fisik (senjata), melainkan cenderung menggunakan organisasi dan politik sebagai alatnya.

CATATAN

[1] Sartono Kartodirdjo, *Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia,* Pidato Dies Natalis ke-18, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1967, hal. 42-53.

[2] Abdurachman Surjomihardjo, *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi,* Yayasan Idayu, Jakarta, 1979, hal.

[3] A. Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme,* Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta 1973, hal. iv.

[4] F.De Haan, *Priangan,* De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811, III, BGKW, Batavia, 1912. hal. 76, 85, 339, 341, 379, 416, 419, 446-447, 690-691.

BAB II PERLAWANAN DI DAERAH JAWA BARAT DALAM ABAD KE 16, 17, DAN 18 MASEHI.

2.1. *Kehadiran Portugis di Jawa Barat Dihadang di Pelabuhan Kelapa.*

2.1.1 *Latar Belakang Terjadinya Pertempuran di Pelabuhan Kelapa*

Pada awal abad ke-16 Masehi, di Pulau Jawa masih terdapat dua buah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Sunda[1] dan Kerajaan Majapahit.[2] ; yang pertama berlokasi di bagian barat Pulau Jawa, sedangkan lokasi Kerajaan Majapahit terletak di bagian timur Pulau Jawa. Pada waktu itu Kerajaan Majapahit sedang mengalami proses kehancuran total, sedangkan Kerajaan Sunda berada dalam masa kejayaan walaupun bayang-bayang kehancurannya sudah tampak.

Meskipun Kerajaan Sunda cenderung sebagai negara agraris, namun terlibat pula dalam kegiatan perniagaan. Hal itu terbukti dengan adanya tujuh buah kota pelabuhan yang berderet di sepanjang pesisir utara seperti disaksikan oleh Tome Pires pada tahun 1513.[3] Ketujuh kota pelabuhan itu berturut-turut dari barat ke timur ialah Banten, Pontang, Cikande, Ta-

ngerang, Kelapa, Karawang, dan Cimanuk (Indramayu). Cirebon dipandang oleh Tome Pires sebagai kota pelabuhan di luar lingkungan Kerajaan Sunda, melainkan di bawah pengaruh Kesultanan Demak. Banten dan Kalapa merupakan pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Saudagar-saudagar dari Arab, Parsi, India, Cina, Palembang, Malaka, Pasai, Jawa Timur, Madura dan lain-lain berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan tersebut untuk berniaga. Sebaliknya saudagar-saudagar Sunda sendiri berdagang ke luar negeri. Dalam struktur berokrasi Kerajaan Sunda terdapat jabatan sahbandar, yang mengepalai pelabuhan dan urusan pelayaran[4].

Selain itu, pada tahun 1518 telah dikenal istilah-istilah di lingkungan sekitar pelabuhan (12 istilah), ahli pelayaran *(puhawang)*, ukuran harga sampai bernilai jutaan, sejumlah nama negara di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur, dan ahli bahasa *(sang jurubasa darmamurcaya)*.[5]

Ibukota Kerajaan Sunda ialah Pakuan Pajajaran yang terletak di sekitar Bogor sekarang.[6] Pakuan Pajajaran berada di daerah pedalaman, tetapi ibukota itu dapat didatangi oleh kapal-kapal kecil dengan menyusuri sungai Ciliwung melalui Kota Pelabuhan Kalapa. Perjalanan Kelapa – Pakuan dapat ditempuh selama dua hari. Pada waktu penduduk ibukota Pakuan berjumlah sekitar 50.000 orang.[7]

Pada waktu Tome Pires mengunjungi kota-kota pelabuhan di wilayah Kerajaan Sunda (1513) terbetik berita adanya perasaan khawatir raja Sunda terhadap desakan pengaruh saudagar Islam dan pengaruh kekuasaan Islam[8] yang merasuk ke dalam wilayahnya dari arah timur.

Raja Sunda berusaha membendung pengaruh para saudagar Islam itu dengan cara mengurangi jumlah saudagar Islam yang memasuki pelabuhan-pelabuhan di wilayahnya.[9] Namun usaha raja Sunda tersebut ternyata tidak berhasil, sebab sumber utama

pengaruh itu letaknya dekat, yaitu Kesultanan Demak yang berlokasi di Jawa Tengah.

Demak muncul ke atas panggung sejarah sebagai pengganti Kerajaan Hindu Majapahit. Kerajaan ini didirikan atas prakarsa Sunan Ngampel beserta para ulama Islam lainnya di Jawa Timur dan atas dukungan para saudagar Islam yang bermukim di sepanjang pesisir utara Jawa Timur sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi, karena itu dalam perkembangannya, Kesultanan Demak bercirikan Islam dan perniagaan serta berusaha untuk menjadi pusat penyebaran Agama Islam dan pusat perniagaan di Pulau Jawa.

Penyebaran Agama Islam di wilayah Kerajaan Sunda diawali dari Cirebon. Sebagai sebuah kota pelabuhan tentunya Cirebon banyak dikunjungi oleh para pelabuhan 'tentunya Cirebon banyak dikunjungi oleh para pedagang termasuk pedagang-pedagang Islam (awal abad ke-15 Masehi). Dari pergaulan melalui hubungan dagang ada penduduk setempat masuk Islam. Sebagai muslim mereka berusaha menyebarkan Agama Islam kepada orang-orang sekitarnya. Sejak itu kaum muslimin di Cirebon makin lama makin meningkat jumlahnya. Lebih-lebih setelah datangnya Susuhanan Jati yang kemudian menjadi guru agama di sana (1470). Dengan dukungan kaum muslimin setempat dan sultan Demak, Susuhunan Jati membangun kekuasaan sendiri di Cirebon dan kemudian melepaskan diri dari ikatan dengan Kerajaan Sunda.[10]

Cirebon yang bekerjasama dengan Demak berusaha terus untuk menyebarkan Agama Islam ke dalam wilayah Kerajaan Sunda. Pada tahun 1513 penduduk Kota Pelabuhan Cimanuk (Indramayu) telah banyak yang memeluk Agama Islam, walaupun kepala daerahnya sendiri belum masuk Islam.[11]

Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membawa akibat jauh bagi perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Semula Portugis bermaksud akan menjadikan Malaka

menjadi pusat perniagaan di kawasan Asia Tenggara. Begitu pentingnya kedudukan Malaka bagi dunia perniagaan waktu itu, sehingga ada yang berpendapat, bahwa barang siapa ingin menguasai Asia Tenggara, harus terlebih dahulu menguasai Malaka,[12] tetapi maksud Portugis itu tidak bisa tercapai dengan baik, karena ternyata makin lama makin banyak saudagar, terutama saudagar Islam, yang enggan singgah di Pelabuhan Malaka. Hal itu disebabkan oleh tingginya pajak yang dipungut oleh Portugis. Orang Portugis kurang mendapat simpati penduduk dan pedagang setempat berhubung dengan sikap dan perilaku mereka sering tidak senonoh, dan orang Portugis berusaha menyebarkan Agama Kristen.[13]

Untuk menghindari Malaka, banyak saudagar yang memindahkan rute perjalanannya dari jalur niaga utara (Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Malaka, terus ke Cina atau ke India) ke luar niaga selatan (Maluku, Nusa Tenggara, Pulau Jawa, Pantai Barat Sumatra, terus ke India) melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bahkan banyak pula saudagar dari Malaka sendiri memindahkan kegiatan dan tempat tinggal berikut kekayaan mereka ke kota-kota pelabuhan lain, terutama kota pelabuhan yang dikuasai oleh kaum muslimin, antara lain ke Cirebon dan Jepara (pelabuhan utama Kesultanan Demak).

Dengan demikian peristiwa jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendatangkan keuntungan bagi kota-kota pelabuhan di pesisir utara Pulau Jawa. Bagi Cirebon dan Demak keuntungan itu bukan hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang sosial dan politik.

Bagi Kerajaan Sunda datangnya keuntungan materi itu beriringan dengan masuknya faktor yang bisa mengakibatkan hancurnya negara. Faktor yang dimaksud itu ialah saudagar Islam; sebab dengan masuknya saudagar Islam, akan masuk pula agama Islam, dan dengan masuknya Agama Islam akan putuslah kesetiaan rakyat terhadap pusat kekuasaan (raja).

Untuk mengatasi kemungkinan bahaya itu, Raja Sunda mengambil kebijaksanaan dua langkah. *Pertama,* seperti telah dikemukakan di atas mengurangi jumlah saudagar Islam yang memasuki kota-kota pelabuhan milik Kerajaan Sunda. *Kedua,* mengadakan hubungan kerja sama dengan Portugis di Malaka guna mengimbangi kekuatan Demak.

Dalam rangka pelaksanaan langkah kedua raja Sunda mengirimkan utusan ke Malaka di bawah pimpinan Samiam pada tahun 1512.[14] Kunjungan persahabatan itu disambut baik oleh pihak Portugis. Untuk mengatasi makin sempitnya perniagaan di Malaka dan membalas serangan Demak (1512) Portugis bermaksud menguasai jalur niaga selatan dan sekaligus menguasai Demak. Selain dengan Kerajaan Sunda, Portugis menjalin pula hubungan baik dengan Balambangan di ujung Timur Pulau Jawa, sisa kekuatan Majapahit.[15] Guna meningkatkan persahabatan itu pada tahun 1522 pihak Portugis mengirimkan utusan resmi dipimpin Henrique Leme ke ibukota Kerajaan Sunda sebagai kunjungan balasan dengan membawa sejumlah hadiah. Pada waktu itu Samiam telah menjadi raja Sunda. Raja Sunda menerima baik utusan Portugis itu, karena mempunyai kepentingan untuk bersahabat dengan Portugis, baik dalam rangka pencarian bantuan untuk menghadapi Demak ataupun untuk kepentingan perdagangan. Hasil dari kunjungan balasan itu ialah ditandatanganinya perjanjian kerja sama dalam bidang perniagaan dan keamanan antara keduanya pada tanggal 21 Agustus 1522. Perjanjian itu menetapkan bahwa raja Sunda memberikan izin kepada orang-orang Portugis untuk membangun sebuah benteng, raja Sunda akan memberikan berkapal-kapal lada kepada Portugis sebagai tukaran barang-barang yang diperlukan oleh Kerajaan Sunda. Sebagai tanda persahabatan raja Sunda akan menghadiahkan 1000 karung lada setiap tahun kepada raja Portugal sejak hari pembangunan benteng dimulai.[16]

Perjanjian kerjasama antara Kerajaan Sunda dengan Portugis sangat menggoncangkan Demak. Soalnya, perjanjian kerjasama itu diadakan tidak lama setelah kegagalan dari Malaka (1521). Timbul dugaan bahwa perjanjian kerjasama itu ditujukan dalam rangka Portugis akan melancarkan serangan balasan terhadap Demak. Oleh karena itu, bagi Demak menggagalkan terlaksananya perjanjian kerjasama itu merupakan mati-hidupnya Kesultanan Demak. Kerjasama itu merupakan ancaman besar dan serius bagi Demak.

2.1.2. Pertempuran di Pelabuhan Kelapa.

Kalapa merupakan pelabuhan utama Kerajaan Sunda. Di samping letaknya yang strategis karena berada di hadapan ibukota negara, juga keadaan alamnya indah. Pelabuhan Kalapa terletak di muara Sungai Ciliwung, dilingkari oleh teluk yang cukup luas dan dilindungi oleh sejumlah pulau kecil di depannya.[17]

Begitu strategisnya letak Pelabuhan Kalapa pada waktu itu, sehingga barang siapa hendak menguasai Kerajaan Sunda harus terlebih dahulu dapat menguasai pelabuhan Kalapa. Kedudukan strategis Kota Pelabuhan Kalapa demikian dipahami baik oleh Demak, Portugis maupun oleh Kerajaan Sunda sendiri, hanya persoalannya lain-lain. Persoalan bagi Kerajaan Sunda ialah bagaimana mempertahankan kota pelabuhan itu agar tetap menjadi perisai ibukota kerajaan dan sumber keuangan kerajaan. Karena kekuatan armadanya lemah, maka raja Sunda mendatangkan bantuan orang Portugis yang terkenal tangguh kekuatan armadanya. Mempertahankan kota pelabuhan ini adalah soal mati-hidupnya Kerajaan Sunda.

Portugis harus ikut mempertahankan kedudukan Kalapa di tangan kerajaan Sunda, sebab kota pelabuhan itu berada dalam ancaman serangan Demak. Jika Kalapa dikuasai oleh Demak, maka maksud menguasai perniagaan jalur niaga selatan

dan perniagaan Nusantara pada umumnya akan mengalami kegagalan. Sebaliknya, Demak akan bertambah kuat dan agresif, suatu waktu kekuatannya akan ditujukan lagi kepada Portugis. Jika Portugis mempunyai benteng di Kalapa berarti jalan buat menguasai perniagaan Nusantara terbuka.

Bagi Demak, masalahnya ialah, bahwa kota pelabuhan itu harus segera diduduki, sebab bila tidak, akan didahului oleh Portugis. Jika benteng Portugis sudah berdiri di situ, jauh akan lebih sukar mendudukinya, bahkan mungkin sebaliknya mereka akan menyerang Demak. Jadi bagi Demak harus lebih dahulu menyerang dari pada diserang.

Persiapan Demak untuk menduduki Kalapa memakan waktu bertahun-tahun. Persiapan itu berwujud dua macam. *Pertama*, menyusun kekuatan angkatan perang yang tangguh yang terdiri dari atas angkatan darat dan angkatan laut. *Kedua*, membangun pangkalan di tempat kedudukan musuh. Pangkalan itu diperlukan guna mengumpulkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan musuh, kedudukan pasukan musuh dan sebagai batu loncatan dalam menyerang musuh. Dalam hal ini Kota Pelabuhan Banten dipilih menjadi pangkalannya. Untuk itu Pangeran. Hasanuddin, putra Susuhunan Jati, dikirimkan ke Banten guna membentuk kelompok masyarakat Islam di sana.

Pada tahun 1526 segala persiapan selesai dan waktunya yang tepat untuk melancarkan serangan telah tiba. Pada waktu itu di dalam negeri Kerajaan Sunda sedang dilanda kekacauan yang disebabkan oleh pembrontakan daerah-daerah dan masuknya Agama Islam ke dalam masyarakat.[18] Sementara itu, pihak Portugis sedang menghadapi masalah yang lebih musykil sehubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Goa (India) dan Malaka.

Pasukan Demak yang dipersiapkan untuk melakukan ekspedisi ke Kalapa berjumlah 1968 orang prajurit. Mereka berasal dari pasukan Demak sendiri dan pasukan dari Cirebon.

Pasukan tersebut terdiri atas angkatan darat dan angkatan laut. Pasukan itu menuju sasaran melalui jalan laut; jadi diangkut dengan sejumlah kapal yang cukup banyak. Mereka dipersenjatai dengan meriam, senjata api, dan aneka macam senjata tajam. Sultan Trenggana, sultan Demak ke-13 (1521 – 1546) menyerahkan pimpinan pasukan demak kepada Fatahillah. Susuhunan Jati menugaskan Pangeran Cirebon, Dipati Keling, dan Dipati Cangkuang untuk memimpin pasukan dari Cirebon. Bertindak sebagai panglima pasukan secara keseluruhan adalah Fatahillah.[19]

Fatahillah dilahirkan di Pasai, Sumatra Utara pada tahun 1494. Ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama dan lingkungan masyarakat Islam. Karena pada tahun 1521 Pasai diduduki oleh Portugis, maka Fatahillah pergi meninggalkan tanah airnya menuju ke Mekah, pusat Agama Islam. Di sana ia belajar ilmu Agama Islam dan ilmu lainnya selama 4 tahun. Ia memilih Demak sebagai tempat tinggalnya, setelah diketahui Pasai masih diduduki oleh Portugis. Sultan Demak menyambut baik kedatangan Fatahillah itu, bahkan dijodohkannya dengan Ratu Pembayun, adiknya.[20] Pemilihan Fatahillah sebagai pemimpin pasukan Demak untuk menguasai Kalapa adalah tepat, karena tokoh ini mempunyai latar belakang permusuhan dengan Portugis.

Pasukan Demak tidak langsung menyerang Pelabuhan Kalapa, melainkan menduduki Banten dahulu, tempat pangkalan pasukannya yang telah dipersiapkan oleh Pangeran Hasanuddin. Penguasaan Banten berlangsung tanpa mengalami kesulitan berarti (1526); bahkan selanjutnya pihak Banten memberikan bantuan yang mempermudah pasukan Demak dalam melancarkan serangan terhadap Pelabuhan Kalapa.[21]

Serangan terhadap Pelabuhan Kalapa dilakukan setelah memasuki tahun berikutnya, tahun 1527. Pasukan yang dikerahkan untuk menyerbu Kelapa berjumlah 1452 orang.[22]

Berbeda dengan sewaktu menduduki Banten, dalam menguasai Kalapa pasukan gabungan Demak–Cirebon mendapat perlawanan gigih dari pasukan Kerajaan Sunda. Pihak Sunda telah mempersiapkan pasukan yang tangguh di bawah pimpinan penguasa Kota Pelabuhan Kalapa. Betapapun gigihnya pasukan Sunda bertempur, tetapi akhirnya kalah juga, karena mereka lemah dalam angkatan laut. Setelah pimpinan pasukan Sunda tewas dalam pertempuran, Kota Pelabuhan Kalapa jatuh ke tangan pasukan Fatahillah.[23]

Rencana Portugis untuk mendirikan benteng di Pelabuhan Kalapa pelaksanaannya tertunda-tunda, karena secara tak disangka-sangka mereka harus menghadapi masalah-masalah yang penting yang menyangkut pergantian pemimpin mereka dan mempertahankan kedudukan mereka di Malaka dari serangan pasukan Sultan Mahmud.

Pada tahun 1524 Vasco de Gama pergi berlayar ke India. Ia membawa perintah wakil Raja Portugas Conde Almirante agar segera membangun benteng di pelabuhan Kelapa dengan dipimpin oleh Francisco de Sa, namun wakil raja Portugal itu tiba-tiba meninggal dunia dan kedudukannya digantikan oleh Henrique de Menezes. Wakil raja yang baru mengangkat Francisco de Sa menjadi gubernur Goa.[24] Dengan adanya pengangkatan tersebut pembangunan benteng di Pelabuhan Kalapa tertunda karenanya.

Pada awal tahun 1526 Lopo vaz de Sampaio memegang pemerintahan. Ia segera memberhentikan Francisco de Sa sebagai gubernur Goa. Fransico de Sa sendiri mendapat tugas lain, yaitu mempersiapkan sebuah armada dalam rangka membangun benteng di Pelabuhan Kalapa. Ia berhadil menyusun satu armada dengan kekuatan 6 buah kapal, terdiri atas dua buah kapal galyun, sebuah kapal gale, sebuah kapal galesta, sebuah kapal karavella, dan sebuah kapal brigantin.[25] Segera armada ini berlayar menuju Sunda.

Dalam perjalanan menuju Sunda armada Portugis itu mendapat perintah untuk membantu dahulu rekan mereka di Malaka yang mendapat serangan dari pasukan Sultan Mahmud, sultan Malaka yang terakhir yang melarikan diri ke Bintan sewaktu dikalahkan mereka. Setelah persoalan di Malaka terselesaikan (akhir 1526), barulah armada Portugis itu melanjutkan pelayarannya ke Sunda. Malang menimpa kapal brigantin yang dipimpin oleh Duarte Coelho, di tengah jalan terserang gelombang besar, sehingga terpisah dengan kapal-kapal lainnya dan terdampar dekat Pelabuhan Kalapa. Awak kapalnya ditawan oleh pasukan Islam (Demak) yang beberapa hari sebelumnya telah menduduki kota pelabuhan tersebut.[26]

Pada waktu armada Portugis tiba di Pelabuhan Kalapa, mereka tidak disambut oleh penguasa setempat sebagai mana mestinya yang mendapat kunjungan sahabatanya. Ketika Francisco de Sa menghubungi penguasa setempat guna membicarakan pembangunan benteng sebagaimana disetujui bersama dalam perjanjian kerjasama tahun 1522, penguasa setempat menolak pembicaraan itu. Barulah diketahui bahwa pada waktu itu telah terjadi penggantian penguasa. Kini kota pelabuhan itu telah dikuasai oleh Fatahillah, pimpinan pasukan Demak. Karena kedua belah pihak dalam keadaan bermusuhan, maka pertempuran pun tak terelakkan lagi. Dalam jarak waktu yang pendek peperangan sengit terjadi lagi di Pelabuhan Kalapa.

Tentara Portugis menghujani Kota Pelabuhan Kalapa dengan meriam. Pasukan Cirebon pimpinan Dipati Cangkuang terpaksa mundur dahulu menghadapi peluru-peluru meriam itu, tetapi kemudian pasukan Demak–Cirebon yang jumlahnya lebih besar dengan gagah berani secara serentak menyerbu tentara Portugis, sehingga mereka kewalahan meladeninya. Karena tidak tahan menghadapi serangan prajurit-prajurit Demak dan Cirebon, akhirnya tentara Portugis melarikan diri dari Pelabuhan Kalapa dengan meninggalkan kerugian besar, baik berupa

kapal ataupun tentaranya yang tewas dan luka-luka. Mereka pulang kembali ke Malaka.[27]

Berkat keberanian pasukan gabungan Demak – Cirebon dan kepemimpinan Fatahillah, armada Portugis yang terkenal tangguh kekuatannya yang telah berhasil mengalahkan armada Arab (1508) dan Malaka (1511, 1526) ternyata dapat dikalahkan dan diusir dari Pelabuhan Kalapa.

Dengan digagalkannya rencana pembangunan benteng Portugis di Pelabuhan Kalapa, maka gagal pula rencana Portugis untuk menguasai jalan niaga selatan dan juga menguasai Pulau Jawa. Ini berarti masa penjajahan asing di Pulau Jawa dapat diundurkan selama kira-kira 100 tahun, sebab awal abad berikutnya Pelabuhan Kalapa yang telah berganti nama Jayakarta berhasil diduduki oleh orang Belanda. Hal itu berarti pula bahwa Fatahillah, sebagai panglima pasukan Demak – Cirebon, telah berhasil menyelamatkan Pulau Jawa dari cengkraman penjajahan Portugis.

Selanjutnya Fatahillah diangkat menjadi kepala daerah Kalapa sebagai penghargaan atas keberhasilannya menduduki kota pelabuhan itu dengan mengusir orang Portugis dari pelabuhan itu. Sebagai kepala daerah Kalapa, Fatahillah berusaha menghidupkan dan meningkatkan peranan Kota Kalapa sebagai pelabuhan penting dalam arena perniagaan Nusantara di pantai utara Pulau Jawa. Ia juga berusaha menyebarkan Agama Islam di kalangan penduduk Kalapa dan daerah pesisir utara Jawa Barat pada umumnya.

2.2 Pengepungan Kota Batavia (1628 – 1629)

2.2.1 Latar Belakang Dilakukannya Pengepungan Kota Batavia

Pada akhir perempatan pertama abad ke-17 Masehi di Pulau Jawa terdapat tiga buah pusat kekuasaan yang masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai kekuatan berimbang.

Ketiga buah pusat kekuasaan itu ialah Banten, Batavia, dan Mataram. Banten adalah pusat kekuasaan yang muncul pada pertengahan abad ke-16, sering dengan proses pendudukan Banten dan Kalapa oleh pasukan Demak dan Cirebon (1526, 1527) dan proses islamisasi di daerah Jawa Barat sebelah barat.[28] Selanjutnya Banten berubah menjadi sebuah kerajaan maritim yang tangguh dan Kota Pelabuhan Banten yang sekaligus menjadi ibukota kerajaan merupakan salah satu kota pelabuhan internasional besar di Asia. Di Kota Pelabuhan Banten banyak keluar masuk kapal dagang dari berbagai daerah di Kepulauan Nusantara dan luar negeri, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Cina Arab. Dari wilayah Kesultanan Banten sendiri menghasilkan lada yang merupakan salah satu barang dagangan utama pada waktu itu, di samping pala, cengkih yang merupakan komponen dari rempah-rempah.[29]

Batavia muncul sebagai kelanjutan dari Kota Pelabuhan Kalapa yang kemudian diganti menjadi Jayakarta (1527). Kota pelabuhan ini dipimpin oleh seorang kepala daerah (Fatahillah, Ratu Bagus Angke, Pangeran Jayakarta, Pangeran Wijayakrama) dan berada di bawah kuasa Banten. Di kota pelabuhan ini berdiri tempat kedudukan (yang diperkuat perbentengan) Inggris dan Belanda (1610). Dalam konflik yang terjadi di antara empat kekuatan, yaitu Jayakarta, Belanda, Banten dan Inggris, keluar sebagai pemenang adalah Belanda. Di atas puing-puing Jayakarta dibangunlah Batavia yang berpolakan kota di Belanda pada tahun 1619.[30] Batavia dijadikan pusat kedudukan orang Belanda (VOC) di Nusantara. Orang Belanda berdatangan di Kepulauan Indonesia dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan. Dalam usahanya itu orang Belanda tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan senjata dan muslihat yang licik asalkan tujuannya tercapai. Taktik adudomba telah dipraktekkan orang Belanda pada waktu akan menguasai

Jayakarta, yaitu dengan mengadudombakan Jayakarta dengan Banten.

Sejak berdirinya pada perempatan ketiga abad ke-16 Masehi, Kerajaan Mataram cenderung bersifat agresif dan berambisi memperluas wilayah kekuasaannya. Hal itu tampak dengan jelas sekali pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645). Sejak tahun-tahun pertama pemerintahannya Sultan Agung melakukan gerakan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Mula-mula gerakan itu diarahkan ke daerah sekitarnya, kemudian menjangkau daerah yang lebih jauh, seperti ke Andaka (1614), Wirasaba (1615), Siwalan (1616), Lasem (akhir 1616), Pasuruan (1617), Pajang (1617), Tuban (1619), Surabaya (1620 – 1625), Sukadana (1622), Madura (1624). Di samping itu, perhatian dan gerakan ekspansi Mataram diarahkan pula ke barat, yaitu ke Cirebon (1615), dan daerah Jawa Barat (1625 – 1625),[31] bahkan ia bercita-cita untuk menguasai seluruh Pulau Jawa.

Dalam mempertahankan eksistensi, mengembangkan diri, dan mencapai cita-citanya masing-masing, antara ketiga pusat kekuasaan itu tidak selamanya seiring sejalan, dan melakukan kerja sama, tetapi kadang-kadang terjadi konflik akibat perbenturan kepentingan. Kebijaksanaan pemerintah Kerajaan Banten kadang-kadang bertentangan dengan keinginan orang Belanda (Kompeni). Sikap Kompeni yang cenderung selalu mendesakkan keinginannya untuk memberlakukan monopoli perdagangan di suatu daerah sering mengakibatkan terjadinya konflik sampai ke tingkat kekerasan senjata. Ambisi dan cita-cita penguasa Mataram berulangkali berakibat terjadinya konflik senjata antara pasukan Mataram dengan penduduk daerah yang bertekad mempertahankan tanah-air mereka.

Hubungan antara Mataram dengan Batavia dimulai pada tahun 1613. Pada tanggal 22 September 1613 sebuah kapal Belanda yang berisi utusan Kompeni di bawah pimpinan Jan

Pieterszoon Coen merapat di pelabuhan Japara dan kemudian Kudus, dua pelabuhan milik Mataram. Utusan tersebut bermaksud menjalin hubungan dagang dengan Mataram, karena Mataram terkenal sebagai penghasil beras dan hasil bumi lainnya yang cukup banyak. Maksud orang Belanda tersebut disambut baik oleh pihak Mataram. Sultan Agung sendiri menunjukkan sikap ingin bersahabat dengan Kompeni berdasarkan pertimbangan, bahwa persahabatan itu akan berguna dalam rangka Mataram menghadapi penguasa-penguasa kota-kota pelabuhan di sepanjang pantai Jawa Timur, terutama penguasa Surabaya yang mempunyai pasukan kuat. Pembicaraan antara kedua pihak itu menghasilkan kata sepakat untuk menjalin hubungan dagang. Kompeni akan mendirikan pos perdagangan di Japara, dan sultan Mataram menerima beberapa peraturan yang diajukan Kompeni. Pos perdagangan Kompeni di Japara didirikan tahun 1615, sedangkan pos perdagangannya yang sudah ada di Gresik ditutup.[32]

Pada tahun 1616 dan 1618 Kompeni mengirimkan utusan ke Kraton Mataram untuk membicarakan hububungan dagang mereka. Soalnya. Kompeni tidak memperoleh keuntungan yang memadai dari pos perdagangan di Japara. Pembicaraan antara kedua pihak itu mencapai hasil yang sedikit memuaskan Kompeni.[33]

Atas hasutan dan penjelasan para saudagar Inggris, Sultan Agung mulai menyadari, bahwa kehadiran orang Belanda di wilayah Mataram mengandung bahaya besar. Buktinya dapat disaksikan seperti nasib yang dialami oleh Jayakarta. Sultan Mataram mulai mencurigai Kompeni. Dengan tuduhan melakukan penyelundupan dan bertingkah laku tidak senonoh, saudagar-saudagar Kompeni yang berada di pos perdagangan Japara ditangkap atas perintah sultan Mataram. Sebagian dari mereka dibunuh dan pos perdagangannya dikuasai.[34]

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Japara itu mengundang kemarahan Kompeni di Batavia. Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen segera mengirimkan armada ke Japara untuk melakukan pembalasan dendam. Kota pelabuhan itu dua kali diserang dan dibakar oleh Kompeni (1618, 1619). Pos perdagangan Inggris pun dihancurkan pula oleh pasukan Kompeni dan orang-orang Cina dipindahkan ke Batavia karena dianggap pendukung-pendukungnya.[35]

Sejak terjadinya peristiwa-peristiwa itu hubungan antara Mataram dengan Batavia mengalami ketegangan. Kompeni segera membangun kembali pos perdagangan di Gresik dan membantu pihak Surabaya tatkala diserang oleh pasukan Mataram, sehingga penyerangan itu mengalami kegagalan (1620 dan 1621). Sultan Mataram memerintahkan agar melindungi Kota Pelabuhan Japara dengan mendirikan perbentengan.[36] Pembebasan para tawanan saudagar Belanda dan kebutuhan Belanda akan beras merupakan masalah yang menjadi bahan pembicaraan kedua belah pihak. Pada tahun 1622 barulah kedua pihak mencapai saling pengertian akan perlunya kerja sama, karena Sultan Agung menginginkan hubungan baik dengan Kompeni atau paling tidak sikap netral Kompeni dalam menghadapi penaklukan Surabaya. Dengan demikian para tawanan itu dibebaskan sebagai imbalan atas sikap Kompeni. Selanjutnya tiap tahun Kumpeni mengirimkan utusannya ke Kraton Mataram (1622, 1623, 1624) beserta sejumlah hadiah. Selain untuk memperlihatkan rasa persahabatan, pengiriman utusan dan hadiah itu dimaksudkan pula untuk mengetahui lebih banyak kepentingan Mataram.[37]

Hubungan antara Mataram, Kompeni, dan Banten bukanlah didasarkan atas persahabatan atau kerjasama yang abadi, melainkan atas dasar keabadian kepentingan mereka masing-masing. Kepentingan Banten cenderung untuk mempertahankan eksistensinya dan memajukan negaranya melalui perniagaan, juga pertanian. Kepentingan abadi Kompeni adalah keuntungan da-

gangan sesuai dengan tujuan pertama kedatangan mereka di Indonesia, sedangkan Mataram berkepentingan untuk menjadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa dengan cara memperluas wilayah kekuasaannya.

Setelah Surabaya, Madura, dan Pati dapat ditundukkan oleh pasukan Mataram masing-masing pada tahun 1625, 1624, dan 1627, sehingga seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, kecuali Balambangan, serta sebagian Jawa Barat berada dalam penguasaan Mataram, maka perhatian Mataram mulai diarahkan ke Banten dan Batavia.

Pertama-tama Mataram melakukan pendekatan terhadap Kompeni untuk menghadapi Banten. Mataram mengajak bekerjasama kepada Kompani untuk menyerang Banten. Kompeni menolak ajakan Mataram itu, karena tidak ada kepentingan dalam hal itu. Selanjutnya, Mataram menuntut kepada Kompeni agar mengakui sultan Mataram sebagai yang dipertuannya dan atau mengakui hak dipertuan Mataram atas Batavia. Sebagai pernyataan pengakuan itu Kompeni diharuskan mengirimkan wakilnya ke Kraton Mataram untuk berdatang sembah setiap tahun dengan membawa persembahan. Tuntutan itu ditolak oleh orang Belanda. Mereka tidak mau menunaikan kewajiban-kewajiban seperti yang diminta oleh Sultan Agung, karena mereka menghendaki hubungannya dengan para penguasa di Indonesia bukan atas dasar kuasa-menguasai, melainkan berdasarkan kepentingan dagang (1626). Sultan Mataram merasa kesal dan habis kesabarannya, karena tuntutannya tidak dipenuhi Kompani; karena itu ia merasa bahwa sudah tiba waktunya untuk menindak orang Belanda. Sebagai orang asing mereka harus diusir dari Pulau Jawa. Untuk itu pusat kedudukan mereka di Batavia harus diserang dan kemudian dikuasai.[38]

2.2.2 Persiapan-persiapan untuk Penyerangan ke Batavia

Sejak tahun 1620 telah disebut-sebut adanya maksud Susuhunan Mataram untuk menyerang Jakarta atau Batavia. Pada tahun itu diberitakan bahwa susuhunan Mataram pernah mengumpulkan 100.000 orang prajurit menyerang Sumedang atau Jayakarta; tetapi maksud itu dibatalkan, karena Mataram harus menghadapi masalah-masalah yang lebih mendesak.

Begitu pula pada tahun 1626 ada berita yang menyatakan, bahwa susuhunan Mataram mempersiapkan pasukannya kembali sebanyak 900.000 orang prajurit untuk memerangi "orang kafir" (orang Belanda) di Batavia. Pasukan ini dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa dari Kendal [29], tetapi persiapan ini dibatalkan pula, karena perhatian Mataram harus dipusatkan dahulu untuk menghadapi pembrontakan Pati (1627).

Meskipun mengenai jumlah pasukan Mataram masih menjadi tanda tanya jika dibandingkan dengan jumlah pasukan yang dikerahkan ke Batavia tahun 1628 dan tahun 1629, tetapi adanya maksud dan persiapan itu dapat dipercayai, berhubung dengan situasi hubungan antara Mataram dengan Kompeni dan cita-cita susuhunan sebagaimana tersebut di atas.

Keputusan Sultan Agung untuk mengusir orang Belanda dan menguasai Batavia memerlukan persiapan yang baik dalam pelaksanaannya, baik yang menyangkut pasukan, logistik, persenjataan, dan strategi perangnya.

Dalam hal ini pertama-tama Sultang Agung memanggil dahulu para kepala daerah bawahan Mataram, terutama dari wilayah Pesisir, yang akan diikutsertakan dalam penyerangan itu. Mereka dikumpulkan di ibukota kerjaan untuk mendapat pemberitahuan, penjelasan, dan perintah dari raja mengenai rencana penyerangan ke Batavia dan pelaksanaannya. Menurut *Babad Tanah Jawi,* dalam pertemuan itu Sultan Agung memerintahkan agar semua daerah Pesisir sejak dari Surabaya ke barat, termasuk

juga Sampang (Madura), harus ikut dalam penyerangan itu. Pangeran Mandureja diangkat menjadi panglima pasukan serta dua buah meriam kerajaan dibawa serta pula dalam penyerangan itu. Selain itu, Tumenggung Bahureksa disebut pula sebagai komandan pasukan.[40]

Pengerahan pasukan dari daerah Pesisir dapat dipahami karena kekuatan musuh yang dihadapinya terletak pada armadanya dan berlokasi di tepi pantai (Batavia); namun sesungguhnya bukan hanya pasukan dari daerah Pesisir yang dikerahkan ke Batavia itu, melainkan juga pasukan dari daerah Priangan. Daerah Priangan sejak sekitar tahun 1620 berada di bawah kuasa Mataram.[41] Pasukan orang Sunda yang dikerahkan ke Batavia berasal dari daerah Sumedang dan Ukur. Pasukan itu berjumlah 4.000 – 5.000 orang dan dipimpin oleh Dipati Ukur, wedana bupati Priangan.[42]

Sesungguhnya Sultan Agung pernah mengajak Banten untuk bersama-sama menyerang orang Belanda di Batavia, baik ajakan itu disampaikan langsung oleh utusan Mataram ataupun melalui Cirebon, tetapi sultan Banten menolak ajakan itu secara halus, karena ia khawatir, kalau Batavia sudah terkalahkan, kekuatan Mataram akan ditujukan kepada Banten sendiri.[43]

Pasukan Mataram yang disiapkan untuk menyerang orang Belanda di Batavia berjumlah sekitar 48.000 – 100.000 orang prajurit. Sebagian besar dari mereka berangkat ke Batavia melalui jalan laut diangkut dengan kapal, sebagian lagi menempuh jalan darat, termasuk seluruh pasukan dari Priangan. Senjata yang digunakan mereka terutama berupa senjata tradisional, seperti tombak, panah, pedang, dan lain-lain. Keperluan logistik berupa beras (14 perahu dan 120 last), 150 ekor hewan, 10.600 karung padi, 26.000 buah kelapa, 5.900 karung gula, ditambah 27 perahu hewan yang dibawa oleh sekitar 100 buah perahu dan diurus oleh sekitar 1.000 orang awak perahu.[44]

Sementara itu, agar segala persiapan perang tidak diketahui orang luar, Sultan Agung memerintahkan agar seluruhpantai utara Pulau Jawa yang dikuasai Mataram ditutup dari kunungan kapal-kapal asing termasuk orang-orang Inggris. Pelaksanaan perintah tersebut diawasi secara ketat dengan Tumenggung Bahureksa, bupati Kendal, sebagai pemimpinnya. Namun sebenarnya penutupan kota-kota pelabuhan tersebut menjadikan tanda tanya bagi orang-orang Belanda.[45]

Pada tanggal 13 April 1628 datanglah rombongan orang Mataram di Batavia di bawah pimpinan Kiai Rangga. Rombongan yang menyatakan sebagai utusan Tumenggung Tegal itu membawa 14 perahu yang bermuatan keras. Kiai Rangga mengemukakan keluhannya kepada Kompeni, bahwa orang Belanda membantu Banten.[46] Rupanya pengiriman utusan itu selain untuk menyelidiki keadaan terakhir Kota Batavia, juga dimaksudkan untuk menghilangkan jejak dan mengalihkan perhatian Kompeni agar maksud Mataram untuk menyerang Batavia tidak diketahui oleh Kompeni atau setidak-tidaknya tidak menjadi pusat perhatian mereka.

2.2.3 Jalannya Pengepungan

2.2.3.1 Pengepungan Pertama (1628)

Sebelum berangkat ke Batavia, pasukan Mataram berkumpul dahulu di suatu tempat di sebelah timur Cirebon. Ketika pasukan Mataram yang berasal dari ibukota pimpinan Pangeran Mandurareja tiba di tempat berkumpul yang telah ditentukan. pasukan-pasukan dari daerah Pesisir telah berada di situ. Dari tempat itu berangkatlah semua pasukan ke Batavia dengan menggunakan kapal layar. Dalam perjalanan itu mereka singgah di Cirebon.[47] Di Cirebon diatur segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan penyerangan. Sebagian pasukan orang Sunda, yaitu yang berasal dari Sumedang bergabung pula di situ. Seba-

gian lagi, yaitu pasukan dari daerah Ukur, menuju ke Batavia lewat darat (Purwakarta, Karawang).

Pasukan Mataram yang paling dahulu tiba di Batavia ialah rombongan yang menyatakan sebagai anak buah Tumenggung Bahureksa. Mereka muncul di Pelabuhan Batavia pada tanggal 22 Agustus 1628. Mereka yang berjumlah 900 orang itu membawa kapal sebanyak 50 buah dengan muatan bahan makanan (150 ekor hewan, 120 last beras, 10.600 karung padi, 26.000 butir kelapa, 5.900 karung gula, dan lain-lain). Tiga hari kemudian datang lagi 27 perahu Mataram bermuatan hewan. Pada tanggal 24 Agustus 1628 malam masih datang pula tujuh buah perahu, tetapi mereka tidak diberi kesempatan untuk bergabung dengan rekannya yang datang lebih dulu.

Orang-orang Mataram itu mendesak agar dapat mendarat. Pada waktu fajar secara tiba-tiba mereka menyerang tempat-tempat di sekitar pelabuhan. Mereka bermaksud menduduki benteng Kompeni, namun serangan itu menemui kegagalan.

Pada tanggal 26 Agustus 1628 datanglah pasukan Mataram di Batavia dalam jumlah besar, sekitar 10.000 orang prajurit. Mereka mendekati benteng dengan cara berbaris dan dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa, setelah mendarat di Marunda, tidak jauh dari kota, mereka mengambil tempat kedudukan di sebelah selatan dan tenggara kota. Sekitar 5.500 – 6.000 orang prajurit Mataram itu bermarkas di antara sebuah jalan dan Sungai Ciliwung pada bagian yang berbelok. Kurang-lebih satu kilometer sebelah utara markas pasukan orang Jawa, terletak markas pasukan orang Sunda. Markas orang Sunda dilindungi oleh tepi sungai dan terpisah oleh jalan dari pasukan Jawa. Dengan adanya gerakan pasukan Mataram tersebut, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen memerintahkan agar hutan di bagian selatan kota harus ditebang dan perkampungan yang ada di tepi barat Sungai Ciliwung harus dikosongkan serta rumah-rumahnya dibumihanguskan.[48] Hal itu dimaksudkan

agar jika pasukan Mataram melancarkan serangan dapat terlihat jelas dan mudah dipatahkan.

Pasukan Mataram membangun kubu pertahanan mereka di sekitar tempat kedudukan mereka. Kubu pertahanan itu dibuat dari tumpukan pohon kelapa dan pohon pisang, serta dipagari oleh bambu yang dibelah dua. Pada malam hari tanggal 10 – 11 September 1628 pasukan Mataram menggali garis pertahanan ke arah depan mendekati kota sampai sejarak sekitar satu tembakan pistol dan menggali selokan di belakang suatu barikade yang terbuat dari kayu dan bambu, sehingga dapat menembak dengan aman. Dalam pada itu, garis pertahanan yang dibangun oleh pasukan Ukur dan Sumedang (Priangan) pimpinan Dipati Ukur diperkuat oleh kayu dan tumpukan tanah. Pembangunan kubu pertahanan itu memakan waktu setengah bulan.[49]

Pada tanggal 12 September satu pasukan serdadu Kompeni yang berkekuatan 65 orang melancarkan serangan terhadap kubu pertahanan pasukan Ukur dan Sumedang. Serdadu Kompeni itu terdiri atas orang Belanda, Jepang, Cina dan orang merdeka. Serangan serdadu Kompeni itu didukung oleh 150 serdadu bersenjata senapan dari benteng. Mereka menyusup melakukan kekacauan di daerah antara garis pertahanan baru dan markas. 200 – 300 orang prajurit dari pasukan Ukur dan Sumedang terdesak mundur, di antaranya 30 – 40 orang tewas. Benteng pertahanannya dibakar oleh orang-orang Cina.

Pada tanggal 21 September sebagian pasukan Mataram berusaha untuk mendobrak Benteng Hollandia yang terletak di sebelah selatan kota. Sepanjang malam mereka mencoba untuk menaiki benteng itu dengan memanjat memakai tangga dan kayu. Dalam pada itu tanda bahaya dibunyikan pada hampir seluruh bagian kota oleh pasukan Mataram untuk menakut-nakuti serdadu Kompeni. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Walaupun dalam suasana ketakutan, pada waktu itu orang Belanda mengerahkan pasukannya yang berkekuatan 300 serdadu dan 100 orang pribumi untuk mengusir pasukan Mataram dari kubu-kubu pertahanannya. Kubu-kubu pertahanan pasukan Mataram dibuat kacau. Semua kubu pertahanan pasukan Mataram dirusak dan dibakar. Kerugian yang diderita oleh pasukan Mataram sekitar 1.200 –1.300 orang tewas dan 2.000 – 3.000 orang tertawan. Dengan adanya tentara Mataram yang tertawan oleh serdadu Kompeni, maka rahasia kekuatan dan kelemahan pasukan Mataram menjadi bocor dan diketahui Kompeni. Sisa pasukan Mataram kira-kira berjumlah 3.000 – 4.000 orang termasuk para penggali tanah (bukan prajurit). Di antara tentara Mataram itu banyak yang pergi ke hutan untuk mencari makanan, karena kekurangan bahan makanan.

Pada tanggal 21 Oktober hampir seluruh kekuatan Kompeni yang ada di Batavia dikerahkan untuk melakukan serangan umum terhadap semua kedudukan pasukan Mataram yang mengepungnya. Kekuatan pasukan Kompeni yang dikerahkan itu berjumlah 2.866 orang serdadu. Bertindak sebagai komandan pasukan Letnan Kolonel Jacques le Febvre. Pasukan Kompeni dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok-kelompok pasukan Kompeni yang menyerang tempat kedudukan pasukan Ukur dan Sumedang, ialah :

(1) Pasukan berkuda yang berjumlah 24 orang. Pasukan ini menyerang markas pasukan Ukur dan Sumedang dari arah barat laut.

(2) Pasukan *Avantgarde* yang terdiri atas tiga regu yang masing-masing dipimpin oleh Kapten Dietloff Specht, Ghysbert van Lodensteynx dan Kapten Symon Bolentyn. Pasukan ini dipimpin oleh Kapten Andrian Anthonisz, komandan garnisun Benteng Batavia.

(3) Batalion yang dipimpin oleh Mayor Vogel. Batalion ini terdiri atas: Kompi pimpinan Kapten Jochum Roeloffsz,

pasukan pribumi pimpinan Ontfanger Maseyck dan Hendrick Lievensz. Letnan Kolonel Jacques le Febvre dengan naik kuda mengikuti pasukan ini, disertai oleh Komisaris van der Lee dan sukarelawan lain dan tukang kuda milik Jenderal J.P. Coen.

(4) Pasukan *Arrieregarde* dengan komandannya Adriaan Block Maertsr. Pasukan ini terdiri atas Kompi pimpinan Kapten Hans Juriaen, pasukan pribumi pimpinan Adriaen van Son dan Gommaras van Staen.

(5) Pasukan orang-orang merdeka dan orang Jepang dengan komandan Frederick Kistiens dan dibantu oleh saudagar Jacob Jansen Patacca.

Pasukan tersebut mendapat perintah dari Gubernur Jenderal J.P. Coen bahwa yang lebih dahulu harus diserang ialah pasukan Ukur dan Sumedang. Baru sesudah itu diserang oleh pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Bahureksa dengan perintah yang akan dikeluarkan kemudian.

Pasukan *Avantgarde* bergerak maju menuju tempat kedudukan pasukan Ukur dan Sumedang. Pasukan *Avantgarde* itu diapit oleh pasukan orang-orang merdeka dan orang Jepang. Pasukan orang Jepang berada di sebelah kiri dan pasukan orang merdeka berada di sebelah kanan pasukan *Avantgarde*. Di belakangnya terdapat 42 orang pasukan penembak dan pembela *(Boschieten en Bootgesellen)*.

Pasukan Ukur dan Sumedang mendapat serangan dari beberapa kelompok serdadu Kompeni dari beberapa arah. Mereka tidak mampu mempertahankan diri dan terdesak mundur. Sementara pasukan Dipati Ukur sedang mendapat tekanan oleh serangan serdadu Kompeni, pasukan Bahureksa pun mendapat serangan bombardemen dari Sungai Ciliwung yang dilakukan oleh pasukan lain serdadu Kompeni yang berkekuatan 150 orang di atas dua sampan dan tujuh perahu. Maksud

bombardemen itu ialah untuk mengganggu dan mengacau markas Tumenggung Bahureksa, sehingga pasukannya tidak sempat memberi bantuan kepada pasukan Dipati Ukur yang sedang mendapat serangan besar-besaran.

Sesudah pasukan Ukur dan Sumedang terdesak mundur, pasukan *Avantgarde* bergerak menuju markas Tumenggung Bahureksa. Markas dan kubu pertahanan Tumenggung Bahureksa diserang oleh pasukan ini dari arah belakang (timur). Sementara pasukan orang-orang Cina menyerang dari arah depan (barat). Akhirnya kubu pertahanan dan markas pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Bahureksa dapat direbut oleh serdadu Kompeni. Dalam pertempuran yang terjadi Tumenggung Bahureksa, anaknya dan para pembesar Mataram serta 100 orang prajuritnya tewas. Dari pihak Kompeni menderita lima orang tewas dan 50 orang tertawan.

Pasukan Dipati Ukur yang sudah terdesak mundur, akhirnya melarikan diri dari medan perang untuk kembali ke tempat asalnya. Rupanya bagi Dipati Ukur tidak ada harapan untuk menang lagi, setelah melihat atasannya dan sebagian prajuritnya tewas, tertawan dan merasa kekurangan makanan, sehingga ia memutuskan untuk kembali saja ke kampung halamannya.

Malam berikutnya sebagian besar kekuatan armada Mataram yang sedang berada di Marunda dirusakkan oleh kapal-kapal kecil Kompeni, sehingga dari 200 buah kapal Mataram hanya tinggal 50 buah lagi. Dalam bentrokan senjata yang kemudian terjadi lagi sejumlah prajurit Mataram tewas dan senjatanya terampas.

Ketika pasukan Mataram sedang kocar-kacir dan menderita kerugian akibat serangan pasukan Kompeni, datanglah bantuan pasukan baru dalam jumlah cukup besar di bawah pimpinan Tumenggung Sura Agul-Agul, Pangeran Mandurareja, dan Upasanta. Kini orang-orang Mataram tumbuh lagi harapannya. Selanjutnya, pimpinan pasukan Mataram mengubah taktik da-

lam pengepungan Kota Batavia itu. Mereka memutuskan untuk membendung Sungai Ciliwung agar penduduk Kota Batavia kekurangan air.

Pembangunan bendungan sepanjang satu mil itu dikerjakan oleh 3.000 orang prajurit. Ternyata taktik itu menemui kegagalan, bahkan timbul kelaparan dan penyakit di kalangan pasukan Mataram, sehingga korban manusia berjatuhan. Suatu usaha baru untuk merebut Benteng Hollandia mengalami kegagalan pula. Usaha itu terjadi pada tanggal 27 – 28 Nopember 1628.

Berhubung dengan kegagalan pasukan Mataram dalam menyerang Batavia, maka atas dasar hukum yang berlaku di Mataram sejumlah pimpinan dan anggota pasukan Mataram, antara lain Pangeran Mandurareja dan Upasanta, dihukum mati. Dengan demikian penyerangan pasukan Mataram ke Batavia mengalami kegagalan.

2.2.3.2 Penyerangan Kedua (1629)

Pada akhir Mei 1629 Mataram merencanakan untuk melancarkan serangan ke Batavia yang kedua kalinya. Dalam penyerangan ini dikerahkan pasukan Mataram yang dilengkapi senjata berat lengkap dengan pelurunya. Di tempat-tempat tertentu dalam perjalanan ke Batavia disimpan bahan makanan sebagai persediaan logistik.

Keberangkatan pasukan Mataram terjadi atas dua gelombang. Pertama, berangkat akhir Mei 1629 dan kedua, pada tanggal 20 Juni 1629. Pada bulan Agustus 1629 mereka telah sampai di Batavia.

Sementara itu, pada tanggal 20 juni 1629 datanglah di Batavia seorang bernama Warga disertai beberapa orang pengikutnya. Mereka berasal dari Tegal yang mempunyai tugas sebagai mata-mata Mataram. Kedatangan rombongan pimpinan Warga itu mencurigakan Kompeni. Mereka segera ditangkap dan ke-

mudian diinterogasi oleh Kompeni. Kompeni berhasil mengorek informasi mengenai rencana Mataram guna melancarkan serangan ke Batavia, termasuk tempat penyimpanan bahan makanan di Tegal dan Cirebon. Berdasarkan keterangan tersebut, bahan makanan, terutama padi, pasukan Mataram dapat dirusakkan dan dibakar oleh Kompeni yang mengirimkan tiga buah kapal untuk melaksanakan tugas itu.

Pada tanggal 8 September 1629 pagi hari para prajurit Mataram menggali parit pelindung yang diperkuat oleh kayu dan bambu. Parit pelindung itu digali dari markas pertahanan mereka menuju ke arah Benteng hollandia dan berhasil mendekati benteng tersebut, namun siang harinya sesudah pukul 12.00 pasukan Kompeni melancarkan serangan terhadap pasukan Mataram yang sedang menggali parit. Pasukan Kompeni berhasil menghancurkan parit-parit pelindung itu. Pada malam hari berikutnya 9 September para prajurit Mataram itu sibuk memperbaiki kembali dan melengkapi parit pelindung sehingga aman dari tembakan senapan musuh.

Kelompok lain pasukan Mataram yang berjumlah sekitar 200 orang prajurit menyerbu Benteng Bommel pada tanggal 12 September 1629. Pasukan Kompeni berusaha mempertahankan benteng tersebut, semua pintu masuk benteng itu ditutup dan semua tentara Kompeni yang bertugas di situ disiap-siagakan. Sebaliknya, prajurit-prajurit Mataram pun bergerak maju untuk mendobrak benteng itu. Sekitar 8 – 9 orang prajurit Mataram dengan gagah berani berusaha memanjat dinding benteng agar bisa masuk ke dalam benteng dan kemudian membuka salah satu pintu gerbangnya, namun sebelum usaha itu berhasil, terlebih dahulu diketahui oleh penjaga benteng. Para prajurit Mataram ditembaki sehingga mereka segera mengurungkan maksudnya.

Tanpa mengenal lelah dan takut para prajurit Mataram berusaha terus mendobrak pertahanan pasukan Kompeni. Karena

serangan langsung oleh kelompok-kelompok pasukan terus menerus mengalami kegagalan, selanjutnya mereka menggunakan cara lain. Mereka bermaksud menghantam benteng-benteng Kompeni dengan tembakan-tembakan meriam. Untuk maksud itu, didatangkanlah meriam-meriam ke kubu pertahanan mereka dengan diangkut grobak yang ditarik oleh 12–18 ekor sapi pada tanggal 14 – 15 September 1629. Dua hari kemudian (17 September) tentara Belanda melancarkan serangan terhadap kedudukan pasukan Mataram. Pasukan Mataram menyambut serangan itu dengan gigih sekali. Namun serangan yang dipimpin oleh Antonio van Diemen itu berhasil memukul pasukan Mataram sehingga menderita kerugian besar. Sebagian bangunan markas pertahanan pasukan Mataram terbakar. Tatkala para prajurit Mataram sedang memadamkan api yang sedang menjilati kubu pertahanan mereka, turunlah hujan. Dengan demikian api pun segera padam.

Betapapun korban telah berjatuhan dan kerugian telah diderita dalam jumlah besar, namun semangat juang pasukan Mataram tetap besar. Setelah kubu pertahanan pasukan Mataram dibakar oleh Kompeni, beberapa hari kemudian kubu pertahanan itu diperbaiki dan dibenahi kembali. Sebulan kemudian pasukan Mataram telah kembali melancarkan serangan dengan tembakan-tembakan meriam, baik dari sebelah timur ataupun dari sebelah selatan kota. Selain itu, di bagian barat kota mereka menempatkan tiga buah senjata berat dan beberapa senjata ringan yang sering digunakan menembaki kota.

Suatu kerugian besar diderita oleh Kompeni pada tanggal 20 September 1629. Pada hari itu Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen diketahui meninggal dunia, padahal tiga hari sebelumnya ia masih melakukan inspeksi terhadap pasukannya dan mengamati kubu-kubu pertahanan pasukan Mataram.

Pada tanggal 29 September 1629 pasukan Mataram melancarkan serangan besar-besaran. Sasaran serangan itu tertuju

kepada Benteng Weesp. Serangan ini merupakan serangan yang mengerahkan kekuatan terakhir. Pasukan Mataram dalam jumlah besar dikerahkan dalam serangan ini. Serangan tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Demikian banyaknya pasukan Mataram yang berhasil ditawan oleh Kompeni sehingga pada tanggal 27 September pimpinan tentara Kompeni memutuskan untuk tidak menawan lagi prajurit Mataram, karena terlalu banyak menampung tawanan akan berakibat tanggungan menjamin makan semakin besar. Kegagalan serangan umum pasukan Mataram pada tanggal 29 September itu berakibat merosotnya semangat juang prajurit-prajurit Mataram. Hal itu dapat dibuktikan oleh tentara Kompeni yang melancarkan serangan pada tanggal 1 Oktober 1629. Sesungguhnya sebab utama kemerosotan semangat juang pasukan Mataram itu ialah kehabisan bahan makanan, karena persediaan makanan mereka yang disimpan di Tegal dan Cirebon berhasil ditemui dan dibakar oleh Kumpeni. Pada umumnya pasukan Mataram menderita kelaparan. Banyak di antara mereka yang meninggalkan medan perang untuk mencari makanan ke hutan-hutan, di samping banyak pula yang meninggal karena kelaparan. Permintaan bantuan bahan makanan kepada Banten, ditolak.

Berhubung dengan masalah kekurangan bekal makanan tidak dapat diatasi, maka tak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh pimpinan pasukan Mataram selain memutuskan untuk mengundurkan anak buahnya dari medan perang. Pada tanggal 2 Oktober 1629 dimulailah gerakan mundur pasukan Mataram, kembali ke negerinya. Dalam perjalanan pulang banyak sekali prajurit Mataram yang tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Umumnya mereka tewas akibat kelaparan di tengah perjalanan bersama sapi penarik gerobak dan peralatan perang lainnya, tetapi ada juga yang bisa bertahan hidup dan menggabungkan diri dengan penduduk setempat serta terus menetap di daerah-daerah itu.

Dengan kembalinya pasukan Mataram ke negerinya, maka selamatlah Batavia dari perocobaan untuk dikuasai oleh Mataram. Ini berarti gagallah rencana dan cita-cita Sultan Agung untuk menguasai Batavia dan selanjutnya menguasai Banten. Walaupun begitu cita-cita Sultan Agung untuk menguasai Batavia dan mengusir orang Belanda dari kota itu terus hidup. Untuk itu ia merencanakan dan mengambil langkah-langkah jangka panjang seperti menempatkan sejumlah penduduk di daerah Karawang dan Purwakarta serta memantapkan kekuasaannya di daerah itu guna mempersiapkan bahan makanan dan kekuatan pasukan di kelak kemudian hari. Sebaliknya bagi Belanda, kegagalan serangan pasukan Mataram itu berarti kelangsungan hidup dan kekuasaan mereka di Batavia menjadi terjamin. Kini legalah mereka, meskipun ancaman itu belum lenyap sama sekali, baik dari pasukan Mataram maupun dan terutama dari pasukan Banten.

Mungkin sejarah Indonesia akan lain jalannya, seandainya orang Belanda bisa diusir oleh Mataram dan Jakarta bisa dikuasai oleh Mataram.

2.3 Rakyat Banten Berjuang demi Kedaulatan Negara

2.3.1 Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Pembawa Kerajaan Banten

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Banten didirikan oleh kesatuan angkatan laut Demak dan Cirebon pada tahun 1526 di dalam kerangka proses islamisasi. Ciri laut dan Islam terus melekat, sehingga dalam perkembangannya, Banten menjadi negara maritim dan pusat kegiatan Islam. Ibu kota Banten sendiri terletak di sebuah teluk yang strategis menjadi kota pelabuhan dan perdagangan. Begitu pula kepala-kepala negara Banten merupakan tokoh-tokoh yang berorientasi kepada Agama Islam dan perniagaan, walaupun bidang-bidang lainnya, seperti pertanian dikembangkan pula.

Di antara sultan-sultan Banten itu yang paling termashur karena keharuman namanya adalah Sultan Abdulfath Tirtayasa. Dialah yang membawa Banten ke puncak kejayaannya.

Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra Sultan Abdulma'ali Ahmad dan cucu Sultan Abdulmafakhir Mahmud Abdulkadir. Sultan Abdulmafakhir Mahmud Abdulkadir atau dikenal pula dengan nama Sultan Agung Kanari adalah sultan Banten yang memerintah tahun 1596–1651. Sultan Agung Kanari adalah putra Maulana Muhammad (1580–1596), cucu Maulana Yusuf (1570–1580), dan cicit Hasanuddin (1552–1570), pendiri Kesultanan Banten.

Pada tahun 1640 Sultan Abdulma'ali Ahmad diangkat oleh ayahnya sebagai Sultan Muda, suatu jabatan yang merupakan persiapan menjelang tampuk pemerintahan dipegang sepenuhnya; akan tetapi sepuluh tahun kemudian (1650) beliau meninggal dunia sehingga jabatan itu dialihkan kepada puteranya yang bernama Pangeran Surya. Dari pernikahannya dengan Ratu Martakusuma, putri Pangeran Jakarta, Sultan Abdulma'ali Ahmad mempunyai beberapa orang putera antara lain Pangeran Surya, Pangeran Kilen, Ratu Kulon, Pangeran Lor, dan Pangeran Raja. Dari isterinya yang lain putera-puteranya itu ialah Pangeran Wetan, Pangeran Kidul, Ratu Inten, dan Ratu Tinumpuk.

Sebagai sultan muda, Pangeran Surya diberi julukan Pangeran Satu atau Pangeran Dipati. Ia menaiki tahta secara penuh setelah kakeknya wafat pada tahun 1651. Sebagai sultan Banten, ia bernama Sultan Abdulfath Abdulfattah. Nama ini diberikan oleh raja Islam di Mekah.

Sejarah Banten menyebutkan dua nama orang dari istri Sultan Abdulfattah, yaitu Nyai Ratu Gede, putri seorang punggawa Banten, dan Ratu Nengah putri Pangeran Kasunyatan. Istri yang kemudian dinikah sesudah istri pertama meninggal dunia. Dari pernikahan tersebut Sultan Abdulfattah menu-

runkan beberapa orang putra, tetapi yang mencapai usia dewasa hanya dua orang, yaitu Pangeran Purbaya dan Pangeran Gusti.

Tatkala Pangeran Ratu menduduki tahta pemerintahan (1651), sebenarnya Kesultanan Banten telah mengalami perkembangan di segala bidang kehidupan, baik politik, pertanian, perdagangan, pertahanan, dan keamanan. Kemajuan tersebut dimungkinkan berkat kecerdikan usaha dan kerja keras rakyat Banten di bawah pimpinan kepala-kepala negaranya. Beberapa kegiatan yang menonjol yang dilakukan pada masa pemerintahan sultan Banten ialah melanjutkan usaha penyebaran Agama Islam dan penegakan kekuasaan di wilayah Banten pada masa Maulana Hasanuddin, menundukkan Kerajaan Sunda Pajajaran dan peletak dasar pertanian di sawah-sawah pada masa Maulana Yusuf, melanjutkan usaha penyebaran Agama Islam dan penegakan kekuasaan ke daerah seberang di Pulau Sumatra bagian selatan pada masa Maulana Muhammad, dan meningkatkan kegiatan usaha pertanian, perdagangan, dan pembangunan pada umumnya, usaha mempertahankan eksistenssi dan kedaulan negara dari ancaman penjajahan dan monopoli perdagangan pada pemerintahan Sultan Abulmafakkir Mahmud Abdulkadir. Sultan Abulmafakkir melakukan pendekatan langsung terhadap rakyat dalam menunaikan tugasnya sebagai kepala negara. Ia sering melakukan perjalanan secara diam-diam di waktu malam untuk melihat sendiri keadaan kehidupan dan penghidupan rakyatnya. Kesehatan dan kesejahteraan rakyat selalu mendapat perhatian beliau. Selain itu ia selalu bersikap anti monopoli perdagangan dan penjajahan asing. Di kalangan masyarakat Banten ia dipandang sebagai sultan yang arif bijaksana.[50]

Tingkat kemajuan Banten waktu itu telah menunjang dan mendorong Sultan Abdulfattah untuk lebih meningkatkan kemajuan Banten. Tradisi pemerintahan sultan-sultan Banten, khususnya sikap, tindakan, dan cara kerja kakek dan ayahnya dalam mengelola negara, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi Sultan Abdulfattah.

Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan aneka macam pembangunan, baik pembangunan fisik atau pun pembangunan spiritual. Pada waktu itu dibangun keraton sebagai pusat pemerintahan. Pertama-tama keraton Surosowan diperbaiki, kemudian dibangun pula sebuah keraton baru di Tirtayasa.

Kraton Surasowan mulai dibangun pada masa pemerintahan Hasanuddin. Kemudian keraton itu dikelilingi oleh tembok benteng yang dibuat atas perintah Maulana Yusuf. Oleh sultan Abdulfattah kraton itu diperbaiki, dilengkapi, dan diperindah sehingga menjadi kraton yang megah. Kraton baru di Tirtayasa terletak tidak jauh di sebelah utara Kota Banten dan berada di tepi pantai. Dari Kraton Tirtayasa dapat diamati gerak-gerik kapal-kapal yang keluar masuk Pelabuhan Banten serta diawasi segala kegiatan di kota Banten. Selain itu, dari Kraton Tirtayasa yang juga terletak di jalur jalan kuna dapat dikirimkan pasukan dengan mudah lewat saluran air ke daerah Jakarta. Kraton ini kemudian dijadikan tempat tinggal Sultan Abdulfattah, sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa.[51]

Untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan kraton dan penduduk ibukota, dibangunlah saluran air yang mengalirkan air dari Tasikardi ke kraton melalui pipa-pipa besar dan kecil yang terbuat dari batu-bata. Tasikardi adalah sebuah danau buatan yang merupakan tempat penampungan air Sungai Cibanten. Danau buatan ini berfungsi untuk mengairi sawah-sawah dan kebutuhan air minum rakyat serta keluarga sultan. Penyaluran air ke kraton melalui proses penjernihan di beberapa tempat *(pangindelan mas, pangindelan putih)* sebelum sampai ke kran-kran *(pancuran mas)* di dalam kraton.[52]

Sementara itu, di sepanjang jalan lamasejak dari Sungai Untung Jawa (Sungai Ciujung sekarang) ke Tanara sampai Pontang digali saluran air yang menghubungkan sungai-sungai yang ada di situ. Saluran air itu bisa dilayari dengan mudah oleh perahu-perahu kecil. Saluran air itu selain berfungsi untuk pengairan, pertanian, mungkin perikanan, juga untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Pembuatan saluran air itu dilakukan oleh rakyat Banten sendiri dengan memakan waktu bertahun-

tahun (1660 – 1678)[53]. Di kiri-kanan sepanjang saluran air dicetak pesawahan baru yang menghasilkan padi cukup banyak, sehingga mendatangkan kemakmuran bagi rakyat dan menambah penyimpanan bahan makanan. Penimbunan bahan makanan sangat penting sebagai perbekalan, jika terjadi peperangan.

Dengan adanya saluran air yang dapat dilayari oleh perahu-perahu dengan mudah, maka hubungan antara ibukota Banten dengan daerah-daerah di sebelah timurnya hingga ke Batavia bisa ditempuh secara lebih cepat karena itu, saluran air itu menempati kedudukan penting bagi bidang pertanahan dan keamanan di daerah perbatasan dengan Batavia yang memang sering terjadi ketegangan dan bentrokan senjata.

Di tempat-tempat yang dipandang penting didirikan perkampungan-perkampungan baru yang besar dan kecil. Di daerah sebelah barat Untung Jawa yang menjadi daerah perbatasan dengan Jakarta, dibangun perkampungan besar. Perkampungan ini dihuni oleh sekitar 5.000 – 6.000 jiwa.

Perkampungan-perkampungan itu selain berfungsi untuk membuka daerah pesawahan baru yang berarti meningkatkan kemakmuran rakyat, juga untuk membentuk daerah pertahanan serta membina tenaga tempur di daerah perbatasan dalam rangka menghadapi Kompeni.

Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa pada awal abad ke-16 Masehi Pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional yang dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari berbagai negara, baik negara-negara di Asia maupun di Eropa. Mereka datang di Banten dengan membawa kapal besar dan kecil yang sarat dengan aneka macam barang dagangan, terutama lada. Selain didatangkan dari Maluku bersama pala dan cengkih, lada dihasilkan pula di wilayah Kesultanan Banten, termasuk Lampung, Bengkulu dan Salebar di Sumatra Selatan. Sebagai gambaran pada tahun 1600 Banten telah mengekspor lada sebanyak 50.000 bal ke pasaran Eropa.[54]

Di bekas ibukota Kesultanan Banten hingga sekarang masih ditemui adanya peninggalan bangunan mesjid di Koja, Pabean dan di Kampung Pamarican yang merupakan bukti kegiatan perdagangan di kota pelabuhan itu. Mesjid Koja terletak di per-
dagangan di kota pelabuhan itu. Mesjid Koja terletak di per-

kampungan Pakojan, yaitu tempat orang-orang Koja (Persia) bermukim. Di tempat ini pernah dihuni pula oleh orang-orang yang datang dari India, Jepang, Cina, dan lain-lain. Mereka terdiri atas para pedagang.[55] Pabean adalah tempat pemungutan bea bagi kapal-kapal yang masuk pelabuhan, sedangkan Kampung Pemarican adalah suatu tempat yang dulunya tempat gudang merica (rempah-rempah).[56]

Sultan Ageng Tirtayasa berusaha meningkatkan kegiatan perniagaan itu, baik perniagaan yang diselenggarakan oleh orang Banten sendiri ataupun yang dilakukan oleh saudagar-saudagar asing. Di samping dengan cara meningkatkan hasil bumi, memperkuat armada guna menjamin keamanan para hasil bumi, memperkuat armada guna menjamin keamanan para pedagang di perairan Banten, juga membina hubungan baik dengan negeri-negeri lain, terutama dengan negara-negara Islam, seperti Turki, Arab, Persia, India, Aceh, Ternate, Tidore, Makasar. Pada tahun 1681 Banten mengirimkan utusan ke London, Inggris untuk mempererat persahabatan dan meningkatkan hubungan dagang.[57] Sultan Banten pun mengirimkan surat persahabatan kepada raja Denmark.[58] Secara keseluruhan Sultan Ageng Tirtayasa berusaha untuk memegang teguh politik perekonomian yang bebas dan aktif. Ia berusaha untuk bersahabat dengan semua negara dan bangsa yang datang untuk berdagang di Banten, karena hubungan tersebut menguntungkan semua pihak. Sebaliknya, ia menolak setiap usaha yang menghendaki berlakunya monopoli perdagangan oleh satu pihak.

Pembangunan bidang spiritual dilakukan dengan memajukan bidang kebudayaan dan keagamaan. Sultan Ageng Tirtayasa sendiri sejak muda menggemari permainan naik kuda *(sasaptonan), permainan raket (semacam wayang wong), dan permainan dedewaan.*[59] Dalam pada itu, debus merupakan permainan yang disukai rakyat Banten.

Sultan Ageng Tirtayasa menaruh perhatian besar pada bidang keagamaan. Pada waktu itu pendidikan formal keluarga sultan dan juga rakyat Banten adalah pendidikan pesantren. Pesantren Kesunyatan termasuk pesantren besar yang hidup terus hingga dewasa ini. Untuk meningkatkan pendidikan agama di kalangaan keluarga kraton, didatangkan seorang ulama besar, Syeh Yusuf namanya. Syeh Yusuf adalah seorang

ulama besar yang berasal dari Makassar. Ia pernah belajar di Mekah.[60] Selain diangkat menjadi guru agama di Banteng, Syeh Yusuf dijadikan pula sebagai penasihat Sultan Ageng Tirtayasa.

Sebagai pejabat yang langsung menangani masalah-masalah keagamaan yang disebut *kadi*, diangkat pamannya yang bernama Pangeran Jayasentika. Ketika *kadi* tersebut meninggal dunia di Mekah, Entol Kawista diangkat sebagai penggantinya. *Kadi* terutama berfungsi sebagai hakim ketua pengadilan negara.[61]

Semua buah usaha itu membawa Banten ke alam kejayaan, kemakmuran, dan ketertiban.

2.3.2 Hubungan antara Banten dan Kompeni yang Semakin Tegang

Seperti diutarakan di atas tadi, bahwa hubungan antara Banten dengan Kompeni diwarnai oleh suasana persahabatan dan ketegangan yang silih berganti. Berubah-ubahnya situasi hubungan Banten dengan Kompeni itu disebabkan oleh berubah-ubahnya kepentingan masing-masing. Pada suatu saat kepentingan mereka bersamaan, maka bersahabatlah hubungan mereka, tetapi pada waktu lain kepentingan mereka berbeda, bahkan bisa jadi bertentangan, sehingga teganglah hubungan mereka.

Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya faktor utama yang menyebabkan timbulnya ketegangan antara Banten dan Kompeni lebih banyak disebabkan oleh sikap dan ulah Kompeni yang berulangkali menuntut sistem monopoli dalam hubungan dagang mereka. Sudah barang tentu tuntutan itu ditolak oleh pihak Banten, karena di samping tidak menguntungkan ditinjau dari sudut perdagangan, juga tidak baik ditinjau dari sudut politik, sebab selain para pedagang lain tidak dapat datang lagi ke Banten, dengan sistem tersebut kemerdekaan dan kedaulatan negara pun akan terkikis habis.

Ketika pasukan Mataram melancarkan serangan terhadap pusat kedudukan Kompeni di Batavia (1628, 1629), Kompeni memperlihatkan sikap dan mengajak dijalinnya hubungan bersahabat dengan Banten, karena mereka takut diserang oleh dua kekuatan yang tangguh sekaligus, tetapi sesudah ancaman dari Mataram itu lenyap Kompeni menampilkan tuntutannya lagi. Selanjutnya, ketika ancaman dari Mataram tampak lagi menjelang akhir pemerintahan Sultan Agung, Kompeni berbaik hati lagi, sehingga tercapai kata sepakat untuk mengadakan perjanjian persahabatan selama 10 tahun (1645– 1655). Perjanjian tersebut dimaksudkan oleh Sultan Abdulmafakhir untuk menghentikan tuntutan monopoli perdagangan Kompeni di Banten dan daerah-daerah Indonesia lainnya serta menghentikan gangguan armada Kompeni terhadap kapal-kapal dagang di Kepulauan Indonesia. Sedangkan bagi Kompeni perjanjian persahabatan itu dimaksudkan untuk menghentikan gangguan gerilyawan-gerilyawan Banten di sekitar Batavia serta gangguan bajak laut dari Banten di perairan pantai utara Jawa Barat. Meskipun secara formal telah tercapai kata sepakat menjalin hubungan damai, namun sewaktu-waktu secara informal terjadi saling ganggu dan saling serang, sehingga perasaan kekhawatiran dan saling curiga tetap hidup di kedua belah pihak.

Pada tanggal 10 Maret 1651 Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia Kompeni mengirim surat kepada sultan Banten yang baru naik takhta. Dalam surat itu mereka menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Sultan Abdulmafakhir dan menyampaikan upacara selamat dan harapan terjalinnya persahabatan atas naik tahtanya Sultan Abdulfattah: namun Sultan Abdulfattah pun memahami maksud sebenarnya dari surat tersebut, yaitu hanya basa-basi saja sebagai kebiasaan diplomatik, sedangkan dalam sikap dan tindakan sebenarnya, Kompeni tetap berusaha mengecilkan arti kemerdekaan Banten dan merendahkan derajat sultan Banten.

Sejak masa pemerintahan kakeknya, Sultan Abdulfattah mengikuti dan mengamati sikap dan jejak langkah Kompeni dalam menjalin hubungan dengan Banten. Beliau berkesimpulan, bahwa berhubungan dengan Kompeni harus selalu waspada dan siap bertempur, karena mereka mudah melanggar janji dan terlalu mengutamakan keuntungan sendiri.

Guna berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan Sultan Abdulfattah menyiagakan pasukannya di sekitar Angke – Tangerang yang menjadi daerah perbatasan Kompeni – Banten. Bahkan pada tahun 1652 diberitakan, bahwa sultan Banten mempersiapkan pasukan dalam jumlah besar yang akan digunakan untuk menyerang orang Belanda di Jakarta. Rupanya berita itu kurang benar karena yang terbukti hanyalah serangan kecil-kecilan oleh kelompok-kelompok gerilya Banten terhadap pasukan dan armada Kompeni yang berada di sekitar Jakarta.

Serangan-serangan gerilyawan Banten itu dijawab oleh Kompeni dengan melancarkan blokade atas Pelabuhan Banten. Semua kapal dagang dilarang memasuki Pelabuhan Banten serta tempat-tempat yang biasa dijadikan sarang gerilyawan diisolasi, tetapi blokade tersebut dapat ditembus oleh armada Banten, bahkan sejumlah kapal Kompeni berhasil ditenggelamkan oleh serangan armada Banten. Karena itu tujuan dilakukannya blokade menemui kegagalan. Kejadian-kejadian itu menimbulkan keresahan di kalangan Kompeni, tambahan pula perjanjian persahabatan mereka dengan Banten akan berakhir tidak lama lagi (1655).

Menjelang habis masa berlakunya perjanjian Banten Kompeni, gubernur jenderal Kompeni mengirim utusan ke Banten dengan maksud membicarakan tentang pembaharuan perjanjian. Utusan tersebut menghadap Sultan Ageng Tirtayasa sambil membawa sejumlah hadiah. Usul Kompeni belum bisa diterima oleh pihak Banten. Utusan Kompeni kedua dikirimkan lagi ke Banten pada bulan Agustus 1655 dengan tujuan yang sama, tetapi Sultan Ageng Tirtayasa tetap menolaknya dengan alasan

isi perjanjian yang diusulkan oleh Kompeni memperlihatkan sikap dan tindakan yang memungkinkan bisa lenyapnya kemerdekaan dan kedaulatan Banten.

Pada tahun berikutnya (1656) hubungan antara Banten dengan Kompeni semakin tegang. Terbukti dari pemberitaan Kompeni yang mengatakan, bahwa pasukan Banten terus menerus bergerilya di daerah Angke dan Tangerang, bahkan gerakannya semakin besar. Mereka sering mencegat tentara Kompeni yang sedang melakukan patroli, membakar perkampungan yang digunakan markas Kompeni, merusak tanaman tebu dan pabrik penggilingannya, mencegat pengawal-pengawal Kompeni, dan menyerang kapal-kapal Kompeni di daerah perairan Banten. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menjalin hubungan baik dengan daerah-daerah sekitar Kesultanan Banten, seperti dengan Cirebon, Mataram, Bengkulu, Lampung, dan Salebar

Pada pihak lain Kompeni pun bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang datang dari Banten. Mereka membentuk pasukan baru yang terdiri atas orang-orang Melayu, Bugis, Bali, Makassar, Banda, dan lain-lain. Pasukan baru ini ditempatkan di daerah perbatasan dengan Banten yang merupakan front pertempuan terdepan. Di Angke, Tangerang, dan Pesing diperkuat pertahanan mereka dengan memperbaiki dan melengkapi benteng yang telah ada.

Untuk sementara pertikaian antara Banten dan Kompeni dapat diatasi, sehingga tidak sampai pecah menjadi perang terbuka. Pada akhir tahun 1657 kedua belah pihak setuju untuk mengajukan rancangan perjanjian perdamaian. Selanjutnya, diadakan tukar-menukar nota yang berisi usul-usul teks perjanjian perdamaian. Proses itu berjalan cukup lama sampai memakan waktu berbulan-bulan. Soalnya kedua belah pihak bersikeras dengan kehendaknya masing-masing. Pada akhir April 1658 perjanjian perdamaian itu hampir tercapai dengan lahirnya 10 pasal teks perjanjian, namun tiba-tiba persesuaian pendapat

itu menjadi musnah ketika usul Sultan Abdulfattah yang menghendaki agar rakyat Banten diperbolehkan berkunjung ke Jakarta tiap tahun untuk berbelanja dan kapal-kapal Banten diperbolehkan berlayar ke Ambon dan Perak untuk mengambil rempah-rempah dan hasil bumi lainnya tanpa dipungut bea, ditolak oleh gubernur jenderal Kompeni.

Atas penolakan usul itu, maka Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan, bahwa perjanjian perdamaian tidak mungkin dapat diterima, oleh karena itu, terjadinya perang tidak dapat dicegah lagi, tinggal menunggu waktu saja.[62]

2.3.3 Perang Terbuka antara Banten dan Kompeni

Pernyataan Sultan Ageng Tirtayasa tertanggal 11 Mei 1658 yang merupakan jawaban atas penolakan Kompeni terhadap usul pihak Banten, sesungguhnya merupakan pernyataan perang secara terbuka. Pecahnya perang yang sungguh-sungguh hanya tinggal menunggu waktu yang tidak lama lagi tiba.

Masih dalam bulan Mei 1658 Lurah Astrasusila, seorang perwira Banten beserta dua orang kawannya berlayar dari perairan ibukota Banten ke arah timur menuju Ujung Kahit. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah *selup* (jenis perahu) Kompeni yang sedang berpatroli di perairan daerah itu. Segera perahu mereka diarahkan ke selup itu untuk mengejarnya. Awak selup itu tidak melakukan perlawanan berarti, ketika mereka ditangkap dan kemudian selupnya dihancurkan. Sultan Abdulfattah dan para pembesar Banten merasa kaget bercampur marah mendengar berita tentang peristiwa itu, karena peristiwa itu akan berakibat serangan serupa dari pihak Kompeni; oleh karena itu, sultan Banten mengeluarkan perintah agar semua prajurit dan rakyat mempersiapkan diri dalam menghadapi pertempuran dengan serdadu-serdadu Kompeni.

Peristiwa penangkapan para penumpang dan penghancuran selup itu diterima oleh pimpinan Kompeni dengan kemarahan besar. Segera Kompeni mempersiapkan pasukan yang terdiri atas serdadu-serdadu sewaan dari Kalasi, Ternate, Banda, Kajawan, Melayu, Bali, Makassar, dan lain-lain. Merekalah yang dikirimkan ke garis depan pertempuran untuk bertempur dengan prajurit-prajurit Banten. Sedangkan serdadu orang Belanda sendiri berada di garis belakang dan menjadi komandan pasukannya. Hal itu sengaja dilakukan dalam rangka politik adu domba Kompeni.

Seruan sultan Banten tentang mobilisasi umum mendapat sambutan baik dari rakyatnya. Dengan semangat yang menyala-nyala berbondong-bondonglah rakyat Banten mendaftarkan diri guna menggabungkan diri dalam pasukan Banten. Dalam pada itu, sultan Banten dan para pembesarnya terus-menerus mengatur siasat perang dan perbekalan serta perlengkapan perang.

Di seluruh wilayah Kesultanan Banten, baik di darat maupun di laut, dilakukan penjagaan secara teratur. Di beberapa tempat penting dan strategis ditempatkan satuan armada dan pasukan darat. Di perairan Untung Jawa (Tangerang) ditempatkan satuan armada pimpinan Aria Suranata. Di perairan Karawang dijaga oleh satuan armada pimpinan Tumenggung Wirajurit. Satuan armada ini mendapat tugas mengawasi dan mencegat kapal-kapal Kompeni bantuan dari tempat kedudukan mereka di Maluku dan daerah-daerah lainnya di Indonesia bagian timur. Satuan armada pimpinan Ratu Bagus Singandaru ditugaskan menjaga perairan Tanara yang merupakan tempat strategis bagi pendaratan pasukan yang akan menuju ibukota Banten. Ratu Bagus Wiranata pada memimpin satuan armada yang ditempatkan di sekitar Pelabuhan Pontang. Pelabuhan Pontang terletak di sebuah tanjung yang dekat sekali dan seolah-olah melindungi Kraton Surasowan, sedangkan Suranubaya memimpin satuan armada yang dikirimkan ke Pelabuhan Ratu di pantai

selatan untuk mencegat musuh yang mungkin memasuki Banten dari arah selatan.

Pengaturan sistem penjagaan dan pertahanan di wilayah daratan Banten sendiri mendapat perhatian yang lebih besar daripada di lautan, karena letak wilayah Kesultanan Banten dan Batavia berbatasan. Ibukota negara dan sekitarnya dipertahankan oleh pasukan yang dipertahankan oleh pasukan yang tangguh secara berlapis-lapis sejak dari kraton, dalam kota hingga perbatasan kota. Sekitar pelabuhan dipertahankan oleh satuan armada. Satuan armada ini ditunjang oleh kekuatan angkatan darat dan rakyat yang diperlengkapi oleh meriam-meriam yang diarahkan ke laut. Pertahanan ibukota negara dan sekitarnya berada di bawah tanggung jawab Ngabehi Tannita. Daerah Banten Selatan dipertahankan oleh pasukan yang dipimpin oleh Ngabehi Wirasaba dan Ngabehi Purwakarti. Induk pasukan ini berada di Caringin. Ngabehi Tanujiwa beserta 50 orang *pacalang* sebagai anak buahnya mengemban tugas sebagai penghubung antarpasukan.

Jika diperbandingkan, perhatian yang paling besar ditumpahkan oleh para pemimpin Kesultanan Banten tertuju ke daerah Angke-Tangerang, daerah sebelah timur Banten yang berbatasan dengan wilayah Jakarta yang dikuasai Kompeni. Dengan demikian daerah ini merupakan front terdepan medan perang. Di daerah ini ditempatkan 5.000 orang prajurit Banten di bawah pimpinan Raden Senapati Ingalaga dan Rangga Wirapatra sebagai wakilnya. Dari daerah ini direncanakan suatu serangan besar-besaran terhadap daerah musuh. Jika pertahanan Kompeni di daerah perbatasan dapat ditembus, maka untuk sampai ke kota Jakarta tinggal sedikit lagi. Sebagian pasukan Banten yang ditempatkan di sini berasal langsung dari garnisun ibukota yang dipersenjatai secara lengkap. Mereka berangkat dari ibukota negara pada hari Senin tahun 1658.

Dalam *Sejarah Banten* dikisahkan tentang peristiwa keberangkatan pasukan Banten dari Surasowan yang akan ditu-

gaskan di daerah Angke – Tangerang. menjelang keberangkatan pasukan, Sultan Abdulfattah memberi perintah kepada Panglima Pasukan Raden Senapati agar semua prajurit tidak mundur selangkah pun dalam medan perang dan agar bertempur mati-matian dalam menghadapi musuh. Kemudian Sultan membagi-bagikan uang dan pakaian sebagai hadiah. Sesudah itu barulah pasukan berangkat menuju medan tempur di daerah Angke – Tangerang. Barisan prajurit Mataram cukup panjang. Ketika pengawal pasukan telah sampai di Pangapon, ujung barisan masih berada di alun-alun Surosowan. Sejumlah pembesar Banten (Penggawa, mantri) ikut serta mengantar keberangkatan prajurit-prajurit mereka; seperti Kartiduta, Haji Wangsaraja, Demang Narapaksa, Wirapaksa, dan Kanduruhan Wadoaji. Raden Senapati Ingalaga dan Haji Wangsaraja diusung dalam tandu. Perjalanan itu memakan waktu delapan hari.

Setibanya di daerah Angke – Tangerang, para pemimpin pasukan Banten segera mengatur anak buah masing-masing untuk menempati kubu-kubu pertahanan sambil menunggu perintah mulai pertempuran.

Laporan tentång kedatangan pasukan Banten di daerah Angke – Tangerang telah masuk ke benteng Kumpeni di Jakarta disampaikan oleh mata-mata dan penghubung-penghubungnya. Segera Gubernur Jenderal Kumpeni memanggil serdadu-serdadu sewaannya yang terdiri dari orang-orang Ternate, Kalasi, Kajawan, Banda, dan lain-lain. Pasukan Kumpeni itu di bawah pimpinan perwiranya masing-masing yang semuanya orang Belanda berangkat menuju ke medan perang di Angke – Tangerang. Dalam jangka waktu satu hari penuh barulah perjalanan mereka sampai ke tempat tujuan. Mereka bermarkas di suatu tempat yang berhadapan dengan kubu pertahanan pasukan Banten.

Tujuh hari lamanya tidak ada gerakan pasukan di kedua belah pihak yang menuju ke arah dimulainya pertempuran. Para prajurit masing-masing pihak berjaga-jaga di posnya sendiri-

sendiri sambil menunggu komando atasan mereka. Dalam pada itu, para komandan pasukan sedang sibuk berunding dengan panglima mereka untuk mengatur siasat perang. mereka yang diberi tugas mata-mata terus-menerus mencari informasi dan melakukan pengamatan guna mengetahui kedudukan musuh. kekuatan dan kelemahan musuh, serta kelengkapan musuh.

Panglima pasukan Banten-lah yang mula-mula mengeluarkan perintah dimulainya pertempuran. Perintah itu dikeluarkan setelah sehari sebelumnya diadakan upacara keagamaan berrsama di bawah pimpinan Haji Wangsaraja. Mereka memanjatkan do'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh prajurit dan perwira pasukan Banten memperoleh kemenangan dalam pertempurannya melawan tentara Kompeni.

Pada hari dimulainya pertempuran, pasukan Banten telah siap-sedia maju ke medan perang. Raden Senapati Ingalaga langsung mengatur taktik perang sambil menunggang kuda. Setelah semuanya siap, ia mengeluarkan komando dimulainya penyerangan. Tak lama kemudian bergeraklah pasukan Banten menyerang tentara Belanda. Wakil Panglima pasukan Banten Ki Rangga Wirapatra maju ke medan perang dengan berjalan kaki diiringi oleh beberapa orang pengawalnya. Ia langsung memimpin pertempuran. Rupanya pihak Kompeni pun telah mengetahui rencana penyerangan pihak Banten, sehingga ketika serangan pasukan Banten tiba, mereka telah siap melawannya. Maka pertempuran pun berkecamuklah dengan hebatnya sejak dinihari. Pertempuran berjalan sehari penuh. Waktu malam tiba barulah peperangan berhenti. Pasukan kedua belah pihak kembali ke markasnya masing-masing. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan, tapi belum tampak pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang.

Setelah masa istirahat selama tiga hari, Panglima pasukan Banten mengeluarkan perintah lagi kepada para ponggawa agar menyiapkan pasukannya masing-masing, sebab pertempuran akan dimulai lagi. Kini serangan pasukan Banten diatur me-

nurut sistem *perang dadali.* Serangan pasukan Banten demikian dihadapi oleh tentara Kompeni dengan cara *perang papak.* Dalam hal ini Raden Senapati Ingalaga beserta 500 orang prajurit bergerak ke arah timur dengan maksud menyerang musuh yang ada di situ. Kelompok pasukan Banten yang dipimpin oleh Ngabehi Wirangunangun dan Prayakarti 'bergerak menuju perkampungan yang dijadikan sarang pertahanan Kumpeni. Kampung-kampung yang didatangi dibakar dan dihancurkan. Begitu pula kebun tebu dan pabrik penggilingannya yang ditemui dimusnahkan. Para prajurit Banten bertempur dengan semangat tinggi. Mereka tidak mau mundur setapak pun, walaupun harus bertarung satu lawan satu dengan tentara Kompeni, seperti dilakukan oleh Demang Natapaksa dan Wirapaksa.

Dalam pertempuran sengit yang berlangsung sehari penuh itu berhasil dibunuh empat orang opsir Belanda dan sejumlah prajuritnya menjadi korban pula. Dari pasukan Banten pun jatuh sejumlah korban.

Pada hari berikutnya Raden Senapati Ingalaga menugaskan Prayakarti yang dikawal oleh 40 orang prajurit kembali ke Surosowan untuk melaporkan perkembangan peperangan dan mempersembahkan hasil rampasan perang kepada Sultan. Perjalanan Prayakarti dan anak buahnya memakan waktu sembilan hari. Ketika memasuki ibukota, mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan Sultan Ageng Tirtayasa.

Panglima pasukan Banten melaporkan di dalam suratnya kepada Sultan, bahwa keadaan prajurit dan ponggawa Banten selama ini baik dan sehat, peperanganbelum dapat dipastikan kapan berakhirnya, walaupun beberapa kemenangan telah diraih seperti terbukti dari barang rampasan yang bersama ini dipersembahkan. Dikemukakan pula bahwa Prayakerti sangat berjasa dalam pertempuran-pertempuran yang telah terjadi. Mendengar laporan itu wajah Sultan tampak berseri-seri, tapi juga merasa gemas terhadap Kompeni. Tiba-tiba Sultan menge-

luarkan sebuah pengumuman, bahwa barangsiapa yang dapat menyerahkan kepala seorang Kompeni akan diberi hadiah 10 real dan barang siapa dapat menyerahkan telinga akan diberi hadiah 5 real bagi setiap telinga. Kepada Prayakarti sendiri sultan menjanjikan hadiah sebuah kampung, *lampit* (tikar dari rotan), dan peti *(kandaga)*, jika berhasil membunuh opsir-opsir Kompeni dalam pertempuran satu lawan satu. Sudah tentu pengumuman itu dimaksudkan sebagai perangsang agar semangat para prajuritnya tetap tinggi, berlomba-lomba berusaha menangkap musuh, dan akhirnya berhasil memenangkan angka.

Di samping dari medan perang Angke – Tangerang, laporan perkembangan perang masuk pula ke kraton dari medan-medan perang lainnya, termasuk pertempuran di lautan. Sewaktu satuan armada pimpinan Ratu Bagus Wangsakusuma melakukan patroli tampak di Selat Pulo Pamujan ada sebuah kapal besar Kompeni sedang membuang sauh. Sekoci-sekoci yang diturunkan dari kapal tersebut penuh dengan penumpang tentara Kompeni yang dipersenjatai secara lengkap. Sekoci-sekoci itu bergerak menuju pantai untuk mendaratkan pasukan. Satuan armada Banten terlebih dahulu bersembunyi di belakang Pulau Dua. Selanjutnya, sekoci-sekoci Kompeni dikejar oleh armada Banten. Terjadilah pertempuran hebat. Selain sekoci-sekoci Kompeni dapat dihancurkan, juga kapalnya dirusakkan. Rampasan perang yang berhasil dikumpulkkan segera dikirim ke Surosowan.

Sementara itu, Sarantaka dan dua orang pengawalnya melihat sebuah kapal Belanda membuang sauh di dekat Tanjung Bulukbuk. Kapal itu kemudian diserang dan dihancurkan. Sebuah kapal (jung) besar Banten yang ada di bawah pimpinan Ratu Bagus Singandaru berhasil menghadang dan memusnahkan kapal besar Belanda yang terdampar di Tanjung Barangbang dalam perjalanannya dari Malaka menuju Jakarta. Satuan armada Banten pimpinan Ki Haji Abbas berhasil pula menenggelamkan kapal Kompeni di perairan Gosong Bugang. Kapal-kapal

Banten yang dipimpin oleh Rangga Natajiwa, Sarantaka, dan Wiraprana berhasil mencegat kapal-kapal Kompeni yang didatangkan dari wilayah Indonesia bagian timur untuk membantu rekan mereka di Jakarta. Penghadangan itu dilakukan di perairan Karawang sebelah timur Jakarta), sehingga kapal-kapal itu kembali lagi ke arah timur, kecuali beberapa buah yang berhasil dihancurkan armada Banten. Kapten kapal Kompeni berhasil ditewaskan oleh satuan armada Banten pimpinan Saranubaya dalam suatu pertempuran dahsyat di perairan Pelabuhan Ratu. Namun Saranubaya pun akhirnya gugur, akibat luka yang diderita dalam pertempuran itu.

Di sekitar ibukota Banten pun terjadi pertempuran-pertempuran yang tidak kalah sengitnya. Di sini kapal-kapal Kompeni sering mengacau, menyerang, dan menembaki pertahanan Banten. Satuan armada Kompeni yang sering mengganggu pertahanan Banten berjumlah 11 kapal. Mereka melakukan aksi di perairan antara Pulau Dua dan Pulau Lima. Guna menghadapi kekuatan armada Kompeni yang selalu mengacau Surosowan, Sultan Ageng memerintahkan agar semua meriam yang ada disekitar kraton dan tempat-tempat yang dekat ke pantai diarahkan ke laut dan siap membalas tembakan Kompeni. *Sejarah Banten* menyebut 60 buah nama meriam yang digunakan mempertahankan ibukota dengan nama pemegangnya masing-masing, antara lain Si Jaka Tua dipegang oleh Pangeran Papatih, Si Jaka Pekik oleh Pangeran Kidul, Si Kalantaka oleh Pangeran Lor, Si Nilantaka oleh Pangeran Kulon, Si Kalajaga oleh Pangeran Wetan, Si Muntab oleh Tubagus Suradinata, Si Urang Ayu oleh Pangeran Wirasuta, Si Pranggi Sela oleh Pangeran Prabangsa, Si Danamarga oleh Pangeran Sutamanggala, Si Jaka Dalem oleh Pangeran Gusti. Meriam-meriam itu ditempatkan secara teratur dari Sunya Gagak, Kuta Karang, sampai ke Sungai, dari sebelah barat hingga sebelah timur pabean (pelabuhan); dari Kuta Jaga-jaga hingga Kadongkalan dan Kapatohan. Pada waktu terjadi pertempuran kapal-kapal Belanda menembaki

dari dua arah. Tembakan-tembakan itu segera dibalas oleh tembakan meriam-meriam Banten. Tembakan meriam-meriam Si Jaka Pekik. Si Muntab, dan Si Kalantaka mengenai sasarannya pada sebuah kapal Kompeni. Sorak sorai pun dimulai sebagai tanda gembira. Ketepatan tembakan-tembakan meriam Banten itu mengakibatkan Kompeni terpaksa menghentikan serangannya, kemudian mengundurkan diri dari medan perang.

Satu tahun telah berlalu, peperangan antara pasukan Banten dengan serdadu Kompeni belum juga memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Kedua belah pihak mempunyai kekuatan seimbang. Setelah mendapat laporan tentang keadaan peperangan dari Arya Mangunjaya, Sultan Banten mengambil keputusan akan mengganti pasukan yang sudah satu tahun berperang dengan pasukan baru, terutama dengan pasukan yang berada di front Angke – Tangerang.

Demikianlah, maka segera dipersiapkan pasukan baru dengan Arya Mangunjaya dan Arya Wiratmaja sebagai pimpinannya serta Sayid Ali sebagai pimpinan (imam) dalam bidang keagamaan. Mereka akan menggantikan pasukan Banten yang bertugas di Angke – Tangerang. Perjalanan Surasowan Angke – Tangerang ditempuh oleh pasukan baru dalam waktu sembilan hari. Setelah mereka menduduki kubu-kubu pertahanan, maka pasukan lama pimpinan Raden Senapati Ingalaga ditarik mundur.

Mendengar terjadinya penggantian pasukan tentara Banten, Kumpeni pun melakukan hal serupa. Tidak lama kemudian dua pasukan yang bermusuhan telah saling berhadapan. Pertempuran pun berkecamuklah dengan hebatnya, karena semuanya merupakan tenaga baru. Pertempuran dilakukan secara berkelompok dan perorangan. Begitu bersemangatnya pasukan Banten sehingga Sayid Ali yang sebenarnya hanya bertugas mendo'a saja, bangkit amarahnya terhadap Kompeni. Ia meloncat naik kuda hendak menyerang opsir-opsir Belanda, tetapi

sempat dihalangi oleh rekannya. Prayakarti dan Surantaka merupakan ponggawa Banten yang paling gigih di medan perang tanpa mundur setapak pun. Prayakarti menyerang seorang Kompeni dan berhasil menikamnya. Tetapi malang tanpa diketahui sebelumnya, empat orang serdadu Kompeni menyerangnya dari belakang sehingga gugur sebagai pahlawan Banten.

Pertempuran hebat terus berlangsung setiap hari, kadang berselang beberapa hari. Prajurit-prajurit Banten pada umumnya berinisiatif sebagai penyerang. Berhubung dengan Kompeni terus-menerus didesak dan diserang, sehingga lama-kelamaan mereka merasa lelah dan pesimis untuk menang, maka Pemerintah Tinggi Kompeni yang terdiri atas Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia terpaksa menawarkan perjanjian damai kepada Sultan Banten. Faktor lain yang mendorong Kompeni mengajak berdamai kepada Banten ialah sangat besarnya kerugian yang ditanggung mereka, baik kerugian material ataupun manusia, dan sikap kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia yang menolak monopoli perdagangan Kompeni. Sultan Banten akhirnya menerima ajakan perjanjian perdamaian Kompeni itu, karena melihat kenyataan banyaknya korban berjatuhan dari pihak Banten, besarnya biaya perang yang dikeluarkan, dan tipisnya kemungkinan perang itu akan dimenangkan oleh pihaknya. Pihak Banten sendiri mengorbankan tuntutan kebebasan berdagang dan berlayar ke Ambon. Tetapi sesungguhnya perdamaian itu dapat tercapai, terutama berkat turun tangan Sultan Jambi yang berperan sebagai perantara. Dalam hal ini Sultan Jambi mengutus Kiai Damang Dirade Wangsa dan Kiai Ingali Marta Sidana. Seetelah melalui proses pembicaraan yang berulang kali, akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa dan Gubernur Jenderal Kompeni mencapai kata sepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 10 Juli 1659. Dengan adanya perjanjian perdamaian yang terdiri atas 12 pasal itu, berakhirlah permusuhan antara Banten dengan Kompeni secara formal.[63]

2.3.4 Politik Adudomba Mengakibatkan Masuknya Kekuasaan Kompeni di Banten

Suasana damai dalam hubungan antara Banten dengan Kompeni ternyata tidak dapat berjalan lama, hanya berlangsung kira-kira 12 tahun. Pada tahun 1671 terjadi lagi hubungan tegang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Kompeni akibat ikut-campurnya Kompeni dalam masalah intern kraton Banten.

Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat puteranya yang tertua sebagai putara mahkota seperti lazimnya. Putera mahkota itu bernama Pangeran Gusti atau Pangeran Anom. Sultan muda ini semasa kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Pangeran Prabangsa. Sejak menginjak dewasa tampak dalam diri Pangeran Gusti sifat-sifat yang berbeda dengan ayahnya. Pribadinya tidak kukuh, mudah dipengaruhi dan dihasut oleh orang lain. Angkuh dan tak memperhatikan kehidupan dan-penghidupan rakyat kecil mewarnai watak Sultan Muda ini.

Atas pesan ayahnya, Pangeran Gusti pergi mengunjungi Mekah, Tanah Suci bagi umat Islam, pada tahun 1671. Kunjungan itu penting dalam rangka mempersiapkan diri sebagai calon pengganti Sultan. Dari Mekah Pangeran Gusti mendapat nama Sultan Abdul Kahar. Selanjutnya, ia lebih terkenal dengan sebutan Sultan Haji.

Sejak kedatangan Pangeran Gusti dari Mekah, Sultan Ageng Tirtayasa mengundurkan diri dari kegiatan pemerintahan sehari-hari. Soal-soal yang bertalian dengan politik luar negeri seperti perjanjian dengan luar negeri, pengiriman utusan dan lain-lain masih tetap dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sedangkan hal-hal lainnya telah diserahkan kepada Sultan Muda Abdul Kahar. Sejak itu Sultan Ageng Tirtayasa menetap di kraton Tirtayasa. Dari kraton tersebut beliau dapat mengawasi aktivitas puteranya yang memegang pemerintahan sehari-hari di Surosowan. Di samping itu, Sultan Ageng Tirtayasa masih terus melakukan dan meneruskan pekerjaan-pekerjaan penting yang

berguna bagi kemakmuran, pertahanan, kebudayaan, dan persatuan rakyat.

Pengunduran diri Sultan Ageng Tirtayasa dari kegiatan pemerintahan dan kepindahan tempat tinggal ke kraton Tirtayasa, sangat menggembirakan Kompeni. Memang sejak dulu hubungan Kompeni dengan Sultan Ageng Tirtayasa tidak begitu serasi, karena sikap Sultan Ageng yang konsekkuen menentang monopoli perdagangan Kompeni dan selalu menuntut kebebasan berdagang dan berlayar yang justru bertolak belakang dengan kehendak Kompeni. Sedangkan puteranya, Sultan Abdul Kahar, mudah didekati dan diajak berunding oleh Kompeni serta mudah pula dipengaruhi oleh Kompeni. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi di lingkungan kraton merupakan kesempatan bagi Kompeni untuk lebih mendekati dan mempengaruhi Sultan Abdul Kahar. Kesempatan itu dipermudah dengan diketahuinya ada perbedaan pendapat dan jalan pikiran antara Sultan Abdul Kahar dan ayahnya. Kompeni bermaksud untuk menggunakan perbedaan pendapat dan pandangan itu bagi kepentingannya dengan cara mengadu-dombakan ayah dan anak. Melalui wakilnya di Banteng (W. Caeff) dan kakitangannya, Kompeni mengikuti dan mengendalikan perkembangan hubungan antara Sultan Abdul Kahar dengan ayahnya serta menghasut Sultan Abdul Kahar agar secepatnya menjadi Sultan Banten secara penuh.[64]

Sultan Ageng Tirtayasa sangat marah kepada putera mahkota, ketika secara tidak langsung Sultan Muda menayakan tentang penyerahan kekuasaan secara penuh kepadanya. Begitu pula Sultan Ageng Tirtayasa tidak setuju terhadap sikap putera mahkota yang terlalu dekat dan sering berhubungan dengan orang-orang Belanda dan orang asing lainnya serta perilakunya yang meniru cara hidup Barat, bahkan mempercayai wakil-wakil Kompeni dalam urusan pemerintahan Kesultanan Banten. Guna menghindari agar putera mahkota Banten tidak terlalu tenggelam dalam pelukan, bujukan, dan hasutan Kompeni

yang bisa berakibat membahayakan kehidupan dan keselamatan rakyat dan negara. Sultan Ageng Tirtayasa menasehati puteranya agar pergi ke Mekah lagi untuk mendalami ilmu agama dan beribadah haji. Harapannya ialah supaya Sultan Abdul Kahar dapat kembali kepada pola hidup dunia Timur dan Islam serta menjauhi cara-cara hidup Barat dan mengurangi pergaulan terlalu rapat dengan orang Barat, terutama orang Belanda.

Nasehat ayahnya itu ditaatinya, Sultan Abdul Kahar berangkat ke Tanah Suci pada tahun 1674. Setelah mengunjungi Turki lebih dulu, beliau pulang kembali ke tanah airnya dan tiba di Banten telah memasuki tahun 1676. Selama dalam perjalanan kedudukan sebagai Sultan Muda diserahkan kepada adiknya, Pangeran Purbaya.

Ternyata sepulangnya dari Mekah sikap dan perilaku Sultan Abdul Kahar, lebih dikenal dengan sebutan Sultan Haji sesudah tahun 1676, tetap saja. Beliau tetap bergaul erat dengan orang Belanda, sehingga pengaruhnya makin merasuk dalam pribadinya dan kebijaksanaan pemerintahannya.

Berhubung dengan Sultan Haji tidak dapat lagi dipisahkan dari pengaruh Kompeni, bahkan dapat dikatakan lebih dekat kepada Kompeni dari pada kepada ayahnya, maka tidak ada jalan lain bagi Sultan Ageng Tirtayasa kecuali harus mengadakan usaha-usaha guna meningkatkan kewaspadaan dan kekuatan pertahanan demi keselamatan dan keamanan negara, rakyat, dan agamanya. Soalnya dari sikap dan tindakan-tindakan Kompeni dalam berhubungan dengan Sultan Haji timbul petunjuk kuat adanya keinginan Kompeni memasukkan kekuasaan dan kekuatan mereka ke dalam negeri Banten. Dalam kerangka itu Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan untuk melakukan mobilisasi umum, baik prajurit ataupun rakyat Banten yang masih setia kepada beliau. Beberapa satuan armada dan kelompok pasukan Banten dikirimkan ke daerah-daerah sekeliling Jakarta dengan maksud mempengaruhi, bahkan menguasai daerah-daerah itu sehingga berpihak atau mendukung Banten

dalam berhadapan dengan Kompeni. Tahun 1678 satuan armada Banten memasuki perairan di muara Sungai Citarum guna menghadapi benteng Kompeni di Tanjungpura. Pada akhir tahun itu juga (1678) pasukan Banten pimpinan Cilik Widara melakukan gerakan ekspansi ke wilayah Priangan. Gerakan itu berhasil menduduki beberapa daerah di Priangan, bahkan bupati Sumedang terusir untuk sementara.[65]

Sultan Ageng Tirtayasa pun melakukan usaha kegiatan diplomatik melalui pendekatan dan persahabatan dengan daerah sekitarnya dan daerah-daerah lain di kepulauan Indonesia. Dalam hal ini Banteng menjalin hubungan baik dengan daerah-daerah Lampung, Bengkulu, Salebar di bagian selatan Pulau Sumatera dan juga dengan Cirebon, Makassar serta Mataram. Pada bulan Desember 1676 dan awal 1677 Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan bantuan senjata dan amunisi lewat sejumlah kapal kepada Trunojoyo yang sedang melawan Kompeni dan Sultan Amangkurat I (1645–1677). Sebaliknya Trunojoyo beberapa kali mengirim utusan ke ibukota Banten (Juli dan Desember 1677). Rupanya Sultan Banten bersedia langsung membantu Trunojoyo dengan harapan jika Trunojoyo berhasil, maka selain ancaman serangan Mataram terhadap Banten akan lenyap, juga nanti tiba gilirannya Banten dibantu oleh Trunojoyo. Pada tanggal 20 Agustus dan 19 September 1671 orang-orang Makassar (800 orang dan 300 orang) berkunjung ke pelabuhan Banten di bawah pimpinan Karaeng Montamaramo dan kemudian Raja Lubo dari Mandar. Hubungan antara Banten dengan Cirebon diperbaiki sejak 1677, setelah beberapa tahun lamanya tegang karena Cirebon berpihak pada Mataram. Pemulihan hubungan Banten – Cirebon itu dilakukan dengan kunjungan 4 buah kapal Banten ke Cirebon yang kemudian dibalas (14 Oktober 1677) oleh kunjungan Sultan Sepuh dan Sultan Anom dari Cirebon ke Banten. Kedua sultan dari Cirebon itu ditolong oleh pihak Banten tatkala keduanya dibebaskan oleh pasukan Trunojoyo dari sekapan sultan Mataram.[66]

Bujukan Kumpeni terhadap Sultan Haji agar segera megerakan-gerakan ofensif Banten tersebut, karena pada waktu itu perhatian mereka tertuju menghadapi ketegangan dengan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Ketegangan itu berulangkali mencapai puncaknya sehingga pecah menjadi perlawanan senjata (1635–1655, 1660). Ketegangan itu baru berakhir tahun 1666 dengan tercapainya perjanjian perdamaian menduduki kraton Mataram (1677) dihadapi pula oleh Kompeni. Sultan Mangkurat I (1645 – 1677) meminta bantuan kepada Kompeni untuk menumpas perlawanan itu dan Kompeni berkepentingan membantu Mataram dalam rangka melenyapkan sikap permusuhan Mataram kepadanya dan menarik keuntungan dari kesempitan Mataram itu.[67] Begitu terpojoknya kedudukan Kompeni dalam berhubungan dengan Banten sehingga ketika mereka mendapat peringatan keras, bahkan ancaman Banten, mengenai larangan Banten atas campur tangan dan gangguan Kompeni terhadap Cirebon, mereka tidak berani melanggar peringatan itu.

Sikap dan tindakan Kompeni mengalami perubahan sejak gejolak di Makasar dan Mataram dapat diselesaikan dengan Kompeni dapat dikatakan sebagai pemenang masing-masing pada tahun 1666 dan 1680. Sejak itu Kompeni mulai memusatkan perhatian ke Banten dengan menampilkan sikap agresif. Pada satu pihak Kompeni mendekati dan mempengaruhi Sultan Haji agar kebijaksanaan pemerintahannya sejalan dengan tujuan mereka. Pada pihak lain mereka menjauhi dan menekan Sultan Ageng Tirtayasa. Sikap Kompeni itu mengakibatkan makin besarnya sikap curiga-mencurigai antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji atau antara ayah dan anak.

Bujukan Kompeni terhadap Sultan Haji agar segera memegang kekuasaan penuh di Banten makin merasuk dalam pribadi Sultan Muda itu. Pada bulan Mei 1680 untuk kedua kalinya Sultan Haji menawarkan ikatan perjanjian persahabatan pada Gubernur Jenderal Kompeni di Jakarta melalui utusannya,

tanpa sepengetahuan ayahnya. Dengan demikian tawaran itu merupakan pengkhianatan kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara itu, Kompeni berani mengabaikan peringatan keras dan ancaman Sultan Ageng Tirtayasa mengenai Cirebon. Pada tahun 1679 Kompeni mengirim bantuan pasukan ke Sumedang atas permintaan Bupati Sumedang Panembahan untuk menumpas pasukan Banten pimpinan Cilikwidara yang berhasil menduduki ibukota Sumedang. Pasukan Banten itu berhasil disingkirkan. Kompeni pun kemudian mendekati Cirebon (1680). Terjadilah hubungan surat menyurat antara Sultan Sepuh Cirebon dengan Gubernur Jenderal Kompeni. Kedua pihak akhirnya (23 Januari 1681) sepakat mengadakan perjanjian persahabatan yang antara lain menetapkan perlindungan Kompeni atas Cirebon.[68] Perjanjian persahabatan Kompeni itu merupakan pukulan keras bagi Sultan Ageng Tirtayasa.

Hal lain yang menyakitkan diri Sultan Ageng Tirtayasa berhubung dengan sikap puteranya Sultan Haji terhadap Kompeni adalah pengiriman utusan Banten ke Jakarta tanpa sepengetahuannya. Yang terakhir ialah pengiriman ucapan selamat Sultan Haji atas pergantian Gubernur Jenderal Kompeni. Tindakan tersebut berakibat meningkatnya ketegangan hubungan antara ayah dan anak. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1682, tatkala kesabaran Sultan Ageng Tirtayasa telah melewati batasya.

Pada tengah malam tanggal 26 Pebruari 1682 menjelaskan tanggal 27 Sultan Ageng Tirtayasa mengeluarkan perintah agar pasukannya menyerang Surosowan guna menghukum puteranya. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa menyerang ibukota Banten dari berbagai penjuru dengan sasaran utamanya alun-alun dan kraton Surosowan. Surosowan dipertahankan oleh pasukan Banten yang setia kepada Sultan Haji yang jumlahnya sedikit dengan dibantu oleh sejumlah serdadu Kompeni yang ditempatkan di Banten.

Sesungguhnya Sultan Ageng Tirtayasa tidak bermaksud memusuhi puteranya sendiri. Serangan itu dimaksudkan hanya untuk menghukum puteranya saja agar menyadari kekeliruan jalan yang ditempuhnya. Sedangkan gerakan militernya lebih ditujukan kepada Kompeni. Ternyata Sultan Haji bukannya sadar atas kekeliruan memilih temannya, melainkan makin menggantungkan diri pada Kompeni.

Ketika pasukan Sultan Ageng Tirtayasa mengarahkan serangannya ke kraton Surosowan, Sultan Haji melarikan diri dari Kraton, kemudian mencari perlindungan kepada serdadu-serdadu Kompeni. Bahkan siang harinya setelah pertempuran berhenti Sultan Haji meminta tambahan bantuan pasukan kepada Kompeni.

Pada tanggal 6 Maret 1682 bantuan pasukan Kompeni itu tiba di Surosowan sebanyak dua kapal yang penuh oleh serdadu di bawah pimpinan Saint Martin. Tetapi kedua kapal Kompeni itu tidak dapat merapat ke pelabuhan Banten. karena terus menerus ditembaki oleh meriam-meriam pasukan Banten yang setia pada Sultan Ageng Tertayasa. Pendaratan pasukan Kompeni itu baru berhasil setelah didatangkan lagi bantuan pasukan yang lebih besar di bawah pimpinan Kapten Francois Tack.

Mendengar laporan mengenai perkembangan peperangan di Banten, Pemerintah Tinggi Kompeni di Jakarta memutuskan, bahwa sudah tiba saatnya untuk melancarkan serangan secara besar-besaran terhadap pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam hal ini Kompeni bermaksud melakukan serangan melalui dua front, yaitu pertama lewat laut oleh armadanya yang langsung datang ke ibukota Banten guna melindungi Sultan Haji dan mendesak pasukan Sultan Ageng Tirtayasa ke luar dari Surosowan; kedua, lewat jalan darat dengan mengirimkan pasukan darat ke daerah Tangerang. Tujuan akhirnya ialah menduduki kraton Tirtayasa sebagai tempat kedudukan Sultan Ageng Tirtayasa. Pasukan Kompeni yang dikerahkan

ke daerah Tangerang berkekuatan 227 orang Belanda, 40 orang Makassar, 140 orang Bali, 50 orang Jawa, 50 orang Bugis, 80 orang Madura, dan 300 – 400 orang kuli. Jadi seluruhnya berjumlah sekitar 900 – 1.000 orang dipimpin oleh Kapten Hardtsinck. Mereka diberangkatkan dari Jakarta pada tanggal 16 Maret 1982.

Perjalanan pasukan darat Kompeni menuju Tirtayasa tidak mudah begitu saja, melainkan di sepanjang perjalanan mendapat penghadangan keras dari pasukan Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah lama ditempatkan di daerah-daerah itu. Pusat kubu pertahanan Banten di daerah tersebut ialah Kademangan. Pertama-tama pasukan Kompeni dihadang oleh prajurit dan rakyat Banten yang berkedudukan di daerah perbatasan Angke Tangerang. Bahkan pasukan Banten sempat melancarkan serangan dengan menghancurkan perkebunan tebu, pabrik penggilingan, dan membakar perkampungan yang ditempati serdadu-serdadu Kompani.

Pasukan Banten yang bergerilya di daerah sebelah barat Sungai Angke dipimpin oleh pasukan Dipati. Serangan-serangan mereka sering berhasil menembus pertahanan Kompeni. Pada tanggal 30 Maret 1682 satu kelompok serdadu Kompeni sedang melakukan patroli di daerah itu. Tiba-tiba mereka mendapat serangan gencar sampai tidak sempat mengatur perlawanannya, sehingga mereka terpaksa mundur sambil lari pontang-panting.

Pada bulan Juli 1682 kembali terjadi pertempuran dahsyat di medan perang daerah Tangerang. Dalam pertempuran ini jatuh korban dari pihak Kompeni enam orang tewas dan 39 orang luka-luka berat. Kerugian ini memungkinkan pasukan Kompeni tidak berani melancarkan serangan lebih dulu selama bulan Agustus 1682.

Pada bulan September 1682 pasukan Kompeni membangun benteng-benteng pertahanan dan pos-pos penjagaan di

sebelah timur Sungai Cisadane. Bulan berikutnya benteng pertahanan dan pos-pos penjagaan Kompeni sepanjang perjalanan Jakarta – Tangerang mendapat serangan satuan pasukan Banten. Tetapi pasukan Kompeni terus bergerak maju menuju Kademangan, benteng pertahanan Banten terkuat di fron itu. Benteng pertahanan itu mendapat serangan hebat dari serdadu Kompeni. Betapapun prajurit-prajurit Banten mempertahankan benteng itu dengan gagah berani, namun akhirnya jatuh juga ke tangan Kompeni (2 Desember 1682). Sisa pasukan Banten di daerah itu mengundurkan diri ke arah Tirtayasa, sehingga daerah Angke – Tangerang sepenuhnya dikuasai Kompeni (8 desember 1682).

Serangan pasukan Kompeni selanjutnya diarahkan ke Tanara, tempat pertahanan pasukan Banten yang terdekat dengan ibukota Tirtayasa. Serangan itu dilancarkan dari darat dan laut. Karena gempuran yang hebat, meskipun tentara Banteng berjuang mati-matian, akhirnya Tanara jatuh juga ke tangan pasukan Kompeni. Dengan jatuhnya Tanara, maka terbukalah jalan selebar-lebarnya bagi serangan ke pusat kota Tirtayasa.

Serangan pasukan Kompeni ke Tirtayasa dimulai pada tanggal 29 Desember 1682. Serangan ini dilancarkan pula dari arah Surosowan oleh pasukan Kompeni dan pasukan Sultan Haji yang berhasil mendesak mundur pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dari Surosowan. Gerak maju pasukan Kompeni dan pasukan Sultan Haji tertahan di Pontang, karena di situ pasukan Sultan Ageng Tirtayasa mendirikan pertahanan dan kemudian melakukan perlawanan. Baru setelah melalui pertempuran sengit yang mengakibatkan korban berjatuhan dari kedua belah pihak pertahanan Pontang dapat didobrak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa mengundurkan diri ke pusat kota Tirtayasa. Dengan demikian semua kekuatan tentara dan rakyat yang setia pada Sultan Ageng Tirtayasa bergabung di Tirtayasa guna mempertahankan mati-matian pusat pemerintahan mereka. Sultan Agent Tirtayasa segera memanggil pembesar-pembesar Banten

yang tetap setia kepadanya, termasuk Syeh Yusuf penasihat pribadinya, untuk merundingkan siasat perjuangan selanjutnya. Apakah akan mempertahankan Tirtayasa mati-matian sampai titik darah yang penghabisan. Ataukah akan meninggalkan Tirtayasa untuk melanjutkan perjuangan dari tempat lain. Atau menghentikan perlawanan sama sekali, artinya menyerah kalah. Ternyata kemungkinan kedua yang dipilih. Meskipun demikian Tirtayasa ditinggalkan tidak dalam keadaan utuh, melainkan dibumihanguskan terlebih dahulu. Mereka tidak rela kraton Tirtayasa dijadikan tempat kedudukan musuh. Kini kraton yang megah dan kukuh itu hanya tinggal puing-puing saja.

Sultan Ageng Tirtayasa dan beberapa orang pembesar Banten (Pangeran Purbaya, Pangeran Kidul, Pangeran Kulon, Syekh Yusuf dan lain-lain) serta sejumlah prajuritnya yang tetap setia tidak mau menyerah kepada Kompeni, sebab mereka cinta kemerdekaan dan anti penjajahan. Mereka melanjutkan perjuangan melalui cara gerilya dengan basis gerakannya daerah hutan Kranggan (sebelah selatan Tirtayasa) dan kemudian daerah Banten Selatan.

Dalam surat laporan Sultan Haji kepada Gubernur Jenderal Kompeni di Jakarta dikatakan bahwa ayahnya, adiknya (Pangeran Purbaya), dan sejumlah prajurit yang menjadi pasukan mereka berada di Paringan, daerah pedalaman Tangerang. Sedangkan Syekh Yusuf, Pangeran Kidul, Pangeran Kulon, dan pasukannya berada di Sajira, daerah yang berbatasan dengan Bogor.

Atas petunjuk dan nasehat Kompeni, Sultan Haji mengirim surat kepada ayahnya yang mengatakan permohonan agar ayahnya bersedia menetap di Surosowan dengan jaminan kebebasan dan kemerdekaan bergerak. Sultan Ageng Tirtayasa bersedia memenuhi permohonan puteranya. Rupanya beliau percaya akan ketulusan hati puteranya, apalagi beliau telah berusia lanjut. Dalam pada itu musibah baru saja menimpa Pangeran Kulon. Ia dibunuh oleh seruhan Kompeni pada tanggal 7 Maret 1683.

Sultan Ageng Tirtayasa tiba kembali di Surosowan pada tanggal 14 Maret 1683. Beliau dan sejumlah pengikutnya diterima dengan baik oleh puteranya dan ditempatkan di kraton Surosowan.

Dengan kembalinya Sultan Ageng Tirtayasa, maka berhasillah perangkap yang dipasang oleh Kompeni. Tidak lama kemudian serdadu Kompeni datang ke kraton Surosowan dengan tujuan menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji tidak kuasa menolak tindakan serdadu-serdadu Kompeni itu, karena sesungguhnya beliau sendiri tak lebih dari boneka Kompeni. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa dibawa ke Jakarta dan ditahan di sebuah benteng dengan penjagaan sangat ketat. Rupanya Kompeni merasa khawatir selama Sultan Ageng Tirtayasa masih berada di Banten.

Kedatangan Sultan Ageng Tirtayasa di Surosowan tidak disertai pembesar-pembesar Banten lainnya dan seluruh pasukannya. Pangeran Purbaya, Pangeran Kidul, dan Syeh Yusuf tetap memimpin pasukan dalam perjuangan menentang penjajah orang Kompeni. Mereka tetap bergerilya di daerah pedalaman Jawa Barat. Walaupun dikejar-kejar tentara Kompeni dari arah Banten, Jakarta, Sumedang, dan Cirebon, namun mereka berhasil meloloskan diri dari kepungan dan tangkapan tentara Kompeni. Hal itu memperlihatkan betapa besar semangat dan daya juang mereka serta cerdik bergerilya di daerah pedalaman. Mereka baru tertangkap di daerah Tasikmalaya pada bulan Juli 1684. Pada waktu itu keluarga Syeh Yusuf dijadikan sandera. Kompeni mengeluarkan ancaman, bahwa putri dan putra-putra Syeh Yusuf akan dibunuh, bila Syeh Yusuf tidak menyerah. Suatu cara dan tindakan yang licik, keji dantidak bermoral. Demikianlah memang sifat dan karakter daripada penjajah itu.

Penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa, Syeh Yusuf, Pangeran Purbaya, dan pengikut mereka oleh serdadu Kompeni dengan cara tipu muslihat secara formal telah berhasil meng-

akhiri perlawanan rakyat Banten terhadap Kompeni Belanda dan menyelesaikan perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa (ayah) dan Sultan Haji (anak), walaupun secara batiniah sesungguhnya mereka tidak mau menyerah kepada Kompeni – Belanda. Ketiga pemimpin Banten itu ditahan oleh Kompeni sampai wafatnya di Jakarta (Sultan Ageng Tirtayasa dan Pangeran Purbaya) dan Afrika Selatan (Syeh Yusuf).

Masalahnya sekarang ialah bagaimana untung-ruginya dari peperangan yang berlangsung lama itu? Hampir semua keuntungan akhirnya diraih oleh Kompeni, sedangkan kerugian diderita oleh pihak Banten. Memang berakhirnya peperangan itu telah memungkinkan Sultan Haji dapat naik tahta Kesultanan Banten secara penuh sebagaimana diinginkan olehnya. Namun Sultan Haji harus menanggung konsekuensi yang berat sekali akibat dari sikap dan tindakannya itu. Soalnya Kompeni pun tidak semata-mata mau membantu Sultan Haji, jika di dalamnya tidak ada udang di balik batu.

Sesudah Sultan Ageng Tirtayasa kembali ke Surosowan (14 Maret 1683) dan tak lama kemudian ditangkap dan dibawa ke Batavia, selanjutnya Kompeni mengajukan konsep perjanjian baru dengan Banten yang sesungguhnya hanyalah memaksakan kehendak-kehendak Kompeni. Sultan Haji pun tidak berdaya menolaknya. Perjanjian baru Banten – Kompeni yang ditandatangani bersama tanggal 17 April 1684 itu, selain mengandung 10 pasal ketetapan yang disetujui kedua belah pihak, juga dapat dipandang merupakan pembaharuan 2725 perjanjian 10 Juli 1659 walaupun tetap menguntungkan Kompeni. Bahwa perjanjian tersebut cenderung merupakan pemaksaan kehendak Kompeni dapat dilihat dari ketentuan-ketentuannya yang antara lain berbunyi :

(1) Sultan Banten tidak boleh memberikan bantuan apa pun kepada musuh-musuh Kompeni, baik berupa senjata, alat peperangan atau bahan perbekalan.

(2) Sultan tidak boleh memberikan bantuan kepada Susuhun-Cirebon dan putra mahkotanya atau sebaliknya menyerang Cirebon, karena Cirebon adalah sahabat Kompeni.

(3) Batas wilayah Kesultanan Banten dan Kompeni ditetapkan Sungai Untung Jawa atau Tangerang lalu ditarik lurus ke selatan sampai ke Laut Selatan, tetapi semua tanah di sepanjang Sungai Untung Jawa akan menjadi milik atau ditempati Kompeni.

(4) Sultan Banten harus mengganti kerugian perang kepada Kompeni sebesar 12.000 ringgit.

(5) Sultan Banten tidak boleh mengadakan perjanjian, persekutuan, atau perserikatan dengan kekuatan atau bangsa lain.

(6) Perjanjian ini harus tetap terpelihara dan berlaku terus hingga keturunan Sultan Haji [69]

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa sejak berlakunya perjanjian itu, maka kemerdekaan Kesultanan Banten telah berkurang karena masuknya kekuasaan Kompeni. Namun bagaimanapun juga perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dan pengikutnya yang selalu menjunjung tinggi dan memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara dan bangsanya serta nilai kebenaran dan keadilan, merupakan sesuatu yang patut diteladani.

2.4 *Perlawanan Kiai Tapa*

2.4.1 *Latar Belakang*

Di atas telah dikemukakan bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Banten telah jatuh ke dalam cengkraman Kompeni sejak Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji naik tahta (1684). Begitu pula peranan Banten dalam perniagaan internasional dan Nusantara mengalami kemunduran yang makin lama makin merosot, karena masuknya monopoli perniagaan Kompeni.

Akibat selanjutnya adalah makin mundurnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemunduran Banten tak dapat dihindari pada masa pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Bahkan timbul kegelisahan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat, karena merasa tidak senang atas kehadiran Kompeni di negerinya. Kegelisahannya masyarakat makin tampak dan meningkat sejak masa pemerintahan Sultan Muhamad Zainul Arifin (1733–1748).

Sultan Muhammad Zainul Arifin adalah putra Sultan Muhamad Zainul Abidin (1690–1733). Sebenarnya masih ada putera Sultan Zainul Abidin yang lebih tua usianya yang biasanya lebih berhak menduduki tahta kerajaań, yaitu Pangeran Ratu meninggal dunia (17230 kemudian Pangeran Muhamad Saleh mengundurkan diri dari keinginan menduduki tahta kerajaan sehingga tinggallah Pangeran Ranamanggala sebagai calon pewaris tahta kerajaan. Pada tahun 1731 Pangeran Muhamad Saleh pun meninggal pula.

Memang Pangeran Ranamanggal yang bergelar Sultan Muhammad Zainul Arifin sesudah naik tahta, mempunyai watak keras kemauan dan cepat marah. Namun faktor yang lebih dominan yang mendorong pangeran Rananmanggala berambisi menduduki tahta kerajaan adalah desakan dan bujukan isterinya yang bernama Fatimah.

Fatimah adalah seorang yang dibesarkan di Batavia. Ia dilahirkan dari seorang ibu yang berdarah bangsawan Banten dan ayah berketurunan Arab. Ayahnya tergolong seorang hartawan di Batavia yang kenal baik dengan para pejabat Kompeni. Oleh karena itu, ia dapat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak orang Belanda di Batavia. Kecerdasannya memungkinkan banyak orang Belanda mengaguminya dan karena itu ia menjadi terkenal. Setelah dewasa ia ditikah oleh seorang tentara Kompeni berdarah Melayu sebagai tentara sewaan. Sifat Fatimah yang keras dan materialistis menyebabkan suaminya tidak mam-

pu lagi memenuhi kemauan-kemauannya sehingga terpaksa dicerai oleh suaminya. Selanjutnya Fatimah bekerja di bagian administrasi kantor Kompeni. Berkat kecerdasan dan kemauannya Fatimah terpakai oleh majikannya dan sering dibawa dalam sidang-sidang urusan pemerintahan.[70]

Watak Fatimah yang ambisius dalam mengejar kemewahan hidup mendapat perhatian para pembesar Kompeni. Salah seorang pembesar Belanda mempunyai gagasan untuk memanfaatkan Fatimah bagi kepentingan Kompeni di Banten Kecantikan, kepintaran, dan keluwesan dalam bergaul akan dijadikan umpan oleh Belanda untuk memikat salah seorang putra Sultan Zaenal Abidin. Kepada Fatimah sendiri Belanda menjanjikan akan memberikan kedudukan tinggi, asalkan bersedia memenuhi keinginan mereka dalam usahanya menguasai perekonomian Banten.

Fatimah diperkenalkan kepada keluarga kraton Banten oleh Kapten Brouwer, komandan benteng Speelwijk dan wakil Kompeni di Banten. Dalam perkenalan itu Pangeran Ranamanggala terpikat oleh kecantikan dan penampilan Fatimah. Sejak itu Fatimah sering ditemui dan bergaul dengan Pangeran Ranamanggala. Akhirnya Fatimah ditikah oleh Pangeran Ranamanggala.[71] Dengan pernikahan tersebut maka tujuan pertama Kompeni telah tercapai dalam rangka mencapai tujuan selanjutnya.

Dapatlah dipahami jika dalam proses penggantian sultan di Banten, Kompeni berusaha dengan segala cara sampai cara yang kotor sekalipun agar Pangeran Ranamanggala-lah yang menduduki tahta kerajaan. Dalam hal ini peranan Fatimah besar sekali dalam membangkitkan ambisi Pangeran Ranamanggala untuk memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Banten. Ambisi tersebut berhasil diraih setelah dua orang kakaknya, Pangeran Ratu dan Pangeran Muhammad Saleh, meninggal dunia pada tahun 1723 dan 1731. Pada tahun 1733 kedudukan

tertinggi dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten itu berhasil ditempati Pangeran Rananmanggala berkat dukungan Kompeni. Sebagai Sultan Banten ia bergelar Sultan Muhammad Syafei Zainal Arifin.

Setelah suaminya menduduki kursi kesultanan, usaha Fatimah selanjutnya ialah menggeser kedudukan prameswari dari isteri yang pertama agar jatuh kepadanya. Bujukan, rayuan, dan kecantikan Fatimah berhasil memikat hati Sultan sehingga perhatian dan kesayangan tertumpah kepadanya, sedangkan prameswarinya hampir tidak pernah mendapat perhatian. Hal itu mengakibatkan prameswari sakit hati, kemudian benar-benar jatuh sakit, dan akhirnya meninggal dunia karena merana.

Meninggalnya prameswari merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Fatimah untuk mencapai cita-citanya. Atas desakan Kompeni dan berkat rayuannya. Sultan Zainal Arifin mengangkat Fatimah menjadi prameswarinya. Sebagai prameswari ia bergelar Syarifah Fatimah.

Gelar Syarifah bagi Fatimah merupakan kelanjutan kampanyenya yang memperkenalkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Tampaknya rakyat Banten mempercayai kampanye Fatimah itu dan Fatimah sendiri memanfaatkan kepercayaan masyarakat itu bagi pencapaian cita-cita selanjutnya. Bukan hanya dirinya saja yang memakai gelar Syarifah, tetapi saudara-saudaranya pun diberi gelar serupa, seperti keponakannya mendapat gelar Pangeran Syarif dan Ratu Bagus Syarif. Selanjutnya Syarifah Fatimah menikahkan saudara-saudaranya kepada keluarga kraton Banten dan menempatkan mereka pada kedudukan-kedudukan penting dalam struktur pemerintahan Kesultanan Banten.[72] Tindakan itu agaknya dimaksudkan dalam rangka menyusun kekuatan. Keluarga bangsawan Banten yang ditikah oleh saudara-saudaranya diharapkan akan mendukung dia.

Syarifah Fatimah berusaha mempertemukan Pangeran Gusti, putera Sultan Zainal Arifin dari permaisurinya yang pertama, dengan seorang keponakannya. Usaha ini dimaksudkan agar calon pengganti Sultan itu mempunyai ikatan keluarga dengannya. Menurut rencananya dalam upacara pernikahannya sekaligus akan dilakukan peresmian sebagai isteri padmi yang kelak menurunkan calon sultan. Tetapi ternyata rencananya itu tinggal angan-angan saja, karena Pangeran Gusti menolak menikah dengan saudara ibu tirinya yang jelas telah berbuat kejam yang mengakibatkan ibu kandungnya meninggal dengan merana.

Penolakan Pangeran Gusti atas maksud ibu tirinya berakibat jauh. Syarifah Fatimah merasa sakit hati. Kebencian Syarifah Fatimah terhadap Pangeran Gusti dilampiaskan dengan penentangan keras atas pengangkatan Pangeran Gusti menjadi putra mahkota. Syarifah Fatimah mengajukan Pangeran Syarif, saudaranya sebagai calon putra mahkota. Terjadilah pertikaian di kalangan keluarga kraton antara yang mendukung Pangeran Gusti dan yang mendukung Pangeran Syarif.

Justru pertikaian itulah yang diinginkan Kompeni, karena dalam suasana perselisihan itu politik adu-domba mudah digunakan oleh Kompeni dan penggunaan politik adu-domba mudah mendatangkan keuntungan bagi Kompeni. Sultan Zaenul Arifin sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah itu, karena beliau telah dikuasai oleh permaisurinya. Dengan lihainya Ratu Syarifah Fatimah membujuk Sultan Zaenul Arifin agar dalam menyelesaikan masalah itu minta pertimbangan Kompeni di Batavia. Sebagai bahan pertimbangannya diajukan daftar calon putra mahkota. Selain Pangeran Gusti dan Pangeran Syarif, daftar calon putra mahkota itu berisi pula nama sejumlah pangeran muda, antara lain Raden Raja, Ratu Bagus Hasan Ratu Bagus Abuhir, Ratu Bagus Muhammad, Ratu Bagus Udin, Ratu Bagus Soleh, dan Ratu Bagus Fajar. Atas prakarsa Willem Hendrik van Ossenberg, seorang pejabat Kompeni di Banten, para pangeran muda itu dibawa ke Batavia guna dihadapkan kepada

Gubernur Jenderal Kompeni Gustaf W. Van Ossenberg, seorang pejabat Kompeni di Banten, para pangeran muda itu dibawa ke Batavia guna dihadapkan kepada Gubernur Jendral Kompeni Gustaf W. Van Imhoff. Gubernur Jendral menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada Kapten Brouwer. Keputusan yang dikeluarkan Kompeni adalah bahwa dengan alasan menyelamatkan jiwa Pangeran Gusti beserta pangeran-pangeran muda lainnya serta menjaga keamanan Banten, maka Pangeran Gusti ditangkap dan kemudian dibuang ke Sailan (1745) dan para pangeran muda lainnya ditahan di Batavia.[73]

Berhubung dengan sudah tidak adanya lagi para calon putra mahkota, maka tibalah saatnya bagi Syarifah Fatimah untuk mengajukan Pangeran Syarif keponakannya, sebagai calon putra mahkota. Atas bujukan permaisurinya dan desakan Kompeni, Sultan Zainal Arifin menyetujui Pangeran Syarif diangkat menjadi putra mahkota. Pelantikan Pangeran Syarif sebagai putra mahkota dilakukan tahun 1747 dengan disaksikan oleh utusan Kompeni.

Sesungguhnya banyak rakyat Banten, termasuk kalangan bangsawannya, tidak menyetujui terhadap pengangkatan Pangeran Syarif menjadi putra mahkota Banten, karena tindakan itu bertentangan dengan tradisi (ketentuan) yang telah berlaku berabad-abad lamanya di Banten, yaitu bahwa tahta kesultanan Banten diduduki oleh keturunan Maulana Hasanudin pendiri kesultanan ini. Sementara itu, sikap dan tindakan Syarifah Fatimah makin lama makin merajalela. Ia sering bertindak semena-mena, pegawai kraton yang tidak disukai dipecat tanpa sepengetahuan sultan, digantikan oleh saudara-saudaranya dan orang-orang yang dekat dengannya. Rupanya Syarifah Fatimah berani melakukan tindakan demikian, karena merasa dilindungi dan direstui oleh Kompeni. Tetapi sebaliknya kesabaran rakyat Banten ada batasnya.[74] Di mana-mana timbul gerakan rakyat yang menumpahkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap keadaan negara. Umumnya mereka menentang

terhadap tindakan-tindakan Syarifah Fatimah. Suasana masyarakat menjadi panas dan tidak menentu yang menjurus kepada timbulnya pemberontakan. Karena keadaan masyarakat telah sampai pada batas yang membahayakan, beberapa orang pangeran (keluarga keraton) memberanikan diri menghadap Sultan. Tanpa ragu-ragu lagi dan penuh keberanian mereka melaporkan keadaan masyarakat dan negara yang sesungguhnya berikut faktor-faktor yang menyebabkannya.

Mendapat laporan para pembesar Banten itu, Sultan Zainal Arifin menjadi kaget dan marah kepada permaisurinya. Beliau barulah sadar atas kekeliruannya dan kebusukan hati permaisurinya. Beliau merasa ditipu oleh permaisurinya dan oleh Kompeni Belanda. Karena itu beliau bermaksud untuk menyingkirkan permaisurinya dari lingkungan istana. Tetapi maksud itu telah terlambat. Kekuatan Syarifah Fatimah di dalam lingkungan pemerintahan Kesultanan Banten telah terlampau kuat. Kaki tangannya telah tersebar luas sehingga niat Sultan dapat segera diketahui oleh permaisuri.

Segera Fatimah meminta bantuan kepada Kompeni di Batavia. Ia melaporkan, bahwa Sultan kena penyakit gila dan suka menghasut rakyatnya agar melawan kepada Kompeni serta sekaligus membiayai pemberontakan itu.

Tak lama kemudian (1748) armada Kompeni tiba di pelabuhan Banten di bawah pimpinan Kapten Falck. Mereka menyatakan akan membawa Sultan ke Batavia untuk dirawat karena sakit. Padahal sebenarnya Sultan Zainal Arifin ditangkap dan dibawa ke Batavia dan selanjutnya dibuang ke Ambon.

Kepergian Sultan Zainal Arifin dari Banten membuka jalan bagi Syarifah Fatimah untuk dapat menguasai tahta Kesultanan Banten. Kesempatan itu memang tidak disia-siakan olehnya. Dengan dukungan dan restu Kompeni putra mahkota Pangeran Syarif diangkat menjadi Sultan Banten dengan gelar Pangeran Syarif Abdullah. Sedangkan Ratu Syarifah Fatimah bertindak

sebagai mangkubumi. Sebagai imbalan atas dukungannya, Kompeni memperoleh kebebasan menguasai pantai utara Jawa Barat dan daerah Sukabumi Selatan serta memperoleh ganti rugi dalam bentuk setengah dari hasil tambang emas di Tulang Bawang, produksi lada di Lampung, dan tanah di dekat Tangerang.[75]

Sesungguhnya sebagian besar pembesar dan rakyat Banten tidak setuju terhadap pengangkatan kedua orang tersebut di atas menjadi pimpinan tertinggi di Banten. Namun mereka tidak berani menyatakan secara terbuka ketidaksetujuannya itu, karena takut oleh serdadu-serdadu Kompeni yang makin banyak dan kuat di Banten yang berpusat di benteng Speelwijk. Perasaan tidak senang rakyat terhadap Syarifah Fatimah makin bertambah besar, setelah ternyata rakyat terus-menerus diperas tenaga dan hartanya, ditekan kebebasan hidupnya serta dirampas kemerdekaan negaranya. Kebencian rakyat Banten bukan hanya kepada Syarifah Fatimah, tetapi juga dan terutama tertuju kepada Kompeni yang mengendalikan dan menjadi majikan Syarifah Fatimah.

Akhirnya, habislah kesabaran rakyat Banten, kemudian mereka melancarkan perlawanan secara terbuka. Pecahnya perlawanan rakyat Banten secara terbuka dan besar-besaran terhadap penguasa yang dolim dan penjajah asing dimungkinkan karena munculnya dua orang pemimpin yang ditaati pengikutnya, yaitu Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa.

Ratu Bagus Buang tampil sebagai pemimpin kalangan bangsawan yang tidak senang terhadap campur tangan Kompeni di dalam urusan pemerintahan Kesultanan Banten dan tidak senang pula terhadap ulah Ratu Syarifah Fatimah yang banyak merugikan kalangan bangsawan dan rakyat Banten. Beliau sendiri adalah keponakan Sultan Zainal Arifin. Dengan demikian beliau menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Syarifah Fatimah membohongi dan menipu Sultan; bagaimana

dia memecat para bangsawan Banten sebagai pegawai kraton dan menggantikannya dengan anggota keluarganya; bagaimana Pangeran Gusti disingkirkan dari kraton dan Pangeran Syarif diangkat jadi putra mahkota. Ratu Bagus Buang menaruh kebencian yang sangat dalam terhadap Kompeni dan Ratu Syarifah Fatimah.[76]

Kiai Tapa pun sebenarnya masih berdaarah bangsawan Banten. Pada mulanya beliau bernama Pangeran Nagarajaya, masih bersaudara dengan Sultan Zainal Arifin hanya berlainan ibu. Sejak kecil beliau berminat untuk menekuni agama Islam dan gemar bertirakat. Sesudah dewasa dan berilmu banyak, beliau aktif bergerak dalam bidang pendidikan agama dengan membuka pesantren di beberapa tempat. Pesantren yang didirikannya mendapat kunjungan banyak anak-anak, pemuda, ataupun orang tua. Jika pesantren yang didirikannya telah maju, pesantren tersebut diserahkan kepada temannya atau muridnya. Beliau sendiri kemudian membuka pesantren baru di tempat lain.

Di Jakarta juga Kiai Tapa pernah mendirikan pesantren yang kemudian berkembang pesat sehingga menjadi pesantren besar. Santri-santrinya berdatangan dari berbagai daerah di Kepulauan Nusantara, bahkan orang asing pun banyak yang masuk Islam dan berguru agama kepada beliau. Menjelang usia lanjut beliau memilih tempat tinggal di daerah pedalaman yang jauh dari keramaian kota, tepatnya di Gunung Munara. Tempat itu terletak tidak jauh dari Tangerang. Di situ hingga sekarang masih terdapat kampung bekas kompleks pesantren Kiai Tapa yang disebut Kampung Keramat.[77]

Ketika telah bertempat tinggal di Gunung Munara inilah Kiai Tapa dihubungi oleh Ratu Bagus Buang untuk diajak melancarkan perlawanan terhadap pemerintah yang dolim dan kaum penjajah.

2.4.2 Jalannya Perlawanan

Pada mulanya Ratu Bagus Buang termasuk keluarga bangsawan Banten yang mendukung Sultan Banten dan bekerja di lingkungan kraton Banten. Akan tetapi karena beliau menyaksikan kedoliman, kemunafikan, dan pengkhianatan yang terjadi justru di lingkungan kraton, maka ia bersikap menjauhi kraton dan menentang kedoliman, kemunafikan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Syarifah Fatimah dan kawan-kawannya. Di luar kraton beliau menyusun kekuatan dengan mengumpulkan massa dan membentuk pasukan bersenjata. Mula-mula pasukan itu hanya kecil-kecilan saja, tetapi kemudian berkembang menjadi pasukan besar.

Ratu Bagus Buang membentuk kekautan bersenjata dimaksudkan untuk melawan kekuatan Syarifah Fatimah dan majikannya, yaitu Kompeni, yang telah merendahkan derajat Sultan Banten dan menghancurkan kemerdekaan dan kedaulatan Kesultanan Banten. Perlawanan itu bertujuan mengembalikan kewibawaan dan derajat Sultan Banten serta mengembalikan kemerdekaan dan kedaulatan Kesultanan Banten yang telah dirobek-robek oleh Kompeni.

Ratu Bagus Buang memilih sistem gerilya dalam cara perjuangannya mengingat jumlah pasukan yang masih sangat terbatas. Pada satu saat dilakukan serangan terhadap suatu kedudukan musuh, pada saat lain kedudukan musuh yang lain diserang. Setelah serangan dilakukan mereka mengundurkan diri. Akibat dari serangan itu jatuh korban di kedua belah pihak, tetapi tidak ada tanda-tnda pasukan Bagus Buang akan memenangkan perang. Suatu kali serangan pasukan Bagus Buang itu berhasil baik, pada waktu lain pasukan Syarifah Fatimah dan Kompeni yang memenangkan perang itu.

Meskipun telah berjuang selama sekitar tiga tahun, namun tujuan Bagus Buang belum juga tercapai. Salah satu sebabnya ialah jumlah pasukan masih sedikit dan belum terlatih baik

serta persenjataannya belum lengkap. Hal itu berarti dukungan rakyat Banten belum begitu banyak dibandingkan dengan jumlah seluruh rakyat Banten

Dalam rangka menambah jumlah pasukan dan dukungan rakyat, pada tahun 1750 Ratu Bagus Buang menemui Kiai Tapa di pesantrennya di Gunung Munara. Dalam pertemuan tersebut Ratu Bagus Buang menerangkan tentang sebab-sebab dan tujuannya melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Syarifah Fatimah dan Kompeni serta diakhiri oleh permohonan dan ajakan agar Kiai Tapa ikut terjun dalam perjuangan tersebut sampai kaum penjajah terusir dari bumi Banten dan pemerintah yang dolim dan batil digantikan oleh pemerintah adil. Keikutsertaan dan dukungan Kiai Tapa sangat diperlukan, karena beliau mempunyai pengaruh besar dan pengikut banyak di dalam masyarakat Banten dan sekitarnya. Bahkan beliau dianggap keramat oleh sementara kalangan. Ajakan Ratu Bagus Buang itu disambut hangat, karena beliau pun sudah mengetahui dan tidak setuju terhadap adanya kebatilan dan kedoliman di negerinya. Beliau menyerukan *jihad fisabilillah* terhadap kafir Belanda.

Langkah pertama yang diambil oleh Kiai Tapa adalah mengadakan mobilisasi umum melalui pembentukan pasukan di daerah-daerah. Pesantren-pesantren yang telah dibinanya dan pesantren-pesantren yang didirikan oleh murid-muridnya menjadi basis kekuatan pasukan Kiai Tapa. Dalam pada itu, kiai-kiai dan santri-santri yang telah berguru pada beliau banyak yang bertindak sebagai penggerak dan pemimpin pasukan di daerahnya masing-masing. Usaha ini mendapat sambutan baik dari rakyat Banten, terutama yang ada di desa-desa. Sementara Ratu Bagus Buang sendiri lebih ditujukan untuk membina dan menyusun kekuatan di kalangan bangsawan Banten.

Gunung Munara dijadikan markas besar pasukan Kiai Tapa. Di situlah dibicarakan tentang dasar tujuan perjuangan, taktik dan strategi peperangan, organisasi perjuangan, dan lain-lain.

Di tempat itu pula Ratu Bagus Buang mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Kiai Tapa.

Pada bulan Oktober 1750 Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa menggerakkan pasukan mereka. Dari Gunung Munara pasukan itu digerakkan menuju Surosowan, ibukota Banten. Tujuannya ialah membersihkan Banten dari anasir-anasir dan kekuatan Kompeni serta Ratu Syarifah Fatimah. Serangan itu dihadang oleh pasukan yang setia kepada Pangeran Syarif Abdullah dan Syarifah Fatimah serta pasukan Kompeni. Terjadilah pertempuran hebat berulangkali di sekitar ibukota. Pada beberapa sektor pertempuran gabungan pasukan Kompeni dan Fatimah menderita kekalahan. Karena itu pertahanan kota Surosowan semakin terdesak.

Ternyata serangan-serangan pasukan Kiai Tapa berhasil melumpuhkan beberapa tempat pertahanan kota Surosowan. Pasukan pertahanan kota Surosowan hampir tidak berkutik menghadapi serangan-serangan kaum perlawanan, sehingga jatuhnya ibukota Banten tinggal menunggu waktu saja. Namun dalam saat yang kritis itu tiba-tiba datang bantuan pasukan Kompeni dalam jumlah besar yang didatangkan dari Batavia lewat jalan laut. Terhindarlah untuk sementara kota Surosowan dari kejatuhan, karena pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang melakukan gerak mundur untuk mengatur siasat baru.

Selain mengatur siasat serangan yang akan datang, Kiai Tapa dan Bagus Buang mencari informasi mengenai keadaan di dalam benteng Speelwijk yang merupakan markas besar pasukan Kompeni. Benteng tersebut dilindungi oleh tembok yang tebal dan tinggi sehingga tidak mungkin dapat didobrak orang. Dalam pada itu di beberapa sudut benteng itu dilindungi oleh sejumlah meriam yang dapat menghancurkan musuh yang akan memasuki benteng. Kiai Tapa dan Bagus Buang berhasil mendekati Tisnanagara, seorang penjaga pintu gerbang benteng itu. Karena tugasnya ia sering keluar masuk benteng untuk mengangkut ba-

rang-barang, terutama bahan makanan, bagi keperluan para serdadu Kompeni yang ada di dalamnya. Karena itu ia mengetahui dengan baik seluk-beluk keadaan di dalam benteng itu. Ternyata Tisnanagara mau membantu para pejuang rakyat Banten, rupanya ia sendiri menaruh perasaan benci kepada orang-orang Belanda, walaupun menjadi pegawainya. Ia membukakan semua rahasia benteng Speelwijk kepada pengikut Kiai Tapa dan Bagus Buang, baik mengenai kekuatan pasukannya, persenjataan, gudang mesiu, lokasi pertahanan, fasilitas-fasilitas hidup para penghuninya. Tisnanagawa sendiri kemudian ditangkap atas perintah Kapten Philipe, Komandan Benteng Speelwijk, karena dicurigai menjadi mata-mata musuh. Ia dipenjarakan di Batavia dan kemudian dibuang ke Pulau Edam.

Sebulan kemudian pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang melancarkan serangan lagi ke ibukota Banten. Serangan itu dilakukan secara besar-besaran ke berbagai sudut kota yang melibatkan hampir seluruh pasukan perlawanan. Serdadu-serdadu Kompeni dan pasukan Syarifah Fatimah tidak mampu menahan serangan itu. Mereka mengundurkan diri dari basis-basis pertahanannya. Tentara Kompeni terus-menerus didesak mundur sampai terpaksa bertahan di basis pertahanan terakhir, yaitu benteng Speelwijk. Di benteng inilah para serdadu Kompeni mempertahankan diri, karena menurut anggapan mereka pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang tidak akan mampu mendobrak pertahanan mereka yang kokoh itu.

Berhubung dengan rahasia benteng Speelwijk telah ada di tangan pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang, maka mundurnya semua serdadu Kumpeni ke benteng itu sangat memudahkan pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang untuk menaklukkan mereka. Segera benteng itu dikepung dan semua fasilitas hidup para penghuninya diblokade oleh pasukan Kiai Tapa. Saluran-saluran air yang masuk (air bersih) dan yang keluar (air kotor) benteng dirusakkan. Akibatnya serdadu-serdadu Kompeni yang berada di dalam benteng itu mengalami kekurangan air untuk minum

dan keperluan hidup lainnya, sementara air kotor tetap tergenang di dalam benteng. Keadaan itu menyebabkan banyak serdadu Kompeni yang meninggal karena kehausan dan kelaparan. Dalam keadaan sulit demikian serangan pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang pun terjadi sehingga pertahanan benteng itu menjadi rapuh. Dalam pertempuran yang terjadi, Kapten Philipe tewas. Akhirnya serdadu-serdadu Kompeni yang ada di dalam benteng itu menyerah kepada pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang. Benteng Speelwijk yang dibanggakan oleh Kompeni itu akhirnya jatuh juga ke tangan pasukan Kiai Tapa dan Bagus Buang setelah dikepung diblokade selama dua minggu. Dengan sendirinya Surosowan pun dikuasai mereka. Pangeran Syarif Abdullah dan Syarifah Fatimah berada di bawah pengawasan mereka.[78]

Selanjutnya Kiai Tapa membagi dua pasukannya. Sebagian pasukan dengan pimpinan oleh Bagus Buang ditempatkan di Surosowan guna mempertahankan ibukota Kesultanan Banten. Sebagian lagi dalam jumlah lebih besar, yang dipimpin oleh Kiai Tapa bergerak lagi untuk melakukan serangan ke pusat kedudukan Kompeni di Batavia. Pasukan perlawanan Banten pimpinan Kiai Tapa dibagi dua lagi berdasarkan rute perjalanan menuju Jakarta. Satu kelompok menempuh jalan lwat Bogor, sedangkan kelompok lain mengambil jalan melalui Tangerang. Kedua kelompok pasukan itu akan bertemu di daerah perbukitan Tanah Abang sebelum melancarkan serangan bersama terhadap benteng Kompeni di Batavia.

Dalam perjalanan menuju Jakarta kedua pasukan Kiai Tapa itu melancarkan serangan terhadap benteng-benteng Kompeni dan tempat-tempat kedudukan serdadu Kompeni yang dilaluinya. Dalam hal itu pasukan Kiai Tapa berhasil menguasai benteng-benteng *De Kwal* di Tangerang, *Drechterland* di Leuwiliang (Bogor), *Westergo* di Ciampea (Bogor), dan benteng-benteng kecil serta tempat kedudukan serdadu Kompeni di sepanjang Sungai Ciliwung.

Pada waktu Kompeni sedang menderita berbagai kekalahan, dan pasukan Kiai Tapa sedang dalam perjalanan menuju Jakarta, terjadi perubahan dalam kepemimpinan Kompeni. Jabatan Gubernur Jendral Kompeni diserah-terimakan dari van Imhoff (1743–1750) kepada Jacob Mossel pada bulan terakhir tahun 1750. Gubernur Jendral J. Mossel mengambil kebijaksanaan lain dalam menghadapi kasus perlawanan di Banten. Ia berpendapat bahwa timbulnya perlawanan tersebut disebabkan oleh karena Banten diperintah oleh orang yang bukan keturunan Sultan-Sultan Banten sebelumnya. Oleh karena itu untuk menghentikan perlawanan itu terlebih dahulu harus menyingkirkan Pangeran Syarif Abdullah dan Syarifah Fatimah dari Banten, kemudian menempatkan keturunan bangsawan Banten, tentu saja dipilih yang setia kepada Kompeni, pada kedudukan sultan Banten, walaupun Kompeni akan kehilangan keuntungan berupa penerimaan lada bebas pajak setiap tahun dari Banten.[79]

Segera Gubernur Jendral J. Mossel mengusulkan gencatan senjata kepada Kiai Tapa, disertai dengan usul rancangan perjanjian. Setelah diadakan tawar-menawar, akhirnya dicapai kata sepakat untuk menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu berisi :

(1) Fatimah bersama-sama dengan saudara-saudaranya diusir dari Kesultanan Banten, demikian pula pengikut-pengikutnya

(2) Memanggil kembali Pangeran Gusti dari tempat pembuangannya dan mengembalikan kepada tahtanya

(3) Sebelum Pangeran Gusti datang, Pangeran Adi Santika diangkat sebagai pejabat Sultan Banten

(4) Blokade Banten dari laut dihentikan dengan segera.[80]

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian itu Gubernur Jendral J. Mossel mengeluarkan perintah kepada Falck, agar membawa Fatimah dan saudara-saudaranya ke Jakarta, kemudian mereka

dibuang ke Pulau Edam di Teluk Jakarta.[81] Pangeran Adi Santika, paman Pangeran Gusti, pun diangkat menjadi pejabat Sultan Banten.

Ternyata masa gencatatan senjata itu digunakan pula oleh Kompeni untuk memperkuat diri. Mereka mendatangkan pasukan baru dari negerinya dan dari Maluku.

Melihat kenyataan tersebut Kiai Tapa segera bertindak. Beliau menghimpun kembali kekuatan militernya di Gunung Munara. Perjanjian perdamaian dibatalkan. Kiai Tapa berhasil mengumpulkan sekitar 7.000 orang prajurit. Pasukan itu serentak digerakkan menuju Jakarta. Pada bulan Juni 1751 dimulailah penyerangan ke tempat kedudukan dan benteng-benteng Kompeni. Serangan mereka berhasil menerobos garis penjagaan Kompeni. Desa-desa yang digunakan basis pertahanan Kompeni dibakar dan perkebunan tebu milik Belanda di sepanjang Sungai Cisadane dihancurkan. Serangan itu sangat mengkhawatirkan Mossel. Segera ia memerintahkan Letnan Kolonel Ossenberch untuk memukul musuhnya sebelum tiba di Batavia.[82] Tetapi perintah tak dapat dilaksanakan dengan baik, karena kekuatan pasukan Kiai Tapa lebih unggul dari pasukan yang dipimpin Ossenberch. Ossenberch sendiri kemudian melarikan diri ke Bogor.

Pada tanggal 1 Juli 1751 Kiai Tapa dan pasukannya telah berada di luar batas kota Batavia. Mereka mengadakan pertemuan di daerah perbukitan Tanah Abang yang waktu itu merupakan kebun tebu milik orang Cina untuk membicarakan siasat dan rencana penyerangan ke benteng-benteng Kompeni.

Sesuai dengan siasat yang disetujui bersama, pasukan Kiai Tapa dibagi dalam empat kelompok pasukan. Tiap-tiap kelompok pasukan dipimpin oleh seorang komandan pasukan. Kiai Tapa bertindak sebagai pemimpin umum. Tiap kelompok pasukan menyerang benteng Kompeni dari satu jurusan. Kelompok yang melakukan serangan dari arah barat mengambil jalan me-

lalui Tanah Abang, dari arah utara melalui Rawa Angke, dari arah selatan melalui Cihideng, dan dari arah timur melalui Kampung Kramat. Kiai Tapa sendiri telah mengenal baik seluk-beluk daerah kota Jakarta dan sekitarnya, karena pernah menetap di Kramat dalam jangka waktu cukup lama.

Pengepungan dan serangan pasukan Banten pimpinan Kiai Tapa yang dilancarkan dari segala arah itu benar-benar menyusahkan Kompeni. Kompeni menghadapi serangan itu dengan perasaan dan pikiran kacau balau. Apalagi pada waktu itu Kompeni sedang ikut menyelesaikan kemelut yang terjadi di Yogyakarta. Van Deventer mengatakan, bahwa pada waktu itu orang Belanda betul-betul terjepit dan kedudukannya kritis. Hal seperti itu belum pernah mereka alamami sebelumnya, bahkan serangan tentara Mataram tahun 1629 pun tidak begitu membahayakan kedudukan Kompeni di Batavia.[83] Sementara P.J. Veth mengakui, bahwa serangan pasukan Kiai Tapa itu merupakan serangan paling hebat selama pendudukan Belanda di Indonesia. Sejak tahun 1628 benteng Belanda itu belum pernah terancam sedemikian hebatnya seperti ketika serangan Kiai Tapa tahun 1751. Pasukan Kiai Tapa merayap di bawah tembok benteng tanpa gentar sedikit pun, walaupun benteng itu dilengkapi dengan segala macam meriam. Prajurit-prajurit Kiai Tapa tidak takut melihat meriam-meriam itu. Mereka berusaha membuat satu terowongan di bawah benteng untuk jalan masuk ke dalam benteng. Orang Belanda yang berada di dalam kota tidak sempat mengungsi ke dalam benteng, Tanpa ampun mereka dibunuh oleh prajurit-prajurit Kiai Tapa.[84]

Sementara Kiai Tapa mendapat kemenangan-kemenangan di Batavia, Ratu Bagus Buang bersama pasukannya yang masih tercecer di Pontang, Tanara, dan Caringin mendapat serangan yang mendadak dari Belanda yang dipimpin Convert. Pasukan Ratu Bagus Buang sempat menyelamatkan diri ke pedalaman Pandeglang. Ratu Bagus Buang terus menerus dikejar oleh Convert.[85]

Berita Ratu Bagus Buang dikejar-kejar oleh pasukan Convert didengar oleh Kiai Tapa melalui kurirnya. Kiai Tapa merasa khawatir mendengar berita tersebut, kemudian beliau bersama pasukannya berangkat dari Batavia menuju Pandeglang. Dengan susah payah Kiai Tapa mencari Bagus Buang dan baru dapat bertemu di Gunung Munara.

Karena Gunung Munara selalu dipakai tempat pertemuan kaum gerilya, Letnan Kolonel van Ossenberch mengadakan serangan yang cukup besar ke Gunung Munara. Kali ini pasukan Belanda tidak begitu mendapat perlawanan. Pasukan Kiai Tapa masuk ke daerah Gunung Salak.

Pada bulan Januari 1752 pasukan Kiai Tapa sudah berada kembali di sekitar Pontang dengan maksud merebut kembali Pontang dan Caringin. Dengan tentara sejumlah 800 orang Kiai Tapa menyerang Belanda di Tanara, Pontang dan Caringin. Semua kubu pertahanan Belanda di tempat itu habis dibakar. Letnan Kolonel Van Ossenberch mengeluh tak berdaya menghadapi gerilyawan Banten, yang kadang-kadang muncul di kota, kadang-kadang bergerak di pesisir atau di pedalaman. Oleh karena itu pada tanggal 13 Maret 1752 Van Ossenberch mengeluarkan pengumuman, bahwa Pangeran Gusti akan dijadikan Sultan Sepuh sedangkan Pangeran Adi Santika diangkat kembali menjadi Sultan Banten. Kepada para gerilyawan yang menyerahkan diri akan diberikan pengampunan.

Pengumuman tersebut tidak diperdulikan oleh Kiai Tapa maupun oleh Ratu Bagus Buang dan pengikutnya, karena biasanya hanyalah merupakan cara-cara penipuan yang sering terjadi. Pengumuman itu hanyalah suatu cara yang menjurus ke arah pengkhianatan terhadap para pemimpin Banten.

Pada tanggal 14 April pasukan Kiai Tapa yang berjumlah sekitar 4.000 orang dikerahkan untuk menyerbu ibukota Banten. Pertempuran terjadi di sekitar Serang. Pasukan Kiai Tapa berhadapan dengan pasukan Banten yang setia pada Sultan dan

pasukan Belanda yang lengkap persenjataannya. Pertempuran berlangsung siang malam selama tiga bulan. Korban dari kedua belah pihak cukup banyak jumlahnya. Keunggulan persenjataan Belanda memungkinkan mereka dapat menguasai daerah Serang dan pasukan Kiai Tapa terus terdesak sampai jauh ke selatan ke perbatasan Jasinga.

Di Jasinga Kiai Tapa berusaha menghimpun sisa-sisa pasukannya yang setia mendampinginya. Ia menyadarinya kekuatan dan kemampuan Belanda yang lengkap dengan senjata apinya. Belanda tidak mungkin dapat diusir dengan cara peperangan secara lokal, tetapi harus dikepung dari setiap daerah, karena Belanda berada baik di darat maupun di lautan. Kiai Tapa harus berusaha menambah kekuatan dengan mengadakan hubungan dan kerjasama dengan daerah lain Maka diputuskannyalah untuk berangkat ke Jawa Tengah bergabung dengan orang-orang Mataram yang sedang mengadakan gerilya di Pati, Jombang, dan sisa pasukan Cakraningrat yang bergerilya di Gresik, Bojonegoro.

Sambil lewat menuju Jawa Tengah pasukan Kiai Tapa menghancurkan tangsi-tangsi Belanda yang ada di Cipanas dan Cianjur. Di sekitar Bandung pasukan Kiai Tapa dicegat oleh tentara Belanda dan terjadilah pertempuran sengit. Taktik perang gerilya Kiai Tapa cukup merepotkan Kompeni. Tidak sedikit kerugian Kompeni, selain barang-barang banyak yang dibakar, tentara Belanda pun banyak yang tewas.

Dengan melalui daerah pegunungan dan perkampungan sampailah Kiai Tapa di Banyumas dan terus ke Bagelen bergabung dengan gerilyaan Mataram. Perjuangannya tidak hanya sampai di Jawa Tengah, tetapi terus ke Jawa Timur membantu anak buah Pangeran Cakraningrat yang masih bergerilya di Gresik dan Madura.

Petualangan Kiai Tapa di Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan manifestasi dari sikap dan pandangannya yang

menentang kehadiran Kompeni Belanda di tanah airnya. Perjuangan menentang kekuasaan orang asing di tanah airnya yang melakukan penindasan danpemerasan terhadap penduduknya telah mendorong Kiai Tapa mempunyai perasaan senasib-sepenanggungan dan mendorong lahirnya kepentingan bersama dengan para pejuang yang juga menentang kekuasaan dolim dan kekuasaan asing di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Setelah beberapa waktu lamanya mengadakan perjuangan menentang kekuatan asing dan kaki tangannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama gerilyawan-gerilyawan setempat, akhirnya Kiai Tapa pulang kembali ke tanah tumpah darahnya. Usia yang telah lanjut merupakan faktor utama yang mendorong beliau dalam mengambil keputusan untuk kembali ke Jawa Barat. Namun Kiai Tapa tidak kembali ke Banten, karena beliau tidak rela melihat tanah airnya dikoyak-koyak oleh Kompeni dan juga pertimbangan keamanan mempengaruhi keputusan itu. Beliau memilih Cianjur sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya.

Berakhirnya perjuangan Kiai Tapa tidak berarti, bahwa di Banten dan di Jawa Barat pada umumnya kemudian menjadi aman tenteram dan tidak muncul lagi perlawanan terhadap Kompeni – Belanda. Dalam periode berikutnya seperti akan dibicarakan di belakang, perlawanan rakyat Jawa Barat terhadap kaum kolonialis dan imperialis terus-menerus berlangsung. Generasi-generasi sesudah Kiai Tapa mempunyai kehendak pula agar daerah dan bangsanya bebas dari cengkraman kekuasaan asing. Bahkan perjuangan Kiai Tapa hanyalah merupakan salah satu tahap dan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme, imperialisme, kebatilan, dan ketidak-adilan.

CATATAN

[1] Hoesein Djajadiningrat, *Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten,* Disertasi, Haarlem, 1913, hal. 132 – 134. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1579 Masehi.

Dalam tradisi Sunda dan kemudian diambil oleh pengarang buku-buku Sejarah Indonesia untuk kerajaan ini menggunakan nama Pajajaran. Tentang masalah ini, lihat: Ayatrohaedi. Pajajaran atau Sunda? *Arkeologi,* I, 4 Maret 1978, Jakarta, hal. 46–52.

[2] Walaupun menurut sumber tradisi runtuhnya Kerajaan Majapahit terjadi pada tahun 1478 Masehi, namun nyatanya pada awal abad ke-16 Masehi kekuasaan Hindu di Jawa Timur masih ada sebagai kesatuan dari Majapahit yang memang sedang mengalami proses kehancuran. Lihat: Sartono Kartodirdjo, "Segi-segi Strukturil Historiografi Indonesia", *Lembaran Sedjarah,* Yogyakarta, 1968, hal. 6. Hasan Djafar, *Girindrawarddhana Beberapa Masalah Majapahit Akhir,* Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, Jakarta, 1978. hal. 91–97.

[3] Armando Cortesao. *The Suma Oriental of Toma Pires,* The Hakluyt Society, London, 1940, hal. 166–173. Tome Piers ikut serta dalam rombongan orang Portugis mengunjungi kota-

kota pelabuhan pesisir utara Pulau Jawa pada bulan Maret – Juni 1513. Rombongan tersebut membawa empat buah kapal.

[4] J. Hageman, Geschiedenis der Soendalanden, *TBC*, XVI, 1867, hal. 211. Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal. 76.

[5] Atja dan Saleh Danasasmita, *Sanghyang Siksa Kandang Karesian*, Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981, hal. 42 – 46.

[6] Moh. Amir Sutaarga, *Prabu Siliwangi*, Panitia Museum Sedjarah Tugu Nasional, Djakarta, 1964, hal. 27.

[7] J. Hageman, "Geschiedenis der Soendalandes," *TBC*, XVI, 1867, hal. 210. Ternyata jumlah penduduk tersebut cocok dengan yang diungkapkan oleh naskah *Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara* (parwa III sarga 4, hal. 138) yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta di Cirebon pada akhir abad ke-17 Masehi, tepatnya berjumlah 48.271 jiwa. Jumlah penduduk tersebut sebagai hasil pencatatan jiwa yang dilakukan atas perintah Sultan Trenggono dari Demak pada tahun 1521.

[8] Armando Cortesao, *Op. Cit.*, hal. 173.

[9] Loc. Cit.

[10] Atja, *Tjarita Purwaka, Tjaruban Nagari*, Ikatan Karyawan Museum, Djakarta, 1975, hal.   Naskahnya disusun oleh Pangeran Arya Carbon pada tahun 1720. Keterangannya telah diperkuat oleh naskah yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta pada akhir abad ke-17 Masehi.

[11] Armando Cortesao, *Op. Cit.*, hal. 173.

[12] Dharmono Hardjowidjojo, *Benarkah orang-orang Portugis Melancarkan Perang Agama Terhadap Umat Islam Selama Kehadiran Mereka di Indonesia?* Prasaran Dalam Seminar Sejarah Nasional II, Jogjakarta, 1970, hal. 4.

[13] Ibid., *hal. 4.*

[14] J. Hageman, *Op. Cit.*, hal. 210. Menurut naskah *Pustaka Nagara Kretabhumi* (Parwa I sarga 2, hal. 51 – 55) yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta di Cirebon pada akhir abad ke-17 Masehi, pimpinan utusan raja Sunda (Samiam) itu ialah Ratu Sangiang atau Sang Prabu Surawisa.

[15] Hasan Djapar, *Op. Cit.*, hal. 88 – 90.

[16] Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal 73 – 74.

[17] Armando Cortesao, *Op. Cit.*, hal. 172 – 173.

[18] Atja dan Saleh Danasasmita, *Carita Parahiyangan*, Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, Bandung, 1981, hal. 36 – 38.

[19] Atja, *Op. Cit.*, 1975, hal. 7 – 9.

[20] Hoesein Djajadiningrat, *Op, Cit.*, hal. 74 – 75

[21] *Ibid.*, hal. 75.

[22] Atja, *Op. Cit.*, 1975, hal. 13 – 16

[23] Atja, *Op. Cit.*, 1975, hal. 14 – 17

[24] Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal. 74.

[25] *Loc. Cit.*,

[26] *Loc. Cit.*,

[27] *Ibid.*, hal. 75, Djuharin, *Op. Cit.*, hal. 54 – 56.

[28] Edi S. Ekadjati, "Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat, *Sejarah Jawa Barat,* Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat, Bandung, 1975, hal. 98–99, 103.

[29] J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society*, 2nd edition, Sumur Bandung, Bandung, 1960, hal. 112, 142-144.

[30] Bernard H.M. Vlekke, *Nusantara* (Sejarah Indonesia), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1967, hal. 140–141.

[31] H.J. De Graaf, *De Regering van Sultan Agung, vorst van Mataram* (1613 – 1645), VKI, XXIII, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1956, hal. 26-52, 77-98, 135-143.

[32] *Ibid.*, hal. 53 – 56.

[33] *Ibid.*, hal. 56 – 57

[34] *Ibid.*, hal. 58 – 60

[35] *Ibid.*, hal. 60 – 63

[36] *Ibid.*, hal. 64 – 65

[37] *Ibid.*, hal. 67 –76

[38] *Ibid.*, hal. 144 – 145

[39] Jan Pieterz Coen, *Bescheiden Omtrent zijn bedrijf in Indie*, VII – 1, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1952, hal. 534,537.

[40] *Babad Tanah Djawi,* Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1941, hal. 135–139.

[41] *Dagh-Register Anno 1624 – 1629,* 1896, hal. 148. Catatan harian tanggal 1 Mei 1625, soal ini banyak dikemukakan dalam naskah-naskah yang berasal dari wilayah Priangan, lihat: Edi S. Ekadjati, *Cerita Dipati Ukur*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1979, hal. 83 – 211.

[42] Jan Pietersz Coen, *Op. Cit.*, V, 1923, hal. 92, P.A. Leupe, "Beschrijving der kaart, voorstellende de belegering van de stad Batavia 1628." *BKI,* V, 1859, hal. 310. Pangeran Arya Carbon, *Op. Cit.*, hal.

Menurut naskah ini, pasukan Sumedang berkumpul dahulu di Cirebon sebelum berangkat menuju Jakarta. Naskah-naskah Sunda yang mengungkapkan keikut-sertaan pasukan dari wilayah Priangan dalam pengepungan kota Batavia telah dibahas dan diterbitkan, lihat: Edi S, Ekadjati, *Op. Cit.*, 1979, hal. 83–211.

[43] Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal. 47–48.

[44] P.A. Leupe, "Verhaal van de belegeringhe der stadt Batavia in't coninckrijck van Jaccatra, Anno 1628, den 22 Augustij", *BKI*, III, 1855, hal. 289–290.

[45] H.J. De Graaf, *Op. Cit.*, hal. 145.

[46] *Ibid.*, hal. 146.

[47] *Babad Tanah Djawi*, hal. 136.

[48] P.A. Leupe, *Op. Cit.*, 1855, hal. 289–291. P.A. Leupe, *Op. Cit.*, 1859, hal. 310–311.

[49] Sumber yang digunakan sampai selesai pengepungan kota Batavia ke-2 adalah H.J. De Graaf, *Op. Cit.*, hal. 147–163. Jan Pietersz Coen, *Op. Cit.*, II, 1923. VI, 1953, hal. 416, 418, 421, 423, 434, 436, 442. P.A. Leupe, *Op. Cit.*, 1855, hal. 291–312. Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, 1913, hal. 46–48, 168–171. J.K. De Jonge, *De Opkomst van het Nederlandsch—Gezag in Oost—Indie*, V,, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1870.

[50] Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal. 50–51. Uka Tjandrasasmita, *Sultan Ageng Tirtayasa*, Proyek IDSN, Departemen P & K., Jakarta, 1981, hal. 1–3.

[51] Uka Candrasasmita, *Op. Cit.*, hal. 25. Halwany Michrob, *Sekitar Ekskavasi Pemugaran Arkeologi dan Persiapan Site Museum Banten Lama*, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Jakarta, Unit II Banten, 1979, hal. 23–24.

[52] *Ibid.*, hal. 24–25.

[53] Uka Tjandrasasmita, *Op. Cit.*, hal. 25–27.

[54] J.C. van Leur, *Op. Cit.*, hal. 3–4, 112–115, 141–142.

[55] *Loc. Cit.*

[56] Nama-nama tersebut itu hingga sekarang masih dikenal dan digunakan di sekitar lokasi desa Banten, bekas ibukota Surosowan dulu.

[57] Lihat, Setiawaty Sulaeman, *A mission of two ambassadors from Banten to London 1681*, Yayasan Kanisius, 1975. Utusannya bernama Ngabehi Naya Wirapraja dan Ngabehi Jaya Sedana.

[58]

[59] Uka Tjandrasasmita, *Op. Cit.*, hal. 5–6.

[60] G.W.J. Drewes, "Sech Joesoef Makassar", *Djawa*, 6e jaargang, 2, 1926, hal. 83–88. Tudjimah, *Sjech Jusuf*, prasaran dalam Seminar Sejarah Nasional II, Yogyakarta, 1970.

[61] Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal. 66.

[62] Tentang peperangan antara Banten dengan Batavia dituturkan dalam naskah *Sejarah Banten* secara terperinci sebagai bagian akhir isi naskah tersebut. Lihat: Hoesein Djajadiningrat, *Op. Cit.*, hal. 67–72. Ternyata apa yang diceritakan dalam Sejarah Banten itu cocok dengan sumber-sumber yang berasal dari orang Belanda yang ditulis pada zamannya. Lihat : Uka Tjandrasasmita, *Op. Cit.*, hal. 12–24.

[63] Dari 12 pasal perjanjian perdamaian itu antara lain mengungkapkan :

a. Penduduk dari Jakarta yang memasuki daerah Banten akan dikembalikan oleh Sultan Banten, dan sebaliknya.

b. Permusuhan antara Banten dan Jakarta, baik di darat maupun di laut akan dihentikan, sementara perdamaian antara kedua pihak akan dipelihara dan dijaga agar berlaku terus-menerus.

c. Kompeni akan menempatkan wakilnya lagi di Banten dan bangunan yang ditempati wakil Kompeni itu tidak dibayar dan disewa.

b. Batas daerah antara Banten dan Batavia ditetapkan ialah Sungai Untung Jawa mulai dari laut hingga darat melalui tanah pegunungan.

c. Orang Banten tidak diperkenankan memasuki daerah Batavia guna memelihara keamanan dan ketertiban.

[64] Uka Tjandrasasmita, *Op. Cit.*, hal. 34–50. Dalam melaksanakan taktik adu-domba W. Caeff, wakil Kompeni di Banten memainkan peranan sangat penting. Ia mengirim laporan secara teratur kepada Gubernur Jenderal Kompeni di Batavia setiap ada perkembangan baru, antara lain laporan tertanggal 24 Februari dan 12 Maret 1671.

[65] ***Dagh-Resgister Anno 1678***, hal. 738–739, ***Dagh-Register Anno 1679***, hal. 525. ***Dagh-Register Anno 1680***, hal. 105–110.

[66] ***Dagh-Register Anno***, 1678, hal. 58.

[67] Bernard H.M. Vlekke, *Op. Cit.*, hal. 178–179.

[68] ***Dagh-Register Anno 1681***, hal. 46. Lihat: H.J. De Graaf, ***De Regerring van Sunan Mangkurat I, II***, UKI, 39, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1962.

[69] Uka Tjandrasasmita, *Op. Cit.*, hal. 56–58.

[70] Bernard H.M. Vlekke, *Op. Cit.*, hal. 217.

[71] Tb. Haruna Djaja, ***Pakem Banten***, (naskah dan catatan yang dikumpulkan olehnya).

[72] Halwany Michrob, *Op. Cit.*, hal. 14.

[73] Mucharam, "kiai Tapa"Kiai Tapa", ***Sari*** (majalah berbahasa Sunda), V, 68, September 1966.

[74] *Loc. Cit.*, Bersumberkan P.J. Veth, ***Java***, tweede druk,

Haarlem, 1898.

[75] *Loc. Cit.*

[76] Aju Murniati Suhada, *Pemberontakan Kiai Tapa (1750–1752).* Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung 1967, hal. 20.

[77] Mucharam, *Op. Cit.*, hal. 20. H.J. De Graaf, *Geschiedenis van Indonesia*, van Hoeve, 's-Gravenhage–Bandung, 1949, hal. 270.

[78] Aju Murniati Suhada, *Op. Cit.*, hal. 24–25.

[79] H.J. De Graaf, *Op. Cit.*, 1949, hal. 270.

[80] Mucharam, *Op. Cit.*, hal. 21.

[81] P.J. Veth, *Op. Cit.*, 1898, hal. 188.

[82] *Loc. Cit.*

[83] M.L. Van Deventer, *Geschiedenis der Nederlanders of Java, II*, Haarlem, 1887, hal. 162.

[84] Mucharam, *Op. Cit.*, hal. 22.

[85] Aju Murniati Suhada, *Op. Cit.*, hal. 30–33.

BAB III PERLAWANAN DALAM ABAD KE- 19

3.1 Perlawanan Bagus Rangin (1802–1818)

Sepeninggal Pangeran Girilaya kesultanan Cirebon dibagi 3 yang masing-masing diperintah oleh putra-putranya, yaitu antara Pangeran Martawijaya (Panembahan Sepuh), Pangeran Kartawijaya (Panembahan Anom), dan Pangeran Wangsakerta (Panembahan Cirebon). Kemudian pada tahun 1729 Panembahan Sepuh (Pangeran Martawijaya) membagi daerah kesultanannya menjadi dua yang diberikan kepada dua orang putranya, yaitu Sultan Sepuh dan Sultan Cirebon. Pangeran Kartawijaya (Panembahan Anom) sebagai putra kedua Panembahan Ratu (Pangeran Girilaya) diganti oleh putranya, yaitu Sultan Anom. Selanjutnya putra bungsu Panembahan Ratu, yang bergelar Panembahan Cirebon (Pangeran Wangsakerta) pada tahun 1773 wafat. Karena beliau tidak berputra, daerah kekuasaannya diberikan (diwariskan) kepada Sultan Sepuh dan Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Dengan terjadinya pembagian wilayah kesultanan Cirebon itu, maka pada akhir abad ke-18 di Cirebon terdapat empat kesultanan yang masing-masing dikuasai oleh Sultan Sepuh, Sultan Cirebon, Sultan Anom dan Panembahan Cirebon. Proses pembagian kesultanan di Cirebon itu tidak lepas dari campur tangan Kompeni ke dalam pemerintahan kesultanan di

Cirebon. Dengan politik adu-domba Kompeni memecah-belahkan persatuan Kesultanan Cirebon dalam daerah Cirebon dimulai tahun 1681, sejak ditandatangani perjanjian antara Kompeni dan Cirebon pada tanggal 4 Januari.

Pada tahun 1768 penguasa Kompeni di Batavia memecat Sultan Cirebon dengan tuduhan melakukan korupsi serta berkelakuan jahat. Daerahnya kemudian diserahkan oleh Belanda kepada Sultan Sepuh, sedangkan Sultan Cirebon sendiri dibuang ke Maluku.[1] Dengan adanya tindakan Belanda itu, kesultanan Cirebon hanya dikuasai oleh Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Nasib dua kesultanan itu dalam mengendalikan pemerintahannya pada akhirnya hanya tergantung kepada penguasa Kompeni di Batavia.

Pada tahun 1798 Sultan Kanoman (Sultan Anom) wafat. Rakyat lebih condong untuk mengharapkan Raja Kanoman (Pangeran Surianagara) sebagai penggantinya. Akan tetapi harapan rakyat itu ditolak oleh Belanda, bahkan pihak Belanda sengaja mengangkat Pangeran Surantaka, yang tidak disenangi rakyat. Pangeran Surianagara (Raja Kanoman) yang dicintai rakyat Cirebon oleh Belanda diusir dari keraton bersama dua orang saudaranya, yaitu Pangeran Kabupaten dan Pangeran Lautan.[2]

Dalam keadaan miskin Raja Kanoman beserta dua orang saudaranya berkeliling ke desa-desa dan di sana mereka mendapat simpati sebagian besar rakyat Cirebon.[3] Soalnya pada waktu itu rakyat pedesaan di wilayah Cirebon sedang dilanda gundah-gulana, karena tenaganya habis dikuras oleh orang-orang Cina yang menyewa desa mereka. Pajak yang ditarik oleh orang Cina pun dirasakan terlalu besar dan banyak macamnya, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak jembatan, dan lain-lain. Dengan kehadiran ketiga tokoh itu rupanya rakyat telah menemukan pimpinannya kembali dan dengan pimpinannya itu setiap saat mereka siap untuk melakukan atau melaksanakan perintahnya. Penindasan terhadap rakyat yang dilakukan orang-orang Cina

dan kepala-kepala pemerintahan kolonial di desa-desa yang disewakan dan terjadinya pertikaian mengenai penggantian mahkota di Cirebon merupakan sebab utama meletusnya huru-hara dan kekacauan yang berlangsung selama belasan tahun.[4] Huruhara itu meletus pada tahun 1802 berupa gerakan perlawanan rakyat yang menentang Belanda beserta kaki tangannya. Huruhara itu bukan hanya terjadi di daerah Cirebon, tetapi meluas ke wilayah Kabupaten Karawang yang pada waktu itu beribukota di Kandanghaur dan daerah Kabupaten Sumedang sebelah timur laut. Sasaran pertama dari gerakan perlawanan rakyat Cirebon itu ialah orang-orang Cina, karena mereka dianggap secara langsung memeras rakyat. Akibat adanya gerakan rakyat, banyak orang Cina yang dibunuh atau diusir dari daerah Cirebon, misalnya di Palimanan, Lohbener, Darmayu, dan sebagainya. Bagi Belanda sesendiri pecahnya perlawanan rakyat itu mulai terasa akibatnya. Kedudukannya sebagai penguasa mulai terancam, penerimaan pajak dan penjualan wajib hasil bumi semakin berkurang. Oleh karena itu diambillah keputusan untuk menumpas gerakan perlawanan rakyat tadi. Menurut Bupati Sumedang R.A. Surianagara (1791–1828), kekacauan di seluruh wilayah Cirebon yang merembet pula ke daerah Sumedang disebabkan oleh terlalu kejamnya sikap dan tindakan para penguasa kolonial waktu itu terhadap rakyat dan juga pejabat pribumi. Di Kabupaten Sumedang sendiri sampai terjadi seorang *cutak* dari Conggeang bernama Baen dan Patinggi Cipicung melarikan diri dari daerahnya dan bergabung dengan kaum pemberontak bersama 77 orang pengikutnya. Mereka melarikan diri karena Cutak Baen disiksa oleh pejabat Belanda Lawick van Pabst. Pejabat Belanda tersebut, seorang komisaris, terkenal sangat bengis dan kejam.[5]

Pihak Belanda mensinyalir bahwa pecahnya kerusuhan itu sesungguhnya digerakkan oleh Pangeran Suriawijaya. Hal ini lebih dijelaskan lagi oleh S.H. Rose selaku Residen Cirebon pada waktu itu dengan mengatakan, bahwa yang menyebarkan desas-

desus untuk membenci pemerintah Belanda ialah Raja Kanoman dan sebagian dari kaum agama yang telah memihak Kanoman harus ditangkap.[6]

Selanjutnya Rose menyarankan kepada pemerintah Belanda di Batavia, bahwa untuk menumpas gerakan itu pemerintah harus mengundang Raja Kanoman beserta dua orang saudaranya ke Batavia dengan dalih untuk berunding. Pemerintah Belanda menerima saran itu dan kemudian disampaikan undangan kepada Raja Kanoman. Tetapi setibanya di Batavia bukanlah perundingan yang dilakukan, melainkan penangkapan atas diri ketiga orang pemimpin gerakan rakyat itu. Mereka ditahan dan kemudian dibuang ke Ambon.[7]

Setelah mendengar kabar bahwa pemimpin rakyat Cirebon itu ditahan oleh Belanda di Batavia, maka pada tahun 1805 rakyat Cirebon yang terdiri atas kurang lebih 1000 orang mengadakan perjalanan *(long march)* ke Batavia guna menyampaikan tuntutan supaya Raja Kanoman dibebaskan dan dinobatkan sebagai sultan di Cirebon.

Untuk mencegah agar barisan rakyat Cirebon itu tidak sampai ke Batavia, Residen Cirebon segera mengajukan resolusi kepada pemerintah Belanda di Batavia tertanggal 26 Februari 1805 yang memberitahukan bahwa ada suatu gerombolan orang Cirebon yang berbaris menuju Batavia, untuk mengajukan suatu permohonan supaya Raja Kanoman diangkat menjadi raja mereka; supaya ada perintah kepada para bupati, jangan memberi jalan kepada gerombolan tersebut.[8]

Atas dasar resolusi tersebut, pemerintah Belanda di Batavia memberitahukan kepada Bupati Karawang R.A. Surialaga supaya rombongan itu setibanya di Karawang dicegat dan diharuskan kembali ke Cirebon. Berdasarkan resolusi tanggal 15 Maret 1805, Belanda mengirimkan sebuah kapal ke Cilincing yang digunakan untuk mengangkut rombongan orang Cirebon kembali

ke tempat semula. Pengembalian rombongan itu selesai tanggal 7 Mei 1805.[9]

Sekalipun pimpinan gerakan rakyat Cirebon telah ditahan dan dibuang ke Ambon, namun ternyata tidak bisa mengubah situasi pergolakan, bahkan sebaliknya, pergolakan itu semakin meningkat dan meluas. Sebagai usaha untuk mengatasi pergolakan di daerah Cirebon itu, Dewan Penasehat Belanda di Batavia mencoba mengirimkan sebuah delegasi yang dipimpin oleh bekas Residen Cirebon, P. Walbeek. P. Walbeek menyodorkan suatu perjanjian yang di dalamnya berisi ketentuan sebagai berikut :

(1) Raja Kanoman akan dikembalikan
(2) Belanda akan memperbaiki keadaan rakyat
(3) Orang Cina tidak akan diperbolehkan lagi menyewa desa dan tidak diizinkan tinggal di udik
(4) Perhambatan dibatasi.
(5) Pemerintah Kolonial Hindia Belanda akan mengangkat patih dan beberapa menteri bagi tiap raja, supaya pemerintah lebih tetap
(6) Kepada Raja Kanoman akan diberi 1000 cacah yang diperintah oleh Panembahan Cirebon hingga tahun 1773
(7) Penghasilan Residen dari kopi yang besar sekali jumlahnya akan dikurangi

Semua isi perjanjian itu ditolak oleh rakyat Cirebon yang sedang marah terhadap Belanda, bahkan sebaliknya mereka mengadakan perlawanan lebih intensif lagi. Soalnya perjanjian tidak menyatakan jaminan kongkrit akan perbaikan kehidupan dan penghidupan rakyat. Mereka melancarkan perlawanan terhadap orang Cina, Belanda, dan penguasa kesultanan yang memihak kepada Belanda. Mereka berontak karena segi-segi kehidupan ekonominya diganggu dan tenaga merasa diperas oleh golongan Cina, golongan feodal (kesultanan), dan Belanda. Gerakan perlawanan rakyat Cirebon padak babak pertama ini ti-

dak berhasil dipadamkan oleh Belanda. Bahkan dari kehidupan sosial-ekonomi yang semakin buruk itu justru lahir kekuatan perlawanan yang lebih besar lagi yang dipimpin oleh Bagus Rangin.

Perjuangan Bagus Rangin dalam menentang kolonialisme dan imperialisme Belanda pada hakekatnya merupakan kelanjutan dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Suriawijaya (Raja Kanoman). Pusat gerakan Bagus Rangin berlokasi di sekitar daerah Jatitujuh, termasuk Kabupaten Majalengka sebelah utara, Keresidenan Cirebon. Bagus Rangin berasal dari Demak, Blandong, Rajagaluh (sekarang termasuk daerah Kabupaten Majalengka terletak di kaki utara Gunung Ciremai). Beliau dilahirkan sekitar tahun 1761. Beliau putera Sentayem (Buyut Teyom), cucu Buyut Waridah, keturunan Embah Buyut Sambeng. Bagus Rangin mempunyai tiga orang saudara, kakaknya bernama Buyut Bangin dan kedua orang adiknya masing-masing bernama Buyut Salimar dan Ki Bagus Serit. Ayahnya adalah seorang yang taat dalam agama Islam dan dalam tugasnya seharihari beliau menjadi guru agama serta dikenal sebagai kiai *(ajengan)* yang tinggi ilmunya dan banyak muridnya, termasuk putranya, Bagus Rangin.[10] Sift Bagus Rangin digambarkan oleh Stapel sebagai pemimpin yang gagah berani dan sanggup menyatakan perang yang didukung oleh pengikutnya yang banyak.[11] Setelah cukup umurnya, Bagus Rangin diserahi tugas mengepalai Kebagusan Jatitujuh oleh Sultan Cirebon dengan pangkat Senapati.

Bagus Rangin berguru ilmu agama kepada seorang ulama yang disebut Rama Banten atau Ama Banten. Dalam mengajarkan ilmu agama itu, Rama Banten mengajarkan pula ilmu tarekat. Bagus Rangin tergolong murid yang cerdas dan saleh. Ia menjadi kesayangan dan kepercayaan gurunya. Karena senang dan sering melakukan tirakat, Bagus Rangin lama-kelamaan dipandang oleh masyarakat setempat sebagai seorang pemim-

pin terhormat, disegani, dan diharapkan dapat menolong masyarakat yang sedang menderita kesusahan dan kemudian membawanya ke alam kejayaan dan kemakmuran.[12]

Sementara itu rakyat Palimanan daerah antara Jatitujuh dan Majalengka, mulai bangkit pula untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa daerahnya, karena daerah tempat kediamannya disewakan oleh Bupati kepada ornag-orang Cina. Mereka dihisap tenaganya dan dikenakan pajak setinggi-tingginya. Atas tindakan orang-orang Cina itu, rakyat Palimanan mengajukan suatu permohonan kepada bupati supaya pajak bagi rakyat di daerah tersebut diringankan. Karena jawaban bupati tidak memuaskan, akhirnya mereka melancarkan perlawanan. Mereka meminta bantuan dan nasehat kepada Bagus Rangin yang dianggap sebagai pemimpin mereka. Bagus Rangin menyetujui tujuan gerakan rakyat Palimanan dan menasehatkan, bahwa yang wajib dibunuh terlebih dahulu ialah bupati dan wakil residen Belanda, karena kedua orang pejabat itulah yang paling bertanggungjawab atas kesengsaraan dan kemelaratan rakyat.[13]

Setelah mendapat persetujuan Bagus Rangin, rakyat Palimanan segera menyerbu kota Palimanan di bawah pimpinan Bagus Serit (adik Bagus Rangin). Mereka menyerbu ke dalam pendopo kabupaten untuk membunuh Bupati Tumenggung Madenda, kemudian mendobrak rumah dan membunuh wakil Residen Belanda. Rumah para bangsawan setempat dan orang Cina pun dikepung dan diserang pula oleh mereka. Beberapa orang yang dijumpainya dibunuh, termasuk rakyat yang dianggap pengabdi kaum kolonial.[14] Mereka memandang, bahwa semuanya itu yang menyebabkan kemelaratan hidup mereka.

Setelah melancarkan serangan ke Palimanan, para penyerang itu kemudian mengundurkan diri dan menyebar ke tempat-tempat asalnya, dan sebagian dari mereka bergabung kepada Bagus Rangin.

Van Lawick memberitakan dalam resolusi tanggal 25 Februari 1806 tentang adanya gerakan yang melawan pemerintah kolonial. Menurut berita tersebut, di daerah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Cirebon (yaitu daerah Jatitujuh dan sekitarnya) terdapat gerombolan yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Untuk menghadapi mereka, Gubernur Jenderal mengirimkan 50 orang upas dan beberapa orang serdadu.[15] Menurut F.W. Stapel, sampai tahun 1806 jumlah kaum pemberontak yang membawa senjata sudah mencapai sekitar 40.000 orang.[16] Pasukan yang langsung dipimpin Bagus Rangin berjumlah antara 280 – 300 orang yang telah terlatih perang.[17] Beberapa orang pemimpin perlawanan itu selain Bagus Rangin yang menjadi pemimpin umum, antara lain Bagus Wariem dan Bagus Ujar dari Bayawak, Bagus Sakti dan Bagus Kondur dari Jatitujuh, Rontui dari Baruang Wetan,[18] Bagus Sidung di Sumber, Bagus Arisem dari Loyang, Bagus Suara dari Bantarjati, Bagus Sanda dari Pamayahan, Bagus Narim dari lelea, Bagus Jamani dari Depok, Demang Penangan dari Kandanghaur, Demang Wargagupita dari Kuningan, Wargamanggala dari Cikao, Wirasraya dari Manis, Jurangprawira dari Linggajati, Jayasasmita dari Ciminding, Jangbaya dari Luragung, Harmanis dari Cikao, Anggasraya dari Timbang, Demang Jayaprawata dari Nagarawangi, Demang Angonklangon dari Weru, Ingabei Martamanggala dari Pagebangan, Demang Jayapratala dari Sukasari.[19] Asal-usul dari pemimpin-pemimpin perlawanan tersebut mencerminkan betapa luasnya wilayah perlawanan itu, yang meliputi wilayah Kabupaten-kabupaten: Subang, Karawang, Sumedang, Indramayu, Majalengka, Cirebon, dan Kuningan sekarang. Memang mereka didukung oleh masyarakat daerah-derah tersebut dalam bentuk tenaga manusia dan senjata, logistik (beras dan bahan makanan lainnya), dan moril. Beberapa desa yang membantu pasukan Bagus Rangin adalah Benuang Kulon, Malandang, Conggeng, Cililin, Depok, Selaawi dan Sukasari. Sedangkan kepala-kepala desa yang mendukung kaum perlawanan ialah kepala-kepala desa Batu-

nunggal, Tegal, Bentang, Gerudu, Cinaka, Tanggulun, Tambal, Ayer, dan lain-lain. Selain dari rakyat, dukung dan bantuan itu diperoleh pula dari beberapa orang penguasa daerah setempat terutama dalam bentuk perlengkapan perang sangat penting (seperti senapan, meriam, dan lain-lain) dan bahan makanan.[20] Adapun senjata yang digunakan oleh pasukan Bagus Rangin ialah tumbak, pedang, bedog, keris, senapan, dan meriam.[21]

Guna menyelesaikan kerusuhan-kerusuhan di daerah Cirebon, Gubernur Jenderal A.H. Wiese (1805–1808) dengan mendapat persetujuan Dewan Penasehat Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, segera menugaskan Nicolaes Engelhard memimpin pasukan untuk menumpas perlawanan rakyat Cirebon pimpinan Bagus Rangin itu. Pasukan Belanda tersebut dibantu oleh pasukan dari Bangkalan (Madura) di bawah pimpinan Mangkudiningrat, putra Bupati Bangkalan. Selain itu para kepala daerah pribumi (sultan, bupati) yang daerahnya terletak di sekeliling daerah pergolakan diperintahkan mempersiapkan dan mengirim pasukan ke tempat yang dilanda kekacauan guna ikut serta memadamkan pemberontakan itu. Dalam hal ini adalah pasukan dari Sumedang, Subang, Karawang, dan Cirebon. Pasukan Sumedang dan Cirebon ditugaskan mengepung daerah perlawanan dari arah selatan dan timur, sedangkan pasukan Subang dan Karawang mengepung dari arah barat dan utara. Pasukan Sumedang mendirikan markasnya di Darmawangi, dan kemudian di Tomo sedangkan pasukan Cirebon menjaga daerah sepanjang Sungai Cimanuk. Selanjutnya, pasukan Sumedang yang dipimpin oleh bupati dan patih Sumedang sendiri, R.A. Surianagara dan Raden Wangsayuda, dan pasukan Cirebon melancarkan serangan terhadap daerah pemusatan pasukan Bagus Rangin di sekitar Bantar Jati. Jatitujuh, daerah perbatasan Sumedang Cirebon. Dalam pada itu, pasukan Karawang pun yang dipimpin oleh bupatinya, R.A. Suryalaga bergerak maju pula sambil menyerang tempat-tempat kedudukan kaum perlawanan. Akibat

dari pertempuran-pertempuran yang terjadi selama berbulan-bulan jatuh korban dari kedua belah pihak. Dari pihak Sumedang saja sampai puluhan jatuh korban, termasuk dua orang Kepala Distrik, putera Patih Sumedang. Selain itu 25 orang prajurit Sumedang tertawan, tetapi kemudian mereka dihukum mati. Korban dari pihak pasukan Bagus Rangin lebih besar lagi, karena diserang oleh berbagai pasukan dari segala arah. Namun demikian bagian terbesar dari pengikut Bagus Rangin berhasil meloloskan diri dari kepungan dan serangan pasukan-pasukan para bupati. Mereka menyelamatkan diri dan bersembunyi serta untuk sementara menghentikan kegiatan perlawanan.[22] Sementara itu pada tanggal 1 September 1806 tercapai persetujuan diadakan perjanjian antara pemerintah kolonial dengan Sultan Sepuh dan Sultan Anom yang isinya antara lain menetapkan, bahwa Raja Kanoman beserta saudaranya dikembalikan ke Cirebon dan dinobatkan sebagai sultan. Selanjutnya orang-orang Cina tidak diijinkan lagi tinggal di daerah pedalaman dan kepada para sultan tidak diperkenankan memeras rakyatnya.[23]

Berlakunya perjanjian itu belum juga dapat meredakan pergolakan rakyat daerah Jatitujuh dan sekitarnya. Bahkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal W. Daendels (1808–1811) justru perlawanan rakyat itu makin meluas ke daerah Indramayu sebelah selatan, karena Daendels secara terus-menerus mengurangi kekuasaan sultan. Tanggal 25 Maret 1808 Raja Kanoman, setelah dikembalikan dari tempat pembuangannya di Ambon, diangkat menjadi Sultan Cirebon. Oleh Daendels, daerah Cirebon dibagi menjadi dua prefektur, yaitu prefektur pertama meliputi daerah Cirebon utara dan prefektur kedua meliputi Galuh, Limbangan dan Sukapura. Prefektur utara dibagi atas tiga kabupaten, yaitu: (a) daerah Cirebon dan Kuningan dikepalai oleh Sultan Sepuh; (b) daerah Majalengka dikepalai oleh Sultan Anom dan (c) daerah Indramayu dikepalai oleh Sultan Cirebon.

Tindakan Daendels tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1809 daerah Cirebon dijadikan hak milik pemerintah Belanda. Para sultan dijadikan pegawai negeri dengan mendapat gaji dari pemerintah. Tanggal 2 Maret 1810 Sultan Cirebon, Raja Kanoman (Pangeran Suriawijaya) dipecat, karena sikap dan tindakannya dianggap selalu menentang pemerintah.

Dipecatnya Sultan Kanoman menimbulkan kegelisahan yang amat besar di kalangan rakyat Cirebon, karena mereka merasa kehilangan pemimpin yang membela kepentingan dan nasib mereka. Akibat tindakan Daendels yang tegas dan keras itu telah membawa ketegangan dan keresahan di segala lapisan masyarakat. Dengan tindakannya pula gerakan-gerakan perlawanan rakyat di daerah-daerah pedalaman yang semula akan mereda, berkobar kembali, bahkan makin hebat.

Dalam pada itu Bagus Rangin berhasil menghimpun dan membina kembali para pengikutnya. Pengaruh Bagus Rangin di kalangan para pengikutnya dan masyarakat setempat pada umumnya sangat besar. Bagus Rangin sangat dipercayai dan diharapkan menjadi pemimpin oleh para pengikutnya. Begitu besarnya pengaruh Bagus Rangin itu sehingga kemudian beliau dipercayai sebagai titisan Ratu Adil yang akan melenyapkan kedoliman dan ketidak-adilan serta membawa keadilan dan kemakmuran.[24]

Sebagai pemimpin masyarakat Bagus Rangin sering menyepi di tempat-tempat tertentu untuk mencari ilham, dan kekuatan gaib serta memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar harapan masyarakatnya terkabul. Menyepi yang terakhir dilakukan di Pasir Luhur, termasuk daerah Banyumas, perbatasan tanah Sunda dan Jawa. Nyepi di Pasir Luhur dilakukan oleh Bagus Rangin sampai dua kali. Yang kedua dan terakhir dilakukan pada tahun 1811 selama satu bulan. Para pengikutnya mau menjemput Bagus Rangin yang sedang nyepi di Pasir Luhur. Tujuan gerakan Bagus Rangin lebih ditingkatkan lagi. Kini beliau meng-

adakan gerakan tidak lagi dimaksudkan untuk melakukan peperangan, melainkan untuk membela rakyat yang sedang sengsara akibat masalah yang bertalian dengan penanaman padi dan untuk berikhtiar guna meringankan beban rakyat berupa kerja paksa.[25] Sasaran gerakannya sendiri bukan lagi merusak dan menghancurkan, akan tetapi juga mendirikan negara sendiri. Melalui sarana negara dan pemerintahan yang akan dibentuk itulah tujuan gerakan itu dapat tercapai. Dalam rencana ini Bagus Rangin akan diangkat sebagai raja. Kerajaannya akan dinamai negara Panca Tengah dan ibukotanya di Bantarjati.[26]

Di dalam rangka pematangan persiapan perang, diadakanlah penggemblengan khusus terhadap pemimpin pasukan dan sebahagian anak buahnya. Waktu penggemblengan dilakukan setelah sembahyang Jum'at di mesjid Jatitujuh. Mereka berpakaian serba putih sebagai tanda ikhlas, rela berkorban, baik harta, jiwa maupun raga demi tanah air, bangsa, dan agama. Penggemblengan dan komando terutama diberikan oleh Bagus Rangin. Senjata yang mereka gunakan terdiri atas: keris, tombak, cangak, gada, panah, dan wareng.[27]

Dari pengintaian yang dilakukan oleh mata-mata Bagus Rangin dapat diketahui, bahwa gabungan tentara Belanda dan para bupati telah bergerak dari Kadipaten untuk menuju Jatitujuh.

Bagus Rangin selaku panglima perang berpendapat, bahwa sebelum tentara gabungan musuh masuk daerah Jatitujuh terlebih dahulu pasukannya harus menyerang. Bagus Rangin memerintahkan supaya segera memasang umbul-umbul di lapangan Jawura, Bantarjati. Maksud pemasangan umbul-umbul tersebut sebagai tanda "menantang perang" kepada musuh. Pemilihan lapangan Jawura sebagai tempat pertempuran merupakan tempat yang sangat menguntungkan menurut perhitungan Bagus Rangin dan kawan-kawannya. Lapangan tersebut berada di sebelah barat Desa Kertajati, kira-kira lima kilometer dari Jatitujuh.

Bentuknya memanjang ke arah timur-barat dengan luas kira-kira lima hektar.[28]

Seluruh pasukan Bagus Rangin ditempatkan di bagian utara lapangan Jawura. Komandan-koamdan pasukan yang terkenal di antaranya ialah Buyut Merat, Buyut Deisa, Buyut Sena, Buyut Jayakusuma, Buyut Jago, Buyut Teteg, Buyut Huyung, Buyut Bongkok, dan Buyut Jasu.

Sebaliknya, menurut Komisi Thalman tahun 1807, dalam rangka persiapan perang menumpas perlawanan rakyat pimpinan Bagus Rangin, pemerintah kolonial mengeluarkan perintah agar dari tiap kabupaten di wilayah Priangan dan Kabupaten Karawang mengirimkan sejumlah pasukan, terutama kabupaten-kabupaten yang berbagasan dengan daerah perlawanan. Bupati Sumedang Pangeran Kusumahdinata (1798–1828) dan Bupati Karawang R.A. Surialaga diangkat sebagai komandan pasukan masing-masing. Kedua pasukan itu dibantu oleh serdadu Belanda dari Batavia yang dipimpin seorang Mayor Belanda ditambah dengan para *opziener.*[29] Sebagai penunjuk jalan ditetapkan Soeriabarata dan Raden Soeriakusumah. Setelah sampai di medan pertempuran, kedua orang penunjuk jalan tadi disuruh pulang, karena sudah selesai melaksanakan tugasnya.[30]

Ketika pasukan gabungan pemerintah tiba di perbatasan Kertajati dan Babakan, nampaklah kepada mereka umbul-umbul merah yang dipasang oleh pasukan Bagus Rangin sebagai pertanda tantangan perang. Pimpinan serdadu Belanda segera memerintahkan supaya setiap pasukan dipencar. Sebagai tanda dimulainya perang terdengarlah dentuman meriam dan sejak saat itu terjadilah pertempuran di lapangan Jawura.

Bagaimanakah situasi atau jalannya perang Jawura itu? Dalam hal ini De Haan menulis catatan tentang maklumat tanggal 22 Juli 1810 yang menyatakan, bahwa Bagus Rangin dapat mengalahkan pasukan Sumedang dekat Bantarjati (di tepi Sungai

Cimanuk). Tetapi Bagus Rangin menyatakan pula, bahwa pasukannya menderita suatu kekalahan.[31]

Selanjutnya, Pasukan Bagus Rangin yang dipimpin Buyut Merat dan Buyut Deisa dapat pula mematahkan kekuatan pasukan Karawang. Akan tetapi karena pasukan serdadu Belanda lebih lengkap persenjataan dan jumlah pasukannya lebih banyak, pada akhirnya pasukan Bagus Rangin terpaksa harus mundur. Di samping itu Jatitujuh diblokade musuh, sehingga gerakan pasukan Bagus Rangin ruang geraknya menjadi terjepit dan hubungan pun terputus. Setelah pasukan Sumedang dikonsolidasi oleh Pangeran Kornel, pasukan Bagus Rangin dapat dipukul mundur ke daerah desa Panongan.[32] Tetapi penumpasan perlawanan rakyat di sekitar daerah Cirebon itu belum dapat terselesaikan seluruhnya, sebab terhalang oleh penggantian pemerintahan kolonial dari tangan Belanda ke tangan Inggris (1811). Dengan demikian terdapat kesempatan bagi Bagus Rangin dan pengikutnya untuk melakukan konsolidasi dan menyusun kekuatan kembali.

Pada tanggal 9 Januari 1812 Gubernur Jenderal Inggris Raffles memerintahkan Komisaris Couperus yang berkedudukan di Cianjur agar mengumpulkan 500 orang prajurit dari Kabupaten Cianjur yang dipimpin oleh bupati sendiri untuk diberangkatkan ke Karawang guna menumpas perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Bagus Rangin. Selain itu, pasukan Mangkunegara dari Solo yang dipimpin oleh Pangeran Mayor Surianagara dan Suriadipura ikut serta dalam usaha menghadapi perlawanan rakyat daerah itu. Bupati Karawang R.A. Suryalaga mengerahkan pula pasukannya di medan perang Bantarjati.[33]

Pertempuran pun terjadi lagi di medan tempur Bantarjati pada tanggal 16 sampai dengan 29 Februari 1812. Pertempuran berjalan sengit. Namun tak lama kemudian pengikut Bagus Rangin dapat dipukul dan sebagian mundur secara teratur, kemudian melarikan diri, termasuk pimpinannya, Bagus Rangin. Da-

lam pertempuran tersebut kerugian dari pihak Bagus Rangin adalah 87 orang prajurit tewas, 227 orang dan dua orang pemimpinnya tertangkap dan dapat dirampas, serta 23 pucuk senapan, 19 buah tombak, 27 buah pedang atau bedog, dan tiga buah keris. Selain itu terampas pula payung kebesaran Bagus Rangin dan perlengkapan wayang serta 776 orang keluarga kaum perlawanan yang terdiri atas wanita dan anak-anak ditahan.[34]

Daerah Panonangan ditinggalkan dan pasukan Bagus Rangin kemudian bertahan di suatu daerah yang kini bernama Pangayoman. Karena mendapat serangan yang terus-menerus dari serdadu Belanda, mereka mundur lagi ke kampung Sindang, sebelah barat desa Panongan. Di satu tempat yang sekarang disebut Rancabolong secara tiba-tiba Buyut Sena dikepung Belanda sehingga tidak dapat melarikan diri. Karena badannya penuh dengan tusukan senjata musuh, akhirnya ia gugur dan dimakamkan di sebelah timur Desa Kertajati. Buyut Jayakusuma dan Buyut Jasu pun pernah dikepung dan dikejar-kejar serdadu Belanda, tetapi masih sempat melarikan diri.[35]

Operasi militer pasukan pemerintah kolonial terus dilanjutkan ke desa-desa yang dijadikan atau dianggap dijadikan tempat persembunyian kaum perlawanan. Operasi militer ini berhasil menangkap pemimpin perlawanan Bagu8 Rangin di Panongan pada tanggal 27 Juni 1812.[36] Tertangkapnya pemimpin perlawanan rakyat Cirebon itu dapat memadamkan perlawanan itu untuk sementara.

Pada tanggal 8 Desember 1816 tersiar berita bahwa orang-orang penduduk Karawang, Ciasem, dan Pamanukan yang jumlahnya sekitar 2.500 orang laki-laki bersenjata lengkap bermaksud untuk berontak melawan pemerintah. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Bagus Jabin. Ia adalah putera Bagus Sanda, keponakannya Bagus Rangin. Pemuda ini berusaha melanjutkan perlawanan terhadap pemerin-

tah kolonial dan menggantikan kedudukan Bagus Rangin sebagai pimpinan perlawanan. Bagu8 Jabin dianggap orang sakti oleh para pengikutnya. Para pemimpin perlawanan itu masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Bagus Jabin, antara lain Bagus Bulun, Bagus Wangsa, Bagus Asidin, Bagus Brata, Candrawijaya, dan Taluk. Mereka semuanya berkumpul di kampung Lohbener, pinggir Sungai Cimanuk sebelah barat. Mereka sudah siap sedia berperang, jika serdadu dan polisi pemerintah kolonial menyerang. Berulangkali Residen Cirebon mengirimkan utusan kepada mereka untuk menanyakan tentang alasan mereka akan berontak dan menasehati agar mereka mengurungkan maksudnya. Daripada berontak terhadap pemerintah, lebih baik minta damai dan berunding dengan pemerintah secara baik-baik. Bagus Jabin dan pengikutnya menolak ajakn berdamai dan menjawab pertanyaan itu, bahwa mereka dikebani pajak dan kewajiban terlampau berat, terlalu banyak ditekan oleh kepala-kepala desa dan orang Cina, serta merasa diperlakukan tidak adil.[37]

Bagus Jabin dan pengikutnya mempunyai maksud untuk mengadakan penyerbuan ke Kandanghaur (bekas ibukota kabupaten Karawang dan Indramayu). Penyerbuan ke daerah itu dimaksudkan untuk :

(1) menggulingkan kedudukan kepala daerahnya yang tidak disenangi rakyat, karena sikap dan tindakannya selalu memeras serta menindas rakyat lagi pula bekerja sama dengan Belanda;

(2) menuntut kepada pemerintah kolonial supaya pajak diperingan dan penyerahan upeti dihentikan;

(3) menyerang kedudukan Belanda yang ada di daerah itu.[38]

Pada tanggal 9 Desember 1816 Bagus Jabin dan pengikutnya melancarkan serangan ke kota Kandanghaur. Mereka menduduki kota itu, mengusir dan menganiaya penduduk yang dicu-

rigai, dan merampas harta benda penduduk. Akibatnya banyak penduduk mengungsi ke luar kota karenanya.[39]

Peristiwa pendudukan Kandanghaur oleh para pengikut Bagus Jabin telah mengakibatkan Residen Cirebon W.N. Servatius marah sekali. Segera ia mengirimkan pasukan ke daerah kerusuhan. Kandanghaur dikepung dari segala arah oleh pasukan serdadu Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1816 ia mengeluarkan ultimatum terhadap Bagus Jabin agar segera menyerahkan diri. Jika tidak mau menyerah, ia akan ditangkap dengan cara kekerasan. Karena Bagus Jabin tidak mengindahkan ultimatum tersebut, keesokan harinya (20 Desember 1816) Kandanghaur diserang oleh serdadu-serdadu dan polisi Belanda dari empat jurusan, yaitu dari jurusan-jurusan Indramayu, Ujung Losarang, dan Lohbener Wetan. Walaupun serangan serdadu Belanda dilancarkan dari berbagai penjuru, tetapi pengikut Bagus Jabin tidak gentar menghadapinya. Semua serangan ditahan dengan gagah berani. Sementara itu kelompok pengikut Bagus Jabin yang menahan serangan dari arah Indramayu diperbesar jumlahnya dengan tujuan, bukan hanya menahan serangan itu, tetapi menghancurkan mereka dan sekaligus melakukan serangan ke arah Indramayu. Serdadu-serdadu Belanda yang datang dari arah Indramayu berhasil dipukul mundur, sementara tiga kelompok serdadu lainnya dapat ditahan, sehingga kota Indramayu terancam.[40]

Begitu pula prajurit-prajurit Bagus Jabin akan menyerang kota Indramayu, tiba-tiba datang bantuan pasukan pemerintah secara serentak dari wilayah Priangan. Pasukan dari Priangan yang dipimpin oleh Residen Priangan W.C. van Motman itu datangnya dari arah Wanayasa (Subang), terus ke Lohbener Kulon, dan sampai di Losarang. Pasukan serdadu Belanda dari Priangan itu dibantu oleh pasukan dari Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Limbangan di bawah pimpinan bupatinya masing-masing, yaitu R.A. Surianagara dan R.A. Aiwijaya. Dalam pada itu pe-

merintah kolonial mendatangkan pula balabantuan pasukan dari Jawa Tengah, berupa 160 orang serdadu Belanda dari detasemen Semarang dan pasukan Bangawan Wetan (Solo) yang dipimpin oleh bupatinya sendiri R.A. Nitidiningrat.[41]

Kini pasukan perlawanan Bagus Jabin harus menghadapi musuh yang juga datang dari arah belakang yang justru kekuatannya lebih besar. Karena itu maksud untuk menduduki Indramayu diurungkan, mereka perlu berhadapan dengan pasukan yang datang dari Priangan. Pertempuran hebat pun segera terjadi. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang, para prajurit Bagus Jabin terdesak sampai ke pinggir Sungai Cimanuk. Mereka yang akan menyeberangi sungai ke arah timur dan selatan terpotong oleh pasukan serdadu Belanda dari Cirebon sehingga mereka terkepung rapat. Hanya kurang dari 25 orang di antara pengikut Bagus Jabin yang berhasil meloloskan diri. Selebihnya dapat ditangkap (500 orang), tewas dalam pertempuran (60 orng), dan luka berat (100 orang). Para tawanan perang dibawa ke Cianjur untuk diadili. Sedangkan korban dari pihak Belanda adalah empat orang serdadu bangsa Belanda dan 11 orang tentara pribumi.[42]

Pukulan berat terhadap kaum perlawanan pimpinan Bagus Jabin di daerah Lohbener itu mengakibatkan berhentinya untuk sementara perlawanan tersebut.

Sesungguhnya perlawanan rakyat daerah Cirebon tidak berhenti sampai di situ saja, walaupun korban di pihak mereka telah banyak, baik yang tewas, luka-luka atau pun tertangkap. Hal itu terbukti dengan munculnya kembali kegiatan mereka pada tahun 1818. Bahkan pada tahun tersebut sampai terjadi dua kali peristiwa yang menggoncangkan pemerintah kolonial, yaitu peristiwa yang terjadi sekitar bulan Januari – Februari dan sekitar bulan Juli – Agustus 1818.

Pada pertengahan bulan Januari 1818 terjadi keributan di Distrik Blandong, Cirebon. Kota Distrik Blandong diserang oleh

kaum perlawanan pimpinan Bagus Jabin, Bagus Serit, dan Nairem. Dalam peristiwa itu Demang Among Pances, Kepala Distrik Blandong, dan jurutulisnya terbunuh. Pengikut Bagus Jabin yang melakukan kegiatan itu berjumlah 100 orang. Mereka berkedudukan di Kedongdong. Nairem adalah seorang demang di desa Padagangan, Distrik Indramayu. Ia pernah menjadi pengikut Bagus Rangin, dalam gerakan tahun 1811. Beberapa hari kemudian (23–24 Januari) kaum perlawanan itu menyerbu Palimanan, sebuah kota kecil di sebelah barat kota Cirebon. Mereka berhasil mendobrak penjara di kota itu dan membebaskan rekan mereka yang berada di dalamnya. Selain itu jembatan-jembatan yang menuju ke kota itu dihancurkan. Pada tanggal 27 Januari kaum perlawanan melancarkan serangan ke Rajagaluh, ibukota Kabupaten Majalengka dan desa-desa di sekitarnya, seperti Banjaran dan juga Palimanan. Dalam penyerangan itu sejumlah rumah dibakar, antara lain rumah Residen di Rajagaluh dan rumah Prundant di Banyaran. Mendengar peristiwa tersebut Asisten Residen Heycenreich dan Bupati Bangsawan Wetan R.A. Nitiningrat segera memburu tempat kerusuhan disertai pasukan berkuda berkekuatan 60 orang. Namun pasukan pemerintah kolonial itu disergap secara tiba-tiba oleh para pengikut Bagus Serit, sebelum dapat menunaikan tugas dengan baik. Akibatnya, Asisten Residen Heydenreich dan Bupati R.A. Nitidiningrat yang berjasa dalam pertempuran di Kandanghaur tewas dalam penyergapan itu.[43]

Mendengar adanya kerusuhan-kerusuhan di daerah Rajagaluh, Residen Priangan van Motman mengambil inisiatif segera datang ke daerah perbatasan Priangan – Cirebon untu menyelamatkan gudang-gudang kopi di Tomo dan Kaangsembung. Bupti Sumedang mendapat perintah lagi untuk mengirimkan pasukan bersenjata ke medan perang. Dalam pada itu serdadu-serdadu kembali dkkerahkan. Dari Batavia dikirimkan pasukan infantri dari resimen 5 batalyon 1 yang berkedudukan di Weltevreden (Batavia), kompi pribumi dari batalyon 19 infantri, dan

36 orang pasukan artileri berikut dua pucuk meriam di bawah pimpinan Letnan Koloneol Richemont. Seluruh pasukan ini berangkat dari Batavia dengan sebuah kapal tanggal 26 Januari 1818 dan tiba di Cirebon dua hari kemudian. Dalam pada itu, dari Bogor diberangkatkan pula (27 Januari 1818) dua pasukan terdiri atas pasukan Benggal dan pasukan berkuda (kavaleri) dipimpin Halshuher van Harloch. Pada tangal 25 Januari 1818 kapal meriam nomor 7 dikirim ke Cirebon pula di bawah pimpinan Letnan W.H. Hunther. Satu detasemen serdadu Belanda yang berada di Semarang pimpinan Kapten Couvreur diperbantukan pula ke Cirebon. Pasukan-pasukan pemerintah kolonial tersebut ditampung di tiga tempat dahulu sesuai dengan arah datangnya sebelum diberangkatkan menuju medan tempur. Ketiga tempat penampungan itu adalah Karangsembung bagi pasukan yang datang dari Priangan dan Bogor, Cirebon bagi pasukan yang datang dari Batavia dan Semarang, dan Indramayu bagi pasukan yang telah berada di daerah tersebut. Serangan umum terhadap kaum perlawanan akan dilakukan pada tanggal 2 Februari 1818. Pengiriman pasukan secara besar-besaran ke Cirebon langsung atas perintah Gubernur Jenderal itu dilakukan berhubung dengan perlawanan Bagus Jabin dan kawan-kawan dianggap sangat berbahaya, terutama setelah Asisten Residen Heydenreich dan Bupati R.A. Nitidiningrat tewas disergap mereka.

Sementara pasukan pemerintah kolonial menunggu kedatangan semua rekannya dan perintah penyerangan, kelompok-kelompok pasukan perlawanan meningkatkan kegiatan mereka dengan penyerbuan terhadap beberapa desa di sekitar Kedondong. Mereka telah menguasai jalan raya Sumedang – Cirebon di sekitar Palimanan, sehingga Residen Priangan van Motman harus menempuh jalan lain untuk sampai ke Cirebon dari Karangsembung. Para pengikut Bagus Jabin bermaksud untuk menyeberang (Priangan), tapi dapat segera dicegah oleh pasukan Be-

landa. Begitu pula mereka telah bergerak untuk menyerang Sindangkasih (dekat kota Majalengka sekarang). Pasukan Benggal terpaksa diberangkatkan ke tempat yang akan menjadi sasaran serangan untuk mencegahnya.

Pada tanggal 1 Februari 1818 pasukan Belanda mulai bergerak dari Cirebon menuju Desa Jamblang. Pada hari berikutnya serangan umum ke pusat kedudukan kaum perlawanan di Kedondong telah diputuskan akan dilaksanakan. Tetapi keputsuan tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan, karena terjadi penggantian Komandan Operasi dari Letkol Richemont yang diangkat oleh Gubernur Jenderal kepada Letkol Hoorn yang diangkat oleh Panglima Pasukan Belanda. Penggantian pimpinan pasukan telah berakibat selain timbulnya perasaan tidak puas, juga disiplin para serdadu mengalami kemerosotan. Sejumlah serdadu, termasuk pimpinan kelompok pasukannya, mengabaikan tugas mereka dan bahkan meninggalkan medan tempur, seperti diperlihatkan oleh Kapten Mulder yang diberi tugas mengepung dan menyerang Kedondong, Letnan Van Steenis, Kapten Van Gent. Akibatnya semua rencana penyerangan itu mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Bahkan sebaliknya pasukan Belanda berhasil dikocar-kacirkan oleh serangan pengikut Bagus Jabin dan Nairem. Pasukan Belanda kemudian melarikan diri ke Palimanan, tapi terus dikejar oleh pasukan perlawanan. Dalam peristiwa tersebut Letnan Van Hoorn, Letnan Wessel, dan Kapten Kalberg menjdi korban.

Kekalahan pasukan Belanda dapat ditolong dengan majunya pasukan Benggal dan pasukan berkuda pimpinan Letnen Borneman dan Kapten Elout. Gerak maju pasukan perlawanan dapat dihentikan oleh pasukan Benggal dan pasukan berkuda, bahkan kemudian para pengikut Bagus Jabin itu dapat didesak mundur sampai ke seberang Sungai Karu, anak Sungai Cimanuk, walaupun tidak sepenuhnya pada tanggal 9 Februari 1818. Guna meningkatkan semangat tempur dan hasrat mencapai keme-

nangan serdadu-serdadunya, pemerintah kolonial akan memberi hadiah 500 Sp. M. bagi yang dapat menangkap dan menyerahkan hidup-hidup pemimpin perlawanan terpenting, 250 Sp. M. bagi yang dapat menyerahkan seorang pemimpin perlawanan, dan 100 Sp. M. bagi yang dapat menyerahkan anggota kaum perlawanan.

Operasi pasukan Belanda terus ditingkatkan dan diperluas wilayah operasinya serta kekuatannya pun ditambah. Pada tanggal 13 Februari 1818 kekuatan inti pasukan perlawanan berhasil dicerai-beraikan, desa-desa yang semula memihak kaum perlawanan dapat ditertibkan kembali, dan jalan raya dapat diamankan lagi. Sementara itu, pemimpin perlawanan Nairem dapat ditangkap pada tanggal 25 Februari 1818.

Pada bulan Maret 1919 keadaan daerah Rajagaluh, Kedondong, dan Palimanan telah kembali bebas dari gangguan kaum perlawanan. Untuk menjaga keamanan daerah itu dibangunlah markas militer yang akan ditempati oleh sejumlah pasukan di Palimanan, Kedondong dan Indramayu.

Anggapan, bahwa semangat perlawanan telah padam dan perlawanan rakyat di daerah Cirebon telah lenyap sama sekali seperti yang dinyatakan dalam laporan pejabat setempat pemerintah kolonial terhadap atasannya, ternyata tidak benar. Pada awal Juli 1818 diberitakan adanya kegiatan sekelompok rakyat di Kabupaten Talaga (sebelah selatan Majalengka) yang menjurus ke arah timbulnya perlawanan lagi. Pada waktu itu seorang yang menamakan diri Rama Gusti mengumpulkan pengikut di Desa Ciputri. Tatkala akan ditangkap, ia berhasil meloloskan diri, walaupun akhirnya tertangkap pula. Tapi yang paling berbahaya ialah munculnya kembali tokoh Bagus Serit yang sudah berhasil mengumpulkan 50 orang pengikut bersenjata di Desa Kraton Babadan. Ia berhasil menghindari sewaktu polisi akan menangkapnya. Ia kemudian mengajak penduduk di desa-desa untuk bergabung dalam barisan perjuangannya.

Pada tanggal 6 Agustus 1818 kaum perlawanan melakukan serangan ke Palimanan. Mereka merusakkan kompleks bagnunan untuk pertahanan Belanda yang sedang dibangun, merampas pakaian dan persenjataan serdadu Belanda yang disimpan di kompleks bangunan itu. Pasukan pelopor Belanda yang berada di situ segera mengundurkan diri ke Kali Tanjong, karena takut berhadapan dengan para penyerang. Pasukan perlawanan mengundurkan diri kembali, setelah Krieger, Komandan Pasukan Belanda, menghimpun kekuatan kembali.

Dalam rangka menyusun kekuatan Bagus Serit pernah mengajak ketiga orang sultan di Cirebon melalui surat agar bergabung dengan gerakannya guna membebaskan Cirebon dari genggaman kaum kolonial. Sultan Sepuh menolak ajakan itu. Beliau melaporkan ajakan itu kepada pejabat Belanda di Cirebon dan menangkap pembawa suratnya.

Berhubung dengan gerakan pengikut Bagus Serit mobilitasnya tinggi, sehingga sulit untuk dihadapi, apalagi ditangkap, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman yang berbunyi, bahwa barang siapa yang dapat menyerahkan pemimpin pemberontak Bagus Serit hidup atau mati akan diberi hadiah oleh pemerintah sebesar F. 2.200.

Pada tanggal 8 Agustus 1818 terjadi kontak senjata antara pasukan Belanda dengan pasukan perlawanan di dekat Desa Sumber. Dalam kontak senjata itu pasukan perlawanan berhasil menceraikan musuh menjadi dua kelompok dan hampir dapat membunuh Komandan Pasukan Belanda yang bernama Kapten Krieger. Namun dalam kontak-kontak senjata selanjutnya pasukan perlawanan mengalami kemunduran. Berkat keikutsertaan Sultan Sepuh beserta pasukannya, akhirnya Bagus Serit dapat ditangkap oleh pasukan Sultan Sepuh. Atas keberhasilan Sepuh. Atas keberhasilan ini Sultan Sepuh mendapat hadiah penghargaan dari pemerintah kolonial. Sebaliknya, Nairem dan Bagus Serit, berdasarkan keputusan pengadilan dijatuhi hukuman

mati pada tanggal 31 Oktober 1818. Sedangkan para pemimpin perlawanan lainnya yang bernama Sapie, Lejo, dan Ribut dijatuhi hukuman dera dan dibuang selama 7 tahun pakai rantai. Selain itu, 14 orang pengikut Bagus Serit dihukum kerja paksa seumur hidup di perusahaan negara di Banda dan 7 orang lainnya dihukum kerja paksa di kebun kopi di Banyuwangi.

Demikian, akhir dari perlawanan rakyat Cirebon yang berlangsung selama sekitar 14 tahun. Sesudah itu selama abad ke-19 tidak terdengar lagi perlawanan serupa di daerah Cirebon.

3.2 Perlawanan Raksa Praja (1842)

Pada awal abad ke-19 di kalangan pejabat yang diberi kekuasaan oleh pemerintah Hindia Belanda terdapat suatu kecenderungan, bahwa jabatan yang diperolehnya atau jabatan yang pernah diperoleh orang tuanya, secara langsung bisa diwariskan kepada anak, atau keturunan berikutnya. Pandangan demikian dianut oleh Raden Aria Anggadikusuma yang pada waktu itu sedang menduduki jabatan sebagai Patih Polisi. Tetapi dengan kedudukan itu ia masih belum merasa puas, karena ia selalu ingat akan hak waris ayahnya yang pernah diangkat pemerintah Hindia Belanda sebagai kepala cutak. Sebagai kepala cutak, ia diberi kekuasaan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membawai empat cutak lainnya, yaitu cutak Cisondari, cutak Rongga, cutak Cihea, dan cutak Kopo. Dengan dihinggapi perasaan ambisi untuk menguasai keempat cutak bekas wilayah kekuasaan ayahnya itu, maka pada tahun 1822 Raden Aria Anggadikusuma mencoba mengajukan suatu permohonan kepada Residen Priangan, yang isinya meminta supaya keempat cutak bekas wilayah kekuasaan ayahnya itu dikembalikan kepadanya. Atas dasar permohonan itu ternyata Residen hanya memberikan dua cutak saja, yaitu cutak Cisondari dan cutak Rongga, sedangkan cutak Cihea dan cutak Kopo tetap berada di bawah kekuasaan orang lain. Sekalipun dua cutak sudah berada di ba-

wah kuasanya, namun pada dirinya masih terasa bahwa tuntutannya belum seluruhnya terpenuhi. Hal ini mengandung arti bahwa ambisi pada diri Raden Aria Anggakusuma masih belum hilang.[44]

Sementara keinginannya belum terpenuhi seluruhnya, dengan tidak ada alasan yang dapat difahaminya, tiba-tiba pemerintah Hindia Belanda memecat kedudukannya sebagai Patih Polisi. Tindakan pemerintah Hindia Belanda ini terhadap diri Raden Aria Anggadikusuma telah membawa akibat timbulnya perlawanan terhadap pemerintah sendiri, sekalipun Aria Anggadikusuma dalam perlawanan itu tidak menjadi pelaku utamanya.

Sementara perlawanan belum pecah, sebuah sumber mengatakan bahwa salah seorang penduduk cutak Karang, termasuk Kabupaten Sukapura, yang bernama Raksa Praja pada tahun 1828 mengangkat dirinya sebagai Raja dengan gelar Sultan Raja Kanoman. Motifasi apa yang melatarbelakangi Raksa Praja sampai mengangkat dirinya sebagai Sultan Raja Kanoman? Diduga bahwa sikap Raksa Praja itu merupakan salah satu cara untuk menentang pemerintah Hindia Belanda dan ia mencoba, adakah reaksi dari pemerintah setelah ia berbuat demikian. Ternyata pemerintah Hindia Belanda dengan adanya tindakan Raksa Praja itu segera melakukan penangkapan atas dirinya, kemudian dijatuhi hukuman buang ke luar Jawa,[45] selama enam tahun, dengan tuduhan melakukan penipuan dan pemakaian gelar kebangsawanan.[46]

Setelah selesai menjalani hukuman buang selama enam tahun, maka pada bulan April 1842, ia menampakkan dirinya kembali di daerah tempat tinggalnya dahulu, yaitu cutak Karang. Setiba di kampungnya segeralah ia mendenar, bahwa kawan lamanya, Raden Aria Anggadikusuma, telah dipecat dari jabatannya sebagai Patih Polisi. Di samping itu ia mendengar berita pula, bahwa Raden Wiranatakusuma selaku Bupati

Bandung pada waktu itu sedang tidak ada di tempat. Keadaan demikian telah membangkitkan tekadnya untuk mengambil alih kekuasaan Bupati Bandung dengan jalan menyerang kota Bandung. Tetapi untuk melaksanakan keinginannya itu ia memerlukan bantuan dari Raden Aria Anggadikusuma. Untuk maksud itu segeralah pada tanggal 2 April 1842 ia memanggil kawan andalannya yang bernama Sastra, dan disuruhnya menyampaikan sepucuk surat kepada Raden Aria Anggadikusum[47] Sekalipun Raksa Praja sudah mendengar, bahwa Raden Aria Anggadikusuma telah dipecat dari jabatannya sebagai Patih Polisi, namun dalam isi suratnyaa ia menanyakan tentang pemecatan itu. Pertanyaan itu dimaksudkan juga untuk mendapatkan jawaban langsung dari orang yang bersangkutan tentang kebenarannya. Di balik pertanyaan tadi terkandung maksud pula untuk bekerjasama dalam rangka merencanakan perebutan kedudukan Bupati Bandung. Dengan surat tadi diharapkan Raksa Praja adanya bantuan persenjataan yang dibutuhkannya dari Raden Aria Anggadikusuma.

Tanggal 23 April 1842, Sastra suruhan Raksa Praja telah pulang lagi ke kampung. Dalam perjalanan pulang dari Bandung ia sempat mampir ke kampung Kamasan yang termasuk cutak Banjaran, untuk membawa adiknya, Wangsa. Pengambilan adiknya dimaksudkan untuk menambah tenaga sebagai anggota baru dalam rangka memperkuat gerakan Raksa Praja. Sebagai jawaban atas surat Raksa Praja, isi surat Raden Aria Anggadikusuma menyatakan bahwa ia mengundang Raksa Praja supaya menemuinya di Bandung. Istilah "mengundang" yang terdapat pada surat jawaban Raden Aria Anggadikusuma ternyata ditafsirkan secara keliru oleh Raksa Praja. Dikiranya arti "mengundang" di situ sebagai tanda "lampu hijau" dari Raden Aria Anggadikusuma agar Raksa Praja berangkat ke Bandung dengan jumlah rombongan yang banyak. Dengan tafsiran yang keliru itu segeralah Raksa Praja mengumpulkan anak-buahnya yang

sebagian besar terdiri atas tukang-tukang pemetik buah kopi, yang jumlahnya 16 orang ditambah dengan dua orang isteri Raksa Praja, masing-masing bernama Ambu Jaiya dan Nyai Sadiyem.[48] Secara spontan Raksa Praja mengatakan kepada pengikutnya, bahwa mereka diajak berangkat ke Bandung dengan tekad untuk menyerang kota itu, dan melaksanakan niat raksa Praja sendiri dalam usahanya mengambilalih kekuasaan Bupati Bandung.[49]

Akhir bulan April 1842 di bawah pimpinan Raksa Praja berangkatlah 19 orang penduduk cutak Karang dengan tujuan utama untuk menyerbu kota Bandung. Di perjalanan mereka singgah di beberapa kampung yang dilewatinya sambil menambah anggota baru yang diajak dan menaruh simpati terhadap gerakan Raksa Praja itu.

Sampai di Cengcem, sebuah kampung yang termasuk ke dalam wilayah cutak Singaparna, mereka mengingap di rumah Sumacandra. Mungkin memperhitungkan masalah keamanan, dari rumah Sumacandra mereka pindah lagi ke pondok Gaga dan di sini menginap selama empat malam. Di Kampung Cipetir inilah Raksa Praja menghimpun tambahan tenaga untuk memperkuat gerakannya. Di antara penduduk kampung ada yang terpengaruh serta langsung masuk menjadi anggotanya. Perjalanan berikutnya dilanjutkan menuju kampung Cikupa dan Cikupa dan Cikamiri yang kedua-duanya termasuk ke dalam wilayah cutak Tarogong. Di Cikamiri mereka menginap satu malam. Pada keesokan harinya gerakan Raksa Praja langsung menuju kampung Liang Maung, yang dimasukkan ke wilayah cutak Banjaran, dan di sini mereka menginap semalam. Setelah kampung Liang Maung mereka tinggalkan, akhirnya gerakan itu sampailah ke kkampung Cihanjaro sebagai daerah bawahan cutak Banjaran juga, dan di situ mereka menginap di rumah Laiya Santana selama dua malam.[50]

Pada saat gerakan perlawanan berada di kampung Cihanjaro terlintaslah pada pikiran Raksa Praja tentang bagaimana lankah

selanjutnya yang harus ditempuh oleh gerakan yang dipimpinnya itu. Guna mendapatkan informasi yang erat kaitannya dengan situasi dan kondisi kota Bandung, sekali lagi Raksa Praja menyuruh Sastra menghubungi Raden Aria Anggadikusuma dengan disertai sepucuk surat.

Dalam balasan surat Raden Aria Anggadikusuma diperoleh kesan, bahwa untuk sementara gerakan Raksa Praja dianjurkan agar bersembunyi. Surat jawaban Raden Aria Anggadikusuma ini bagi Raksa Praja sungguh sulit dibayangkan, bagaimana sesungguhnya sikap dan keinginan Raden Aria Anggadikusuma itu, seolah-olah ia meragukan akan kemampuan dan kekuatan gerakan Raksa Praja. Semula Raksa Praja mengharapkan suatu informasi yang jelas mengenai situasi kota Bandung beserta persiapan-persiapan yang dilakukan Raden Aria Anggadikusuma. Surat jawaban tersebut telah menimbulkan rasa kecewa bagi Raksa Praja, karena harapan yang berupa bantuan dan sambutan dari Raden Aria Anggadikusuma sampai saat itu masih belum bisa diperkirakan. Tetapi sekalipun kekecewaan itu ada pada diri Raksa Praja dan gerak-gerik Raden Aria Anggadikusuma. Raksa Praja memutuskan untuk meninggalkan kampung Cihanjaro. Mereka melanjutkan perjalanan dan kemudian sampailah di Gunung Tilu. Di situ mereka tinggal bersembunyi selama 15 hari, dan di situ pula Raksa Praja menggelari dirinya dengan nama Pangeran Raja Markum.[51]

Raksa Praja setelah menentukan empat persembunyian anakbuahnya dirasakan perlu memberitahukan tentang lokasi gerakannya kepada Raden Aria Anggadikusuma. Untuk keperluan itu lalu disuruhnya Sastra supaya menemui Raden Aria Anggadikusuma di Bandung.

Menyadari akan rasa kecewa pada diri Raksa Praja, maka dengan pertemuan dengan Sastra, Raden Aria Anggadikusuma mencoba meyakinkan Sastra, bahwa ia masih tetap bertekad untuk turut serta dalam pemberontakan. Dalam pertemuan

yang ketiga kali itu Raden Aria Anggadikusuma menyatakan dirinya sebagai Ratu Adil. Ia pun berjanji, bahwa ia akan berang kat ke Cilauteureun guna menjemput 71 buah kapal dan Nyai Ratu Ageng dalam rangka membantu gerakan Raksa Praja. Selanjutnya untuk membesarkan hati Raksa Praja, dikirimkanlah dengan perantaraan Sastra seperangkat barang-barang yang biasa diperlukan oleh seorang bupati, berupa dua rol kain putih, satu rol kain merah, dua buah sendok mas yang memakai keris, 30 butir batu senapan, dan satu helai kain panas. Sebelum barang-barang tadi disampaikan ke tangan Sastra. Raden Aria Anggadikusuma meminta agar Sastra menemui Raden Jaya Kusuma bekas Kepala Cutak Ciparay. Barang-barang tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepadanya, dan melalui Raden Jaya Kusuma inilah akhirnya barang-barang keperluan bupati dapat sampai ke tangan Raksa Praja. Jadi liku-liku penyampaian barang-barang tersebut secara singkatnya tidak boleh disampaikan oleh Sastra yang belum pernah menduduki jabatan tinggi. Oleh karena itu dengan perantara Raden Jaya Kusuma barang-barang tersebut secara resmi disampaikan oleh orang yang pernah menjabat jabatan tinggi dari pada Raksa Praja sendiri. Aturan penyerahan barang-barang itu dimaksudkan juga sebagai aturan permainan yang wajar dari atasan kepada bawahan. Dengan demikian dapatlah digambarkan, bahwa dalam mengatur segala kegiatan yang dilakukan Raksa Praja sesungguhnya dikendalikan oleh Raden Aria Anggadikusuma selaku pimpinan tertinggi dalam melakukan perlawanan itu.[52]
Untuk membuktikan tentang benar tidaknya Raksa Praja berada di Gunung Tilu, maka disamping mengutus Raden Jaya Kusuma, disertakan pula Bapa Upi selaku utusan pribadi Raden Aria Anggadikusuma. Setelah terbukti bahwa Raksa Praja berada di Gunung Tilu, maka pada tanggal 5 Mei 1842 diutuslah istri Bapa Upi dengan tugas menemui Raksa Praja dan kepadanya ditanyakan tentang keperluan makanan apa yang dikehendakinya. Kepada Ma Upi dipesankan juga, bahwa Raden Aria

Anggadikusuma ingin bertemu secara langsung dengan Raksa Praja di Bandung yang pelaksanaan penjemputannya akan dilakukan oleh utusannya Utusan Raden Aria Anggadikusuma akan menjemputnya di Citarum.[53]

Atas dasar pesan Raden Aria Anggadikusuma itu, Raksa Praja berangkatlah menuju Bandung. Setelah tiba di Citarum, diketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Dengan perasaan kecewa kemudian kembali lagi ke Gunung Tilu. Di sana ia mengadakan pertemuan besar dengan pengikutnya dan dalam pertemuan tersebut dikemukakannya sekali lagi, bahwa secara tegas Raksa Praja bersama komplotannya akan melaksanakan penyerangan ke kota Bandung dan sekaligus mengadakan perebutan kekuasaan Bupati Bandung. Dalam pertemuan itu juga Raksa Praja menunjuk empat orang andalannya, masing-masing Ba Sawi, Ali Pakuwan, Raksawijaya, dan Natawijaya, yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada Raden Aria Angadikusuma, bahwa Raksa Praja bersama pengikutnya akan segera melakukan serbuan ke kota Bandung. Mereka berangkat menuju Bandung dengan diantar oleh Ma Upi (istri Bapa Upi) yang pada waktu itu masih berada di Gunung Tilu. Setiba di Bandung mereka disambut oleh Bapa Upi. Setelah Bapa Upi melaporkan kedatangan utusan Raksa Praja, kemudian Raden Aria Anggadikusuma menyampaikan pesan melalui Bapa Upi, bahwa mereka ditunggu di mesjid kecil.

Ketika mereka bertemu di mesjid, Ali Pakuwan selaku juru bicara utusan Raksa Praja menyampaikan apa yang telah dipesankan oleh Raksa Praja seperti telah dikemukakan di atas tadi. Ternyata Anggadikusuma setelah mendengar pesan Raksa Praja itu menjadi cemas dan tidak menghendaki rencana penyerangan ke Bandung itu. Untuk menutupi ketidak setujuannya, segera ia menulis surat yang berisikan saran, antara lain supaya rencana Raksa Praja sebaiknya dilancarkan pada tahun Alip,

dan harus dilancarkan di Tegal Luwar. Jika diperhitungkan dengan mengadakan penyesuaian antara tahun Hijrah dengan tahun Masehi, maka yang diartikan tahun Alip oleh Anggadikusuma ialah tahun 1843. Jelaslah bahwa Anggadikusuma untuk membendung rencana Raksa Praja itu selalu diusahakan dengan jalan mengulur-ulur waktu agar serangan itu tidak langsung ditujukan ke Bandung. Dalam surat Anggadikusuma dikatakan pula, bahwa Raksa Praja beserta penganutnya dianjurkan supaya pergi ke daerah cutak Cidamar yang waktu itu Kepala cutak Cidamar, Jaya Samudra, memang tidak disenangi penduduknya, karena ia bukan orang asli dari daerah itu.[54] Anjuran Anggadikusuma tersebut mengandung arti, bahwa ia berusaha agar serangan Raksa Praja yang semula ditujukan ke Bandung dapat digagalkan dan dibelokkan ke cutak Cidamar.

Sekalipun Raksa Praja merasa dikecewakan dengan anjuran-anjuran Anggadikusuma melalui suratnya yang dibawa oleh utusan tadi, namun Raksa Praja rupanya masih menaruh kepercayaan kepada Anggadikusuma. Guna melaksanakan anjurannya itu. Sekali lagi Raksa Praja menyampaikan surat ke Anggadikusuma tentang apa yang harus dilakukannya untuk langkah-langkah selanjutnya. Tanggal 19 Mei 1842 Ba Kasdin setelah menjemput Laija Santana dari kampung Cihanjaro, berangkatlah berdua menuju Bandung.

Surat Raksa Praja dijawab oleh Anggadikusuma, yang berisikan perulangan janjinya, bahwa ia akan pergi ke Cilauteureun menjemput kapal sebanyak 71 buah dan menjemput Nyai Ratu Ageng. Ba Kasdin, dan Laija kembali ke Gunung Tilu dengan disertai anggota baru, bernama Mujiam yang dibawanya dari kampung Cihanjaro. Dengan jawaban Anggadikusuma itu lalu Raksa Praja melaksanakan anjuran Anggadikusuma,dan ditinggalkannyalah Gunung Tilu. Bersama rombongannya Raksa Praja mengadakan perjalanan menuju daerah cutak Cidamar. Ternyata mereka mendapatkan tambahan pengikut sebanyak

24 orang yang terdiri atas orang-orang yang tidak senang terhadap Kepala Cutak Cidamar. Di daerah ini komplotan Raksa Praja selain mendapat pengikut yang banyak, mereka pun mengadakan pengacauan dan menakut-nakuti penduduk dengan jalan kekerasan.[55] Tetapi karena sengaja menghindari untuk langsung berhadapan dengan serdadu pihak pemerintah Hindia Belanda, mereka segera meninggalkan daerah itu dan bersembunyi di hutan Cikalibit. Di situ mereka menginap semalam dan keesokan harinya mereka memasuki kampung Nyalindung. Kedudukan mereka masih terasa terancam. Setelah menginap semalam di kampung Nyalindung, kemudian mereka menuju kampung Cimiring, dan di sini bermalam selama tiga malam. Di tempat ini Raksa Praja setelah mengangkat dirinya sebagai Sultan Raja Kanoman dan Pangeran Raja Markum, lalu memberi gelar pula kepada pembantu-pembantu utamanya. Laija Santana bergelar Pangeran Laija Kusuma, Mujiam bergelar Pangeran Bagus Mujiam, Ali Pakuwan bergelar Pangeran Pakuwan, Genjreng bergelar Pangeran Genjreng, Jaya bergelar Pangeran Jaya, Natayuda bergelar Pangeran Natayuda, dan Ba Sawi bergelar Braja Gelap.[56]

Di daerah Cimiring Raksa Praja mengutus Wangsa untuk menyampaikan surat kepada Raden Aria Anggadikusuma, yang isinya berupa pemberitahuan bahwa ia bersama pengikutnya sudah berada di Cimiring.[57] Sebaliknya, Raden Aria Anggadikusuma pun lewat tangan Wangsa ini telah menyampaikan surat balasan bagi Raksa Praja, yang di dalamnya berisikan anjuran, bahwa Raksa Praja bersama pengikutnya harus melanjutkan perjalanannya ke Cilauteureun, dan di tempat itu Raksa Praja dapat bertemu langsung dengan dia. Untuk kesekian kalinya Raksa Praja tetap mematuhi anjuran dan petunjuk Anggadikusuma, karena masih mempunyai keyakinan, bahwa ia masih berkesungguhan untuk membantu usahanya dalam rencana perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Di atas telah dikemukakan, bahwa rombongan Raksa Praja masuk ke daerah cutak Cidamar, mereka mengadakan kekacauan dan menakut-nakuti rakyat daerah itu, serta berhasil menambah anggota komplotannya yang diambil dari daerah tersebut. Dalam menghadapi tindakan kekerasan yang dilancarkan gerakan Raksa Praja itu, Jaya Samudra selaku Kepala cutak Cidamar segera mengambil kebijaksanaan lain dalam cara mengatasi kegitan mereka di situ. Langkah pertama, ia berusaha dengan jalan pendekatan kepada mereka dan menanyakan tentang maksud mereka datang ke daerah cutak Cidamar. Untuk keperluan itu, Jaya Samudra memerintahkan kepada Kopral Polisi, Suma Wireja bersama 11 orang anak buahnya dikirim ke kampung Cimiring.[58] Lewat para pengamatnya pada waktu itu Jaya Samudra mendapat laporan, bahwa di daerahnya telah didatangi rombongan pengikut Raksa Praja. Cara mengatasi mereka oleh Jaya Samudra tidak dilawan dengan cara kekerasan, termasuk pengiriman seorang Kopral Polisi (Suma Wireja) yang memimpin 11 orang anak buahnya. Mereka dikirim ke daerah Cimiring bukanlah dengan maksud untuk menyerang gerakan Raksa Praja, tetapi hanyalah sebagai utusan pemerintah setempat guna menanyakan tentang maksud mereka datang ke situ. Dari Ali Pakuwan selaku utusan Raksa Praja, didapat penjelasan, bahwa mereka datang ke Cidamar ialah untuk melanjutkan perjalanan ke Cilauteureun. Atas dasar penjelasan Ali Pakuwan, lalu Suma Wireja menyarankan agar sebelum mereka meneruskan perjalanannya terlebih dahulu harus melapor kepada Kepala cutak di Cidamar. Tetapi Ali Pakuwan menolak saran Suma Wireja, bahkan sebaliknya Ali Pakuwan bersama anak buahnya segera menangkap utusan Jaya Samudra itu.[59] Bersama gerakan Raksa Praja mereka dibawa ke kampung Cilimus dengan status sebagai tawanan. Di daerah ini Raksa Praja berhasil menambah anggota pengikutnya sehingga jumlah keseluruhannya tercatat sebanyak 90 orang.[60]

Jaya Samudra setelah mendengar bahwa Kopral Polisi Suma Wireja beserta 11 orang anak buahnya ditangkap gerakan perlawanan Raksa Praja, mulailah sadar bahwa di daerahnya dimasuki komplotan pengacau. Sebagai langkah kedua dalam menangani kekacauan di daerahnya, segeralah Jaya Samudra memerintahkan Gariman selaku kepala pasukan untuk mengumpulkan anak-buahnya. Ia berhasil menghimpun sejumlah 150 orang yang akan digunakan untuk menyerang gerakan Raksa Praja. Mereka segera diberangkatkan ke Cilimus, dan Gariman langsung menemui Raksa Praja. Dengan nada yang bersifat menggertak Gariman mengatakan bahwa 150 orang anak-buahnya telah siap untuk menggempur gerakan Raksa Praja. Ucapan Gariman dijawab oleh Raksa Praja secara gertak-balik pula dengan mengatakan, "Jangankan 150 orang, 200 sampai 300 orang pun akan saya lawan".[61] Mendengar jawaban Raksa Praja demikian, Gariman seperti tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali mengurungkan niatnya untuk menyerang gerombolan Raksa Praja, yang banyaknya akan lebih banyak jika dibanding dengan pasukan yang dibawanya, sehingga ia tidak dapat mencegah tekad Raksa Praja berangkat ke Cilauteureun. Serangan yang tidak jadi dilakukan oleh pasukan Gariman itu justru menambah semangat pengikut-pengikut Raksa Praja. Pasukan Gariman diserang dan dikejar-kejar sampai ke pusat cutak Cidamar. Jaya Samudra sendiri selaku Kepala cutak Cidamar berhasil ditangkap pengikut-pengikut Raksa Praja, tetapi keesokan harinya ia dibebaskan kembali, karena dianggap bukan merupakan tokoh penting dan bukan orang populer di kalangan masyarakat daerah Cidamar.[62]

Selama dalam perjalanan menuju Cilauteureun, gerakan Raksa Praja sempat singgah di Guha Gentong dan di Sodong Leuwi Buaya. Di kedua tempat itu mereka menginap masing-masing satu malam. Pada saat mereka berada di Sodang Leuwi Buaya, datanglah seorang utusan Raden Aria Anggadikusuma,

bernama Aki Jungjung, yang membawa pesan, bahwa mereka atas anjuran Raden Aria Anggadikusuma harus berangkat menuju Bungbulang. Untuk kali ini Raksa Praja secara langsung menolak anjuran Raden Aria Anggadikusumah itu. Kemudian ia mengutus Laija Santana dan Mujiam untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Raden Aria Anggadikusuma, yang pada waktu itu menurut Aki Jungjung sedang berada di Bungbulang.

Sementara itu Jaya Samudra setelah dibebaskan kembali oleh gerakan Raksa Praja, segera ia melaporkan tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya, terutama mengenai jumlah kekuatan gerakan pengacau, kepada Ridders, yang pada waktu itu sedang menjabat sebagai Residen Priangan *(Preanger-Redgentschappen).* Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Ridders memerintahkan kepada Bupati-bupati Bandung, Limbangan, dan Sukapura supaya mempersiapkan pasukan-pasukannya guna menumpas gerakan Raksa Praja.

Ternyata pasukan-pasukan yang didatangkan dari kabupaten-kabupaten tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka telah berhasil menangkap Ali Pakuwan dan Mujiam yang sedang melakukan perjalanan menuju Bung-bulang dengan tugas untuk menyampaikan surat dari Raksa Praja kepada Raden Aria Anggadikusuma. Dengan tertangkapnya kedua orang komplotan Raksa Praja itu mulailah terbongkar tentang rencana dan tujuan komplotannya.

Adanya pasukan gabungan kabupaten tadi akhirnya tembus juga kepada Anggadikusuma, sehingga dengan perantaraan Aki Jungjung segeralah disampaikan pesan supaya perjalanan dikonsentrasikan pasukan gabungan pemerintah untuk menggempur gerakan Raksa Praja. Setelah menerima pesan Anggadikusuma, gerakan Raksa Praja segera meninggalkan Sodong Leuwi Buaya dan mereka berangkat menuju Cilayu dengan membawa tawanan Suma Wireja beserta 11 orang anak buahnya. Mereka akhirnya dibebaskan setelah sampai di Cilayu. Dari Cilayu perjalanan

mereka diteruskan ke Cipancang. Selanjutnya perjalanan diteruskan ke Sodong Ciliyak. Baik di Cilayu maupun di Sodong Ciliyak mereka hanya tinggal semalam saja. Keesokan harinya mereka menuju ke kampung Cikaso, yang termasuk wilayah cutak Kandangwesi. Di situ mereka tinggal selama empat malam. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya ke Muara Cikandang, Cirompong, dan Cigelam yang termasuk ke dalam wilayah cutak Garut, kabupaten Limbangan. Selama dalam perjalanan dari Cipapancang sampai di Cigelam gerakan Raksa Praja pernah berhadapan dengan pasukan pengamat Jaya Samudra, sehingga mereka berhasil menangkap 19 orang anak buah Jaya Samudra. Di Cigelam mereka berhasil menewaskan seorang utusan Kepala cutak Garut.[63] Dari Cigelam perjalanan dilanjutkan ke Gunung Sembung, dan di sini mereka menginap semalam. Keesokan harinya mereka berangkat menuju Gunung Guhatana, dan menginap selama dua malam. Akhirnya mereka sampai hutan Kesesepan, atau berada di kaki Gunung Windu, yang termasuk ke dalam wilayah cutak Majalaya.[64] Di hutan Kasesepan mereka tinggal selama dua malam.

Setelah mendengar laporan, bahwa gerakan Raksa Praja berada di hutan Kasesepan, segeralah Kepala Cutak Majalaya menyiapkan pasukannya sebanyak 20 orang dengan tugas untuk mengamat-amati gerak-gerik mereka. Pasukan tersebut kemudian mengirim lima orang utusan yang diserahi tugas untuk menanyakan tentang maksud gerakan Raksa Praja datang di daerah Majalaya. Guna menghadapi utusan Majalaya. Raksa Praja memerintahkan Dipatruna. Pranawijaya, Raksa, Masta, dan Ba Eyet. Kepada mereka Raksa Praja memerintahkan agar melakukan tindakan kekerasan yaitu menyerang kelima orang utusan itu. Akibat serangan mereka, salah seorang utusan Majalaya menjadi korban keganasannya.[65] sedangkan empat orang lainnya berhasil melarikan diri, dan melapor kepada Komandan Prajurit Majalaya, berpangkat Letnan bernama Raden Rangga Suriadireja. Berdasarkan laporan itu, maka pada tanggal 8 Juni

1842 Letnan R. Rangga Suriadireja menyiapkan seluruh pasukannya dan diberangkatkan ke hutan Kasesepan guna menyerang Raksa Praja.[66] Dalam melawan gerakan Raksa Praja, diberitakan bahwa tujuh orang anak buah Raden Rangga Suriadireja tewas, sedangkan dari pihak Raksa Praja, delapan orang tewas, dan 5 orang lainnya ditangkap. Raksa Praja beserta pengikut-pengikutnya setelah terjadi pertempuran di hutan Kesesepan segera meninggalkan hutan itu menuju daerah Cilaki, dan di situ mereka beristirahat semalam.[67]

Langkah lanjut untuk memadamkan gerakan Raksa Praja dimungkinkan setelah keluarnya instruksi Ridders selaku Residen Priangan kepada Bupati Bandung. Sebagai pelaksanaan instruksi tadi, Bupati Bandung mengerahkan 200 orang prajurit, ditambah dengan lima orang andalannya yang terdiri atas Nitipraja, Martadireja, Abdulrahman, Raden Natadireja, dan Raden Purakusuma. Mereka bersiap-siap di Sukapura.[68] Pasukan ini kemudian bergabung dengan pasukan-pasukan kabupaten lainnya, yang dipersiapkan juga di Sukapura. Seluruh pasukan pemerintah ini akhirnya diberangkatkan ke Cilaki.

Akibat serangan yang efektif ini, gerakan Raksa Praja dapat dilumpuhkan dan sisanya melarikan diri secara terpencar-pencar, sedangkan Raksa Praja sendiri sempat melarikan diri ke daerah hutan Gunung Cayur.[69]

Untuk menggarisbawahi peristiwa gerakan perlawanan Raksa Praja ini perlu dipertanyakan tentang nasib Raksa Praja sendiri sebagai pemimpin gerakannya, dan bagaimana pula halnya dengan nasib Raden Aria Anggadikusuma, serta nasib tokoh-tokoh lainnya? Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, salah satu sumber pemerintah Hindia Belanda secara singkat mengatakan, bahwa Residen dengan bantuan para bupati, polisi, dan tentara berhasil mengakhiri pemberontakan itu dengan jalan menangkap dan membuang Raden Aria Anggadikusuma, sedangkan dari sembilan orang yang jatuh ke tangan polisi terdapat seorang yang menamakan dirinya Sultan Kanoman.[70]

Dari keterangan singkat itu dapat penjelasan, bahwa Raksa Praja atau Sultan Raja Kanoman setelah berhasil melarikan diri ke Gunung Cayur pada saat terjadinya pertempuran Cilaki, akhirnya ia berhasil juga ditangkap polisi. Tetapi apabila memang Raksa Praja itu tertangkap, mengapa di dalam proses pengadilan untuk menentukan bentuk hukumnya, tidak terdapat berkas perkaranya? Mungkinkah setelah ditangkap itu langsung dibunuh? Untuk memecahkan persoalan ini belum diperoleh suatu sumber atau keterangan lain.

Setelah menyimak gerakan Raksa Praja berdasarkan uraian di atas dapatlah diambil suatu jangkauan kesimpulan, bahwa :

(1) Gerakan perlawanan Raksa Praja dalam usahanya menentang kekuasaan pemerintah penjajahan Belanda telah berakhir dengan kegagalan, karena gerakan perlawanan itu tidak mempunyai konsepsi atau orientasi yang jelas tentang maksud dan tujuan perlawanan tersebut. Gerakan ini sifatnya masih tradisional, karena tidak memiliki landasan kokoh dalam rangka membentuk suatu organisasi program, strategi, dan taktik yang baik.

(2) Raksa Praja sendiri sebagai pencetus dan pelaksana perlawanan tidak mempunyai keputusan yang pasti untuk merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan, karena ia terlalu percaya kepada Raden Aria Anggadikusuma, yang sebenarnya tidak mempunyai wawasan yang luas terhadap situasi dan kondisi politik yang riil pada waktu itu. Raden Aria Anggadikusuma memang orang yang mempunyai ambisi, tetapi ambisi untuk melawan kepada pemerintah tidak ada pada dirinya. Raden Aria Anggadikusuma orang yang berwatak tidak senang pada tindakan kekerasan. Sebaliknya, Raksa Praja adalah orang yang berambisi keras, tetapi rapuh dalam pikirannya, karena mudah didikte orang lain.

(3) Perlawanan Raksa Praja ini gagal, karena tidak ada suatu koordinasi yang terpadu antara Raksa Praja dengan Raden

Aria Anggadikusuma. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan tujuan.

3.3 Gerakan Perlawanan Nyi Aciah (1870 – 1871)

Gerakan perlawanan Nyi Aciah dikatagorikan sebagai salah satu gerakan lokal yang bersifat keagamaan. Gerakan ini dapat juga dianggap sebagai akibat terjadinya proses dinamika masyarakat setempat.[71] Nama Nyi Aciah sesungguhnya ialah Dewi Siti Johar Manikem. Di samping nama tersebut, karena kesaktiannya, timbul suatu anggapan, bahwa ia bukanlah keturunan makhluk biasa, melainkan ia adalah seorang putri dari Jamadil kubra. Kepadanya banyak orang yang datang untuk berobat, dan sebagai tanda terima kasih, Nyi Aciah sering mendapat imbalan berupa hadiah-hadiah. Sebagai salah seorang gadis Sunda yang memiliki keluarbiasaan ia mulai dikenal di kalangan penduduk Sumedang dan sekitarnya sejak usia 4 atau 5 tahun. Dengan bekal kesaktiannya, ia semakin tersohor lagi setelah berhasil menyembuhkan penyakit mata yang diderita ayahnya, Bapa Naip. Pada akhirnya penduduk setempat memandangnya sebagai orang suci dan berbuat hormat kepadanya. Setiap mengadakan kunjungan ke tempat-tempat lain, ia selalu disertai para pengiringnya, dan tidak ketinggalan pula ayahnya sendiri.

Munculnya gerakan Nyi Aciah dalam situasi kolonial telah tersebar di kalangan penduduk suatu ramalan, bahwa di kemudian hari akan berdiri dua buah kerajaan Sunda, masing-masing di Keling sebelah selatan Banjar, dan di Tegal luar.

Sementara itu ketika rombongan Nyi Aciah sampai di rumah Bapa Asminem di Cibiana, distrik Majalengka, diadakanlah suatu pertemuan yang dihadiri juga oleh Hasan Mohammad. Hasan Mohammad ini berasal dari daerah Urug, dan ia mengakui dirinya sebagai salah seorang keturunan Jawa berasal dari daerah Bagelen. Sebelum bertemu dengan Nyi Aciah, ia pernah mendapatkan pendidikan keagamaan di pesantren Malangbong (di

daerah Garut) dan pesantren di Jawa Timur, misalnya di Madiun dan Kediri. Pada tahun 1868 ia pulang ke kampung halamannya, yaitu kampung Urug, dan di situlah ia mengangkat dirinya sebagai ustad (guru agama) dan sebagai dukun. Karena kepandaiannya dalam masalah keagamaan, penduduk setempat menyebut "kiai". Ia sangat dihormati dan dipuja penduduk sekitarnya.

Hasan Mohammad sebelum melancarkan gerakan yang dipimpinnya, pernah pula melakukan beberapa kali tapa, dan dalam menjalankan tapa tersebut jiwanya sering dikuasai oleh roh suci, yang kemudian diucapkannya sebagai "ilham". Setiap ilham yang diperolehnya ditulis sebagai "piagem", yang kemudian dikenal sebagai "surat tobat". Salinan atau copy "piagam" tadi disebarluaskan di antara para penganutnya ketika gerakan keagamaannya mulai dilancarkan.

Di atas telah dikemukakan, bahwa ketika Nyi Aciah datang di rumah Bapa Asminem, Hasan Mohammad pun ikut pula menghadirinya. Dalam kesempatan tersebut, sekalipun Hasan Mohammad baru pertama kalinya bertemu dengan Nyi Aciah, ia secara spontan memanggil Nyi Aciah sebagai anaknya, yang telah sekian lama dicarinya. Berdasarkan ilhamnya, di dalam pertemuan itu ia mengatakan, bahwa telah tiba saatnya akan pecah perang dan peraturan yang berlaku sekarang ini harus dimusnahkan. Selanjutnya dikatakan, bahwa di kemudian hari akan berdiri dua kerajaan seperti telah dikemukakan di atas. Dalam salinan piagam pertama yang diberikan kepada Nyi Aciah disebutkan, bahwa ia akan diangkat sebagai Ratu Kerajaan Tegalluar, sedangkan Hasan Mohammad akan bertindak sebagai patihnya. Bapak Enom dan anaknya masing-masing dicalonkan sebagai panglima perang, dan sebagai pembawa payung kebesaran kerajaan Sunda. Oleh karena Nyi Aciah ini lahir dari keturunan yang utama, kepada para regen, pangeran-pangeran, dan kaum bangsawan lainnya diminta supaya jangan merintangi

gerakannya. Dalam usaha melancarkan gerakannya itu, Hasan Mohammad pun telah berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Raden Mohammad Ahmad (Naib Tasikmalaya), Mohamad Sanusi (Naib Indihiang), Mas Abdul Manan (Naib Malangbong), Bapak Enom dan Bapak Arsinem (kedua-duanya dari Cibiana), Bapa Naip beserta Ambu Aciah (orang tua Nyi Aciah), Haji Abdullah, dan Haji Abdullah Umar.

Ketika gerakan Nyi Aciah mengunjungi daerah Malangbong pada bulan Mei 1871, ternyata mereka mendapat sambutan dan dorongan hangat dari sebagian besar kaum wanita di daerah tersebut, di antaranya dari istri Wedana Malangbong. Di antara pengiring-pengiring Nyi Aciah sendiri terdapat juga beberapa orang "petinggi" (kepala-kepala sub distrik).

Pihak pemerintah kolonial Belanda menganggap, bahwa gerakan Nyi Aciah ini perlu ditindak, karena dalam gerak-geriknya telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Atas dasar anggapan tersebut, Nyi Aciah beserta penganut-penganutnya yang terkenal segera ditahan pada awal bulan Mei 1871.

Kasus gerakan Nyi Aciah merupakan suatu bentuk gerakan keagamaan yang mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya tentang harapan datangnya atau timbulnya kembali Kerajaan Sunda. Gerakan tersebut memiliki kesamaan tujuan dengan gerakan-gerakan mesianis terdahulu, seperti gerakan Raksa Praja (1841), gerakan Bapa Kantang (1853), dan gerakan Mutayam (1863).[72]

3.4 Gerakan Perlawanan Sosial di Tanah Partikelir

Gerakan perlawanan sosial dikenal juga denganistilah "gerakan melawan pemerasan", "gerakan melawan keadaan" atau "gerakan melawan peraturan yang tidak adil". Dalam istilah kolonial peristiwa perlawanan semacam itu dikatagorikan sebagai "gangguan ketenteraman", "huru-hara", "kerusuhan", atau "gerakan rohani".[73] Suatu ciri umum, bahwa hampir

semua gerakan perlawanan sosial peristiwanya terjadi di tanah-tanah partikelir *(particuliere landerijen)*. Guna memahami sebab-sebab timbulnya gerakan tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan sedikit tentang asal-usul terbentuknya tanah partikelir dan situasi yang mempengaruhinya.

Tanah partikelir timbul sejak awal jaman VOC sampai perempatan pertama abad ke-19, sebagai akibat adanya praktek penjualan tanah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Tanah-tanah tersebut berlokasi di sekitar Batavia, sebagian besar berada di daerah pedalaman antara Batavia dan Bogor, daerah Banten, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Pada awal kekuasaan VOC tanah tadi dihadiahkan kepada penanggungjawab keamanan dan ketenteraman daerah di sekitar Batavia, sedangkan sebagian kecil ada yang diberikan kepada kepala-kepala pribumi. Khusus untuk tanah partikelir daerah Bogor, status pemilikannya berada di tangan pribadi para Gubernur Jenderal yang berlangsung secara berturut-turut. Bagi orang yang menerima tanah tersebut secara leluasa mereka bertindak sebagai tuan-tuan tanah dan segera menguasai penggarap tanah dengan dikenakan beban berupa pajak tanah *(cuke)* yang tinggi, serta penyerahan wajib kerja yang berat. Tindakan pemerasan tuan tanah di wilayah pemilikan tanahnya itu membangkitkan gerakan perlawanan sosial yang penampilannya lebih cenderung bermotifkan perasaan dendam yang bersifat milenaristis atau mesianistis. Untuk menghilangkan kegelisahan para petani di daerah tersebut pada masa pemerintahan Daendels dan Raffles pernah dikeluarkan larangan kepada tuan-tuan tanah untuk memperoleh sepersepuluh dari hasil tanah atau menentukan penyerahan tenaga kerja yang berat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tahun 1836 dinyatakan, bahwa pemerintah mempunyai hak untuk melindungi para petani dan mengatur suatu peradilan di tanah partikelir. Tetapi dalam menghadapi kecurangan tuan-tuan tanah, termasuk para pembantunya, pi-

hak pemerintah sangat sulit mengawasinya, sehingga kegelisahan di kalangan petani semakin cenderung untuk mencetuskan gagasan dengan jalan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk perlawanan yang berkesinambungan. Contoh kongkrit perlawanan petani yang bersekala agak besar dan terorganisasi, misalnya perlawanan-perlawanan yang terjadi di Cikandi Udik (tahun 1845). Ciomas (tahun 1886), dan perlawanan Ciampea (tahun 1892).[74] Kasus perlawanan petani di tanah-tanah partikelir selama periode abad ke-19 dan 20 banyak terjadi seolah-olah merupakan hal yang lumrah. Daerah Banten paling sering terjadi perlawanan semacam itu, sehingga secara khusus daerah itu dikatagorikan mempunyai tradisi suka memberontak.[75]

Sekedar untuk memperoleh gambaran singkat mengenai beberapa kasus perlawanan sosial dalam rangka menjelaskan uraian di atas, berikut ini akan dibicarakan tentang gerakan perlawanan sosial di Cikandi Udik, dan Ciomas.

3.4.1 Gerakan Perlawanan Sosial di Cikamandi Udik (1845

Kebencian dan perasaan dendam yang mendalam terhadap tuan tanah partikelir Cikandi Udik sudah tidak dapat dibendung lagi oleh para petani. Perasaan dendam mereka dibuktikan dengan melakukan pemberontakan sebagai manifestasi tidak tertahannya memikul beban berupa pajak (cuke) yang tinggi dan pelayanan wajib kerja yang dirasakan sangat berat. Meledaknya pemberontakan itu terjadi pada tanggal 13 Desember 1845. Secara mendadak mereka menyerbu ke rumah tuan tanah P.J. Kamphuys. Akibat serbuan tersebut, P.J. Kamphuys beserta isteri dan kelima orang anaknya terbunuh. Di samping keluarga P.J. Kamphuys, ikut juga terbunuh beberapa orang Eropa yang tinggal di situ, seperti Pes Viering beserta isteri dan empat orang anaknya, dan Wanbert de Puiseau.[76] Tiga orang anak P.J. Kamphuys lainnya berhasil diselamatkan oleh Bapa Sarinten, salah seorang pimpinan pemberontak. Selama berada di rumah tuan tanah P.J. Kamphuys, semua pengikut

pemberontakan dilarang keras melakukan perampokan. Sebaliknya tempat tersebut dijadikan markas, dan di situ dikibarkan bendera pemberontak. Mereka mengadakan upacara sebagai tanda kesetiaannya kepada kerajaan Banten bahari. Sementara itu jumlah pengikut pemberontak meningkat sampai 600 orang.[77]

Setelah diadakan pengusutan, ternyata gerakan perlawanan terhadap terhadap penguasa tanah partikelir Cikandi Udik digerakkan oleh keluarga Mas Jakaria, yaitu Mas Agus, Mas Mayi, Unyar, Nuraipa, Mas Cingak, Sakudin, Bapak Kamidin, Culang, Bapak Arbaya, dan Nidian,[78] ditambah tiga orang putera Mas Jakaria,[79] masing-masing Mas Anom, Mas Serdang, dan Mas Andong.[80] Ketiga putera Mas Jakaria tahun 1849 pernah diasingkan, tetapi dalam tahun 1841 berhasil meloloskan diri, yang kemudian secara diam-diam menyusup ke Banten. Residen Banten yang mempunyai kekuatan detasemen ''Jayasengkar' untuk sementara terpaksa harus menghindari 400 orang kaum pemberontak bersenjata. Setelah mendapat bantuan tentara dari Serang, ditambah dengan bantuan tentara yang didatangkan dari Batavia mulailah diadakan seranganpenumpasan terhadap pemberontak itu. Dari hasil serangan balasan itu tertangkap 384 orang, sedangkan yang lainnya berhasil meloloskan diri ke daerah di sekitarnya, dan sejumlah pemberontak lainnya mencoba menembus ke daerah selatan dengan maksud menggabungkan diri dengan gerombolan pemberontak di daerah itu. Di antara yang tertangkap terdapat seorang wanita bernama Nyai Perbata, yaitu Ibu Nyai Gumpara sendiri. Ia dilahirkan di Surakarta, dan setelah lama diam di Sawarna sebelah selatan Banten, kemudian bermukim di dekat *Wijnkoopsbaai* (sekitar Pelabuhan Ratu). Ia telah meramalkan akan berdirinya kembali kerajaan-kerajaan Banten dengan segala kemegahan dan kebesarannya seperti yang diharapkan oleh orang Banten. Ia meramalkan pula akan adanya istana yang megah, sebuah kendaraan istana yang indah datang dari sebelah barat pulau Jawa, menjemput

para pengikutnya, yang kesemuanya itu akan dihadiahi gelar kebangsawanan, pangkat, serta kekayaan.

Dari sejumlah 384 pemberontak yang tertangkap, 25 orang di antaranya dijatuhi hukuman mati, tetapi dalam kenyataannya hukuman mati hanya dijatuhkan kepada 13 orang saja,[81] 134 orang diasingkan dan dihukum kerja paksa, enam orang mati dalam penjara, dan sebanyak 219 orang dilepaskan

Setelah dijatuhi vonis, sejumlah 20 orang diasingkan ke luar Banten, yang terdiri atas keluarga Mas Jakaria, kepala desa, dan beberapa orang wakil kepala desa yang mengetahui tentang rencana pemberontakan itu tetapi tidak melaporkannya kepada yang berwajib.[82] Keputusan hukuman dilakukan pada tanggal 15 dan 17 Agustus 1846 di Serang dan di Cikandi Udik, tanpa mengakibatkan timbulnya kerusuhan.[83]

3.4.2 Gerakan Perlawanan Sosial di Ciomas (1886)

Menurut letak geografisnya, tanah partikelir Ciomas berada di lereng sebelah utara Gunung Salak. Tanah tersebut menjadi milik tuan tanah setelah dijual oleh Gubernur Jenderal Daendels, dengan meliputi areal tanah seluas 9.00 bau (1 bau = 0,8 hektar). Tanah seluas itu dihuni oleh penduduk kurang lebih 15.000 jiwa. Seperti di tanah partikelir lainnya di daerah Ciomas pun para petani dihadapkan kepada kodisi-kondisi sosial-ekonomi yang tidak menguntungkan, karena tenaganya dieksploitasi oleh tuan tanah, para pengawas, dan petugas tuan tanah lainnya yang menuntut pelayanan kerja yang berat, serta pemenuhan pajak (cuke) yang tinggi. Di samping cuke dan kerja berat, sebelum meletusnya gerakan petani itu perlu ditinjau keadaan politik danekonomi yang berlaku di daerah Ciomas sendiri, antara lain: (1). Para pemungut pajak sering melakukan praktek, bahwa untuk menunai panen para petani diharuskan menunggu · waktu yang ditentukan oleh tuan tanah. Untuk mengawasi panen, tuan tanah menunjuk petugas-petugas dan

penjaga yang ditempatkan di sawah-sawah. Oleh karena petugas-petugas dan penjaga itu tidak diawasai secara langsung oleh tuan tanah, mereka cenderung untuk menggunakan kedudukannya dengan praktek yang curang terhadap petani. Berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di tanah partikelir lainnya, bahwa pada saat panen tiba, penuaian hanya dilakukan oleh petani di daerah itu. Sedangkan di Ciomas, orang-orang dari luar diperbolehkan ikut menuai panen itu. Hal ini akan membawa akibat, bahwa sebagian dari hasil panen dapat diserap ke tempat lain, dan dengan sendirinya mengurangi pendapatan petani Ciomas, (2). Kekurangan pendapatan petani Ciomas itu ditimpa lagi dengan kewajiban untuk mengangkut hasil panen milik tuan tanah dari sawah-sawah ke lumbung-lumbung (gudang-gudang padi) yang jaraknya antara 10 sampai 12 paal (= 15 sampai 18 km); (3). Di kebun-kebun dan pabrik-pabrik kopi Ciomas berlaku juga sistem perbudakan yang lebih berat, sehingga di sini berlaku kerja paksa. Kepada buruh yang tidak hadir atau datang terlambat dikenakan peraturan yang keras. Apabila berhalangan dan sebagai gantinya dikirimkan orang lain, ternyata ditolak juga; (4). Kepada para petani dikenakan juga kewajiban untuk menyerahkan jenis barang tertentu, antara lain penyerahan dua butir kelapa untuk setiap pohon, penyerahan sebatang bambu untuk setiap petak sawah, penyerahan seluruh hasil pohon enau dan kopi yang diwajibkan ditanam di kebun petani yang jumlahnya mencapai 250 batang; (5). Petani dilarang mengekspor padi, kerbau, dan hasil bumi lainnya; (6). Jika petani tidak dapat membayar hutangnya, maka kepadanya dikenakan penyitaan atas tanah, rumah, dan kerbaunya; (7). Perluasan kekuasaan tuan tanah terhadap petani sampai juga pada pengawasan mengenai penjualan ternak, rumput, kayu, dan penebangan pohon-pohon; (8). Kaum wanita dan anak-anak pun diharuskan bekerja selama sembilan hari untuk setiap bulannya.[84]

Adanya dominasi politik, ekonomi, dan sosial yang dilakukan tuan tanah terhadap kaum petani seperti dikemukakan di

atas telah membawa iklim yang lebih buruk dan pada akhirnya sampai mencapai konflik yang tajam. Salah satu akibat dari pelaksanaan eksploitasi tenaga kerja yang berat dan pemungutan cuke yang tinggi menjelang pecahnya perlawanan petani ialah terjadinya migrasi penduduk dari daerah itu. Bagi mereka yang tidak tahan lagi dengan praktek pemerasan tuan tanah dan merasa terancam akan kehancuran ekonominya segeralah angkat kaki meninggalkan tanah partikelir Ciomas. Terjadilah pelarian petani Ciomas yang jumlahnya mencapai 2.000 orang.[85] Perasaan tidak puas petani untuk bekerja di tanah partikelir lebih nampak nyata ketika menolak kerja paksa di perkebunan kopi, dan mulailah mencetuskan perlawanan secara terbuka yang ditandai dengan tindakan kekerasan.

Perlawanan secara langsung diawali dengan melancarkan pemberontakan tanggal 22 Februari 1886, ketika mereka membunuh Camat Ciomas, Haji Abdurrachim. Masih pada buan Februari itu juga Arpan bersama kawan-kawannya mengundurkan diri ke Pasir Paok, dan di sana mereka menolak untuk menyerah kepada tentara pemerintah kolonial.[86]

Sebulan sebelum terjadinya kedua peristiwa tadi, Mohammad Idris telah mengundurkan diri ke Gunung Salak. Sekalipun ia lahir di Ciomas, namun dalam perjuangan hidupnya ia selalu berpindah-pindah tempat, misalnya ke Sukabumi dan Ciampea. Ia termasuk salah seorang yang sangat membenci tuan tanah dan kaki-tangannya. Karena sikapnya itu makin banyaklah petani pelarian dari tanah partikelir untuk menggabungkan diri. Setelah diadakan pertemuan besar di pondok kecilnya, Idris bersama pengikutnya bersepakat untuk melancarkan penyerangan ke Ciomas. Tepat pada hari Rabu malam, tanggal 19 Mei 1886 sesuai dengan rencana semula Idris bersama pengikutnya berhasil menduduki daerah Ciomas bagian selatan. Selama menduduki daerah tersebut mereka tidak melakukan perampokan terhadap gudang-gudang di Sukamantri,

Gadog, dan Warungloa. Bahkan sebaliknya mereka menyatakan, bahwa serangan yang dilancarkannya itu tidak dimaksudkan untuk merampok kekayaan, tetapi serangan tersebut hanya ditujukan khusus bagi pribadi tuan tanah. Tanggal 20 Mei 1886 para pemberontak menyelenggarakan upacara sedekah bumi di Gadog, yang dihadiri juga oleh semua pegawai tuan tanah. Upacara tersebut sebenarnya merupakan perayaan tahunan yang dimeriahkan dengan permainan musik, tari-tarian, dan atraksi-atraksi lainnya. Sebagai penutup dari perayaan itu, seolah-olah seperti diberikan aba-aba, bahwa kaum pemberontak setelah melihat pegawai-pegawai tuan tanah yang sesungguhnya bertindak sebagai penindas dan memeras mereka, beberapa di antara pengikut Mohamad Idris segera melampiaskan kemarahannya menyerang agen-agen tuan tanah secara membabi buta. Perayaan sedekah bumi itu berakhir dengan pembunuhan besar-besaran yang ditujukan kepadapegawai-pegawai tuan tanah. Dari peristiwa pembunuhan tadi diketaahui sejumlah 40 orang mati dibunuh, dan 70 orang lainnya luka-luka. Tuan tanah beserta keluarganya selamat, karena secara kebetulan mereka tidak hadir dalam upacara itu.[87]

Dari panggung peristiwa perlawanan petani Ciomas itu jelaslah bahwa yang menjadi sasaran utama dan sebagai musuhnya adalah tuan tanah, pegawai pemerintah kolonial baik asing maupun pribumi, para pedagang, dan lintah darat.

Gerakan perlawanan petani Ciomas memperlihatkan adanya spontanitas baik waktu timbul maupun selama masa berkembangnya, yang ditunjang juga dengan iklim atau situasi politik yang benar-benar telah diperhitungkan akan timbulnya gerakan perlawanan. Peristiwa perlawanan petani Ciomas merupakan suatu corak atau model perjuangan yang berlatarbelakangkan perbedaan kepentingan dan tujuan antara tuan tanah, pemerintah, dan pegawai-pegawai lainnya dengan kaum petani di lain pihak. Pertentangan kepentingan dan tujuan itu pada

akhirnya dapat dilakukan dalam bentuk perlawanan secara keras dari pihak petani sebagai protes akibat tekanan-tekanan yang berat.

3.5 Gerakan Kiai Hasan Maulani dari Lengkong (1842)

Gerakan Kiai Hasan Maulani sebenarnya belum dapat dianggap sebagai gerakan perlawanan terhadap pemerintah, karena itu terdapat bukti dan kegiatan-kegiatan untuk menghimpun suatu kekuatan fisik yang dibentuk di kalangan pengikut-pengikutnya. Pada tahun 1841 memang banyak orang berdatangan ke tempat kediamannya di Lengkong, tetapi tidak bermaksud untuk mengatur siasat dalam rangka menentang pemerintah kolonial. Mereka datang hanyalah untuk mendapatkan ilmu dan ajaran agama yang diberikan olèh kiai tersebut.[88] Adalah suatu hal yang wajar, bahwa Kiai Hasan Maulani sebagai guru agama dan pendiri Pesantren Lengkong sudah tentu mempunyai banyak santrinya. Ia pun sangat disegani penduduk. Kehadiran maupun nasihat-nasihatnya, bahkan sampai pada upacara kenduri, selamatan (sedekah), dan persoalan-persoalan lain yang keluar dari mulut seorang yang dianggap suci senantiasa dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya, termasuk hal-hal yang bersifat takhayul.

Pada tahun 1842 Kiai Hasan Maulani mengangkat dirinya sebagai "pembaharu agama" di Keresidenan Cirebon dan sekitarnya, yang kemudian diikuti dengan pengiriman utusan-utusannya serta pembuatan surat-surat selebaran mengenai ajaran-ajarannya. Surat-surat selebaran itu membawa akibat dan pengaruh besar bagi penduduk beserta pemimpin-pemimpin pemerintah kolonial.[89]

Sementara itu pada permulaan tahun 1842 di bagian timur Keresidenan Priangan beredar surat selebaran yang menurut kata orang, penyebarannya berasal dari Pangsor. Di antara isi surat selebaran tersebut menyatakan, bahwa Kiai Hasan

Maulani pada suatu ketika pernah mendengar suara gaib yang bertanya," Kiai apakah anda mau diperturutkan dengan Iblis?" Atas pertanyaan itu, lalu kiai menjawab, "Bukankah aku menjunjung Allah dan utusannya?' Sekali lagi suara gaib berkata, bahwa jika Kiai tidak ingin diperturutkan Iblis, maka ada keharusan untuk melaksanakan "selamatan" (sedekah). Waktu selamatan ialah pada malam Jum'at setelah selesai shalat, atau dapat juga dilakukan pada hari Selasa, atau hari Kamis. Dalam melaksanakan upacara selamatan gunakanlah piring pisin yang sudah tidak terpakai lagi, demikian juga sisa makanan, nasi, lauk pauk, dan lain-lainnya janganlah diambil kembali.

Di tempat-tempat lain, misalnya di Sukapura dan Limbangan setelah mendengar berita itu menjadi ketakutan dan berramai-ramai mengadakan selamatan. Ada pula orang-orang yang berfikir secara wajar, mereka tidak membiarkan diri diseret oleh rasa ketakutan, dan mencoba mencari duduk-perkara yang sebenarnya mengenai apa yang diutarakan oleh Kiai Hasan Maulani itu. Kepala penghulu Cianjur pernah menanyakan masalah selamatan tersebut kepada seorang temannya di Cirebon di Cirebon dengan mengemukakan pertanyaan, apakah selamatan tersebut berdasarkan kepada hukum adat, atau apakah selamatan tersebut berdasarkan kepada hukum adat, atau apakah selamatan itu sesuai dengan Quran, tradisi, ijma, qiyyas, atau hanya merupakan hal yang bid'ah belaka.

Di Cirebon sendiri, keresahan dan ketakutan penduduk semacam itu justru tidak ada. Ketika sumber sensassional itu diteliti, ternyata bahwa di bulan November 1841 pada beberapa rumah penduduk terjadi sesuatu hal yang aneh. Rumah-rumah mereka seperti diciprati dengan percikan darah. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, kejadian ini pun tidak menghasilkan jawaban yang kongkrit, sehingga persoalannya sudah dianggap selesai.

Setelah mendapat informasi mengenai surat edaran dan akibat yang ditimbulkannya residen Priangan segera mengambil inisiatif supaya pihak pemerintah menanganinya, sekalipun bupati Cianjur menyatakan, bahwa hal yang kecil itu belum waktunya pemerintah mengambil tindakan. Untuk maksud tersebut, residen Priangan dari Cianjur[90] berangkat menuju Sumedang, dan di sana ia berunding dengan para bupati agar mereka menginstruksikan kepada penduduk supaya tidak menerima perintah apa pun selain perintah yang diberikan oleh pemimpinnya. Diperintahkan pula agar guru agama, Muhamad Saleh yang berkedudukan di Pangsor segera diamankan. Kepada residen Cirebon diperintahkan juga agar jika perlu dapat dikenakan penangkapan terhadap Kiai Hadan Maulani.[91] Untuk membuktikan kebenaran tentang kasus selamatan itu, bupati Sumedang pun pernah mengadakan penyelidikan, tetapi tidak memperoleh banyak hasil. Semula ia beranggapan, bahwa Kiai Hasan Maulani telah memberikan surat-surat edaran kepada guru agama Muhamad Saleh di Pangsor, karena ia memberikan pula pelajaran agama kepada anak-anak bupati; tetapi anggapan ini pun tidak benar, karena Muhamad Saleh sendiri secara terus terang menerima surat edaran itu dari penghulu distrik Tasikmalaya. Ia segera melakukan selamatan setelah diadakan pembicaraan dengan Haji Abdulrahman selaku khalifah dan kepala penghulu Sumedang.

Sebaliknya, residen Priangan berpendapat, bahwa surat edaran tadi telah dibagikan oleh Muhamad Saleh atas perintah Kiai Hasan Maulani. Dalam suratnya yang ditujukan kepada pemerintah pusat di Batavia, Residen Priangan menerangkan, bahwa penanganan langsung yang dilakukannya itu karena ketakutan kalau-kalau Muhamad Saleh melarikan diri. Residen berkeyakinan, bahwa Kiai Hasan Maulani berusaha meluaskan pengaruhnya ke keresidenan yang letaknya di bagian timur, dengan tujuan untuk menghasut rakyat.[92]

Selanjutnya residen Priangan dalam surat itu memberikan saran, bahwa kerusuhan itu sebenarnya harus dicari di Lengkong, Kabupaten Kuningan (Cirebon), yang penugasannya diserahkan kepada residen Cirebon untuk diminta pendapatnya dengan mempersoalkan, apakah pengaruh Kiai Hasan Maulani mempunyai unsur yang berlawanan dengan kepentingan dan kewibawaan *(policy)* pemerintah?[93]

Pengaruh Kiai Hasan Maulani semakin mendalam di kalangan penduduk, bahkan sampai merembet kepada para pemimpin pribumi. Hal ini dijadikan alasan oleh residen untuk menangkap kiai tersebut, dengan mengatakan, "Ini adalah bukti, bahwa mereka lebih menghargainya, hingga bupati dalam menunaikan tugasnya bisa saja menemui kesulitan . . . pengaruh yang dilakukan Maulani mungkin akan berlawanan dengan pimpinan gubernemen . . .; hal-ihwal kerohanian yang ia lakukan dengan caranya sendiri . . . bertentangan dengan ajaran Islam, dan sangat dicela oleh para penghulu kepala. Orang Jawa yang sederhana itu dengan kata-katanya yang dibuat sedemikian rupa, hingga dipandang sebagai orang yang mempunyai kekuatan luar biasa dan dilebihkan dari keistimewaan ulama lainnya, sungguh membahayakan masyarakat serta mengganggu ketenteraman, jika kepentingan kiai tersebut mendapat angin."[94]

Pada bagian akhir dari surat residen Priangan itu tertulis kata-kata, "Saya berharap bahwa paduka yang mulia akan mendapat alasan, juga dengan laporan yang telah diberikan oleh para bupati . . . . mengenai orang tersebut, untuk mengasingkan Kiai Lengkong dari Pulau Jawa . . .'[95]

Setelah mempertimbangkan seluruh laporan yang masuk, pemerintah di Batavia dengan surat keputusan tanggal 6 Juni 1842, Kiai Hasan Maulani diasingkan ke Manado dengan status sebagai tahanan negara. Tanggal 16 Juli 1842 ia diberi tunjangan *(toelage)* sebesar 10 *gulden* dari pemerintah.

Bulan Maret 1843 usia Kiai sudah mencapai 62 tahun. Selama dalam tahanan di Batavia, ia pernah mengajukan suatu permohonan kepada gubernur jenderal yang berisi, bahwa ia sudah lama tinggal di Lengkong sebagai guru agama seperti nenek-moyangnya. Ia mendapat nasib dan tanpa proses apa-apa harus diasingkan ke luar Jawa. Ia dan nenek-moyangnya belum pernah berbuat jahat terhadap pemerintah, dan memohon agar ia memperoleh tempat di Jawa saja. Permohonan tersebut ternyata tidak dikabulkan setelah pemerintah mendapat saran dari residen Cirebon.[96]

Dengan dijatuhkannya keputusan pemerintah yang ditunjang secara mutlak oleh laporan dan saran dari residen Priangan dan Cirebon, jelaslah Kiai Hasan Maulani,tidak dapat membela dirinya dan dari keputusan itu tidak bisa mengharapkan sesuatu keringanan lain.

Pada bulan Maret, jadi kira-kira setahun setelah hukum buang dijatuhkan kepada Kiai Hasan Maulani, putra kiai yang berumur 20 tahun, bernama Mohamad Hakim, dengan memperhatikan fisik dan usia ayahnya pernah mengajukan suatu permohonan kepada pemerintah agar ayahnya dikembalikan dari tempat pengasingannya. Permohonan ini memang ditunjang juga dengan laporan dari Manado tentang tingkah laku kiai yang baik sehingga memberi kemungkinan untuk dikembalikan.

Atas usul putra kiai dan laporan dari Manado itu, kemudian pemerintah meminta pendapat dari residen Priangan dan Cirebon. Ternyata dalam menanggapi tentang pengembalian Kiai Hasan Maulani, Residen Priangan tetap berpegang pada pendiriannya. Ia tidak.mau mengambil risiko dengan mengatakan, bahwa seorang yang diasingkan belum tentu akan jera dengan hukuman yang ditimpakan kepadanya. Kehadiran kiai ke tempat asalnya ditakutkan akan lebih menyesatkan penduduk dari ajaran agama yang sebenarnya. Residen berkeyakinan, bahwa dalam kurun waktu tiga tahun tidak akan segera mengubah si-

kap seseorang, baik secara pribadi maupun menurut lingkungan. Dengan kembabahkan memperluasnya, sehingga bertolak belakang dengan pemerintah yang resmi.[97]

Ketika tersiar kabar, bahwa Kiai Hasan Maulani akan dikembalikan, dan setelah mendapat informasi dari berbagai macam lapisan dan tingkatan masyarakat, dalam tanggapannya, residen Cirebon bersikap lunak. Ia berpendapat, bahwa jika memang cukup alasan yang kuat untuk mengembalikan kiai dari tempat pengasingannya, maka sebaiknya Kota Surabaya saja yang ditunjuk sebagai tempat tinggalnya, dan selama tinggal di kota itu ia berada di bawah pengawasan polisi.[98]

Menghadapi pendapat kedua residen itu, pemerintah Belanda di Batavia rupa-rupanya mendapat kesulitan untuk memecahkan masalah pengembalian Kiai Hasan Maulani, karena terbukti sampai sampai bulan Desember 1845 kiai masih tetap mendekam di tempat pengasingannya di Manado.

Mengingat kasus kiai itu dirasakan terlalu berlarut-larut, maka keempat orang putranya mengajukan permohonan kepada pemerintah pada bulan Desember 1868, yang isinya menyatakan, bahwa ayah mereka yang sudah berusia 90 tahun itu supaya dikembalikan ke Jawa. Permohonan tersebut dimaksudkan agar anak-cucu kiai dapat merawatnya, dan sesuai dengan adat, seyogyanya mereka dapat memandikan serta memakamkannya jika telah sampai waktunya meninggal. Permohonan yang sama telah dikirim juga kepada gubernur jenderal di Batavia oleh Kiai Hasan Maulani sendiri.

Permohonan mereka kemudian mendapat persetujuan dari bupati Kuningan dengan menyatakan, bahwa pengembalian kiai sebaiknya dilakukan secara diam-diam saja agar putra-putranya tidak dibebani rasa ketegangan batin. Pengasingan selama 27 tahun dianggap sudah cukup bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu yang dilakukannya di masa lalu. Dalam tahun 1842 bupati ini pernah menjadi magang di Distrik Kuningan,

dan banyak mengetahui tentang kasus kiai itu jika dibandingkan dengan residen Cirebon yang hanya mengetahui hal-ihwal kiai itu berdasarkan informasi dan surat-menyurat saja,[99] tetapi pada akhirnya kedua permohonan itu tidak dikabulkan juga, karena permohonan tersebut dianggap datang dari sepihak.

Untuk ketiga kalinya, salah seorang putra Kiai Hasan Maulani mengajukan permohonan untuk menengok ayahnya di Manado. Semula residen Cirebon menolak permohonan itu, tetapi setelah mendapat saran (advis) dari gubernur jenderal, barulah putra kiai yang bernama Agus Absari diizinkan menengoknya ke Manado. Tanggal 29 April 1874 Kiai Hasan Maulani meninggal di tempat pengasingan, dan selama 32 tahun di tempat itu harapannya untuk kembali ke tempat kelahirannya tak terkabulkan.[100]

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dari pihak penguasa Belanda ada unsur kesengajaan untuk tidak mengembalikan Kiai Hasan Maulani dari tempat pengasingan ke tempat asalnya, yakni Pesantren Lengkong. Dalam pertengahan kedua abad ke-19 Pesantren Lengkong merupakan salah satu pesantren terkenal di Jawa yang dapat meluaskan pengaruhnya melampaui batas-batas lokal, sehingga kegiatannya dicurigai Belanda. Pesantren merupakan lembaga penting bagi pembentukan pola kehidupan sosial, budaya, dan agama penduduk kaum muslimin. Pesantren tidak sempurna jika tidak dihubungkan dengan kehidupan tarekat, karena tarekat mempunyai peranan kuat bagi usaha untuk menggerakkan kembali kebangkitan agama dalam abad ke-19. Untuk melumpuhkan kehidupan dan kegiatan Pesantren Lengkong diambillah suatu cara oleh pemerintah kolonial dengan jalan mengasingkan gurunya, Kiai Hasan Maulani, yang jauh terpisah dari para santrinya sebagai kader-kader pemimpin agama.[101]

3.6 Gerakan Perlawanan di Cilegon (1888)

Gerakan perlawanan Cilegon merupakan gerakan yang bersifat mesianistis, yaitu gerakan yang mengharapkan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi. Di samping itu, semangat perjuangan gerakan perlawanan Cilegon diperkuat pula oleh semangat perang sabil. Sebagai peran utama untuk menggerakkan para pengikutnya terdiri atas para guru tarekat. Rasa tidak puas terhadap peraturan-peraturan pemerintah kolonial telah menciptakan iklim yang baik bagi terhimpunnya pendukung gerakan perlawanan itu. Harapan akan datangnya Imam Mahdi yang ditunjang dengan semangat perang sabil sebagai ide telah memperkuat tekad atau semangat perjuangan pengikut-pengikutnya.[102]

Di antara tokoh-tokoh guru tarekat yang memelopori gerakan perlawanan di Cilegon tahun 1888 dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama, Haji Abdul Karim yang menganut ajaran tarekat Kadariah. Ia seorang guru tarekat terkemuka dan banyak pengikutnya. Kemudian ia lebih dikenal dengan nama Kiai Agung. Di antara murid-muridnya terdapat nama-nama Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Asnawi dari Bandung Lampuyang, Haji Abibakar dari Pontang, Haji Tubagus Ismail dari Gulacir, dan Haji Marjuki dari Tanara. Mereka termasuk orang-orang penting pada saat terjadinya pemberontakan. Kedua, Haji Tubagus Ismail, salah seorang murid Haji Abdul Karim, Ia telah beberapa kali melakukan ibadah haji. Setibanya di kampung halaman, seperti gurunya juga mendirikan sekolah agama dan membentuk cabang aliran tarekat Kadariah di tempat kediamannya, Gulacir. Setelah penampilannya di muka umum, kemudian ia mulai melakukan propaganda untuk mengadakan suatu gerakan perlawanan menentang pemerintah yang kafir. Ternyata setelah memperdengarkan suara kampanyenya itu ia mendapat sambutan dari para kiai, serta mereka bersedia menjadi pendukung tugas suci seperti yang dikemukakan oleh propaganda Haji Tubagus Ismail. Di bawah pimpinannya

dalam rangka pembentukan gerakan perlawanan terhadap kaum kafir tersebut segeralah mendaftarkan diri: Haji Wasid dari Beji, Wasid dari Beji, Haji Abubakar dari Pontang, Haji Sangadeli dari Kaloran, Haji Ishak dari Saneje, Haji Usman dari Tunggak, Haji Asnawi dari Bendung Lampuyang, dan Haji Mohamad Asik dari Bendung.[103] Ketiga, Haji Marjuki. Ia tinggal di Tanara, dan sepulangnya dari Mekkah, pernah mengadakan perjalanan ke Banten, Tangerang, Jakarta, dan Bogor sambil mempropagandakan ide tentang jihad. Bersama-sama dengan Haji Wasid mereka mempropagandakan pula tentang "perang suci".*(holy war)* yang telah berhasil pula memperngaruhi para kiai di seluruh Jawa Barat. Sekembalinya dari Mekkah pada bulan Agustus 1888 segeralah menduduki jabatannya yang lama, yaitu sebagai guru dalam tata bahasa Arab *(nahwu)*, sintaksis bahasa Arab *(saraf)*, dan ilmu fikih.[104] Keempat, Haji Wasid. Ia berasal dari keluarga pemberontak. Ayahnya, Abas, pernah mengambil bagian dalam pemberontakan Haji Wakhia pada tahun 1850. Haji Wasid dilahirkan di Grogol, dan ketika terjadi peristiwa pemberontakan Cilegon ia sudah berusia 45 tahun. Ia melancarkan kegiatannya terutama di kota-kota Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, dan Cirebon. Sayang sekali dalam peristiwa pemberontakan Cilegon ia gagal dalam menyempurnakan gerakannya menentang pemerintahan kaum kafir, karena berselisih faham dengan sebagian besar pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya pada saat menentukan pecahnya pemberontakan itu.[105]

Bagaimanakah jalannya peristiwa perlawanan rakyat Cilegon di bawah pimpinan mereka itu? Untuk mendapatkan gambaran yang agak jelas tentang jalannya perlawanan tersebut terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang lokasi Kota Cilegon sendiri yang dijadikan obyek utama oleh para pelaku perlawanan itu.

Letak Kota Cilegon diapit oleh dua buah jalan raya, yaitu jalan raya dari Serang menuju ke Anyer, dan jalan lainnya me-

nuju ke Mancak. Di tengah-tengah kota terdapat sebuah alun-alun sebagai pusat keramaian kota Cilegon. Di bagian utar alun-alun berdiri sebuah rumah yang dihuni oleh Asisten Residen Gubbels, dan di dekatnya terdapat rumah lain yang dihuni oleh *Aspirant Controleur* Van Rinsum. Di situ terdapat juga kantor pos. Di sebelah selatan alun-alun terdapat kabupaten dan kompleks penjara. Di sebelah barat alun-alun berdiri rumah keluarga Bachet, sebagai kepala gudang garam, dan sebuah mesjid. Di sebelah timur alun-alun tepat di persimpangan jalan terdapat rumah Groundhout dan pos Cilegon. Di sebelah utara jalan menuju Serang terdapat gardu dan pasar, gudang garam, dan rumah Tan Keng Hok. Di sebelah timur dan barat jalan yang menuju ke Tanjung Kurung masing-masing terdapat rumah-rumah keluarga Dumas, jaksa, ajun kolektor, wedana, penjara, penghulu, dan rumah Haji Ishak.[106]

Pada dasarnya perlawanan ini digerakkan oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Sebagai persiapan, gelombang massa akan digerakkan dari dua jurusan guna memasuki Kota Cilegon itu. Haji Wasid bersama pengikutnya akan memasuki kota melalui jalan utara, sedangkan Haji Tubagus Ismail akan memimpin gerakannya melalui Kota Cilegon bagian selatan. Selanjutnya gelombang gerakan itu akan menyebar ke empat penjuru kota, yang diatur oleh Haji Wasid sebagai berikut: (1) Gabungan gerakan pertama dipimpin langsung oleh Haji Wasid sendiri sebagai pimpinan umum dengan tugas membunuh semua orang Eropa di seluruh kota Cilegon; (2) Kelompok kedua dipimpin oleh Haji Abdul Gani dan Haji Usman dengan tugas utamanya ialah menuju ke arah selatan alun-alun untuk menyerbu rumah Patih Penna, yang sangat dibenci oleh rakyat Cilegon; (3) Kelompok ketiga pimpinannya dipercayakan kepada Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman. Mereka ditugaskan bergerak ke arah barat kota untuk menyerbu rumah Asisten Residen Gubbels; (4) Kelompok keempat dipimpin oleh Jaro Kejuruan dengan tugas

menyerbu penjara dan membebaskan semua tahanan yang ada dalam penjara.[107]

Setelah diadakan rencana yang matang dalam suatu pertemuan antara Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail dengan beberapa pimpinan agama lainnya akhirnya diputuskan, bahwa gerakan penyerbuan ke Kota Cilegon akan dilancarkan pada tanggal 9 Juli 1888. Sementara itu Haji Wasid pun merencanakan, bahwa pada saat yang sama di Serang akan terjadi pula perlawanan dan kemudian akan bergabung dengan gerakan perlawanan Cilegon.

Tepat pada hari Senin malam hari, tanggal 9 Juli 1888 bergeraklah dua gelombang perlawanan memasuki kota Cilegon dari dua arah, yang masing-masing dipimpin oleh Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail.

Dari arah selatan kota bergeraklah massa rakyat yang dipimpin oleh Haji Tubagus Ismail dengnn didampingi oleh Haji Ishak. Mereka bergerak dari Desa Saneja. Gerakan yang dipimpin Haji Tubagus Ismail ini ternyata lebih cepat menccapai sasarannya. Mereka berhasil memasuki halaman rumah Dumas selaku jurutulis asisten residen.[208] Beberapa kali Dumas mendengar pintunya dipukul-pukul orang sambil meneriakkan panggilan namanya. Dengan tergesa-gesa ia membuka pintu kemudian lari menuju rumah jaksa. Tetapi sebelum sampai ke rumah jaksa, ia ditangkap dan pada badannya terdapat bekas tusukan-tusukan. Jiwanya tidak tertolong lagi dan kemudian ia mati terkapar di halaman rumah jaksa. Sementara itu, ketika jaksa mendengar ada suara minta tolong dari Dumas pada saat dikejar-kejar komplotan itu, ia pun ke luar dari rumahnya. Seketika itu juga ia diserang oleh perusuh, dan akhirnya ia pun mati dibunuh.

Pada malam itu Ajun Kolektor Raden Purwadiningrat mendengar jeritan minta tolong Nyonya Dumas yang bergegas melarikan dari rumahnya. Melalui pintu belakang, Raden

Purwadiningrat segera menyelamatkannya. Di luar rumah terdengar teriakan-teriakan rakyat. Dengan mata kepala sendiri ia melihat rakyat berduyun-duyun menuju rumah Patih Penna. Penna telah terhindar jiwanya, karena ketika rumahnya diserbu orang, ternyata ia sedang melaksanakan cuti untuk berobat di Serang, sedangkan istri dan anak-anaknya ketika mendengar adanya kejadian di rumah Dumas dan jaksa sempat melarikan diri.

Gerakan dari sebelah utara kota Cilegon yang dipimpin oleh Haji Wasid mengalami kelambatan selisih waktu. Sekalipun gerakan Haji Wasid itu sikapnya lebih radikal daripada gerakan Haji Tubagus Ismail, ternyata dalam serangannya menemui kegagalan. Rumah asisten residen yang ditujunya dalam keadaan kosong, karena sedang melakukan dinas luar mengikuti perjalanan dinas residen ke daerah Anyer. Mereka bermalam di Anyer Kudul, sedangkan istrinya yang tinggal di Cilegon sudah diselamatkan menjelang serbuan datang.[109] Karena serangannya gagal, gerakan Haji Wasid segera melancarkan serangan lain. Mereka menghancurkan alat hubungan telpun supaya komunikasi musuh antara Cilegon – Serang terputus sama sekali. Selanjutnya mereka melakukan tindakan membabi-buta. Rumah dan segala yang dimiliki musuh dihancurkan. Mereka tidak memilih lagi sasaran serangannya. Laki-perempuan, anak-anak dan orang dewasa yang mereka temui langsung dibunuhnya. Keempat gerakan yang telah diatur oleh Haji Wasid akhirnya bergabung. Kelompok di bawah pimpinan Jaro Kajuruan terus bergerak menuju kompleks penjara dengan tidak mendapat perlawanan yang berarti. Sipir penjara dibunuh, dan setelah berhasil membobolkan pintu penjara, seluruh isi penjara yang bejrumlah 70 orang berhasil dilepaskan. Nyonya asisten residen ternyata disembunyikan di penjara itu. Seketika itu juga ia bersama puteranya dibunuh. Seluruh tahanan setelah dipersenjatai di-

suruh bergabung dan bersama-sama menyerang orang-orang Belanda.

Serangan selanjutnya ditujukan ke rumah kepala Kantor Gudang Garam, yaitu rumah Bachet. Bachet sendiri setelah mendengar kejadian di rumah Dumas dan keributan di penjara segera menutup pintu rumahnya rapat-rapat, dan sempat pula menyelamatkan keluarganya. Ia sendiri siap menunggu gerakan perlawanan di belakang pintu rumahnya dengan senjata di tangannya. Ketika serangan datang, dimuntahkanlah peluru dari senjata yang dipegangnya itu sehingga pihak penyerang banyak yang tertembak mati. Penyerang terus menyerbu, dan akhirnya Bachet dibunuh juga.

Haji Wasid dan pengikutnya segera menuju ke lokasi Pasar Cilegon, dan di sana mereka mengambil-alih beberapa tempat dagang orang-orang Cina untuk dijadikan sebagai markas besar gerakan perlawanan dan untuk mengendalikan semua pertempuran.

Kelompok penyerang lain kemudian menuju gudang garam. Mereka merampas isi gudang itu dan berhasil juga membunuh order kolektor sebagai pemegang kunci kas panak.[110] Sampai siang hari gerakan perlawanan masih terus melancarkan aksinya. Groundhout yang rumahnya berdekatan dengan pos telah pula dibunuh. Seluruh Kota Cilegon telah dapat dikuasai oleh gerakan perlawanan.

Sementara itu Asisten Residen Gubbels pada keesokan harinya pulang ke Cilegon. Pertama-tama ia masuk ke rumah Bachet yang telah hancur. Gerakan perlawanan menyambutnya dengan pekikan sambil menyerang secara membabi-buta. Gubbels berhasil melarikan diri sekalipun mendapat beberapa tusukan pada badannya menuju rumah Patih Penna. Namun pihak penyerang terus mengejarnya. Dengan disaksikan oleh Nyonya Dumas, Gubbels diseret ke luar rumah dan diba ke alun-alun. Di sana

mayatnya digantung.[111] Mengenai peristiwa pembunuhan Gubbels ini sebuah artikel pada koran terdapat kata-kata sebagai berikut :

Asisten Residen Gubbels lari ke rumah Patih Penna, kursi Patih Penna penuh dengan darah, di tengah rumah di mana terdapat meja tulis kelihatan banyak darah tercecer, ternyata para pemberontak menyeret assisten residen ke halaman rumahnya. Nyonya assisten diketemukan mati tercincang, putranya mati tergeletak di dekat mayat ibunya.[112]

Guna menghindarkan agar gerakan perlawanan tidak mabuk atas kemenangannya itu, kemudian Haji Wasid menarik pasukannya dari daerah pertempuran dengan maksud supaya teman-temannya yang berada di Serang segera mengadakan gerakan yang sama. Haji Wasid segera menyiapkan pasukannya menuju ke Serang untuk membantu teman-temannya di sana. Haji Wasid bermaksud akan melakukan serangan dari luar kota Serang sebagai siasat guna mengacaukan pertahanan Belanda yang sedang menghadapi gerakan perlawanan di dalam kota. Sebagai tujuan terakhir apabila siasat ini berhasil, secara bersama-sama akan menyerang benteng Belanda dan membunuh semua penghuninya. Untuk keperluan itu, Haji Usman dari Medang Batu, Haji Usman dari Tunggak, Haji Dulgani dari Beji diperintahkan berangkat lebih dahulu menuju Serang, sedangkan Haji Kasim diperintahkan tetap tinggal di Cilegon di muka rumah asisten residen. Haji Wasid sendiri dan Haji Tubagus Ismail akan menyusul kemudian.[113]

Pasukan yang diberangkatkan lebih daulu di bawah pimpinan ketiga orang haji tersebut ternyata tidak dapat bergerak masuk ke Kota Serang, karena suasana di kota itu tidak terjadi peristiwa yang diharapkan mereka. Di sana tidak terjadi suatu gerakan perlawanan, karena mereka selama itu tetap menunggu berita dari Cilegon. Gerakan perlawanan dari Cilegon dalam per-

jalanannya menuju kota Serang telah tiba di Desa Kaloran dan Desa Kaujon.

Sementara itu pasukan tentara Belanda dari Serang bergerak pula menuju Cilegon di bawah pimpinan Letnan Satu Van de Star. Di perjalanan mereka dihadang oleh gerakan perlawanan sehingga terjadilah bentrokan yang pertama kali antara gerakan perlawanan Cilegon dengan tentara Belanda. Dari pihak gerakan perlawanan banyak yang gugur, dan sebagian melarikan diri berpencar. Gerakan Haji Wasid pada saat akan berangkat menuju Serang mendengar berita, bahwa tentara bantuan Belanda telah tiba di perbatasan kota Cilegon. Mereka tidak mengadakan perlawanan, tetapi segera meninggalkan Cilegon.[144] Kota Cilegon ketika dimasuki pasukan Belanda nampak sepi, mayat bergelimpangan, rumah-rumah hancur, dan darah berceceran di sana-sini. Tentara Belanda membuat markas di bekas penjara.

Tanggal 11 Juli 1888 keadaan Kota Cilegon sudah berubah. Pada setiap sudut kota ditempatkantentara keamanan Belanda. Demikian juga di pantai Anyer dan mercusuar telah dijaga ketat dengan maksud jangan sampai gerakan perlawanan dapat meloloskan diri dari Banten.[115]

Di atas telah dikemukakan, bahwa gerakan perlawanan ini bersifat mesianistis yang mengharapkan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi dengan semangat perjuangan perang sabil. Hal ini dapat dibuktikan ketika gerakan Haji Wasid berada di rumah asisten residen. Di tempat itu untuk merayakan kemenangan perangnya sengaja mengadakan pesta dan seluruh pengikut Haji Wasid bersuka ria. Haji Wasid sendiri mengangkat dirinya sebagai sultan. Paa upacara itu telah dicapai kata sepakat pula untuk mengawinkan Haji Wasid dengan Nona Marie Bachet. Setelah terjadi perkawinan Marie Bachet dijadikan per-

maisuri kesultanan (kerajaan), sedangkan saudara sepupu Marie Bachet, yang bernama Nona Anna Carter Vischer bersama-sama dengan Nyonya Dumas akan dijadikan sebagai dayang-dayangnya. Sebagai panglima perang dalam kesultanan baru itu diangkatlah Haji Tubagus Ismail.[116]

Selanjutnya untuk menumpas gerakan perlawanan Haji Wasid dan pengikut-pengikutnya, pihak Belanda mempersiapkan tentaranya guna melakukan pengejaran terhadap mereka.

Dengan tersiarnya berita, bahwa Haji Wasid berada di Desa Beji, kemudian pasukan tentara Belanda di bawah pimpinan Kapten Hajel segera mengepung desa itu, dan mengepung daerah Gunung Santri. Mereka mendapat penawaran yang cukup berat yang diberikan oleh rakyat di Desa Beji. Semua laki-laki di desa itu ditangkap, dan rumah-rumah yang ada di situ dibakar habis.[117] Pengejaran terhdap Haji Wasid dilakukan juga ke Desa Teratai Udik dan Desa Kandong. Di kedua desa itu pun ternyata tidak ditemukan. Kedua desa tadi dibakar habis pula oleh tentara Belanda. Tanggal 11 Juli 1888 Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail, beserta teman-temannya yang setia berada di Kaligandu, sebelah barat Desa Beji. Mereka tinggal di rumah Haji Nasiman. Pada tanggal 12 Juli 1888 mereka datang ke desa tersebut dan rumah Haji Nasiman dikepung ketat oleh dua lapis barisan serdadu Belanda. Rumah itu ternyata sudah kosong, karena pada tanggal tersebut gerakan perlawanan lebih dahulu meninggalkan tempat itu dan segera menyelamatkan diri ke daerah Ciara Kulon. Di sini mereka menginap di rumah Haji Mahdani. Di tempat tersebut Haji Wasid sempat menghimpun pengikut-pengikutnya yang masih tetap setia ke mana pun Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail pergi.[118]

Karena siasat membakar tidak mendatangkan hasil, kemudian pihak Belanda melakukan taktik lain dalam bentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh residen sebagai usaha untuk mem-

pengaruhi takyat Cilegon dalam rangka penangkapan terhadap Haji Wasid, dan teman-temannya. Adapun surat edaran residen itu tertulis :

> *Kita kasih ingat kepada segala sahabat yang tuan Assiten Resident, polisi di sini berjanji beri upah f.500,– pada siapa yang bisa tangkap atau kasih keterangan di mana tempat tinggal Haji Wasid, Haji Ismail dan Agus Suradikarta kepada perusuh di Cilegon.*[119]

Akibat adanya surat edaran di atas, rakyat semakin susut untuk memberi bantuan terhadap gerakan perlawanan Haji Wasid, karena takut kepada pemerintah Belanda. Di samping itu ada pula orang yang berusaha mengambil keuntungan, apabila ada kesempatan dapat menangkap atau mengetahui tempat persembunyian gerakan itu, kemudian mem beritahukannya kepada serdadu Belanda. Dengan disebarkannya surat edaran tadi, bagi Haji Wasid dan pengikutnya dirasakan tidak aman dan seolah-olah diancam oleh rasa takut dan curiga terhadap tempat-tempat yang mereka singgahi.

Mulai tanggal 13 Juli 1888 Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, dan pengikut-pengikutnya dari Ciara Kulon terus mengadakan perjalanan menuju daerah pegunungan sebelah utara. Mereka melakukan pendakian di Gunung Gede, kemudian menuruni lereng gunung tersebut dengan tujuan meneruskan perjalanan ke arah pantai sebelah barat. Tanggal 14 Juli 1888 rombongan gerakan perlawanan itu tiba di Desa Citangkil. Di sini mereka sempat beristirahat selama dua hari dua malam dengan memasang tenda di tepi Sungai Kerenceng.

Pihak Belanda segera mengadakan pengejaran ke Desa Citangkil pada tanggal 17 Juli 1888, tetapi kedatangan mereka terlambat, karena pada pagi hari tanggal 16 Juli 1888 gerakan Haji Wasid telah meninggalkan tempat itu. Bertepatan dengan datangnya serdadu Belanda ke Desa Citangkil, rombongan gerakan Haji Wasid sudah tiba di Desa Gunung Gudangbatu.

Tanggal 18 Juli 1888 dari Desa Gunung Gudangbatu gerakan Haji Wasid meneruskan perjalanan yang lebih jauh dan sangat melelahkan dengan melewati Kampung-kampung Kepuh, Denak, Blokan, dan Sewuk untuk mencapai aliran Sungai Ciasahan. Setiba di daerah Ciasahan mereka beristirahat selama satu malam.

Sampai tnggal 20 Juli 1888 tentara Belanda belum berhasil menemukan jejak tentang arah kepergian rombongan gerakan Haji Wasid itu. Sedangkan pada tanggal 21 Juli 1888 gerakan Haji Wasid telah berhasil menyeberangi Sungai Cidaun. Tanggal 22 Juli 1888 mereka tiba di Malang Tengah, dan setelah mengadakan perjalanan lagi akhirnya tiba di Kubang Kidul pada tanggal 23 Juli 1888. Keesokan harinya tanggal 24 Juli 1888 mereka telah ampai di Putri. Hari berikutnya dengan tidak mengenal lelah mereka meneruskan perjalanan dan pada tanggal 26 Juli 1888 mereka tiba di Cimoyang.

Tanggal 25 Juli 1888 Belanda menggerakkan tentaranya guna mengepung rombongan Haji Wasid dari arah barat dan timur. Dari arah barat diberangkatkan dengan melalui Anyer di bawah pimpinan Chauving de Blot. Mereka bergerak menuju Brengas dengan melalui jalan yang menuju ke Cimoyang. Sedangkan dari arah timur pasukan Belanda bergerak dari Pandeglang dengan melalui pegunungan, gunung Aseupan, terus menuju ke Gunung Pulosari.

Sementara itu rombongan gerakan Haji Wasid setelah tiba di Cimoyang pada tanggal 26 Juli 1888, mereka terus mengadakan perjalanan, dan pada malam harinya tanggal itu juga tibalah di Brengas. Gerakan Haji Wasid pada tanggal 28 Juli masih terus melanjutkan perjalanan menuju Cibungur dengan melalui Labuhan sambil menyusur pantai barat. Setelah mereka sampai di Camara pada tanggal 30 Juli 1888, pada hari itu juga perja-

lanan tetap dilanjutkan dengan menyeberangi Sungai Cisiit. Pada tanggal 31 Juli 1888 perjalanan mereka diteruskan dengan tujuan daerah Cibaliung, Desa Sumur.[120]

Pada saat tiba di Desa Sumur, Haji Wasid meminta kepada kepala kampung supaya diberi ijin bermalam di desa itu. Tetapi kepala kampung tidak mau menerima rombongan gerakan Haji Wasid dan dalam kesempatan itu, kepala kampung segera melaporkannya kepada Belanda.

Sekalipun Haji Wasid tahu bahwa gerak-gerik kepala kampung lebih condong kepada Belanda, namun mungkin dengan kondisinya yang sudah lelah, ia bersama rombongannya tidak lagi melanjutkan perjalanan. Bahkan sebaliknya dengan tenaga sisa dan kemampuan, serta semangat mengadakan perlawanan terakhir, mereka tetap bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjaadi. Tidak berapa lamanya ke kampung tempat persembunyian mereka datanglah tentara Belanda mengepungnya. Dengan semangat perang fisabilillah mereka bersedia mengurbankan jiwa-raganya dalam perang melawan tentara kolonial. Karena pertempuran itu memang tidak seimbang, akhirnya di waktu subuh seluruh kekuatan gerakan Haji Wasit telah dapat dipatahkan. Secara tragis Haji Wasid sendiri gugur, karena mendapat tikaman dari belakang dilakukan oleh seorang yang mengkhianatinya. Tanggal 1 Agustus 1888 pagi hari sirnalah perlawanan Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, dan para kiyai Banten lainnya. Jenazah kedua orang tokoh perlawanan itu dibawa ke Cilegon. Setelah kawan-kawannya yang masih hidup meminta ijin kepada Belanda untuk memakamkan mereka, akhirnya mereka dikuburkan menjadi satu dalam sebuah liang lahat. Pengikutnya yang masih hidup dan berada dalam tahanan Belanda bejrumlah 17 orang dimasukkan ke dalam penjara dan digabung dengan tahanan peristiwa Cilegon lainnya yang sudah lebih dahulu ditangkap. Pengadilan kolo-

nial dalam sidangnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Sepuluh orang di antaranya menerima hukuman gantung, sedangkan yang lainnya dikenakan hukum buang seumur hidup, dan hukum kerja paksa.[121]

Sekalipun gerakan perlawanan yang dipimpin oleh para ulama Cilegon itu telah berhasil ditumpas oleh Belanda, namun rasa jera untuk memberontak dari orang-orang Cilegon khususnya dan rakyat Banten pada umumnya masih juga belum punah. Banyak di antara para kiyai yang merasa menyesal karena pada saat terjadi peristiwa itu mereka tidak ikut membantu gerakan yang dilakukan oleh Haji Wasid dan kawan-kawannya. Di kalangan kaum agama timbul perasaan dendam untuk membalas tindakan Belanda itu.

Secara diam-diam ketika malam Lebaran tahun 1889 timbul suatu gerakan yang bertujuan akan mencetuskan suatu peristiwa Cilegon. Mereka bertekad akan menuntut balas dendam terhadap orang-orang Belanda atas gugurnya Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, Haji Ishak, dan beberapa kiyai yang terbunuh dalam peristiwa Cilegon. Menurut anggapan mereka, pada malam Lebaran itu merupakan saat yang terbaik untuk melancarkan suatu pemberontakan, karena ke rumah tempat kediaman Regen Serang akan banyak orang Eropa dan pegawai pemerintah bumiputra yang datang berkunjung ke situ. Tetapi ternyata rencana pemberontakan mereka telah bocor dan jatuh ke tangan Belanda. Dalam waktu yang singkat, tentara Belanda segera bertindak dan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigainya. Dari hasil penangkapan tersebut, terbukti bahwa tokoh-tokoh perencana gerakan perlawanan itu kebanyakan terdiri atas orang-orang yang berasal dari daerah Cilegon, Serang, dan Tanara.[122]

Guna menghindarkan timbulnya kembali peristiwa gerakan perlawanan rakyat Banten seperti terjadi dalam peristiwa Cile-

gon itu kemudian pemerintah Belanda mulai menyadari akan tindakan-tindakannya di masa lalu. Mereka mulailah mengubah sikapnya. Perubahan sikap ini terjadi setelah Gubernur Jenderal van Rees mengundurkan diri dari jabatannya, tidak lama setelah terjadinya peristiwa Cilegon. Ia digantikan oleh Mr.C.Pijcaker Hardijk. Gubernur jenderal yang baru ini banyak menaruh minat terhadap sebab-sebab terajdinya peristiwa itu. Dalam masa pemerintahannya diadakanlah beberapa perubahan, perubahan terhadap undang-undang perpajakan, undang-undang perburuhan, dan terhadap pegawai pemerintah di desa-desa pun segera diadakan penelitian yang seksama, karena tidak sedikit dari kekayaan pegawai pemerintah di desa-desa kebanyakan adalah ditarik dari hasil keringat penduduknya. Bagi pekerja ditentukan juga tentang batas waktu kerja. Tekanăn pajak yang melebihi daya mampu penduduk segera dikurangi sampai kira-kira mencapai empat juta gulden.

Perubahan demikian tidak saja terjadi di tingkat pemerintahan, tetapi berpengaruh pula di kalangan orang-orang tingkat menengah. Mereka tidak lagi menganggap dirinya sebagai orang yang tinggi derajatnya, dan harus disembah-sembah oleh orang-orang yang dianggapnya rendah. Secara sadar mereka berintegrasi dengan orang kebanyakan; putra-putranya bebas bergaul dan memilih sekolah yang tidak diikat oleh adat-istiadat Eropa. Golongan agama mendapat perlakuan yang wajar, sehingga mereka tidak lagi bersikap fanatik dan tidak mau dikekang oleh adat-istiadat yang sempit.[123]

CATATAN

[1] F.W. Stapel, *Geschiedenis van Nederlandsch Indie,* V, Batavia, 1940, hal. 24.

[2] *Loc. Cit.*

[3] *Loc. Cit.*

[4] D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Terjemahan Prajudi Atmosudirdjo), cetakan kedua, Pradjnja Paramita, Jakarta, hal. 134.

[5] Rd. Asik Natanegara, "Sejarah Soemedang Ti Jaman Kompeni Toeg Nepi Ka Kiwari", *Volksalmanak Soenda,* 1938, Balai 1938, Balai Pustaka, Batavia, hal. 90–91.

[6] F.W. Stapel, *Op Cit.*, hal. 24.

[7] *Loc. Cit.*, Keterangan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh R.Mh. Bratakoesoema dalam sebuah naskah yang berjudul: *Paririmbon Pustaka Jaman Sajarah Indonesia Tanah Sunda Jawa Tahun 200 dugi ka Taun 1950 M.*, Ciamis 1950, hal. 21.

[8] F.De Haan, *Priangan,* III, BGKW, G. Kolff, Batavia, 1912, hal. 485.

[9] *Loc. Cit.*

[10]E.Suhardi Ekadjati, *Perjuangan Bagus Rangin (1806–1812)*, Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung, 1968, hal. 14. Keterangan itu diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Masdji, Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, di rumahnya di desa Jatitujuh, pada tanggal 22 Nopember 1967. Ia mengakui keturunan keenam dari Bagus Rangin.

[11]F.W. Stapel, *Op. Cit.*, hal. 104.

[12]Keterangan ini diambil dari Dokumen di Arsip Nasional dalam *Bundel Cheribon 39/* yang merupakan keterangan Bagus Manuh, anak buah Bagus Rangin, yang diinterogasi oleh serdadu Belanda di Karangsembung tanggal 26–27 Januari 1812, setelah dia tertangkap. Lihat: Edi S. Ekadjati, *"Ki Bagus Rangin,* Tilikan Sajarah," *Mangle* (majalah berbahasa Sunda), XIX, 551, 21 Oktober 1976, hal. 9.–10.

[13]R.A.A. Martanagara, *Babad Sumedang;* (edisi H. Said Raksakusumah dan E.S. Ekadjati), Lembaga Kebudayaan Universitas Padjadjaran, Bandung, 1978, hal. 124–125. Karangan itu disusun pada tahun 1920–1921.

[14]*Ibid.*, al. 594.

[15]F.De Haan, *Op. Cit.*, hal. 485.

[16]F.W. Stapel, *Op. Cit.*, hal. 25.

[17]Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1939, hal. 89. Berdasarkan keterangan dari Bagus Rangin sendiri yang dikemukakan sewaktu diinterogasi pada tanggal 22 Juli 1812.

[18]Keterangan dari dokumen *Bundel Cheribon* 39/8 Lihat: Edi S. Ekadjati, *Op. Cit.*, 1976, hal. 9.

E [19]Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1938, hal. 90.

[20]Dokumen *Bundel Cheribon 39/8.* Lihat Edi S. Ekadjati, *Op. Cit.*, 1976, hal. 9–10.

[21]Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1939, hal. 89.

[22] *Loc. Cit.*, R.A. Martanagara, *Op. Cit.*, hal. 126–128.

[23] E.Suhardi Ekadjati, *Op. Cit.*, 1968, hal. 23

[24] Dokumen *Bundel Cheribon 39*/ Lihat : Edi S. Ekadjati, *Op. Cit.*, 1976, hal. 10.

[25] *Loc. Cit.*

[26] *Loc. Cit.*

[27] E. Suhardi Ekadjati, *Op. Cit.*, 1968, hal. 28. Keterangan dari Bapak Masji, Bapak Kiol (penduduk desa Jatitujuh).

[28] Lapangan tersebut kami saksikan sendiri. Sekarang telah digunakan untuk pesawahan dan perkampungan.

[29] F. De Haan, *Op. Cit.*, hal. 486.

[30] R.A.A. Martanegara, *Op. Cit.*, hal 132–133.

[31] F. De Haan, *Op. Cit.*, hal. 486.

[32] Wawancara dengan Bapak Masdji, 1967. Lihat: E. Suhardi Ekadjati, *Op. Cit.*, 1968, hal. 31.

[33] Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1939, hal. 88.

[34] *Loc. Cit.*

[35] Kusen, *Asal-usul Nama Desa Panongan,* (naskah), Djatitujuh, 1967, hal. 1.

[36] Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1939, hal. 88–89. Menurut R. Mh. Bratakaoesoema *(Op. cit.*, hal. 21), Bagus Rangin ditangkap di Panongan, Majalengka oleh bupati Karawang (Kandanghaur, R.A. Suryalaga), Tumenggung Raksayuda dari Rajagaluh (Sindangkasih), dan Mantri Sultan Kanoman R. Jayanagara dari Cirebon. Keterangan ini sama dengan informasi dari sumber pemerintah kolonial yang dicatat pada waktu Bagus Rangin tertangkap (tanggal 27 Juni 1812) dan kemudian diinterogasi (22 Juli 1812).

[37] P.H. van der Kemp, *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818,* Idayu, Jakarta, 1979, hal. 7–9, Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1939, hal 94–95.

[38] Babad Geger Celeng (naskah berbahasa Jawa), yang diungkapkan oleh Bapak Kiol, Pimpinan Perhimpunan Sandiwara Djsa Sumber, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, tanggal 25 Desember 1967. Lihat: E. Suhardi Ekadjati, *Op. Cit.*, 1968, hal. 32.

[39] Rd. Asik Natanegara, *Op. Cit.*, 1939, hal. 95.4

[40] *Loc. Cit.*

[41] *Ibid.*, hal. 96.

[42] *Ibid.*, hal. 96.

[43] Sumber yang bertalian dengan perlawanan rakyat daerah Cirebon yang dipimpin oleh saudara-saudara dan anak buah Bagus Rangin, lihat: P.H. van der Kemp., *Op. Cit.* hal. 14–64.

[44] Cf *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, tentang De Preanger-Hervorming, dan Koleksi Dokumen Arsip Nasional, *Besluit 21 Maart 1843 No. 16.*

[45] Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia, *Besluit 18 December 1842 No. 8.*

[46] Arsip Nasional Republik Indonesia, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839–1848,* Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 5, Jakarta, 1973, hal. 10.

[47] Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia, *Besluit 18 December l' 42 No. 8.*

[48] *Loc. Cit.*

[49] *Loc. Cit.*

[50] *Loc. Cit.*

[51] Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia, *Besluit 18 December 1842 No. 8,* Berkas pemeriksaan atas Adijam.

[52] *Loc. Cit.*, lihat berkas pemeriksaan atas Ma Upi.

[53] *Loc. Cit.*

[54] Iman hilman, *Pemberontakan Raksa Pradja Tahun 1842:* Suatu Studi Kasus, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1978, hal. 45–47.

[55] Cf. Iman Hilman, *Op. Cit.* hal. 50

[56] Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia, berkas pemeriksaan atas Laija Santana, dalam *Besluit 18 December 1842 No. 8.*

[57] Berkas pemeriksaan atas Wangsa, dalam *Besluit 18 December 1842 no. 8.* Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia.

[58] Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia, *Besluit 21 Maart 1843 No. 16,* dalam berkas pemeriksaan atas Jaya Samudra.

[59] Iman Hilman, *Op. Cit.* hal. 62.

[60] *Loc. Cit.*

[61] Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia, Lihat: berkas pemeriksaan atas Laija Santana, dalam *Besluit 18 December 1842 No. 8,* dan *Besluit 21 Maart 1843 No. 16.*

[62] Lihat Iman Hilman, *Op. Cit.*, hal. 63–64.

[63] *Cf. Iman Hilman, I*

[63] Cf. Iman Hilman, *Ibid.*, hal. 65–70.

[64] *Ibid.*, hal. 73.

[65] *Loc. Cit.*

[66] *Besluit 21 Maart 1843 No. 16,* dalam Koleksi Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia.

[67] Iman Hilman, *Op. Cit.*, hal. 73–74.

[68] *Besluit 18 December 1842 No. 8,* dalam Koleksi Arsip Nasional Republik Indonsia, berkas pemeriksaan perkara atas Nitipraja, Martadireja, Abdurakhman, Raden Natadireja, dan Raden Purukusuma.

[69]*Besluit 18 December 1842 No. 8,* Koleksi Dokumen Arsip Nasional, tentang berkas pemeriksaan perkara atas Raksa Praja.

[70]Arsip Nasional Republik Indonsia, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia-Belanda Tahun 1839–1848,* Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5, Jakarta, 1973, hal. 11.

[71]Sartono Kartodirdjo, *Religious movement of Java in the 19th and 20th centuries.* Jogjakarta Universitas Gadjah Mada, 1970, hal. 5.

[72]*Ibid.*, hal. 13–14. Lihat juga Sartono Kartodirdjo. 'Messianisme dan millenarisme dalam Sejarah Indonesia'. dalam *Lembaran Sejarah,* No. 7, Djuni 1971, hal. 44–45.

[73]Lihat: Sartono Kartodirdjo, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jilid IV edisi ke-2, 1976, hal. 249–250 dan lihat juga karya penulis yang sama, 'Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonsia' dalam *Lembaran Sedjarah,* No. 7, Djuni 1971, Pidato Dies Natalis ke-18 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1967 di Siti-hinggil, Jogjakarta, Bagian Kedua, hal. 41.

[74]Sartono Kartodirdjo, et. al. *Sejarah Nasional Indonesia.* Jilid IV, edisi ke-2, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1976, hal. 250–252.

[75]Lihat sumber yang sama pada catatan kaki 72, hal. 42.

[76]Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sejarah No. 5 *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839–1848.* Jakarta, 1973, hal. 4 Bandingkan juga dengan E. de Wall. *Onze Indische Financien,* deel I, 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1876, hal. 220.

[77]Sartono Kartodirdjo, *The Peasants Revolt of Banten in 1888,* its Conditions, Course and Sequel, a Case Study of Social Movements in Indonesia, Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land -en Volkenkunde, deel 50, 's Gravenhage, Martinus Mijhoff, 1966, hal. 119.

[78] Ibid., hal. 116 pada catatan kaki 30.

[79] Mas Jakaria termasuk kepala pemberontak, pernah dipenjara di Batavia, tetapi berhasil meloloskan diri. Dalam petualangan selanjutnya ia berhasil menghimpun pengikutnya sebanyak 1000 orang dan langsung mengadakan serangan ke Pandeglang (1827). Dalam serangan itu Mas Jakaria tertangkap, kemudian dipenggal kepalanya, sedangkan mayatnya dibakar. Dalam pemberontakan melawan landrente bulan Desember 1825 ia menggabungkan diri dengan komplotan Tumenggung Mohamad. (Lihat E. de Waal hal. 220).

[80] Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 116.

[81] Cf. Arsip Nasional republik Indonesia, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1939–1848* (1973) hal. 5, dengan E. de Waal (1876), hal. 220.

[82] *Loc. Cit.*

[83] *Loc. Cit .*

[84] Sartono Kartodirdjo, *Social Movements of Java in the XIXth and XXth Centuries:* an Analytical Framework. Economic and Social History. No. 8, hal. 74, 77.

[85] *Ibid.*, hal. 77.

[86] *Ibid.*, hal. 80.

[87] *Loc. Cit.*

[88] Cf G.W.J. Drewes, *Drie Javaansche Georoe's Hun Leven Onderricht en messiasprediking.* Leiden, 1925, hal. 15.

[89] Arsip Nasional Republik Indonesia, Penerbitan Sejarah No. 5 *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1939–1848, Jakarta, 1973, hal. 15.*

[90] Cianjur dijadikan sebagai tempat kedudukan Residen Priangan, karena Bandung pada waktu itu belum menjadi ibukota Keresidenan Priangan.

[91] Lihat G.W.J. Drewes, *op. Cit.*, hal. 11–12.

[92] *Ibid.*, hal. 12–13.

[93] *Ibid.*, hal. 13.

[94] *Ibid.*, hal. 14.

[95] *Ibid.*, hal. 15

[96] *Loc. Cit.*,

[97] *Ibid.*, hal. 16.

[98] *Ibid.*, hal. 17.

[99] *Ibid.*, hal. 17–18.

[100] *Ibid.*, hal. 18.

[101] Cf. Sartono Kartodirdjo, et. al., *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976, hal. 278–279.

[102] sartono Kartodirdjo, Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia, Jogjakarta, 1967, dalam *Lembaran Sejarah*, No. 7, Djuni 1971, hal. 43–44.

[103] Sartono Kartodirdjo, *The Peasants Revolt of Banten in 188*, Its Conditions, Course and Sequel, A Case Study of Social Movements in Indonesia. VKI, Martinus Niyhoff 's-Gravenhage, 1966, hal. 177–179, 183–184.

[104] Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.* hal. 185rf.

[105] *Ibid.*, hal. 188 ff.

[106] Cf. Java Bode, Batavia, 14 Djuli 188 &hal. III, kolom 4.

[107] *Chabar Hindia Olanda*, Batavia, 8 Agustus 1888, hal. III.

[108] Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, hal. 210.

[109] Terjemahan Balai Pustaka, *Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*, Weltevreden, Balai Pustaka, 1936, hal. 53 ff.

[110] *Ibid.*:, hal. 54 ff

[111] Secara lengkapnya lihat Sartono Kartodirdjo, 1966 *Op. Cit.*, hal. 225–227.

[112] *Bataviasch Handelsblad*, Batavia, 11 Djuli 1888, hal. IV., kolom 2.

[113] *Chabar India Olanda,* Batavia, 8 Agustus 1888, hal. III, kolom 2.

[114] Tubagus Rusjan, *Sedjarah Banten,* Djakarta, 1954. Cetakan pertama, hal. 51.

[115] Ayu Murniati S. *Peristiwa Tjilegon 18 8,* Skripsi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung, 1971, hal. 48.

[116] Lihat *Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat,* hal. 59–60.

[117] *Pemberita Melayu,* 24 Djuli 1888, hal. III kol. 4.

[118] Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.,* hal. 249.

[119] *Chabar Hindia Olanda,* 19 Djuli 1888.

[120] Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.,* hal. 250–251.

[121] Tubagus Rusjan, *Op. Cit.,* hal. 51; Df. Ayu Murniati S., *Op. Cit.,* hal. 57.

[122] van Sandick, *Op. Cit.,* hal. 175.

[123] Ayu Murniati S., *Op. Cit.,* hal. 62.

BAB IV PERLAWANAN DALAM PERIODE TAHUN 1900 – 1945

4.1 Perlawanan di Daerah Bekasi (1913–1914)

Gerakan perlawanan penduduk petani di Bekasi sekitar tahun 1913 – 1914 berbentuk pemogokan terhadap kerjapaksa memotong rumput di tanah partikelir; menentang terhadap upah menanam padi yang rendah di sawah-sawah milik orang-orang Cina; mogok makan karena beras yang dimasak dari kualitas yang jelek di tanah-tanah partikelir di Bekasi. Gerakan perlawanan petani di Bekasi ini kemudian mendapat dukungan dari Sarekat Islam, yaitu Jamiatul Islamiyah. Untuk memadamkan gerakan perlawanan ini Pemerintah Kolonial Hindia Belanda setempat menggunakan cara memecah belah gerakan SI. dan mendukung berdirinya *Kong Jie Hien,* sebuah organisasi orang-orang Cina pemilik tanah partikelir di Bekasi.

4.1.1 Gerakan Pemogokan Tahun 1913

Setelah Sarekat Islam lahir pada 1912 dan mulai berkembang menjadi gerakan penduduk, organisasi ini tidak hanya berkembang di kota, tetapi mulai tahun 1913 masuk di pedesaan di Jawa Barat. Gerakan ini, misalnya muncul di Kampung Setu, termasuk daerah tanah swasta Cakung, Bekasi. Gerakan itu berbentuk menentang pelaksanaan kerja rodi,

yaitu memotong rumput, yang dituntut oleh tuan tanah partikelir kepada penduduk daerah ini. Akibatnya pada bulan Nopember 1913 Bilal bersama saudaranya, penduduk Kampung Pondok Kelapa, Bekasi, diajukan ke Pengadilan Bekasi karena menolak untuk memotong rumput. Penolakan terhadap tuntutan tuan tanah diperlihatkan pula oleh masyarakat setempat dalam bentuk bahwa mereka bukan memotong rumput tapi wlingi. Wedana Bekasi dan kontroler yang bertindak sebagai hakim polisi memutuskan dengan memperingatkan pembangkangan atau pelawan ini untuk kembali memotong rumput seperti biasa.

Pada tanggal 25 Nopember 1913, Bilal dan kawan-kawannya melancarkan mogok makan karena nasi yang mereka terima sebagai upah dari tuan tanah partikelir beda jenis beras yang paling buruk. Tuan tanah menjawab aksi mogok itu dengan menuntut mereka di hadapan sidang pengadilan. Tuntutan itu didasarkan atas kenyataan mereka meninggalkan tempat kerja sebelum waktunya; karena itu mereka dipanggil ke pengadilan untuk diperingati dan disuruh pulang.

Seminggu kemudian, yaitu awal bulan Desember 1913, Bilal bersama teman-temannya dipanggil lagi oleh wedana atas pengaduan tuan tanah Cakung. Tuan tanah itu mengadu, bahwa mereka memotong rumput sedikit sekali. Kira-kira 25 orang yang mengikuti Bilai dituduh bersikap keras kepala dan melawan aturan rodi dan peraturan pemerintahan di Bekasi. Pengadilan Bekasi akan mengampuni mereka bila mau berjanji menyerahkan rumput 60 berkas setiap orang pada tuan tanah Cakung, namun mereka menolak tawaran pengadilan tersebut sehingga pada tanggal 6 Desember 1913 Bilal dijatuhi hukuman 10 hari dan dua orang saudaranya masing-masing 5 hari.

Peristiwa kedua timbul oleh karena buruh tani menanam padi penduduk pribumi di Bekasi mogok. Mereka tidak mau lagi menanam padi di sawah-sawah orang Cina dengan upah kerja sebesar f. 0,11 (sebelas sen) tiap setengah hari. Di daerah ini menanam padi dilakukan oleh perempuan dengan upah

f 0,11 – setiap hari, 10 sen untuk wanita penanam padi satu sen untuk mandor, yaitu kepala kelompok penanam. Setelah Sarekat Islam berdiri di Bekasi disusunlah gerakan untuk tidak lagi menanami sawah-sawah orang Cina dengan upah f 0,11. Mereka menuntut upah f. 0,25 (25 sen) untuk setiap setengah hari, ditambah f. 0,025 (2½ sen atau segobang) untuk mandor. Pemerintah setempat melalui Asisten Residen Meester Cornelis Cohen bertindak menjadi penengah. Asisten residen meminta kepada tuan tanah supaya memberikan upah yang adil sebab harga-harga barang lain sudah naik dan kepada buruh tani diperingatkan, bahwa jika tidak mau menanam padi lagi maka upah potong dari hasil potongan *(bawon)* akan hilang. Penanam padi kini menaikkan tuntutannya menjadi f. 0,50 (50 sen) sehari. Sementara itu mereka mau menerima upah f. 0,11 (11 sen) di sawah-sawah milik bangsanya sendiri.

Di Telukpucung, bagian timur tanah Cakung, orang-orang yang bukan anggota Sarekat Islam mau menanam padi di sawah-sawah orang Cina dengan upah f. 0,15.

Sementara itu, tuan tanah Cakung meminta tolong pada mandor Saingkun di Bojongrangkong yang bukan anggota Sarekat Islam agar mau membujuk wanita-wanita di kampung itu untuk mau menanam padi lagi di sawah-sawah. Dijanjikan upah menanam akan naik f. 0,11 menjadi f. 0,125 dan f. 0,02 untuk mandor. Mandor Saingkun dianggap musuh oleh Sarekat Islam oleh karena tindakannya itu. Saingkun bersama temantemannya dianggap akan mendirikan partai sendiri untuk menentang Sarekat Islam.

Di Ujung Menteng orang sudah mulai mau menanam padi pada tanggal 14 Desember 1913, tetapi berita bahwa Sarekat Islam akan menghalangi penanaman padi itu sudah disebarluaskan. Wedana Bekasi mengambil tindakan dengan menempatkan polisi yang kuat di tempat-tempat tertentu supaya tidak terjadi kerusuhan.

Sementara itu, Mandor Jahari dari Pondok kelapa, Cakung, masih saudara Saingkun, sudah dianggap oleh masyarakat

terlalu mementingkan tuan tanah Cina. Ia sering bertindak keras kepada penduduk dalam urusan rodi. Sejak lama Mandor Jahari dibenci oleh penduduk setempat. Pada awal Desember 1913 kebencian penduduk telah mencapai puncaknya dan mereka mau mengambil tindakan kepada mandor yang kerjam itu. Mandor Saingkun telah mencium rencana penduduk Pondok Kelapa terhadap saudaranya. Ketika pada tanggal 7 Desember 1913 bedug dipukul bertalu-talu di langgar Pondok kelapa, mandor Saingkun bersama 50 orang temannya cepat-cepat menuju Pondok kelapa untuk membantu mandor Jahari, karena ia tahu bahwa suara bedug itu merupakan tanda untuk memulai tindakan terhadap saudaranya itu.

Di samping itu, orang-orang Sarekat Islam telah berkumpul di Kampung Setu, Cakung. Kampung tersebut berbatasan dengan Kampung Bojongrangkong, tempat tinggal mandor Jahari. Bunyi bedug sebagai tanda dimulainya komunikasi gerakan antar anggota Sarekat Islam di Bekasi untuk menunggu perintah melakukan sesuatu telah bertalu-talu. Beberapa pemimpin Sarekat Islam tampak mengadakan perjalanan antar kampung di Bekasi, seperti Ngeya dari Kampung Cibening di daerah tanah swasta di Pondok-gede, Sapat bekas juragan di Bulaktemu dari Kampung Setu di tanah swasta Cakung, Haji Ibrahim dari Kranji, dan Japar bekas mandor di Setu. Pemimpin-pemimpin itulah yang mengerahkan penduduk berkumpul di Setu pada tanggal 14 Desember 1913. Langgar pak Karim, ayah Sapat, dijadikan pusat berkumpul. Kampung Setu dan Bojongrangkong adalah dua kampung yang berbatasan. Setu adalah kampung pusat gerakan anggota-anggota Sarekat Islam, sedangkan Bojongrangkong merupakan kampung yang umumnya penduduknya menjadi pengikut mandor Saingkun dan Jahari. Penduduk Kampung Setu disiapkan untuk menghadapi gerakan penduduk Bojongrangkong yang menjadi pengikut mandor Saingkun dan Jahari yang dianggap memihak tuan tanah Cina.

Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 1913, sebanyak 150 orang anggota Sarekat Islam dari Pondok kelapa tidak

masuk kerja pada tanah-tanah swasta karena takut pada Saingkun dan teman-temannya. Potiah, pengurus tanah swasta, meminta agar para pembangkang diajukan ke pengadilan. Dari 150 orang itu diambil 13 orang yang dianggap sebagai penggeraknya atau pemimpinnya. Dari 13 orang itu tiga orang dihukum oleh pengadilan dan seorang dibebaskan pada tanggal 13 Desember 1913. Kepada pekerja yang lain (146 orang) diancam hukuman bila minggu depan tidak melakukan kerja di tanah swasta di Bekasi.

Hari Sabtu – Minggu dalam bulan Desember 1913 semua anggota Sarekat Islam di Kampung Setu tidak masuk kerja di tanah kongsi swasta. Tumpang, seorang mandor, menyelidiki orang-orang di Setu. Tumpang datang pada Sinen untuk menanyakan mengapa tidak kerja. Jawabnya ialah karena ia dilarang oleh Japari, bekas mandor, yang telah menjadi pemimpin Sarekat Islam. Saimban yang datang pada saat itu membenarkan keterangan Sinen. Mandor Tumpang marah mendengar keterangan dua orang penduduk Kampung Setu itu. Ia marah, karena menurut anggapannya yang berkuasa di daerah itu adalah dia sebagai mandor. Saimban ditampar oleh mandor Tumpang. Keributan pun terjadi sampai menjalar kepada orang-orang dari Paten dan Blandongan. Orang yang datang dari Blandongan membawa pisau. Saimban yang kena tampar pergi. Terdengarlah bunyi bedug bertalu-talu di Kampung Setu kira-kira jam 07.00. Bunyi bedug tersebut di sambut oleh bedug-bedug di langgar lain dan ditambah bunyi *kohkol* (kentrongan). Kemudian mengalirlah orang-orang dari beberapa kampung di Kecamatan Bekasi menuju langgar pak Karim di Kampung Setu. Di antara gerombolan orang yang datang itu ada yang dari Kampung Babelan yang berjarak 10 pal dari Setu, bahkan dari Cicadar, Distrik Cibinong, Afdeeling Bogor.

Asisten residen mendapat laporan dari Wedana Bekasi tentang orang-orang bersenjata dari banyak kampung datang ke Bojongrangkong. Tak lama kemudian timbul kerusuhan dan perkelahian di Kampung Setu. Selanjutnya, dilaporkan bahwa orang terus mengalir menuju Bojongrangkong. Asisten

Residen Meester Cornelis (Jatinegara) menelepon komandan militer setempat untuk minta bantuan 20 orang militer di bawah pimpinan seorang letnan. Pasukan itu bersama asisten residen datang di tempat kerusuhan. Mareka menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai dua buah mobil. Mereka yang belum dapat diangkut, diminta menunggu kendaraan dari Weltevreden. Dalam perjalanan menuju Kampung Setu diperoleh keterangan, bahwa di Kampung Setu terjadi perkelahian. Orang-orang Sarekat Islam yang datang dari kampung lain sudah mengepung Kampung Setu dan Bojongrangkong untuk memberi bantuan. Asisten residen bersama militer dan pembantunya memasuki pekarangan rumah mandor Tumpang. Di sekeliling rumah nampak orang mengelilingi kira-kira antara 2000 – 3000 orang yang terpanggil oleh bunyi bedug itu. Asisten Residen memerintahkan orang-orang itu supaya jongkok. Perintah itu ditaati. Salah seorang di antara mereka kemudian ditanya tentang maksud berkumpul di Setu. Ngeya menjawab, bahwa mereka datang untuk menyelesaikan ketiga kasus saudaranya yang dipukuli oleh Mandor Tumpang. Masalah perkelahiran dan pemukulan atas ketiga orang itu oleh mandor Tumpang diminta penyelesaiannya di Pengadilan Bekasi hari Selasa. Atas nasihat asisten residen orang yang berkumpul itu pulang kembali ke rumah masing-masing. Dengan demikian dapat dihindarkan kemungkinan jatuhnya korban jiwa.

Hari Selasa keempat orang yang terlibat perkelahian di Setu itu sudah datang di pengadilan Bekasi dengan diantar oleh kira-kira 100 orang. Yang mengantar berjongkok di sekeliling Pengadilan Bekasi. Pertanyaan pertama tentang bagaimana orang dari kampung dapat datang sebanyak itu dalam waktu singkat hanya sekedar mentaati bunyi bedug, tiada ada yang dapat menjawabnya. Yang jelas mandor Saingkun dan Tumpang dengan bantuan keuangan orang-orang Cina, telah bersumpah untuk memusuhi Sarekat Islam. Thio Ju Liong orang Cina yang amat luas sawahnya sanggup mengeluarkan uang banyak untuk membunuh Sarekat Islam setempat, seperti Sapat dan Jaya. Pada malam tanggal 7 Desember 1913 Saingkun bersama 600

orang kawannya dari Pondok kelapa berusaha membunuh para pemimpin Sarekat Islam, tapi gagal. Untuk memperjelas persoalan Haji Abdurachman, Presiden Sarekat Islam di Meester Cornelis, mengadakan musyawarah.

Sementara itu, seekor kerbau yang dicuri oleh seorang Cina yang gila dapat diketemukan lagi di Pondok Gede, dan hal ini juga dengan membunyikan bedug bertalu-talu – menyebabkan orang berkumpul dengan tidak tahu persoalannya. Kepada patih dan kontroler diberitahukan, bahwa Saingkun dan pemelik besar tanah partikelir Cina menentang Sarekat Islam yang menyebabkan pekerja-pekerja penanaman padi mogok menjadi sebab-sebab timbulnya keributan-keributan, orang lainnya boleh pulang.

Presiden *Jamiatul Islam* sebuah cabang Sarekat Islam, yaitu Haji Ibrahim, supaya memecat keempat orang yang melakukan keributan, meminta waktu 14 hari.

Kerja paksa untuk kepentingan tuan tanah di Cakung merupakan penyebab langsung terjadinya kerusuhan tanggal 13 malam Desember 1913 menjelang tanggal 14; rakyat penanam padi ikut oleh karena masalah upah yang dirasakan tidak adil terutama di tanah-tanah swasta di Cakung Bekasi.

4.1.2 Bekasi, 1914

Sarekat Islam Distrik Bekasi merupakan anak cabang Sarekat Islam Kabupaten Meester Cornelis terlepas dari Betawi. Raden Danumihardja, kepala Sekolah Pribumi kelas I di Meester Cornelis menjadi presiden Sarekat Islam yang didirikan pada bulan Mei 1913. Gerakan Sarekat Islam Bekasi mengisukan akan mengambilalih semua tanah pesawahan yang berada di tangan turunan asing dan merencanakan akan membunuh orang-orang Eropa.

Sikap permusuhan Sarekat Islam terhadap sebagian penduduk yang bukan anggota Sarekat Islam di Bekasi sangat menonjol. Hal itu nampak dalam penolakan memberi bantuan kepada orang-orang yang bukan anggota Sarekat Islam pada

saat pemakaman, pindah atau mendirikan rumah, bercocok tanam, dan pembagian sedekah. Imam desa menolak memandikan dan menyembahyangkan jenazah orang yang bukan anggota Sarekat Islam. Orang-orang yang bukan anggota Sarekat Islam dianggap kafir. Akhirnya seruan jihad disebarkan oleh para anggota Sarekat Islam di Bekasi.

Asisten Residen Cohen menganggap Sarekat Islam di Bekasi berbahaya dan supaya diubah namanya menjadi Jamiatul Islamiyah. Pada mulanya nama itu merupakan nama perkumpulan kematian yang telah dibubarkan. Haji Abdurachman menjadi Ketua Jamiatul Islamiyah setelah didesak oleh Asisten Residen Cohen pada bulan Oktober 1913. Ia menggantikan Haji Hidayat. Haji Hidayat menggantikan Rd. Danumiharja yang dipindahkan. Setelah Haji Abdurahman menjadi ketua Jamiatul Islamiyah, perkumpulan itu tidak melulu bercocok keagamaan, tapi mulai memasukkan unsur ekonomi, seperti mendirikan warung-warung atas dasar koperasi dengan saham f1, – sehelai. Warung itu dikenal dengan nama "Warung Andeel".

Penggantian nama dari Sarekat Islam menjadi Jamiatul Islamiyah menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan para anggota Sarekat Islam. Dalam pada itu, Haji Abdurachman menjadi Ketua perkumpulan bukan atas dasar pilihan anggota, melainkan ditunjuk oleh Wedana Meester Cornelis. Uang adil sebesar f 2, –/helai dianggap tidak pernah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, demikian pula surat keanggotaan tidak pernah dimilikinya. Orang-orang yang tidak puas ini menggabungkan diri dengan Sarekat Islam di Bekasi. Mereka tidak mengakui Jamiatul Islamiyah dan mendirikan Sarekat Islam tersendiri. Sebaliknya Jamiatul Islamiyah menolak untuk menyerahkan kembali uang iuran anggota 30% kepada Sarekat Islam.

Permintaan izin rapat pada asisten residen ditolak. Haji Abdurachman dipilih kembali sebagai ketua Jamiatul Islamiyah. Setelah ini H. Abdurachman mengatakan Sarekat Islam

berbahaya pada asisten residen dan Wedana Meester Cornelis dln setelah mempertanggungjawabkan keuangan dan hasil uang andeel itu sebelum mendapat pengakuan Badan Hukum dari Pemerintah Hindia Belanda, tetapi dari keluhan umum nampak bahwa Jamiatul Islamiyah supaya diberi nama lagi Sarekat Islam. Asisten residen pengganti Cohen, yaitu Feith, tidak berkeberatan atas penggantian nama itu dan pemberian tanda keanggotaan. Rapat-rapat diadakan di seluruh Distrik Bekasi, yang dihadiri 300 orang. Wedana Meester Cornelis dengan keputusannya memulihkan kembali nama Sarekat Islam, karena memaklumi timbulnya perpecahan Sarekat Islam dengan Jamiatul Islamiyah.

4.1.3 Perkumpulan Kong Jie Hin

Sebagai akibat sikap permusuhan Sarekat Islam dan Jamiatul Islamiyah terhadap orang-orang Cina, maka di Distrik Bekasi didirikan perkumpulan Kong Jie Hin. Perkumpulan ini didirikan olehbeberapa orang administratur, pedagang, dan tuan tanah dengan tujuan menolong dalam rangka menghadapi sikap permusuhan yang diperlihatkan Sarekat Islam dan Jamiatul Islamiyah . Kong Jie Hin yang berarti "peningkatan kesejahteraan umum" didirikan untuk melindungi diri dari kemungkinan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota-anggota Sarekat Islam di Bekasi. Kong Jie Hin didirikan pada bulan Agustus 1913. Pada mulanya kegiatan perkumpulan ini adalah menolong anggota yang kematian dengan memberi bantuan uang sebesar f 25,–, tetapi kemudian aktivitasnya cenderung merongrong Sarekat Islam dari dalam. Pengurus Kong Jie Hin ialah Thio Jung Liong, tuan tanah di Karatan sebagai ketua; Suan Po, bekas *potiah* di Teluk Pucung, sebagai kasir; dan Saingkun, bekas mandor di Cakung, sebagai komisaris. Selanjutnya perkumpulan itu menggunakan sistem ranting *(kring)* di tiap daerahnya. Hubungan anggota satu dengan yang lainnya ditandai dengan cara bersalaman dan sesudah itu tangan ditumpangkan

di bahu kanan, sarung disampingkan di atas bahu diberi simpul yang menumpang di dada. Bila ada perkelahian atau keadaan darurat tangan diletakkan pada bahu, sebagai tanda minta bantuan.

Kong Jie Hin mendapat simpati pemerintah daerah, karena pemerintah merasa dapat bantuan dalam menghadapi Sarekat Islam. Hampir semua mandor dan polisi tanah-tanah partikelir masuk jadi anggota Kong Jie Hin, juga pesuruh-pesuruh wedana Bekasi. Wedana Bekasi memerintahkan agar menghukum lebih berat kepada anggota Sarekat Islam yang bersalah dari pada kepada anggota Kong Jie Hin.

Kerusuhan di Kampung Setu tanah Cakung bulan Desember 1913 dan di Teluk Pucung pada bulan Pebruari 1914, di Bangkalan bulan April 1914 dilatarbelakangi oleh permusuhan antara Sarekat Islam dengan Kong Jie Hin. Kong Jie Hin bergerak secara gelap, sedangkan Sarekat Islam secara terang-terangan. Selain di daerah Bekasi, Kong Jie Hin berkembang pula di Pulau Gadung, termasuk Distrik Meester Cornelis. Anggota orang pribumi Kong Jie Hn sebenarnya lebih suka masuk Sarekat Islam. Abdurachman dilarang menerima anggota baru Jamiatul Islamiyah oleh pemerintah (Surat tanggal 29 September 1913). Sikap simpati wedana Bekasi kepada Kong Jie Hin menjadi sumber sikap antipati penduduk pribumi, khususnya anggota Sarekat Islam. Oleh karena itu untuk mengembalikan wibawa dan simpati rakyat terhadap pemerintah di Bekasi, Raden Bakhran Wedana Bekasi dipindahkan dari Bekasi.[1]

4.2 Gerakan Sosial, Politik dan Ekonomi (1918–1924)

4.2.1 Gerakan Perlawanan di Priangan Tengah, 1918

Dari laporan Asisten Residen Bandung Hillen kepada Residen Priangan pada tanggal 21 September 1918 dapat dike-

tahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 1918 telah terjadi keributan di Desa Rancakasumba, Majalaya, Bandung. Sekelompok masyarakat yang terdiri dari sekitar 180 orang anggota Sarekat Islam menyergap Haji Jaelani, penduduk Desa Rancakasumba. Mereka mendesak Haji Jaelani supaya masuk Sarekat Islam. Haji Pakih, kepada kelompok Sarekat Islam, menyatakan dirinya sebagai Imam Mahdi yang tidak takut kepada pistol dan orang Belanda. Ia menyatakan pula, bahwa barang siapa tidak masuk Sarekat Islam akan mendapat pengajaran yang setimpal.

Haji Jaelani telah sebulan yang lalu berjanji mau masuk Sarekat Islam, tapi kemudian dia menghilang. Oleh karena itu, pada tanggal 9 September 1918 dia beramai-ramai ditangkap dari rumahnya. Haji Pakih dan Maja kemudian ditangkap oleh polisi, kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan masing-masing 1½ bulan penjara. Dua orang pengurus desa dipecat karena turut campur dalam peristiwa di Rancakasumba itu.

Di Ciparay pun telah timbul pula gerakan menentang pemerintahan setempat. Untuk menghadapi gerakan itu Asisten Residen mengirim delapan orang polisi yang dipimpin oleh kepala agen polisi untuk berjaga-jaga di tempat itu. Pada tanggal 12 dan 13 September 1918 diberitakan bahwa di desa-desa di Kewedanan Ciparay telah timbul kerusuhan yang dilakukan oleh anggota-anggota Sarekat Islam terhadap penduduk setempat.

Gerakan Sarekat Islam Majalaya itu dipimpin oleh Mantri Guru di Cangkring Mas Suriadimaja dan kepala desa Cibodas. Kedua orang itu dianggap sebagai pusat gerakan. Karena itu mereka dikenakan tahanan oleh polisi pada tanggal 13 September 1918.

Pada tanggal 14 September 1918 asisten residen, bupati, patih, dan kontroler dari Bandung mengadakan pemeriksaan

di desa-desa di Kewedanan Ciparay. Pemeriksaan tersebut dimulai dari Desa Cibodas yang kepala desanya terlibat gerakan itu. Kepada penduduk diberitahukan, bahwa kepala desa mereka ditahan di Bandung bersama beberap orang anggota pengurus Sarekat Islam. Penduduk yang berkumpul menanyakan duduk persoalannya, terutama persoalan anggota-anggota Sarekat Islam. Dari penduduk yang bukan anggota Sarekat Islam diperoleh keterangan bahwa lurah (kepala desa) Ciboas telah menentang kekuasaan pemerintah untuk kepentingan Imam Mahdi. Lurah Cibodas sendiri menerangkan kepada penduduk sebelum dipenjara, bahwa sekarang sudah cukup lama mencelakakan penduduk di Hindia Belanda dan sekarang bagian bumiputra telah sampai pada waktunya.

Dalam keributan yang terjadi Haji Hasan Ibrahim dipukul oleh lurah Cibodas karena tidak mau masuk Sarekat Islam. Akibatnya ia lari ke Leles, Garut, karena takut dianiaya lagi oleh anggota Sarekat Islam. Lurah Bojong pun dianiaya oleh Lurah Cibodas. Selain itu, rumah-rumah penduduk di desa Bojong yang bukan anggota Sarekat Islam dilempari batu. Penduduk yang rumahnya kena lemparan batu mengaduk kepada kepala desa.

Di Desa Majalaya dilakukan perjalanan besar oleh anggota-anggota Sarekat Islam. Orang-orang banyak keluar rumah untuk melihat barisan yang panjang itu seperti di Desa Mantri Cina, Talun, dan Balekambang. Arak-arakan Sarekat Islam tanpa izin atau tanpa memberitahu kepada lurah atau camat setempat. Pengikut barisan ini membawa batu, pasir, alat musik, dan bendera sambil berteriak-teriak. Bendera-bendera yang dibawa mereka berwarna hijau, putih, dan merah.

Dari Desa Maruyung diketahui bahwa seorang lebe (pejabat desa bidang agama) diambil dari rumahnya oleh 40 orang anggota Sarekat Islam. Di Desa Talun anggota Sarekat Islam memu-

kuli dua orang penduduk setempat dengan sepengetahuan tua orang penduduk setempat dengan sepengetahuan tua kampung, polisi desa, jrutulis, dan lurah Talun. Di Desa Cibeet juga terjadi pelemparan batu. Dari penduduk setempat didapatkan formulir Sarekat Islam yang berisi anjuran supaya menolak perintah negara yang menyusahkan penduduk.

Kerusuhan di Ciparay dan Majalaya timbul setelah di daerah ini berdiri Sarekat Islam. Di Majalaya Sarekat Islam didirikan pada bulan April 1913 dan mendapat pengesahan dari pemerintah kolonial pada tanggal 17 Februari 1915, No. 24. Pertumbuhan jumlah anggota melonjak dengan cepat. Pada bulan Januari – September 1918 anggota Sarekat Islam sudah mencapai 3251 orang dan pada akhir bulan Mei 1918 telah masuk 341 orang anggota wanita. Pada bulan Juni 1918 H.O.S. Cokroaminoto, presiden Sarekat Islam Pusat berkunjung ke daerah ini berhubung dengan iuran anggota belum masuk ke pusat.

Pengurus Sarekat Islam Majalaya adalah Mas Suriadimaja Darmakusuma sebagai mantri guru, tokoh ini mampu membangkitkan semangat juang pengikutnya. Pada masa itu guru bumiputra dan guru-guru pada umumnya mempunyai perasaan iri terhadap pegawai pamongpraja demikian pula sebaliknya.

Dalam tahun 1918 terdapat sembilan kepala desa di Kecamatan Majalaya yang menjadi pengurus Sarekat Islam. Hal ini mengakibatkan jumlah anggota naik. Dari camat Majalaya sulit diminta keterangan tentang perkembangan Sarekat Islam di pedesaan. Pada bulan Juni 1918 wedana Ciparay dipecat dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menangani keamanan dan ketertiban dari tekanan Sarekat Islam.

Bupati Bandung RAA. Martanagara bersikap membiarkan gerakan Sarekat Islam di daerahnya; oleh karena itu, pemerintah kolonial memandang perlu mengganti Bupati Bandung RA A. Martanagara itu dengan alasan telah berusia lanjut dan akan

digantikan oleh orang muda. Perlawanan Sarekat Islam di Ciparay dianggap pemerintah kolonial tidak lepas dari pada kesalahan dan kelemahan bupati tua.

Kepala Desa Cibodas adalah pemimpin suatu aliran kepercayaan rahasia yang menyebarkan kepercayaan, bahwa Tuhan telah menitis pada diri Cokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam, yang turun di bumi untuk memerintah. Pada 16 Juli 1918 tua kampung mengumpulkan penduduk untuk milisi Sarekat Islam, sebab menurut mereka Ratu Wilhelmina tidak lama lagi akan diganti oleh Cokroaminoto. Pemberitaan ini menjadi pendorong meningkatnya jumlah anggota baru Sarekat Islam di Kewedanaan Banjaran. Pembicaraan sehari-hari penduduk pada waktu itu adalah tentang Kerajaan Cokroaminoto. Berita kerajaan Cokroaminoto makin hari makin meluas di kalangan masyarakat. Berita itu menjadi sumber ketidak-tertiban di daerah ini. Tambahan pula muncul berita tentang akan terjadinya pemberontakan pada tahun 1919. Berita tersebut membuat keadaan penduduk makin resah dan gelisah. Pada tanggal 13 September 1918 Mas Suriadimaja Darmakusuma, mantri guru di Cangkring dan tokoh Sarekat-Islam ditahan di Bandung. Atas permintaan direktur pendidikan ia dipindahkan tugas mengajarnya ke Cianjur Selatan.

Pada bulan Oktober 1918 Pemerintah Kolonial di Priangan mengirim kesatuan polisi dan militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban di Ciparay dan Majalaya. Demikian pula lurah desa Cibodas Wiratmaja dihukum penjara karena telah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah maksimal enam tahun. Murtasik, ketua Kampung Pasir Huni, Desa Cibeet ditahan karena menghasut rakyat dengan menyebarkan berita bahwa pada taahun 1920 Ratu Wilhelmina akan turun takhta dan Cokroaminoto akan menjadi raja Jawa.[2]

4.2.2 Gerakan Perlawanan di Cimareme, 1919

Penangkapan, penjara dan hukuman mati yang dilakukan dan dijatuhkan pemerintah kolonial terhadap para pemimpin gerakan penduduk desa-desa di Kabupaten Bandung pada tahun 1918 tidak menyelesaikan masalahnya. Faktor-faktor penyebab gerakan itu tidak dapat diselesaikan dengan tindakan penumpasan, penjara, dan hukuman mati.

Demikian adaptasi dalam proses wasternisasi di kalangan priyayi dan masyarakat pedesaan berbeda. Perkenalan dengan ukuran prestise baru di antara para bupati berdasarkan pada ukuran Barat menggoyahkan nilai-nilai tradisi politik dan kepincangan sosial ekonomi pada masyarakat elit pribumi. Westernisasi yang membawa proses sekularisasi berjalan dalam kalangan priyayi atau *menak* yang bekerjasama dengan lembaga-lembaga Barat. Sementara pemimpin agama resmi atau tidak resmi sebagian besar tinggal pada orientasi tradisi.

Sekularisasi membawa napas baru antara pemimpin religius dengan penguasa politik yang sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan atas pemimpin religius. Golongan pemimpin religius merupakan penentang kuat terhadap perluasan pengaruh kekuasaan Barat. Konflik antara priyayi dengan pemimpin religius tidak dapat dihindarkan karena perbedaan ideologi dan kedudukan sosio-ekonomi yang timbul dari proses modernisasi. Akhirnya perbenturan ideologis menjadi terbuka antara pemimpin agama dengan priyayi yang menjadi alat pemerintah Hindia Belanda.

Kiai atau haji dengan pesantren dan aliran tarekatnya menduduki kedudukan sosial ekonomi yang tinggi dan kekuasaan moral atas penduduk pedesaan, di pihak lain pamong praja berorientasi pada norma struktur kolonial. Perubahan peran dan kepemimpinan elite religius nampak pada pesantren. Sebagai akibat dan pertumbuhan dari pengaruh Westernisasi dan se-

kularisasi, kiai atau haji banyak kehilangan pengaruh politiknya dan kredibilitasnya terhadap masyarakat di pedesaan. Kepercayaan umum pada lambang kekuatan supernatural dan kapasitas kesaktiannya memberi kekuatan kharisma yang besar, khususnya pada keadaan tertekan. Bila petani tidak mendapat jalan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya melalui keagamaan dan tarekat, maka mereka akan berubah menjadi gerakan pemberontakan.

Kekuatan kiai terletak pada lembaga Islam dalam bentuk pesantren dan tarekat. Kiai dapat melatih para pemuda pedesaan di pesantren dengan cara tradisional. Kiai menuntut kesetiaan, kepatuhan dan disiplin melalui organisasi tarekatnya. Solidaritas timbul dari hubungan kekeluargaan di pesantren.

Pengaruh dan kekuasaan kiai di lingkungan pesantren dan tarekat sangat besar. Demikian pula terhadap penduduk pedesaan dan sekitarnya. Lembaga pesantren besar manfaatnya untuk agitasi politik. Agitasi tersebut mulai memasuki pedesaan di Priangan melalui Sarekat Islam pada permulaan tahun 1913. Dengan doktrin perang sabil mereka bersedia mati untuk agama dan tarekat.

Peristiwa Cimareme tahun 1919 diprakarsai oleh Haji Moh. Hasan Arif yang lebih dikenal dengan panggilan Haji Hasan. Kekayaan, umur, karakter, dan pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang agama Islam, memungkinkan Haji Hasan mempunyai pengaruh besar terhadap lingkungannya, tidak hanya dalam keluarga dan santrinya, tetapi juga di sekitar daerah tempat tinggalnya. Ia bertempat tinggal di Desa Cikendal, Kabupaten Garut. Kenyataannya ia seorang pemimpin agama dan tarekat yang berpengaruh terhadap pengikutnya. Menantunya, Haji Gojali, seorang yang berpengaruh di daerah Pameungpeuk, Garut Selatan. Rupanya ia sudah terpengaruh ideologi Sarekat Islam. Hal itu membawa angin baru terhadap sikap dan pan-

dangan Haji Hasan dalam menghadapi masalah peraturan penjualan padi secara paksa dari pemerintah setempat. Hubungan Haji Hasan dengan bupati Garut, sebelum Bupati Kartalegawa, cukup baik. Perselisihan timbul pada tahun 1918 ketika pemerintah setempat memotong tanaman tembakau untuk diganti dengan tanaman padi.[3]

Setahun kemudian ketidak-puasan Haji Hasan menjadi besar dan pecah dalam bentuk penolakan untuk menjual padi kepada wedana Leles. wedana mengancam Haji Hasan akan menyita semua padi dari sawahnya, apabila tidak memenuhi kewajiban untuk menjual padi kepada pemerintah sebanyak 4 pikul padi untuk setiap bahu.

Menurut peraturan itu Haji Hasan diwajibkan menyetorkan padi 40 pikul (2500 kg) dari sawahnya seluas 10 bahu. Haji Hasn merasa berat untuk menjual apdi 40 pikul kepada pemerintah karena Haji Hasan mempunyai anggota keluarga sebanyak 84 orang. Haji Hasan mengirim surat kepada Asisten Residen Garut (24 April 1919) untuk menjelaskan keadaannya dan meminta jumlah wajib jual padi dikurangi dari 4 pikul untuk setiap bahu menjadi 1 pikul.

Hari Jum'at tanggal 4 Juli 1919 di Kampung Cimareme nampak keadaan yang luar biasa, yaitu dengan banyaknya penduduk yang berbaju putih dan bersenjata menempati tempat tertentu. Para pejabat tingkat Kabupaten Garut bersama pasukan polisi yang berjumlah 60 orang dengan pedagang terhunus dan senapan siap ditembakkan bergerak menuju Cimareme. Di tengah-tengah pasukan polisi itu nampak para pejabat pemerintah kolonial setempat seperti asisten residen, bupati, patih, wedana, camat, penghulu, dan komandan pasukan polisi. Mereka bergerak dari Cibudug Girang dengan membentuk gerakan paruh lembing menuju Cimareme menyerang rumah Haji Hasan sekitar jam 09.00 waktu setempat. Selama dalam perjalanan pa-

sukan polisi tidak mendapat gangguan dari pengikut Haji Hasan yang bersembunyi di balik pohon atau rumpun-rumpun yang menunggu perintah dari Atmaka, pembantu Haji Hasan urusan pembelaan diri. Setelah pasukan polisi bersama pejabat Kabupaten Garut sampai di halaman rumah Haji Hasan, barulah Atmaka memerintahkan pengikutnya untuk menampakkan diri dari persembunyian mereka di bukit-bukit sekeliling rumah Haji Hasan. Pengikut Haji Hasan berkekuatan sekitar 300 orang. Mereka memakai seragam baju putih dan bersenjata tajam. Haji Hasan yang mengenakan pakaian putih, dan keris terselip di pinggang dikawal oleh Wiyatna, Suwardi, dan Nurhamid. Ia berdiri di serambi rumahnya. Atmaka dan beberapa kiai siap menantikan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama polisi terhadap gurunya.

Asisten residen bersama polisi melihat kesiapsiagaan dan jumlah yang besar dari pengikut Haji Hasan. Ia melancarkan siasat diplomasi untuk menutupi kelemahannya dan tidak langsung menangkap Haji Hasan. Terjadilah dialog antara asisten residen dengan para pemimpin kaum perlawanan.

Asisten Residen : *'Mengapa banyak orang yang berbaju putih di sini dan bersenjata golok?"*

Atmaka : *"Mereka ingin menyaksikan tindakan Belanda yang akan menembak mati Haji Hasan Arif."*

Asisten Residen : *"Apakah betul Haji Hasan Arif mau mengadakan perang sabil?"*

Atmaka : *"Kalau tindakan pemerintah mau menembak mati Haji Hasan Arif yang tidak berdosa itulah sabil namanya?"*

Asisten Residen berdiam diri. Atmaka balik bertanya.

Atmaka : *"Betulkah pemerintah mau menembak mati Haji Hasan Arif?"*

Asisten Residen : *"Tidak, pemerintah hanya mau membeli padi 4 pikul dari setiap bahu".*

Atmaka	:	*"Apakah pemerintah tidak dapat mempertimbangkan usul kami, dari 4 pikul tiap bahu menjadi 1 pikul tiap bahu. Dan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah apabila petani tidak mau menjual padi pada pemerintah?"*

Asisten residen mundur selangkah dan tampil penghulu Garut ke depan untuk bertanya.

Penghulu	:	*"Apakah yang disebut perang sabil itu?" Menurut pendapat saya diartikan dengan Perang Sabil ialah perang mempertahankan faham agama. Sedang sekarang hanya masalah padi, berarti keduniawian".*
Haji Hasan Arif	:	*"Tuan mungkin lebih tahu soal-soal agama dari pada saya. Akan tetapi cobalah pindahkan perasaan Tuan pada rakyat. Kalau anak cucu Tuan sendiri kekurangan makanan, dapatkah tentram menjalankan kewajiban agama dan ibadah kepada Tuhan? Dan apa yang harus dikatakan bila seseorang sedang menjalankan ibadah sembahyang auratnya terlihat? Demikian pula karena lapar akan menggoncangkan ibadahnya. Jadi justru soal makanan, pakaian itulah syarat untuk menjamin ketentraman umat dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Swt. Dan karena itu pula masalah ini tidak dapat dilepaskan dari faham agama. Jadi, apabila hak-hak kami itu terancam adalah hak dan kewajiban kami akan mempertahankannya".*

Penghulu mendengar jawaban Haji Hasan itu tidak memberikan bantahan. Suasana hening tapi tegang. Asisten residen menyadari bahwa pembicaraan dan kedudukan mereka tidak menguntungkan. Asisten residen berembuk dengan bupati; selesai berunding bupati menyatakan pada Haji Hasan, bahwa usul rakyat akan dilangsungkan kepada pemerintah di Batavia. Usul itu dijamin akan terkabul dan pasukan Haji Hasan supaya dibubarkan dan kembali ke tempat masing-masing bekerja seperti biasa.

Haji Hasan tidak memberi jawaban dan rombongan asisten residen bersama polisi meninggalkan Cimareme tanpa terjadi bentrokan senjata. Sepeninggal rombongan Asisten Resi-

den, Haji Hasan membubarkan pasukannya dan berpesan kepada pengikut dan sahabatnya untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat memberikan bantuannya.

Pada tanggal 7 Juli 1919 dengan tidak diduga sebelumnya oleh Haji Hasan, bupati Garut bersama rombongan kembali lagi ke Cimareme. Rombongan itu diperkuat oleh polisi dan militer dalam jumlah yang lebih besar. Haji Hasan memperkirakan kedatangan bupati beserta polisi dan tentara secepat-cepatnya 15 hari setelah kedatangan mereka yang pertama. Haji Hasan menggunakan kesempatan waktu itu dengan menikahkan putranya, Asikarta; oleh karena itu, ketika berita kedatangan rombongan bupati sampai di rumah Haji Hasan, suasana panik terjadi. Suasana pesta perkawinan berubah secara mendadak menjadi siap siaga menghadapi kemungkinan perang. Beberapa orang pemuda seperti Suktma dan Moh. Yahya disuruh oleh Haji Gojali untuk pergi ke Cijulang mengambil benda-benda pusaka.

Kira-kira pukul 10.00 padi datang informasi bahwa dari arah Garut telah datang rombongan asisten residen, bupati, wedana camat, penghulu bersama 30 orang polisi dan 40 orang serdadu infanteri yang didatangkan dari Cimahi Bandung di bawah Komandan Letnan Van Hillen.[4]

Setelah rombongan mendekati Kampung Cimareme sejak dari Cibudug Girang pasukan polisi dan infanteri turun dari kendaraan mereka dan langsung membentuk formasi penyerangan dalam bentuk paruh lembing dan bergerak menuju sasaran, yaitu rumah Haji Hasan Arief. Satu regu langsung mengepung rumah Haji Hasan Arief dan satu regu menyebar melakukan perlindungan dan penyerangan terhadap penduduk yang berada di ladang, sawah, kebun yang tidak siap untuk menghadapi kemungkinan yang akan terjadi. Penduduk yang ada di sawah dan ladang ditangkap dan digiring ke depan rumah Haji Hasan Arief. Komandan pasukan yang mengepung rumah Haji

Hasan Arief dengan suara keras berseru supaya Haji Hasan Arief keluar dari rumah dan menyatakan menyerah, kalau tidak berarti menentang pemerintah. Haji Hasan Arif tidak menjawab seruan itu dan tidak keluar rumah. Tak lama kemudian tembakan salvo ke atas terdengar ke seluruh penjuru kampung diselingi oleh jeritan suara perempuan dan anak-anak yang ketakutan dari dalam rumah.

Tembakan peringatan dihentikan. Mereka menunggu lagi jawaban Haji Hasan Arief beserta keluarganya yang tetap berada di dalam rumah. Haji Hasan menyatakan kepada anggota keluarga dan teman seperjuangannya, bahan ia tidak akan menyerah kepada musuh dan berpesan agar perjoangannya melawan Belanda diteruskan.

Rupanya regu penembak dari rombongan asisten residen sudah tidak sabar lagi menunggu jawaban Haji Hasan atau seseorang keluarga dari dari dalam rumah. Dengan tiba - tiba terdengar perintah "tembak Haji Hasan dengan semua pengikutnya". Ketika itu juga berdentumlah suara tembakan senapan yang diarahkan ke dalam rumah Haji Hasan Arief. Sesaat setelah suara tembakan berlalu terdengar suara jeritan anak-anak dan perempuan yang kesakitan dari dalam rumah Haji Hasan Arief. Dari lubang dinding seorang serdadu menodongkan senjatanya ke arah seseorang tua berbaju putih yang sedang sujud bersembahyang. Setelah beberapa butir peluru menembus tubuhnya rubuhlah Haji Hasan Arief seketika itu juga tanpa suara kesakitan. Haji Bakar yang melihat kejadian ini melompat dari dalam rumah menabrak jendela untuk melakukan perlawanan dan berhasil merebut senapan penembak Haji Hasan Arief dan mencekiknya tapi serdadu lainnya menghantam dengan pedang kepada Haji Bakar yang seketika itu pula jatuh ke dalam kolam dan ditembak mati. Menyusul Udin, Engko, dan Saedi dari dalam rumah keluar menuju pekarangan

melakukan perlawanan. Mereka sempat melukai beberapa orang serdadu, tapi akhirnya mereka bertiga kalah karena serdadu Belanda lebih banyak dan bersenjata lengkap. Ketiga orang pengikut Haji Hasan Arief itu disiksa kemudian ditembak mati. Demikian pula Ijiguna yang melakukan perlawanan mengikuti temannya mendapat hadiah tembakan, tapi ia beruntung masih dapat sembuh, tetapi mengalami lumpuh tangan dan kakinya.

Setelah diketahui bahwa Haji Hasan Arief telah rubuh berlumuran darah dan tidak bernyawa lagi, barulah tembakan dan perkelahian berhenti. Tindakan selanjutnya yang mereka lakukan ialah melakukan penangkapan terhadap barang siapa yang dicurigai. Kemudian tawanan itu segera dirantai dan digiring ke Garut. Semenara itu, Atmaka sempat dapat menyelamatkan diri dari tempat epersembunyiannya, tetapi beberapa hari kemudian ia tertangkap juga dan dimasukkan ke dalam penjara Garut.

Peristiwa perlawanan rakyat petani yang dipimpin oleh Haji Hasan Arief dari Kampung Cimareme terhadap kekuasaan pemerintah kolonial setempat berakhirlah sudah setelah Haji Hasan Arief gugur di rumahnya kena peluru serdadu Belanda. Dari peristiwa itu tercatat enam orang pengikutnya meninggal dunia, 22 orang luka-luka, dan33 orang pengikutnya dikenakan tahanan.[5]

4.3 Gerakan Perlawanan di Jawa Barat, 1924

Pembrontakan petani di Cimareme dengan mudah dipadamkan oleh Pemerintah Kolonial di Priangan dengan menggunakan kekuatan polisi dan tentara pada tanggal 4 – 7 Juli 1919. Kematian Haji Hasan Arief dan empat orang anggota keluarganya serta 22 orang yang mendapat luka-luka mendapat perhatian masyarakat dan kaum pergerakan nasional Indonesia. Masyrakat menyoroti Pemerintah Hindia Belanda di Priangan

mulai dari lurah Cikendal, asisten residen Garut, wedana leles, penghulu Kabupaten Garut, patih dan bupati Garut serta residen Priangan kemudian gubernur-jenderal Hindia Belanda, yang menjalankan kekuasaan dengan cara kekerasan untuk memaksa petani supaya memenuhi peraturan menjual padi kepada Pemerintah sehingga terjadi pertumpahan darah.

Masih pada hari Senin tanggal 7 Juli 1919, Pemerintah menangkap dan memenjarakan 24 orang petani dari daerah Garut, yang dianggap turut membantu Haji Hasan Arief. Mereka anggota atau pengurus dari apa yang oleh Residen Priangan disebut *Afdeeling B* Sarekat Islam di wilayah Priangan.[6]

Beberapa bulan kemudian Pemerintah Kolonial di Priangan melalui pengadilan di Garut menjatuhi hukuman kepada delapan orang petani yang dipandang pembrontak di Cimareme. Tindakan Pemerintah Kolonial tidak putus sampai di situ saja, ternyata kemudian Pemerintah Kolonial melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan terhadap para anggota dan pengurus *Afdeeling B* serta anggota dan pengurus Sarekat Islam di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bandung dan Cianjur. Kemudian dilakukan pula penangkapan, pemeriksaan dan penahanan terhadap pengurus Central Sarekat Islam seperti Abdul Muis, Sosro Kardono, dan Cokroaminoto.

Protes timbul dari kaum pergerakan nasional dan masyarakat luas, bahkan dari orang-orang Belanda sendiri terhadap tindakan pemerintah kolonial yang tidak bijaksana dalam menyelesaikan masalah perlawanan petani di Cimareme, Garut dan masalah pemeriksaan, penangkapan dan penahanan para anggota dan pengurus Sarekat Islam di berbagai tempat. Salah satu di antaranya adalah protes berlangsung di Lapangan Gambir Jakarta pada tanggal 20 Juli 1919.[7] Surat-surat kabar bumi putra dan Belanda banyak memuat kritik atas tindakan pemerintah kolonial dalam kebijaksanaannya menyelesaikan masalah pembelian padi di Priangan yang menyebabkan kema-

tian lima orang petani dan 22 orang luka-luka serta penahanan terhadap anggota dan pengurus *Afdeeling B* Sarekat Islam di Priangan. C.O. Van Der Plas menyatakan bahwa terjadinya pemberontakan petani di Cimareme pada tanggal 7 Juli 1919 itu disebabkan oleh ketidak-bijaksanaan para pejabat pemerintah setempat.[8]

Begitu menggegerkannya peristiwa Cimareme itu sehingga *Volksraad* (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) bersidang pada tanggal 22 Juli 1919 khusus membicarakan kebijaksanaan Pemerintah di Priangan terhadap petani dalam peristiwa Cimareme serta pertanggunganjawab atas pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan anggota dan pengurus *Afdeeling B* Sarekat Islam di Priangan yang menyebabkan protes dari kaum pergerakan nasional dan masyarakat pada tanggal 20 Juli di Lapangan Gambir Jakarta. Hasilnya Dewan Perwakilan Rakyat menganggap perlu membentuk sebuah komisi untuk mengadakan penelitian tentang peristiwa Cimareme itu.[9] Dr. Hazeu dari Komisi Pemerintah Urusan Bumiputra dan Islam melaporkan kepada gubernur jenderal Hindia Belanda (Van Limburg Stirum) pada tanggal 29 Agustus bahwa tidak terdapat petunjuk kuat bahwa Haji Hasan Arief dipengaruhi Afddeling B Sarekat Islam. Peristiwa Cimareme yang disebutkan sebagai "pengadilan berdarah" disebabkan oleh tindakan pemerintah setempat kurang bijaksana. Ia mengusulkan dalam laporannya supaya wedana Leles, bupati Garut, asisten rediden Garut, dan residen Priangan dipindahkan atau diberhentikan dengan hormat.[10] Sebaliknya pada tanggal 17 September 1919, Residen Priangan melaporkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg Stirum, bahwa pembrotakan petani di Cimareme, Garut yang dipimpin oleh Haji Hasan Arief merupakan gerakan *Afdeeling B* Sarekat Islam atau "gerakan Priangan" di Priangan.[11] Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg Stirum dalam laporannya kepada menteri kolonial mempertanggungjawabkan dan membela tindakan residen Priangan dalam kebijaksanaannya

mengenai penyelesaian peristiwa pemberontakan petani di Cimareme dan kebijaksanaannya di wilayah Hindia Belanda.[12]

Masalah kekurangan makanan, beras khususnya, menunjukkan makin berkurangnya kemakmuran yang menjadi sebab pokok kegelisahan masyarakat di Priangan pada tahun 1919 dan berubah menjadi perlawanan di Cimareme, Garut. Pemerintah menyelesaikan masalah kekurangan makanan menjadi penumpasan terhadap yang dianggap biang keladinya pembrontakan petani di Cimareme, Garut yang oleh residen Priangan disebut *Afdeeling B* Sarekat Islam di Priangan. Penyelesaian secara politis terhadap masalah sosial ekonomi dan kepercayaan tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Pemberontakan-pemberontakan setelah pemberontakan Cimareme muncul dari Sarekat Rakyat, Sarekat Hejo, Pamitran, Sukalillah, Margaluyu, Musyawaratul Ulama, Gerakan Asrar, Kaiin dari Pangerang dan pemberontakan tahun 1926 di Priangan.

Penggantian asisten residen di Garut, Residen di Priangan dan gubernur jenderal Hindia Belanda dari Van Limburg Stirum kepada Fock tidak berhasil menyelesaikan masalah sosial ekonomi, pemerintahan dan kepercayaan pada masyarakat petani yang lebih cepat mengalami perubahan.

4.3.1 Gerakan Ratu Adil di Tangerang, 1924

Pimpinan gerakan pembrontakan petani ini bernama Kaiin Bapak Kayah, seorang petani yang bermukim di tanah partikelir di Pangkalan, Tangerang. Isterinya seorang keturunan Cina, bernama Tan Teng Nio alias Nyonyah Banten. Sejak tahun 1919 Kaiin belajar pedalangan pada seorang dalang di Mauk bernama Wie Ek; tidak lama kemudian Kaiin menjadi dalang kenamaan sehingga mendapat sebutan Bapak Dalang.

Tiga tahun kemudian perubahan pada diri Kaiin terjadi. Ia sering mengunjungi makam-makam suci di Mangga dua, yaitu makam Pangeran Blongsong dan Ibu Mas Kuning. Ber-

sama Haji Riun dan Enang, Kaiin sering berkunjung ke rumah Sairin di Cawang (Jatinegara, Jakarta). Sairin seorang guru dalam ilmu "*kawedukan*" (kekebalan), "*kadigjayaan*' (kesaktian) dan "*kasalametan*" (keselamatan). Mereka juga mengadakan perjalanan ke tempat Kiai Mohamad Santri di Girijaya di lereng Gunung Salak, Bogor. Kiai Santri yang berasal dari Solo terkenal karena teosofinya. Tujuan kunjungan Kaiin ke Kiai Santri ialah untuk mendapat berkah dan restu tentang rencananya untuk mengadakan gerakan menentang tuan tanah

Dalam bulan Oktober 1923 atas prakarsa ibu Minah, seorang dukun, diadakanlah pertemuan antara orang-orang yang setuju terhadap rencana gerakan itu. Kemudian pertemuan itu dilanjutkan di rumah Merin dalam suatu pesta perkawinan. Pada pesta perkawinan itu disajikan seni pantun yang membawakan lakon "*Pangiring Sari*" yang menceritakan kepahlawanan tokoh itu dan putranya Suklawijaya. Kedua tokoh tersebut keturunan Prabu Siliwangi Tiba-tiba Kaiin melarang juru pantun menyebut nama Suklawijaya, karena Kaiin tidak tahan mendengarnya. Menurut Kaiin, ia telah mendapat ilham bahwa Suklawijaya menitis kepada dirinya dan ia akan dijadikan Ratu Robul Alamin atau Sanghiang Tunggal.

Setelah Kaiin bertapa selama 17 tahun, maka sampailah waktunya untuk melaksanakan niatnya. Kaiin mengajak pengikutnya bergerak ke Gunung Salak. Kemudian berkali-kali diadakan pertemuan di antara para pengikutnya. Kaiin sering mengunjungi makam Pangeran Blongsong untuk mendapatkan kekebalan dan mohon restu dalam merebut kembal tanah dari tuan tanah partikelir. Menurut pikiran Kaiin, tanah partikelir di Tangerang sesungguhnya hak milik leluhurnya yang disewakan kepada tuan tanah Cina oleh Belanda. Karena batas waktu sewaan telah habis, maka Cina penyewa harus pergi dan mengembalikan tanah pada Kaiin. Kaiin akan diangkat menjadi raja di daerah itu dengan julukan Prabu Arjuna.

Berdasarkan petunjuk Sairin, hari untuk menuntut pengembalian tanah ditetapkan pada tanggal 4 bulan Rajab, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1924. Upacara mendapatkan jimat untuk kekebalan diadakan sebagai persiapan. Upacara itu diadakan bagi para pengikutnya dengan maksud mendapatkan jimat. Caranya ialah pertama-tama menaruh mata uang dalam sebuah panci yang sudah disediakan berisi air bunga yang tertutup kain putih. Selanjutnya kemenyan dibakar di bawah panci itu dan Sairin membaca do'a. Selain pembacaan do'a air bunga itu dibagikan kepada yang hadir untuk diminum. Air sisanya dipakai untuk membasuh kepala masing-masing. Kemudian tiap pengikut makan kemenyan sedikit. Sairin menyatakan, bahwa seusainya upacara itu dengan sendirinya para pengikutnya sudah kebal. Kepada Kaiin disampaikan sebuah batu hitam sebesar ibu jari sebagai jimat dalam melakukan perlawanan guna mengembalikan tanah leluhur dari tuan tanah partikelir.

Beberapa hari menjelang tanggal 10 Februari 1924 mereka mengunjungi sekali lagi makam Pangeran Blongsong dan Kiai Santri, sambil berpuasa. Semua pengikutnya diwajibkan menyediakan celana putih dan topi bambu Tangerang. Akhir bulan Januari 1924 diedarkan kepada para pengikutnya surat yang ditulis dengan pensil. Surat itu berisi undangan untuk menghadiri suatu kenduri (sedekah) selamatan di tempat Bapak Dalang karena telah berakhirnya masa tapa selama 17 tahun.

Pada awal Februari 1924 para pengikut Kaiin menyatakan kesiapsediaan mereka melakukan perang besar ataupun perang kecil setelah Bapak Dalang menyatakan dirinya sebagai Saidin Ali. Barang siapa tidak percaya boleh meninggalkan tempat untuk pulang ke rumah, tapi jangan menyesal di kemudian hari.

Pertemuan terakhir diadakan setelah Kaiin dan para pengikutnya mengunjungi tempat keramat yang ke-399. Kaiin se-

bagai Saidin Ali menganggap dirinya sebagai orang keramat terakhir.

Persiapan terakhir diadakan pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 1924. Pada hari itu diadakan upacara di rumah Kaiin yang dihadiri oleh 30 orang pengikutnya. Kaiin sendiri menyepi di dalam sebuah kamar yang penuh oleh asap dan bau kemenyan. Kemudian para pengikut yang hadir menaruh uang satu gulden 7 sen ke dalam panci besar. Malam harinya uang tujuh sen dikembalikan kepada peserta yang hadir sebagai jimat. Kemudian mereka yang hadir minum air dari panci itu yang dicampuri bunga bekas mencuci wayang golek Bima, Arjuna, dan Semar.

Hari Minggu tanggal 10 Pebruari 1924, Kaiin atau Bapak Dalang dan pengikutnya telah siap dengan senjata masing-masing. Dengan pakaian celana putih dan topi bambu Tangerang mereka bergerak ke rumah tuan tanah Pangkalan. Dalam perjalanan gerombolan Kaiin mendatangi toko-toko Cina dan menyatakan kepada mereka supaya segera pulang ke tanah leluhur mereka dan sempat pula menangkap dan melukai Sahir, seorang pesuruh tuan tanah. Berhubung dengan tuan tanah Pangkalan tidak berada di tempat, maka gerakan itu menuju rumah tuan tanah Kampun Melayu. Kaiin menyatakan pada tuan tanah Cina di Kampung Melayu, bahwa sewa tanah 25 tahun sudah habis dan supaya dikembalikan atau pulang. Kantor Kongsi dirusak dan beberapa alat tulis-menulis dan buku dibakar. Setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju rumah camat Teluknaga. Di perjalanan sempat mengusir seorang cutak dan seorang agen polisi. Kepada camat Kaiin menyatakan maksudnya akan menuju Betawi untuk menghancurkan kota itu. Camat Teluknaga menjamu Kaiin dan pengikutnya. Sementara itu camat memberitahukan tentang adanya gerakan Kaiin kepada kontroler dan detasemen polisi di Mauk. Kira-kira pukul 14.30, hari Minggu itu, Kontro-

lur bersama polisi dari Mauk datang ke Teluknaga. Setelah diadakan tanya-jawab antara Kaiin dengan pejabat setempat, kemudian Kaiin bersama pengikutnya digiring menuju Betawi. Tetapi sesampainya di Tanah Tinggi, Kaiin terjatuh dari tangan polisi dan bersamaan dengan itu pengikut Kaiin menyerang polisi dan polisi membalas dengan tembakan sehingga 19 orang pengikut Kaiin mati dan 23 luka-luka dan ditahan.[13]

4.3.2 Gerakan Perlawanan Sarekat Hijau dan Sarekat Rakyat di Sumedang, 1925

Sarekat Hijau untuk pertamakalinya muncul di Sumedang di bawah pimpinan seorang Patih. Pada awal pendiriannya Sarekat Hijau dimaksudkan sebagai sebuah perkumpulan yang anggotanya sebagian besar terdiri dari petani di pedesaan. Perkumpulan itu bertujuan menolong para anggotanya yang kematian dan memerlukan bantuan. Kemudian dengan pengarahan dan pimpinan patih Sumedang, Sarekat Hijau ini ditujukan untuk memberantas Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat di Sumedang dipimpin oleh Ujang Kaih. Penduduk petani di desa-desa di daerah Kabupaten Sumedang diharuskan memasuki perkumpulan Sarekat Hijau oleh kepala desanya masing-masing. Jika seorang penduduk di suatu desa tidak mau menjadi anggota Sarekat Hijau, maka ia akan mendapat ancaman dan tekanan dengan bermacam-macam cara dan akan mendapat kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Di Kabupaten Sumedang sudah diketahui secara umum, bahwa seorang lurah mempunyai pengaruh besar terhadap penduduk desanya. Ia berusaha supaya orang terpaksa menjadi anggota Sarekat Hijau. Orang-orang hanya boleh menjadi anggota Sarekat Hijau dan tidak boleh menjadi anggota organisasi lain. Orang takut kalau tidak menjadi anggota Sarekat Hijau dan karenanya berbagai cara diusahakan agar dapat menjadi anggota perkumpulan itu. Setiap hidung dari penduduk di Sumedang dapat mencium bahwa patih Sumedang adalah seorang yang paling

besar dalam memainkan peranan perkumpulan Sarekat Hijau. Sarekat Hijau meluas ke daerah kabupaten-kabupaten Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Cianjur.

Sementara itu, kegiatan Sarekat Rakyat yang muncul tahun 1923 makin lama makin menunjukkan sikap kasar atau radikal sehingga banyak orang merasa terhina karèna kesombongannya dan terutama oleh agitasi politiknya untuk menentang pemerintah. Sikap tersebut ditujukan pula terhadap anggota-anggota Sarekat Hijau, Sarekat Islam dan Paguyuban Pasundan serta orang yang di luar organisasi. Sikap dan cara gerakan Sarekat Rakyat yang radikal itu dengan sendirinya membuat perubahan sikap anggota-anggota Sarekat Hijau. Sarekat Hijau yang semula hanya giat dalam bidang sosial-ekonomi, budaya, dan religi kemudian beralih kegiatannya ke dalam bidang politik dengan kecenderungan menentang Sarekat Rakyat, terutama setelah menjadi pendukung PKI mulai tahun 1923. Patut diketahui beberapa oran pimpinan Sarekat Rakyat di wilayah Priangan, yaitu Darmoprawiro di Bandung, Ujang Kaih di Sumedang, Wiranta di Tasikmalaya, Rukmanada di Cicalengka, Yuda di Rancaekek, dan Sarjono di Sukabumi.

Pada tahun 1924, diperkirakan anggota Sarekat Hijau mencapai jumlah nggota sekitar 70.000 orang. Ini berarti kira-kira seperenam dari jumlah penduduk Kabupaten Sumedang.

Konfik secara terbuka antara Sarekat Rakyat dengan Sarekat Hijau terjadi dalam peristiwa perkelahian massal di depan gedung bioskop Kutamaya di Sumedang. Konflik itu bermula dari permintaan izin penggunaan gedung bioskop yang diajukan secara paksa oleh Sarekat Rakyat untuk rapat. Permintaan izin dari Sarekat Rakyat itu ditolak berhubung dengan pengurus gedung memerlukannya. Sarekat Rakyat membalas penolakan izin itu dengan melarang anggota-anggotanya dan menghalang-halangi orang yang mau menonton di bioskop tersebut yang hanya ada satu-satunya di Sumedang pada saat

itu. Lebih dari itu Sarekat Rakyat melakukan ancaman dan keributan-keributan pada waktu pertunjukan sedang berlangsung dengan cara melempari gedung bioskop dan lain-lain. Pengurus bioskop Kotamaya membalas tindakan Sarekat Rakyat itu dengan memberikan potongan harga karcis bioskop kepada penonton yang dapat memperlihatkan kartu keanggotaan dari Sarekat Hijau. Cara perlawanan ini telah memukul aksi pemboikotan dari Sarekat Rakyat.

Pada suatu malam banyak anggota Sarekat Rakyat datang di bioskop Kutamaya dan memaksa minta harga karcis dengan potongan. Tetapi mereka tidak dapat memperlihatkan kartu keanggotaan Sarikat Hijau. Timbullah pertengkaran mulut antara penjaga dan pengurus bioskop dengan anggota-anggota Sarekat Rakyat yang kemudian meningkat menjadi perkelahian. Pemilik bioskop memanggil polisi dan beberapa penonton lain untuk dimintai bantuan pertolongan melerai perkelahian. Mendengar teriakan permintaan tolong ini, maka berdatanganlah orang-orang yang berdekatan ke tempat perkelahian di depan gedung bioskop. Demikian pula orang-orang dari pasar berdatangan karena letak pasar dekat dengan gedung bioskop. Di antara orang banyak yang datang ke tempat perkelahian itu ada anggota-anggota Sarekat Hijau. Bersamaan dengan itu datang pula polisi 'Perkelahian dapat dihentikan sehingga tidak berakibat lebih parah dan meluas ke tempat lain. Perkelahian dapat dihentikan oleh karena jumlah anggota Sarekat Rakyat yang membuat kerusuhan di tempat itu tidak sebanding dengan orang yang datang dari Sarekat Hijau dan polisi. Mereka segera disuruh bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing dengan peringatan dari polisi bahwa jangan membuat perkelahian di tempat lain atau mengulanginya di tempat yang sama. Kejadian perkelahian di gedung bioskop antara anggota Sarekat Hijau dengan anggota Sarekat Rakyat kemudian sampai pula beritanya ke istana gubernur jenderal di Bogor dan menjadi bahan pembicaraan dalam rapat para residen. Sejak

itu dikenallah nama Sarekat Hijau di kalangan pemerintah kolonial.

Di Tasikmalaya dan Ciamis telah berdiri pula perkumpulan yang serupa dengan Sarekat Hijau. Anggota perkumpulan tersebut terdiri atas petanidi pedesaan dengan dasar ajaran agama Islam. Perkumpulan ini menarik pula bagi bekas anggota Sarekat Islam *Afdeeling B* dan Sarekat Islam. Sikap dalam tindakan anggota-anggota Sarekat Rakyat yang kasar dan sombong kepada orang-orang yang bukan anggota Sarekat Rakyat, bahkan mereka sering menyebut orang yang bukan anggota Sarekat Rakyat dengan sebutan anjing, babi, katak, dan nama-nama binatang lainnya. Perkataan-perkataan yang kotor itu menimbulkan rasa antipati masyarakat pada umumnya. Akhirnya perkumpulan Sarekat Hijau di Tasikmalaya dan Ciamis bersikap menentang Sarekat Rakyat, karena para anggotanya sering tidak mau datang pada tetangga yang kematian atau kenduri perkawinan, khitanan, dan selamatan lain yang bersifat keagamaan Islam serta adat-istiadat setempat, lebih-lebih terhadap pemerintah.

Penilaian R.A. Kern, penasehat Pemerintah Kolonial dalam Urusan Bangsa Pribumi dan Hukum Islam, sendiri terhadap Sarekat Rakyat dikatakannya memang sulit untuk menyebut Sarekat Rakyat sebagai partai politik seperti komunis, walaupun gerakan dan programnya memang seperti program Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1923. Sebab pada kenyataannya ada pula petani yang mempunyai tanah luas masuk menjadi anggota Sarekat Rakyat yang hanya bermaksud untuk berlindung karena takut terkena pembagian tanah dan mengharapkan untuk ikut menentang pemerintah supaya pajak tanah yang dirasakan makin berat oleh petani dihapuskan. Para pemilik sawah komunal *(bengkok)* di desa, yaitu pamong desa, dianggap pula sebagai komunis. Demikianlah akhirnya petani yang memiliki tanah atau tidak memiliki tanah asal mereka masuk menjadi anggota Sa-

rekat Rakyat disebut komunis. Perkumpulan di desa-desa yang dipimpin oleh lurah-lurah setempat menyebut perkumpulan serupa itu sebagai perkumpulan anti komunis. Di samping kekacauan pengertian bagi petani yang sebenarnya tidak mudah untuk memahaminya dan bukan tujuannya yang utama untuk menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang terasa makin menekan dan tidak memuaskan. Pada umumnya pertentangan antara gerakan petani religius dan gerakan yang sekuler yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah setempat banyak menimbulkan kegelisahan dan kepanikan masyarakat di Priangan Timur.

4.3.3 Gerakan Pamitran, Anti Ribut Bond, Sarekat Hijau, dan Sarekat Rakyat di Bandung, 1925

Ruang gerak Partai Komunis Indonesia dalam persaingan mencari anggota dan pendukungnya lebih leluasa di kota Bandung dari pada di kota-kota kabupaten lainnya di wilayah Karesidenan Priangan setelah tahun 1923. Komposisi dan pekerjaan penduduk serta kedudukan kota Bandung sebagai kota industri pada saat itu memberi keleluasaan kepada kaum Komunis untuk mendapat anggota dan pendukungnya dengan mudah. Pada waktu itu Bandung tidak lagi sebagai kota dari masanya Haji Hasan Mustapa Penghulu Bandung (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20), walaupun penduduk Jawa Barat sebagian besar merupakan pemeluk agama Islam, terutama penduduk pedesaan yang juga 80% adalah petani.

Perkumpulan *Pamitran* berpusat di Banjaran, sebuah kota distrik termasuk ke dalm wilayah Kabupaten Bandung. Pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Asmita. Dalam pembentukan perkumpulan Pamitran itu wedana Banjaran memainkan peranan yang besar dan mendapat perintah bupati Bandung. Pada mulanya Pamitran melakukan kegiatan dalam bidang kesenian dengan tujuan meningkatkan hubungan antara

rakyat dengan pejabat pemerintah, di antara penduduk kota dan desa. Untuk mencapai hubungan yang erat antara penduduk desa dan kota, Pamitran membentuk sandiwara yang diberi nama Perkumpulan Sandiwara Bandung. Pada waktu di kota Bandung diselenggarakan Kongres *Java Institut,* Perkumpulan Sandiwara Bandung turut menyumbangkan kesenian dengan pementasan Lutung Kasarung. Kemudian Perkumpulan Sandiwara Bandung menyelenggarakan pementasan di beberapa tempat dengan berhasil baik.

Pada awal tahun 1925 Perkumpulan Sandiwara Bandung mengalami perubahan berhubung dengan masuknya Lurah Desa Banjaran dan beberapa orang pedagang pasar Banjaran sebagai anggota. Mulai saat itu timbul kegiatan baru dengan membentuk kelompok-kelompok kecil di antara para anggotanya. Perubahan tersebut terjadi karena keadaan di Bandung mulai panas berhubung dengan berdirinya Sarekat Rakyat. Memanasnya situasi di Banjaran dimulai sejak Partai Komunis Indonesia bersama Sarekat Rakyat melancarkan kegiatan propaganda dengan menuntut penghapusan pajak tanah dan rencana pembagian tanah dari para tuan kepada petani yang tidak memiliki tanah atau penggarap dan buruh tani.

Bentrokan antara Sarekat Rakyat dengan Pamitran tak dapat dihindari lagi. Anggota-anggota perkumpulan Pamitran mendapat dukungan dan bantuan polisi setempat dalam persaingan dan pertengkaran dengan Sarekat Rakyat dan PKI. Sarekat Rakyat dengan giat mengadakan rapat-rapat untuk mengadakan propaganda penghapusan pajak dan pembagian tanah. Mereka mengajak para petani untuk bersama-sama melawan pemerintah kolonial.

Pada bulan Pebruari 1925 pertentangan antara anggota Sarekat Rakyat dengan Anggota Pamitran pecah gara-gara insiden ronda malam. Sebagai tindakan berjaga-jaga Lurah Banjaran mengharuskan kepada setiap anggota Sarekat Rakyat

untuk mendaftarkan diri di desa, demikian pula untuk anggota Perkumpulan Pamitran. Tetapi anggota dan pengurus Sarekat Rakyat menolak untuk memberitahukan dan mendaftarkan diri kepada Lurah dan polisi di desa. Sebuah rumah anggota Sarekat Rakyat telah dilempari batu pada malam hari sebagai pembalasan atas pengrusakan oleh anggota Sarekat Rakyat terhadap rumah anggota Pamitran 'Dalam keadaan seperti itu penduduk petani yang tidak menjadi anggota Pamitran ataupun Sarekat Rakyat merasa takut dan gelisah karena oleh kedua belah pihak dijadikan sasaran tuduhan dan ajakan kedua perkumpulan itu yang kadang-kadang dilakukan secara paksa.

Rumah seorang anggota Sarekat Rakyat di Ciwidey dihancurkan oleh para anggota Pamitran bersama Sarekat Hijau pada malam hari. Keesokan harinya ia dikunjungi asisten wedana yang menanyakan mengapa tidak melaporkan kepada polisi bahwa rumahnya telah dirusak. Seorang anggota Sarekat Rakyat menjawab, "Kepada siapa harus melapor, sementara saya tahu sendiri siapa yang telah melakukan hal ini." Mendengar jawaban ini maka asisten wedana mukanya merah karena marah dan pergi ke rumah berikutnya, tetapi apa yang terjadi pada malam harinya rumah itu dihancurkan oleh anggota Sarekat Hijau dan Pamitran. Dari beberapa kejadian orang sudah tahu dengan cepat siapa yang melakukan pelemparan batu itu. Rakyat tidak mau melaporkan peristiwa itu walaupun barang-barang isi rumah telah dicuri orang. Bahkan anggota-anggota Pamitran dan Sarekat Hijau yang telah menghancurkan rumah-rumah anggota Sarekat Rakyat mendapat upah antara 10 sen sampai 20 sen untuk setiap rumah yang dihancurkan. Upah ini didapat dari seorang kepala perkebunan yang diberikan kepada kepala pemerintah setempat untuk upah aksi penghancuran rumah-rumah anggota Sarekat Rakyat.

Di daerah Ciparay terjadi pula pertengkaran mulut saling menuduh yang meningkat menjadi saling melempar dengan

batu di antara anggota-anggota Sarekat Rakyat dengan Pamitran pada waktu rapat yang berakibat sebanyak 17 rumah rakyat hancur. Kejadian ini jarang dilaporkan kepada polisi atau pemerintah setempat karena rakyat takut mendapat pembalasan dari kedua belah pihak. Pengrusakan tanam-tanaman, pencurian barang dan pelemparan atas rumah terjadi setelah kejadian perkelahian antara anggota Sarekat Hijau dengan anggota Sarekat Rakyat di Sumedang, yang menjalar tidak hanya di daerah Bandung tapi juga ke Tsikmalaya, Ciamis dan Garut. Pejabat pemerintah setempat sulit untuk mendapatkan keterangan mengenai bagaimana pelemparan dengan batu atas rumah-rumah atau pengrusakan kebun-kebun petani dan pencurian barang-barang itu terjadi. Jalan satu-satunya ialah dengan mengadakan penjagaan setiap malam oleh polisi dan pejabat setempat mulai dari wedana, camat, lurah, dan bersama penduduk. Sehubungan dengan situasi seperti tersebut di atas di Bandung didirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama *Anti Ribut Bon* yang anggota justru bekas anggota Sarekat Rakyat. Pada minggu-minggu pertama setelah pendirian perkumpulan ini anggota-anggotanya secara bergilir melakukan pnjagaan pada waktu malam. Menurut keterangan anggotanya anggota perkumpulan Anti Ribut Bond terdiri dari berbagai suku bangsa warga kota Bandung. Jumlahnya mencapai sekitar 1500 orang. Beberapa bulan setelah keadaan menjadi tertib kembali perkumpulan Anti Ribut Bond membubarkan dirinya lagi.

4.3.3 Gerakan Perlawanan Sarekat Islam. Sarekat Hijau, dan Sarekat Rakyat di Garut dan Priangan Timur, 1925

Jika di daerah Kabupaten Bandung kebanyakan anggota Sarekat Rakyat mendapat gangguan, maka situasi di Garut sebaliknya. Di daerah ini justru rumah-rumah milik anggota

Sarekat Islam yang dilempari batu. Para pejabat dan masyarakat setempat tidak mempedulikan kejadian itu. Mungkin sekali perasaan takut terulangnya kembali seperti peristiwa pemberontakan petani di Cimareme yang dipimpin oleh Haji Hasan Arief masih sangat membekas pada masyarakat.

Gerakan perlawanan terhadap pemerintah dari masyarakat petani Islam di pedesaan Garut baru muncul sekitar bulan Pebruari – Maret 1925. Gerakan itu muncul disebabkan oleh ulah bupati Garut yang minta diakui oleh rakyatnya menggunakan gelar Khalifatullah pada waktu memberikan khotbah sembahyang Jum'at. Tuntutan bupati untuk diakui sebagai khalifatullah itulah yang menyebabkan munculnya gerakan petani pedesaan di Garut.

Secara resmi bupati meminta keterangan kepada residen Priangan untuk dapat menggunakan gelar khalifah itu. Residen Priangan setelah mendapat keterangan ari Badan Penasihat Urusan Bumiputra yang diketuai oleh RA. Ker dan dibantu oleh Prof. Dr. Husein Jayadiningrat menolak permohonan bupati Garut itu. Penolakan itu didasarkan atas alasan, bahwa dalam pandangan masyarakat muslim bupati bukan seorang *imammat*. Dalam Islam Imammaat bukan seorang kepala pemerintahan negeri sedang bupati adalah *ambtenaar*, bukan seorang kepala negara seperti dalam pengertian Islam.

Seperti diketahui pada tahun 1918 bupti Garut ini mengajukan permohonan kepada residen Priangan untuk dapat menggunakan gelar *aria*, tetapi permohonan itu ditolak, karena menurut penilaian dan pertimbangan-pemerintah keadaan sosial ekonomi masyrakat serta politik tahun itu justru dalam keadaan menurun, masyarakat menghadapi kekurangan beras, prestasi kerja dalam bidang ekonomi di Garut tidak menunjukkan kemajuan, dan bupati-bupati di tatar Sunda berkeberatan sehubungan tingkah lakunya. Gelar aria bukan

gelar jabatan, sedangkan keturunan bupati Cianjur saja hanya sampai dengan keturunan keempat menggunakan gelar itu. Jadi tidak seluruh keturunan bupati Aria Wiratanudatar dapat menggunakan gelar Aria.

Bulan Juli tahun 1919 pecah pembrontakan petani di Cimareme, bulan September tahun itu Alimin menjadi ketua Sarekat Islam Lokal Garut. Tahun 1922 Sarekat Islam lokal Garut mengadakan pergantian ketua lagi. Alimin diganti oleh Suroso. Ia adalah pemimpin guru-guru HIS Sarekat Islam. Ia berasal dari Bagelen berijazah *Hogere Kweekschool* (Sekolah Guru Tinggi) dari Purworejo dan datang di Garut untuk mengajar di HIS Sarekat Islam. Selaku ketua guru-guru HIS Sarekat Islam dan juga ketua Sarekat Islam lokal di Garut, ia mengajukan protes kepada pemerintah karena ijazah HIS Sarekat Islam tidak mendapat penghargaan yang sama dengan ijazah HIS keluaran gubernemen. Alimin bekas ketua Sarekat Islam lokal di Garut yang diganti kedudukannya oleh Suroso pada tahun 1924 menghadiri rapat buruh daerah Pasifik di Kantor sebagai wakil dari PKI bersama dengan Budisucipto yang pada tahun 1925 ditangkap sehubungan dengan rencana untuk mengadakan pemberontakan bersama Darsono, Aliarkham, dan Marjohan.

Kongres Al Islam ke - 2 diselenggarakan di Garut pada tahun 1942 dengan tujuan memantapkan hasil Kongres Al Islam ke-I di Cirebon yang tetap pokok acaranya masalah pendidikan dan pembentukan Majelis Ulama untuk menampung guru-guru agama Islam.

4.3.4 Gerakan Masyawaratul Ulama, Gerakan Asrar, dan Sarekat Islam di Cianjur, Priangan Barat, 1925

Setelah peristiwa pemberontakan antara Sarekat Rakyat dengan Sarekat Hijau di Sumedang sekitar bulan Januari –

Pebruari 1925 selesai kemudian di Cianjur muncul keributan antara Sarekat Islam Putih dengan Sarekat Islam Rakyat. Para anggota Sarekat Islam Rakyat Desa Gelembung, Cianjur yang dipimpin oleh Mohammad Jen datang berkunjung ke tempat kediaman Kiai Gelembung. Pimpinannya mengadakan khotbah yang isinya tidak lain untuk menjatuhkan nama baik Kiai Gelembung di depan para pengikutnya. Khotbah jemaah ini meningkat menjadi perdebatan yang panas dan diakhiri dengan perkelahian secara massal dan diwarnai pelemparan batu di antara kedua belah pihak. Kiai beruntung mendapat bantuan dari penduduk Desa Gelembung sehingg anggota-anggota Sarekat Islam Rakyat baru dapat menyelematkan diri dengan bantuan dan campur tangan polisi desa dan polisi yang didatangkan dari Sukabumi.

Di desa Bangbayang. Kecamatan Warungkondang, Cianjur terjadi keributan pula ketika Patih Cianjur sedang mengadakan rapat bersama rakyat petani desa setempat. Keributan timbul karena Toyib dan Idris, keduanya pemimpin Sarekat Islam, melakukan pengacauan pada rapat itu dengan maksud menggagalkan rapat. Tetapi kedua pemimpin Sarekat Islam itu dikeroyok oleh penduduk setempat bersama polisi sehingga menderita luka-luka karena tusukan bambu-pagar dan lemparan batu. Toyib dibawa ke rumah sakit dan setelah beberapa hari dirawat, barulah diperbolehkan pulang ke rumahnya.

Sebab - sebab timbulnya perlawanan dari sebagian penduduk di daerah pedesaan di Cianjur terhadap Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Rakyat harus dicari dalam ukuran dari sikap dan tindakan para pemimpin organisasi tersebut yang kurang bijaksana. Kesombongan pemimpin-pemimpin dan anggota-anggota Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Rakyat itu antara lain dalam bentuk tidak mau menghadiri kenduri, selamatan, perayaan hari besar keagamaan. Sikap dan tindakan

demikian menimbulkan sikap antipati, kegelisahan, perasaan tidak aman, ketakutan dan perlawanan pada masyarakat pedesaan. Kegelisahan mulai timbul dalam masyarakat Cianjur setelah berdirinya Sarekat Islam yang dipimpin oleh Mohammad Jen. Pimpinan Sarekat Islam menganggap rakyat yang bukan anggota Sarekat Islam sebagai bukan sesamanya. Selain itu, mereka melarang orang masuk ke dalam mesjid tanpa sandal, karena dianggap kotor. Di mana-mana di kota-kota, kecamatan, kewedanaan, kabupaten, dan pedesaan terjadi pelemparan batu pada malam hari. Penduduk petani melempari anggota Sarekat Rakyat atau sebaliknya dan kepada rumah-rumah pegawai pamongpraja.

Musyawaratul Ualama berdiri di Cianjur sebagai suatu tanda adanya perubahan dan perbedaan dalam pandangan kenegaraan dalam masyarakat Islam di Cianjur pada khususnya di Hindia Belanda pada umumnya. Menurut ajaran Islam tidak ada pemisahan antara kekuasaan dalam bidang kerohanian dan kekuasaan dalam bidang keduniawian. Hanya ada datu dunia, yaitu Islam yang dipimpin oleh seorang imam yang memerintah berdasarkan syariat Islam, yaitu ajaran hukum Allah. Kesesuaian antara negara dalam masyarakat penganut agama Islam harus sungguh dikerjakan sesuai dengan Al-Qur'an dan berlaku di segala bidang dan berada di mana-mana. Di Hindia Belanda keadaan ini tidak terkecuali. Namun nyatanya perbedaan antara kekuasaan kerohanian dengan kekuasaan keduniawian berlaku dalam struktur pemerintahan bumiputra dan kolonial di Cianjur dan di Jawa pada umumnya. Kekuasaan keduniawian berada di tangan golongan priyayi (menak dalam bahasa Sunda) sedangkan dunia kerohanian berada di tangan guru, kiai, dan ulama. Kekuasaan kerohanian tidak dipertanggung-jawabkan oleh penghulu dan bawahannya seperti khatib dan lebe. Penghulu mempunyai kedudukan sebagai penghubung antara dunia kerohanian

dengan dunia keduniawian. Penghulu harus mengawasi pelaksanaan kekuasaan keduniawian yang dilakukan oleh pemerintah sesuai atau tidak dengan ajaran Islam. Sikap mereka terhadap bupati serta bawahannya sangat tergantung kepada hal ini; bagi dia hanya ada satu yang harus didengar dan disetujui ialah keesaan dari ajaran Islam, tidak ada yang lain.

Politik termasuk ke dalam kekuasaan kerohanian, hal ini adalah bahagian yang terlemah; tidak ada kiai yang akan menggulingkan seseorang bupati. Tapi partai yang mempunyai ajaran kenegaraan adalah satu alat senjata yang memberi kekuatan kepada mereka untuk melaksanakan ajaran kenegaraan dalam Islam yang secara teoritis tidak ada pemisahan antara kekuasaan kerohanian dengan kekuasaan keduniawian.

Di wilayah Karesidenan Priangan tidak ada kabupaten yang kegiatan masyarakatnya dalam mempelajari pengetahuan Islam begitu berkembang seperti di Cianjur. Pesantren-pesantren tua dengan ajaran Islam dan guru-gurunya serta santri-santrinya yang kesohor. Perhatian dalam hal pengetahuan yang berkenaan dengan perorangan begitu besar, tapi hal ini merupakan tuntutan dari ajaran Islam terhadap pengabdian kepada masyarakat dan bagi pemuda untuk mendapat ajaran sesuai dengan jalan yang diridoi oleh Tuhan. Guru agama tidak dapat dibiarkan lalu begitu saja untuk tidak dipengaruhi ajaran nasionalis. Pengetahuan Barat mengancam anak-anak muda untuk mengambil pengetahuan dengan caranya sendiri dan jiwa Islam akan dibawanya ke dalam jiwa nasionalnya. Gerakan guru-guru yang sekrang muncul mempunyai arah yang dilatarbelakangi oleh jiwa Islam dan anti pada ajaran Barat. Oleh karena itu, mental mereka menjadi oposisi terhadap pemerintah yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam; sebab menurut ajaran Islam urusan pemerintahan adalah juga urusan yang harus berdasarkan prinsip ajaran agama Islam.

Di Cianjur ajaran Islam telah berkembang maju dan sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri dan dalam hal ini juga sikap menentang terhadap bupati Cianjur.

Setelah Kongres Al-Islam di Garut pada tahun 1924, di Cianjur didirikan perkumpulan Musyawaratul Ualama yang peresmiannya dilakukan oleh H.O.S. Cokroaminoto, pemimpin besar Sarekat Islam.

Bulan September 1924 mulai timbul protes dari Sarekat Islam di Cianjur terhadap tindakan bupati yang mengeluarkan surat keputusan pengangkatan terhadap guru-guru agama dari anggota-anggota Musyawaratul Ulama. Akhirnya Asisten Residen menyerahkan keputusan kepada guru-guru anggota Musyawaratul Ulama sendiri untuk memilih apakah mereka menjadi guru agama dengan surat keputusan dari pemerintah atau mengembalikan surat keputusan dan memilih tetap menjadi anggota Sarekat Islam. Surat keputusan inilah yang menyebabkan protes Sarekat Islam, karena menganggap pemerintah terlalu jauh ikut campurdalam urusan Sarekat Islam sedang pemerintah menganggap Musyawaratul Ulama terpisah dari Sarekat Islam sebagai organisasi partai. Masalah ini belum mendapat penyelesaian antara Sarekat Islam dengan Musyawaratul Ulama dan pemerintah setempat yang dikepalai oleh bupati. Sarekat Islam menentang turut campur pemerintah dalam urusan keagamaan Islam. Dalam hal ini pengangkatan guru-guru agama dari anggota-anggota Musyawaratul Ulama. Sarekat Islam menghendaki supaya pemerintah bersikap netral atau tidak memihak. Sedangkan bupati berdasarkan ordonansi yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1905, No. 550, artikel 4, mempunyai kekuasaan untuk mengangkat guru-guru agama. Bahkan lebih dari pada itu di Garut bupai menganggap

dirinya sebagai khalifah meskipun masyarakat muslim Garut tidak menerimanya.

Baru setelah keluar keputusan negara tertanggal 20 Agustus 1924, No. 1796 x, bupati tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan surat keputusan pengangkatan guru-guru agama. Kemudian ordonansi lama diperbaharui setelah diadakan permusyawaratan antara *Jong Mohammadiyah* dengan bupati pada tahun 1925.

Surat keputusan yang melarang bupati turut campur dalam urusan agama ini belum sampai di daerah pedesaan sehingga antara guru agama yang diangkat dengan surat keputusan pemerintah dengan anggota Sarekat Islam masih berselisih seperti terjadi di desa Bunut, Cibulakan, dan Pabuaran. Akibatnya di desa-desa itu terjadi dua macam sembyang Jum'at.

Gerakan Asrar didirikan di Cianjur sebagai perkumpulan Islam dengan tujuan menghilangkan perasaan tidak aman. Tetapi dalam perkembangannya terjadi penyimpangan. Bagi Sarekat Islam Cianjur gerakan Asrar sulit untuk diterima karena sifat gerakan ini tidak murni ajaran Islam tapi bercampur *religio-magico.* Pendukung gerakan Asrar mempunyai anggapan, bahwa alam lebih kuat dari pada ajaran; harga yang paling tinggi dari perasaan kurang nyaman di mana pun keamanan hanya dapat dicapai kepada kekuasaan Yang Mahatinggi yang menjadi benteng dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa mereka tidak mau diikat oleh partai. Sebab menurut tafsiran mereka di dalam Qur'an tidak ada surat yang mengharuskan orang Islam menjadi anggota partai.

Gerakan Asrar selain tumbuh di Cianjur, juga berkembang di Sukabumi dan Cikaret. Pengikut gerakan ini dijiwai oleh ajaran Islam yang bercampur kepercayaan magis dan juga khusus diajarkan seni beladiri pencak bagi para anggotanya.

Seni beladiri pencak dianggap sebagai peninggalan leluhur yang berguna bagi menumbuhkan keseimbangan antara ajaran kerohanian dengan badaniah. Pimpinan gerakan Asrar adalah juga anggota Sarekat Islam. Sebelum berdirinya gerakan Asrar mereka termasuk orang terkemuka. Singkatnya gerakan Asrar adalah gerakan Islam yang dilengkapi dengan ajaran mistik dari Syeh Abdul Kadir Jaelani. Anggota-anggota gerakan Asrar giat melakukan latihan seni beladiri pencak tanpa diikuti maksud menjadi seorang *jawara* atau jagoan yang dilengkapi ajaran Islam dari aliran ajaran Syeh Abdul Kadir Jaelani. Dengan mendapat ajaran agama serta latihan pencak orang akan merasa dirinya menjadi aman. Ajaran mistik dari Syeh Abdul Kadir Jaelani mengandung pokok-pokok pengertian sebagai berikut:

(1) Ya Tuhan berikanlah kepada kami berkahMu supaya kami dapat membuka rahasia-rahasia *(asrara)* dalam kepercayaan menurut ajaran Islam.

(2) Ya Tuhan kami memohon kepadaMu berikanlah kepada kami kebenaran dalam kepercayaan, berikanlah kepada kami petunjuk jalan yang mudah untuk mencegahkan kesulitan-kesulitan megeri kami, tambahkanlah pengetahun, berikanlah kekuatan dalam kehidupan kami, maafkanlah untuk mereka yang telah meninggal mendahului kami, berikanlah kepada mereka kurniaMu.

(3) Berikanlah Ya Tuhan kepada kami penerangan dalam menghadapi bencana kesengsaraan dan lepaskanlah kami dari panasnya api nafsu, dan ampunilah pembicaraan-pembicaraan kami.

Di samping itu anggota-anggota Gerakan Asrar diwajibkan pula membaca doa-doa sehabis sembahyang yang berbunyi sebagai berikut:

(4) Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi selain kekuasaan Allah Yang Maha Luhur dan Maha Pengampun.

(5) Mengucapkan doa selawat sebanyak tiga kali, memohon maaf tiga kali, dan diakhiri dengan mengucapkan kalimah syahadat tiga kali.

Pengaruh ajaran mistik Syeh Abdul Kadir Jaelani sangat kuat pada gerakan Asrar di Cikaret, Cianjur. Mereka mempergunakan ajaran ini sebagai kekuatan batin atau rohani dalam latihan-latihan seni beladiri. Keseimbangan antara kekuatan rohani melalui ajaran Islam yang mistik dari Syeh Abdul Kadir Jaelani ini dipergunakan untuk memberikan keseimbangan dalam ajaran seni beladiri pencak yang badaniah itu. Pada setiap hari Jum'at setelah sembahyang magrib pengikut gerakan Asrar diwajibkan membaca surah: 93, 94 dan 96, yang meminta kepada Tuhan agar mereka diberi jalan yang terang dan benar dalam menempuh hidup yang banyak kesulitan ini. Walaupun mereka melakukan latihan seni beladiri tapi gerakan Asrar ini tergolong pada aliran atau tarekat Kadariah.

4.3.5 Gerakan Sarekat Rakyat di Sukabumi, Priangan Barat, 1925

Kongres Sarekat Islam di Madiun yang diselenggarakan pada bulan Februari 1923 memutuskan tentang disiplin partai bahwa anggota Sarekat Islam dilarang menjadi anggota Sarekat Islam Merah. Berhubung dengan adanya keputusan itu, maka Sarjono, ketua Sarekat Islam Sukabumi, memilih Sarekat Islam Merah pimpinan Semuan; oleh karena itu setelah PKI mengadakan kongres di Bandung pada tanggal 4 Maret 1923 maka Sarjono bersedia menjadi penyelenggara Kongres PKIdi Sukabumi pada tanggal 6 Maret 1923.

Seperti diketahui persaingan antara Sarekat Islam pimpinan Cokroaminoto dengan Sarekat Islam Merah pimpinan Se-

maun merembes sampai di Sukabumi. Untuk itu kerja ama Sarekat Islam Merah dengan Sarekat Rakyat brjalan dengan baik. Mengapa keadaan di Sukabumi tidak seperti di daerah lain di wilayah Priangan. Bagaimana Sarekat Hijau di Sukabumi?

Di Sukabumi tidak terjadi pertentangan antara Sarekat Rakyat dengan Sarekat Hijau, karena di daerah ini tidak berdiri Sarekat Hijau. Juga perlawanan penduduk petani terhadap pemerintah tidak terdapat. Mungkin sekali peristiwa *Afdeeling B* di Garut menyebabkan mereka tidak lagi mau anggota-anggota Sarekat Islam banyak yang tidak aktif walau tidak menyatakan diri keluar, kecuali mereka yang terlibat langsung atau yang dikenakan tahanan sementara maupun tahanan sebenarnya. Kemungkinan lain ialah di daerah ini anggota Sarekat Rakyat tidak bertindak kasar dan sombong seperti di daerah lain sehingga tidak menimbulkan antipati masyarakat pada umumnya. Kemungkinan lain lagi ialah di daerah perkebunan di Sukabumi jumlah anggota Sarekat Rakyat lebih banyak atau sebaliknya karena larangan pemilik perkebunan kepada siapa yang menjadi anggota terlarang seperti Partai Komunis Indonesia atau Sarekat Rakyat, dikenakan pemberhentian dari pekerjaan.

Sarjono memamngku pimpinan Sarekat Rakyat di Sukabumi. Ia adalah putra seorang asisten residen (Belanda) dari ibu seorang pribumi. Salah satu pandangannya ialah, bahwa bahasa Sunda halus dan kasar supaya diganti dengan bahasa Sunda sedang agar tak ada lagi perbedaan klas masyarakat.[14]

4.4 Gerakan Perlawanan Rakyat Jawa Barat Tahun 1926

Untuk melaksanakan perlawanan bulan Nopember 1926, cara mempersipkannya unik. Perlawanan itu seperti direncanakan dan digerakkan oleh kaum komunis yang tergabung

dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun kenyataannya banyak sekali yang melaksanakan perlawanan itu adalah alim-uoama dan santri-santri yang sebenarnya sama sekali tidak mengenal ajaran komunis,[15] terutama perlawanan yang terjadi di Banten.[16] Sejak didirikannya Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920, gerakan mereka menempuh cara yang disebut *"Cellenbouw"* memasuki Sarekat Islam, Sarekat-sarekat Buruh, Sarekat Rakyat dan organisasi yang dianggap revolusioner. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Buruh Daerah Pasifik di Kanton bulan Juni 1924, yang dihadiri oleh Alimin dan Budisucipto.

Wiranta, propagandis PKI, masuk VSTP di Jawa Barat berkedudukan di Bandung setelah masuk VSTP di Betawi (Jakarta). Pada bulan Maret 1924 PKI melalui organisasi Sarekat Buruh Kereta Api membuat suatu kejutan terhadap Pemerintah Hindia Belanda dengan cara melakukan aksi menggulingkan kereta api cepat jurusan Bandung – Surabaya di Rancaekek.[17] Ia kemudian pergi ke Semarang. Pada bulan Desember 1924 Yogyakarta menjadi daerah propaganda PKI melalui Sarekat Islam Buruh Industri. Kantor Federasi Buruh (Sarekat Postel, Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan, Federasi Buruh Bengkel dan Listrik, Sarekat Buruh Gula dan Sarekat Buruh Pembangunan Maritim) di Tasikmalaya, Surabaya. Seperti dinyatakan Alimin di Yogyakarta pada bulan Juni 1925 bahwa untuk membebaskan rakyat dari tindasan kapitisme, imperialisme, dan kolonialisme harus ditempuh jalan revolusi dan pemberontakan dimulai secara lokal yang kemudian diikuti oleh massa luas dan pimpinan gerakan PKI di Jawa, seperti Sarjono, seperti Sarjono, Mohammad Sanusi, Alimin, Wiranta, Budisucipto, Sugono, Subakat, dan Muso.

Di Pulau Jawa pemberontakan yang disponsori PKI meletus pada bulan Nopember 1926. Perlawanan itu bergerak di daerah Jakarta, Banten, dan Priangan.

4.4.1 Perlawanan Rakyat di Sekitar Jakarta

Dari berbagai tempat di Jakarta gerakan rakyat pada malam hari tanggal 12 Nopember 1926. Kira-kira 200 orang penduduk kampung Karet keluar dari kampungnya menuju *Weltevreden.* Di jalan-jalan yan dilalui mereka menghancurkan jembatan-jembatan, kemudian menyerang sebuah pos polisi yang dijaga oleh dua orang agen polisi. Di tempat lain mereka membunuh enam orang agen polisi yang baru diketahui pada keesokan harinya. Dari Manggadua diberitakan bahwa pada malam itu 70 orang yang berjalan menuju pusat kota dapat dicegat oleh polisi. Sekira jam 11.30 muncul 15 orang di Sositet Harmoni dan sejam kemudian muncul 12 orang dari Tanah Abang Barat dengan cepat mereka ditangkap. Sementara itu, pengeroyokan dilakukan terhadap Kepala Polisi Gang Scott. Ia mendapat luka-luka. Demikian pula seorang sersan polisi di dekat Stasiun Tanah Abang terlah dikeroyok sehingga mendapat luka-luka berat. Pengeroyoknya semuanya dapat ditahan. Menjelang tengah malam muncul 30 orang pemberontak dan menyerang Rumah Penjara Glodok, dua orang pimpinannya dapat ditangkap dan luka-luka, dan kemudian 64 orang lagi ditangkap. Dalam pada itu Kantor Telepon dirusak orang dan mereka melakukan penembakan terhadap pegawai Kantor Telepon itu. Setalah datang bantuan militer, bangunan Kantor Telepon itu pada waktu subuh hari sudah dapat dikembalikan pada semula dan pembrontak dapat ditahan. Pos Polisi Pejagalan mendapat serangan dari sekelompok kecil pembrontak dan pada saat yang sama kantor di Penjaringan dirusak kemudian dibakar oleh pemberontak. Di jalan menuju Tanjungpriok

dua buah mobil dibakar, sedang jembatan beton di jalan Tangerang diledakkan. Malam berikutnya dengan mengerahkan kekuatan militer dan polisi dapat ditahan 300 orang yang telah melakukan pengursakan dan pembakaran serta pembunuhan. Selain itu sempat orang dari *Vioslaan* ditahan, karena melakukan penembakan terhadap rumah-rumah pejabat pemerintah kolonial dan polisi. Pada malam tanggal 14 Nopember 1926 keadaan kota Jakarta dapat dikuasai sepenuhnya, baik katertiban ataupun keamanannya.

4.4.2 Perlawanan Rakyat di Jatinegara (Meester Cornelis)

Di daerah ini pemberontakan meletus pada tanggal 12 Nopember 1926. Perlawanan itu dimulai dari Pulo Gadung oleh sekelompok orang yang berjumlah 60 orang. Mereka mendatangi rumah asisten wedana yang terkunci. Mereka dapat memasuki rumah, tetapi asisten wedana tidak ada di tempat. Sementara itu, beberapa orang mendatangi rumah kediaman kasisten Residen, namun mereka lebih dahulu dapat disergap polisi. Di Kampung Melayu Besar mereka mendatangi sebuah rumah, ternyata rumah milik temannya sendiri oleh itu mereka menolak masuk.

4.4.3 Perlawanan Rakyat di Tengerang

Pembrontakan di daerah Tangerang meletus pada jam setengah sepuluh malam tanggal 12 Nopember 1926. Dari arah Tangerang muncul tujuh orang dengan membawa golok, tongkat, dan lain-lain menuju ke arah Cengkareng. Gerakan mereka segera diketahui oleh polisi, karena itu mereka kemudian ditangkap. Pada malam tanggal 13 Nopember 1926 tidak lagi terjadi huru-hara di daerah ini.[18]

4.4.4 Perlawanan Rakyat Banten

Pembrontakan petani di daerah ini yang dipimpin oleh PKI melalui organisasi Sarekat Rakyat, Sarekat Merah dan Sarekat-sarekat Buruh setempat telah terjadi di Labuan, Menes, Petir, dan Serang. Di sini anggota PKI tidak langsung ikut dalam pemberontakan. Lain dengan di Jakarta yang memang banyak anggota PKI yang terdapat dalam buruh-buruh pabrik, pekerja-pekerja lepas, penganggur-penganggur, buruh pabrik, pekerja-pekerja lepas, penganggur-penganggur, dan Sarekat-sarekat Buruh (Sarekat Buruh Kereta Api /VSTP, Sarekat Buruh Telepon, Pegadaian, dan Pelabuhan), sedang di Banten Sarekat Buruh Kereta Api tidak diikutserakan. Dan juga tidak seluruh rakyat di Banten ikut dalam pemberontakan. Yang ikut berontak pun bukan seluruhnya anggota PKI dan memahami ajaran Komunis, melainkan kebanyakan terdiri atas ulama dan santri yang benci terhadap pemerintah kolonial. Jumlah pembrontak hampir mencapai 4.000 orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah Serang, Menes, Petir, dan Cadasari. Anyer, Cilegon, dan Merak menjadi pusat pembrontakan. Pembrontak di daerah ini terdiri sebagian besar adalah penggarap sawah, orang desa biasa, kepala desa, kiai atau haji, dan sejumlah jawara. Hanya sedikit orang cendekiawan di samping beberapa orang Cina ikut serta dalam pemberontakan. Nampak pula bahwa pemberontak rata-rata terdiri atas orang-orang muda di bawah 35 tahun.

Sebab-sebab timbulnya pembrontakan adalah karena adanya kepincangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Adanya harapan yang ditimbulkan baik dahulu oleh Sarekat Islam dan kini Partai Komunis Indonesia serta adanya keadaan yang memungkinkan untuk mengadakan perubahan dengan pemberontakan dari pimpinan PKI. Kesadaran yang timbul atau

dibangkitkan melalui Sarekat Islam dan kemudian oleh PKI telah menyebabkan penduduk petani di pesaan lebih menyadari kepincangan-kepincangan dalam masyarakat baik mengenai sosial, ekonomi maupun politik. Masalah pajak, kerjapaksa untuk desa, sikap fanatik dalam agama Islam sehingga menganggap Pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kafir merupakan faktor-faktor timbulnya pemberontakan yang berbeda dengan pembrontakan di Batavia, kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Banten tidak ada buuh pabrik gula, pabrik kertas, perkebunan tembakau, perkebunan teh, kina dan lain-lain. Di daerah ini faktor yang paling menentukan untuk menimbulkan pembrontakan adalah fanatisme Islam. Di samping itu, turut pula memegang peranan yang tidak kecil ialah adanya perselisihan pribadi antara Entol Enoh, bekas kepala desa di Menes, dengan wedana Menes karena masalah pengumpulan pajak.

Dengan dimasukkannya propaganda menuju kemerdekaan di daerah ini telah membangkitkan jiwa memberontak pada mereka di daerah ini baik dari pendukung-pendukung kesultanan maupun yang lainnya. Demikian pula dihembuskan adanya kemungkinan bantuan 200 orang tentara dari Cimahi dan senjata telah menyebabkan ribuan orang tertarik dan menyediakan diri untuk turut serta dalam pemberontakan, seperti guru-guru agama di daerah Caringin dan tentu murid-muridnya juga ikut. Agama Islam yang mengajarkan untuk membebaskan diri dari orang-orang kafir dengan perang sabil merupakan pendorong kuat di antara penduduk petani pedesaan yang religius untuk ikut dalam pemberontakan terhadap pemerintah di daerah ini.[19] Di Menes rumah asisten wedana diserang oleh pengikut-pengikut haji atau guru agama setempat. Di Pandeglang propaganda kaum pemberontak dilakukan terhadap penjual makanan

di warung-warung, di pasar, tukang arloji, pegawai bank, dan kehewanan. Sedangkan di Menes dan Labuan propaganda dilakukan terhadap kepala-kepala desa dan haji-haji seperti Haji Akhmad Chatib dan Haji Dulhadi Bangko. Mereka didatangi di rumahnya dan juga di mesjid atau langgar.

Banten timbul juga perlawanan terhadap gerakan rakyat tersebut yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat petani pedesaan dipelopori oleh bupati Pandeglang seperti terjadi di Priangan. Namun pengaruh bupati Pandeglang tidaklah sekuat pengaruh bupati Sumedang P. Suria Atmaja dalam Sarekat Hijaunya yang mampu membendung pengaruh PKI di daerahnya.[20] Di Banten perlawanan terhadap kaum komunis datang dari anggota Sarekat Islam yang lahir dan tumbuh dari *Pirukun Pribumi* yang didirikan oleh Hasan Djajadiningrat pada tahun 1908 – 1910.[21] Dari Sarekat Islam inilah kemudian menjadi Persatuan Islam yang menentang gerakan Partai Komunis Indonesia di Banten.

4.4.5 Perlawanan Rakyat Priangan

Pemberontakan di daerah Priangan dimulai dari Cimareme tahun 1919, yang telah dibangkitkan oleh Sarekat Islam dan kemudian dilanjutkan oleh kaum komunis pada pembrontakan bulan Nopember 1926. Pemberontakan di Cimareme tahun 1919 itu tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor sosial-ekonomi dan politik yang pincang dalam masyarakat pedesaan, tetapi pula adanya harapan yang telah dipropagandakan oleh Sarekat Islam dan kemudian oleh Sarekat Islam Merah dan Sarekat Rakyat setelah Sarekat Islam *Afdeeling B* ditindas. Kini orang-orang kota melalui organisasi-organisasi yang dipimpin oleh orang-orang kota mulai menggunakan petani di pedesaan yang masih dalam keadaan tradisional sebagai saluran baru dalam gerakan nasional.

Sudah sejak awal tahun 1925 Sarekat Rakyat melakukan aksi di Priangan bersama Sarekat Islam Merah yang menimbulkan perselisihan, perkelahian, dan pelemparan rumah-rumah perorangan maupun anggota perkumpulan-perkumpulan seperti Sarekat Hijau, Pamitran, Paguyuban Pasundan, dan Sarekat Islam Putih atau Sarekat Islam Cokroaminoto. Anti Ribut Bond didirikan pula di Bandung untuk mengimbangi kekuatan anti PKI di daerah ini.

Sudah sejak bulan Maret 1924 PKI di daerah ini dengan melalui Sarekat Buruh Kereta Api melakukan pengrusakan perhubungan. Kareta Api Cepat Jurusan Bandung – Surabaya digulingkan di Rancaegek oleh Sarekat Rakyat setempat pimpinan Yuda dan penduduk Gedebage. Yuda sendiri adalah seorang pegawai bengkel kereta api.[22] Dengan kejadian ini Pemerintah Hindia Belanda di Priangan melakukan pengawasan dan penjagaan lebih ketat lagi terhadap segala kegiatan kaum pergerakan, terutama kegiatan PKI dan organisasi yang berada di bawahnya seperti sarekat-sarekat Buruh dan lain-lain.

Residen Priangan sudah sejak bulan Juni 1924 telah mengetahui adanya kegiatan rahasia yang meningkat di kalangan PKI yang beritanya diperoleh dari laporan polisi rahasia yang melakukan penyelidikan selama 10 hari. Setelah hal itu diketahui maka pemerintah di Priangan bersama polisi meningkatkan persiapan untuk menghadapi pemberontakan yang akan meletus yang waktunya belum diketahui. Pada tanggal 22 Juli 1924 disita sebuah bom besar dan sebuah keranjang berisi bahan peledak seberat 12 kg yang dialamatkan kepada Wiranta, ketua PKI dan ketua pelaksanaan pembrontakan di daerah ini. Bom ini direncanakan untuk dileadakkan di Kota Bandung, ketika gubernur jenderal Hindia Belanda berkunjung ke daerah ini yang direncanakan pada tanggal 31 Juli 1926. Bom dan bahan

peledak serta senjata-senjata api yang dikirim dari Jakarta itu lebih jauh diketahui dikirim ke Cicalengka untuk dipergunakan dalam pengrusakan terhadap alat-alat perhubungan seperti jalan kereta api, jembatan-jembatan, kantor-kantor telepon, rumah-rumah pejabat, asrama-asrama tentara dan polisi setempat. Diberitakan Wiranta pada bulan Agustus 1926 pergi ke Semarang dan terjadilah di sana pemogokan. Demikian pula di Priangan terjadi keributan-keributan tapi tidak sampai terjadi pertumpahan darah. Malam tanggal 13 Nopember 1926 kepala polisi Bandung mendapat berita peringatan dari kepala polisi Jakarta Kota tentang telah meletusnya pemberontakan di Jakarta Kota, Meester Cornelis, dan Banten; oleh karena itu, tidak menunggu sampai pembrontakan meletus segera dilakukan penjagaan dan penangkapan terhadap anggota-anggota PKI dan organisasi masanya yang dicurigai, sehingga hanya sedikit perintah Wiranata yang sampai kepada anggota atau pengurus aksi di Priangan. Perintah itu berisi seruan segera mulai dilakukan pemberontakan.[23] Pembrontakan di Priangan Tengah selain dilakukan dalam bentuk pembongkaran jalan kereta api, juga penghancuran jembatan yang menghubungkan Bandung dengan Garut. Mereka juga melakukan penjagaan ketat di daerah Bandung Utara, yaitu di Cisarua dan Padalarang pada tanggal 15 Nopember 1926. Besok harinya (16 Nopember 1926) hampir sebagian pemberontak di daerah ini sudah dapat ditahan sementara untuk kemudian dikirim ke Boven Digul Irian.

Di Priangan Timur pembrontakan meletus di Ciamis pada malam tanggal 12 Nopember 1926. Mereka melakukan penyerangan tehadap bupati Ciamis yang berkedudukan di pendopo kabupaten, tetapi polisi setempat telah siap-siap sehingga Pembrontakan tidak sampai meluas. Sementara itu, seperti di Priangan Tengah jauh sebelum meletus pembrontakan telah

dilakukan penahanan dan mereka yang tertangkap basah pada tanggal 12 Nopember 1926 disiksa, bahkan ada pula yang dibunuh seperti terhadap Egon, Dirja, dan Hasan Bakri yang menjadi pemimpin pemberontakan di Ciamis.[24]

Pembrontakan kaum komunis di Priangan mengalami kegagalan karena rencana mereka tidak lancar disampaikan pada anggota-anggota di daerah sebab pengawas dari pemerintah dan polisi keras sekali mengamati gerak mereka sejak bulan Juni 1926, akibatnya rencana pembrontakan yang dirahasiakan itu dapat diketahui oleh Pemerintah Hindia Belanda di Bandung. Selain itu Priangan terutama di Kota Bandung adalah pusat kekuatan militer Belanda, yaitu di Cimahi.

Setelah gerakan yang dilancarkan kaum komunis gagal, muncul Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di bawah pimpinan Ir. Soekarno. Partai ini terkenal suaranya keras dalam mengeritik dan menentang pemerintah kolonial.

4.5 Perlawanan terhadap Pemerintah Jepang di Jawa Barat, 1944 – 1945

4.5.1 Perlawanan Rakyat di Singaparna, Tasikmalaya, 1944

Popularitas Jepang sebagai pembebas kolonialisme pada saat pendaratannya di Jawa bulan Maret 1942, tidak lama bertahan sebab keadaan kehidupan menjadi lebih buruk oleh pasar gelap, pemerasan dan teror *Kempetai.* Kesulitan sosial-ekonomi akibat perang makin berat. Keperluan Jepang akan bahan logistik dan tenaga dari bangsa Indonesia makin besar. Pada tahun 1944, kegagalan panen padi meluas, tuntutan penyerahan padi pada pemerintah dengan paksa menyebabkan kebencian petani kepada Jepang menjadi-jadi. Gerakan pemberontakan yang kehilangan harapan dari petani muncul di

Singaparna pada 25 Februari 1944 dan menyusul di Indramayu. Pembrontakan itu dipimpin oleh pemimpin tradisional kiai bersama santri dari pesantren setempat.

Pembrontakan Singaparna meletus pada hari Jum'at tanggal 1 Maulud Tahun Alif (Pebruari 1944) di bahwah pimpinan Kiai Haji Zainalmustofa atau Ajengan Sukamanah, Kiai Emar dan lain-lain yang bercita-cita bebas dari kekuasaan asing. *Kempetai* Jepang dan dibantu *Tokubetsu Keisatsu* dari Garut dan Tasikmalaya, berjumlah 90 orang dengan mudah memadamkan pemberontakan. Kiai Haji Zainalmustofa bersama 26 orang pengikutnya ditangkap dan diangkut oleh Jepang ke Jakarta dan dihukum mati.[25]

4.5.2 Perlawanan Rakyat di Indramayu 1944.

Rakyat Desa Kaplongan di Distrik Karangampel, Indramayu, Cirebon membrontak terhadap penguasa militer Jepang pada bulan April 1944, karena alasan yang ama seperti di Singaparna, yaitu pengumpulan padi oleh pamongpraja setempat yang melebihi kemampuan penduduk dan masalah kekerasan militer Jepang.

Pada hari Minggu 30 Juli 1944 rakyat Kecamatan Lohbener berontak dengan semboyan "Lebih baik mati sekarang melawan Jepang dari pada mati kelaparan". Rakyat Sindang dan Cidempet dengan semboyan yang sama memberontak pula dipimpin oleh H. Madriyas, Darini, Sura, dan Tosiah dari Cidempet bersama H. Kartiwa dari Panyingkiran Kidul. Pada hari Minggu itu rakyat Cidempet keluar beramai-ramai dengan bersenjata golok, parang, keris, tombak, dan bambu runcing berjalan menuju rumah camat Lohbener Mas Prawiradikarta untuk mengambil kembali padi yang telah dipungut dan menolak pemungutan padi selanjutnya Mujur camat tidak ada di tempat. Keesokan harinya rakyat bergerak lagi mencari camat. Kebetulan

mereka bertemu di jalan dengan camat Sindang bersama dua orang polisi yang sedang berkeliling di Panyingkiran Kidul. Rakyat membunuh ketiga orang pejabat itu dan kemudahan membunuh Kuwu Panyingkiran Kidul Haji Abdulgani. Pemberontakan menjalar ke daerah Cantigi. Kepala Desa Cantigi dibunuh juga. Rakyat Desa Sliyeg, Distrik Jatibarang bergerak mencari camatnya pula tapi tidak berhasil. Saran gerakan mereka dialihkan merusak toko-toko Cina. Pemberontakan menjalan ke daerah Tugu, Segeran, dan Juntikulon. *Sycokan* Cirebon bersama pembantunya dan tentara Jepang yang bermarkas di Kabupaten Cirebon bergerak untuk melakukan penumpasan bersama polisi. Pasukan itu bergerak ke desa-desa untuk mengejar dan menangkap para pemberontak. Hanya dengan mengerahkan kekuatan bersenjata Jepang berhasil menangkap pelaku dan menghentikan pemberontakan itu. Kemudian mereka mengirim beratus-ratus tawanan ke alun-alun Indramayu. Penyiksaan dilakukan oleh *Kempeitai* Jepang terhadap penduduk desa petani yang melawan di lapangan terbuka di Kabupaten Indramayu dengan cara-cara yang kejam.. Dari Cidempet diadili 21 orang dan dihukum mati semuanya, termasuk Kia dari Srengseng.

Akibat pembrontakan itu Bupati Sediono diberhentikan dari jabatannya dan diganti oleh Dr. Murjani dari *Jawa Hokokai* Bandung dengan tugas memadamkan pembrontakan lebih lanjut di daerah Indramayu.[26]

4.5.3 Pembebasan Daerah Rengasdengklok, Karawang dari Kekuasaan Jepang, 1945

Pembrontakan di daerah Rengasdengklok meletus pada tanggal 15 – 16 Agustus 1945 sehari sebelum Proklamasi. Pemberontakan itu dicetuskan oleh tentara Pembela Tanah Air (Peta) *Cudan* II di bawah pimpinan *Cudanco* Setiadi dan

Budanco Umar Bakhsan. Perebutan kekuasaan dari tangan Jepang setempat berhasil dengan baik dilakukan dan tempat ini menjadilah daerah Republik Indonesia yang pertama. Pembebasan daerah ini dari tangan kekuasaan militer Jepang dimaksudkan untuk tempat menampung Bung Karno dan Bung Hatta jika tak mau didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebagaimana diketahui Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945, setelah Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Rengasdengklok dan menginap semalam di tempat ini.[27]

Demikianlah rakyat Jawa Barat telah melakukan perlawanan terhadap penjajahan Hindia Belanda dan Jepang untuk mencapai kemerdekaan.

CATATAN

[1] Arsip Nasional Repiblik Indonesia. *Sarekat Islam Lokal,* Penerbitan Sumber-sumber Sejarah No. 7, Jakarta, 1975. Terjemahan Didi Suryadi Sejarah Sarekat Islam Lokal Jawa Barat, untuk memenuhi tugas dari Panitia pengarah Indonesia, Kerjasama Indonesia – Belanda untuk Pengembangan Studi Indonesia, 1977 – 1978, hal. 3 – 127.

[2] *Loc. Cit.*

[3] Lihat: *Tjimaremestukken,* Koleksi KITLV, Leiden.

[4] Lihat: Didi Suryadi: *Peristiwa Cimareme, 1919.* Sebuah Studi Kasus mengenai gerakan masyarakat petani pedesaan di Priangan Jawa Barat. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1978, hal. 1 – 67.

[5] *Loc. Cit.*

[6] William A. Oats, *The Afdeeling B: An Indonesian Case Study.* JSAS, vol. IX. No. 1, Singapore, 1968, 101 – 112.

[7] Lihat: *Mailrapport,* No. 510x/1919. Algemeenrijksarcheif, Den Haaf.

[8] C.O. van der Plas, *Het Beleid der plaatschelijke ambtenaren in de Garoetzaak, 27 December 1919*, Koloniaal Tijdschrift, 1920, hal. 163 – 165.

[9] Lihat: *Tjimaremestukken,* Koleksi KITLV, Leiden.

[10] Lihat: *Tjimaremestukken Koleksi KITLV, Leiden.*

[11] Lihat: R.C. Kwantes, *Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie,* Eerste stuk, 1917 – 1923. H.D. Tjenk Willink, Groningen, 1975, hal. 136 – 212.

[12] Lihat: *Tjimaremestukken,* Koleksi KITLV, Leiden.

[13] Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit.*, 1967.

[14] Lihat: R.A. Kern, *Asrar Beweging in het Tjiandjoersche 11 December 1925,* Koleksi KITLV. dan Af. Wd. le Gouvernements Secretaris, No. 184x, Buitenzorg, 5 juli 1925 onderwerp: Vraag Van het lid den heer J.E. Stokvis over ongeregeldheden in de Preanger Regentschappen, Koleksi KITLV Leiden.

[15] Lihat: R.A. Kern, *Moesjawaratoel Oelama en S.I. in Tjiandjoer.* Weltevreden, 9 Juni 1925, Koleksi KITLV, Leiden.

[16] Harry J. Benda dan Ruth T. Mc. Vey. *The Communist of 1926 – 1927.* Kery Documents, Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Eastern Studies Cornell University, Ithaca, New York, 1960, hal. 40 – 50.

[17] Lihat: J.M. Pluvier, *Het Indonesische Nationalistische Bronen Boeken voor Het Geschiedenis onderwijd.* J.H. Gottimex, Haarlem, 1972, hal. 16 – 27.

[18] Loc. Cit.

[19] Harry J. Benda dan Ruth T.Mc. Vey, Op. Cit. 1926 – 1927. Key Documents, Indonesia Project Southeast Asia Program Department of Far Eastern Studies Cornel University, Ithaca, New York, 1960, hal. 40 – 50.

[20] R.A. Kern, *Oprichting van contra vereenigingen tegen het Komunis, Sarekat Hedjo in Soemedang en analoge verschijnselen elders in De Preanger*, Koleksi KITLV, Leiden.

[21] *Loc. Cit.*

[22] Wawancara dengan Wiranta, Perintis Kemerdekaan Ex Digulis, Bandung, 1982.

[23] *Loc. Cit.*

[24] Iwa Kusumasumantri, "Pemberontakan Tahun 1926" dalam *Sejarah Revolusi Indonesia*, Jilid I, Grafika, Jakarta, 1964, hal. 27–35.

[25] Didi Suryadi, *Tinjauan Sejarah Sekitar Lahirnya Divisi Siliwangi.* Pada tanggal 20 Mei 1946. Skripsi Sarjana Sejarah Pada Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung, 1967, hal. 30 – 36.

[26] Oemar Bachsan,

[27] Oemar Bachsan, *Tjatatan Tentang Peta* (Pembela Tanah Air) dan *Peristiwa Rengasdengklok*, Melati, Bandung 1966: hal. 1 – 44.

BAB V PENUTUP

Dari keseuruhan pengungkapan kisah perlawanan masyarakat Jawa Barat terhadap kekuatan dan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme tersebut di atas diperoleh kenyataan, bahwa masyarakat Jawa Barat menentang kolonialisme dan imperialisme itu sejak masa awal sampai dengan masa akhir kekuasaan mereka di tanah air kita. Masa awal ditandai oleh pertempuran di Kota Pelabuhan Kalapa tahun 1527. Dalam pertempuran tersebut pasukan dari Cirebon dan juga Banten terlibat di dalamnya melawan armada Portugis. Sementara itu, masa akhir ditandai oleh gerakan tentara Peta untuk membebaskan daerah Rengasdengklok dari penguasaan militer Jepang dalam rangka persiapan Proklamasi Kemerdekaan. Baik peristiwa pada masa awal maupun peristiwa pada masa akhir keduanya dimenangkan oleh pihak bangsa Indonesia sehingga akhirnya kekuatan dan kekuasaan kolonialisme dan imperialisme dapat ditumbangkan.

Gerakan-gerakan perlawanan menentang kolonialisme dan imperialisme di Jawa Barat terjadi sepanjang berlangsungnya sejarah kolonial di tanah air kita. Ditinjau dari bentuk, sifat,

motivasi, tujuan, cara dan isi perlawanan itu sendiri secara garis besar dapat dibedakan tiga macam jenis perlawanan di Jawa Barat. *Pertama*, perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin formal (Fatahillah, Sultang Agung/Dipati Ukur, Sultan Tirtayasa, Ratu Bagus Buang/Kiai Tapa), dilakukan dalam ruang lingkungan antara negara (Demak/Cirebon *versus* Portugis, Mataram/Priangan *versus* Balanda, Banten *versus* Balanda), dan terjadi pada abad ke-16, 17, dan 18 Masehi. Timbulnya perlawanan dalam periode ini disebabkan oleh kehadiran kaum kolonial yang mengganggu perekonomian negara dan rakyat serta mengancam kemerdekaan dan kedaulatan negara. Gangguan perekonomian terwujud dalam bentuk desakan berlakunya monopoli perdagangan bagi kaum kolonial tertentu, sedangkan ancaman kemerdekaan dan kedaulatan negara terwujud dalam bentuk berdirinya benteng kolonial di tengah-tengah negara. Perlawanannya dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik dan senjata dalam kuantitas besar. Tujuan perlawanan itu mempertahankan eksistensi, kemerdekaan, dan kedaulatan negara serta kaum bangsawan setempat.

Kedua, perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin informal (Bagus Rangin, Raksa Praja, Nyi Aciah, Haji Wasid), meskipun kadang-kadang masih berhubungan dengan pemimpin formal (raja Kanoman,, patih Bandung). Perlawanan ini dilancarkan oleh bawahan terhadap atasannya dalam hal ini rakyat melawan penguasanya (kolonial dan pribumi), dan terjadi pada abad ke-19 Masehi. Memang pada masa itu kekuasaan kolonial telah memasuki seluruh daerah Jawa Barat dengan mantap. Seluruh daerah Jawa Barat telah dijadikan bagian dari wilayah Kerajaan Belanda, melalui Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada umumnya perlawanan dalam periode ini disebabkan oleh penderitaan hidup (faktor ekonomi), tekanan batin, faktor psikologis dan politis), dan pergeseran status sosial (faktor

sosial budaya) yang sangat merugikan masyarakat pribumi dan menguntungkan orang asing. Gerakan mereka ditujukan untuk melawan penguasa (kolonial dan pribumi) yang telah menyebabkan segala kemiskinan dan penderitaan hidup mereka, serta melenyapkan kemerdekaan dan kedaulatan daerah mereka. Melalui gerakan yang mereka lancarkan dan yang disandarkan pada dua hal, yaitu kekuatan fisik (tenaga manusia dan senjata) dan kepercayaan (kedatangan Ratu Adil, Imam Mahdi), mereka bertujuan melenyapkan kemiskinan dan penderitaan hidup dengan menegakkan kekuasaan baru yang dikepalai oleh pemimpin-pemimpin mereka. Itulah sebabnya oleh pemerintah kolonial dan penguasa pribumi formal gerakan mereka dianggap sebagai pemberontak, pengacau, perusuh, dan penjahat.

Ketiga, perlawanan yang dipimpin oleh pemimpin informal sepenuhnya (Bilal, Haji Pakih, Mas Suriadimaja, Haji Hasan Arief, Kaiin, Toyib, Wiranta, Haji Mukhamad Asnawi, Kiai Haji Zaenal Mustapa) dan gerakannya dilaksanakan dengan menggunakan alat organisasi, baik organisasi politik, organisasi agama, organisasi sosial, atau pun organisasi kebudayaan (Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, Musyawaratul Ulama, Asrar, Partai Komunis Indonesia), suatu cara perjuangan baru sejalan dengan tahap pergerakan nasional. Perlawanan mereka ditujukan untuk memperbaiki kehidupan, menumbangkan kekuasaan asing yang berlainan agama, dan mendirikan negara baru, yang akan membawa kepada kehidupan yang tenteram, adil, dan makmur. Perlawanan model ini dilaksanakan sepanjang abad ke-20 sampai tercapainya tujuan pertama perjuangan mereka, yakni diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia dan disusul oleh didirkannya negara Republik Indonesia.

Ditinjau secara keseluruhan perlawanan masyarakat Jawa Barat terhadap kolonialisme dan imperialisme tersebar di

hampir seluruh Jawa Barat sejak daerah Banten di ujung barat, hingga daerah Cirebon di ujung timur.

Betapa pun di antara gerakan-gerakan perlawanan itu tidak mempunyai hubungan langsung, namun secara keseluruhan perlawanan masyarakat di Jawa Barat itu merupakan manifestasi dari penolakan masyarakat terhadap kkuatan dan kekuasaan asing di tanah air mereka. Kolonialisme dan imperialisme asing itu telah menyengsarakan hidup rakyat, karena itu harus ditentang dan dilawan.

Pengalaman menunjukkan bahwa perpecahan di kalangan bangsa Indonesia telah mengakibatkan kerugian total bagi bangsa itu sendiri secara keseluruhan. Permintaan bantuan terhadap bangsa asing dalam menyelesaikan masalah yang timbul di dalam negeri bukan cara penyelesaian yang baik, tapi sebaliknya merupakan pemilihan jalan yang berbahaya yang mengakibatkan bangsa dan bumi Indonesia jatuh ke dalam cengkraman kaum kolonialis dan imperialis.

Sejarah menunjukkan pula bahwa bangsa Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa Barat, adalah suatu bangsa yang tidak mau dijajah oleh orang asing melainkan bangsa yang ingin merdeka dan berdaulat di tanah air mereka sendiri. Dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, kebenaran, dan keadilan, masyarakat Jawa Barat bersedia mengorbankan segala-galanya, termasuk harta dan jiwa raga mereka. Dengan gerakan-gerakan perlawanan itu rasa persatuan di kalangan masyarakat Jawa Barat dan masyarakat di daerah-daerah lainnya semakin erat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal Di Indonesia*, Gajah Mada
1979 University Press, Yogyakarta.

Arsip Nasional Republik Indonesia, *Sarekat Islam Lokal*, Ter-
1975 jemahan Didi Suryadi, Sejarah Islam Lokal Jawa Barat, Tugas Panitia Panitia Pengarah Indonesa, Kerjasama Indonesia – Belanda untuk Pengembangan.

Atja. *Tjarita Purwaka Tjaruban Nagari*. Ikatan Karyawan Mu-
1981 seum, Jakarta.

Atja dan Saleh Danasasmita. *Carita Parahiyangan*, Proyek Pe-
1981 ngembangan Pemuseuman Jawa Barat, Bandung.

Ayatrohaedi. Pajajaran atau Sunda? *Arkeologi*, I, 4 Maret
1978 1978, Jakarta.

Bachsan, Oemar. *Tjatatan Tentang Peta (Pembela Tanah Air)*
1966 *dan Peristiwa Rengasdengklok*, Penerbit N.V. Melati, Jalan Gajah 28, Bandung.

Benda, Harry, J., dan Ruth T. Mc Vey, *The Communist Upri-*
1966 *sings of 1926 – 1927*. Indonesia Project South Fast Asia Program Departemen of Far Eastern Studies Comell University, Ithaca, New York.

Blumberger, J. Th. Petrus, *De Nationalistische Beweging in* 1931 *Nederlandsch–Indie,* Haarlem.

Bratakoesoema, R. Mh. *Paririmbon Pustaka Djaman Sadjarah* 1950 *Indonesia Tahun Sunda-Djawa Taun 200 Dugi Ka Taun 1950 M.*, naskah, Tjiamis.

Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia;* (terjemahan Prajudi Atmosudirdjo), tjetakan kedua, 1960 Pradjnja Paramita, Djakarta.

Coen, Jan Pieterz, *Bescheiden Omtrent zijn bedriif in Indie,* 1923 V, VII–1 Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage. 1953.

Cortesao, Armando, *The Summa Oriental of Tome Pires.* The 1944 Hukluyt Society, London.

Dagh-Register Anno 1624 – 1629, Anno 1678, Anno 1679, Anno 1680, Anno 1681.

De Graff, H.J. *Geschiedenis van Indonesia.* Van-Hoeve, 's-1949 Gravenhage, Bandoeng.

---------- 1958 *De Regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram* (1613 – 1645). VKI, XXIII, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.

---------- 1962 *De Regering van Sunan Mangkurat.* I, II, VKI *39, Martinus Nijhoff, 's–Gravenyage.*

De Haan, F. *Priangan.* III, BGKW, G. Kolff, Batavia. 1912

De Jonge, J.K.J. *De Opkomst van het Nederlandsch-gezag in* 1970 *Oost–Indie. V.* Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.

Deventer, M.L. van. Geschiedenis der Nederlanders op Java *II* 1887 Haarlem.

Djafar, Hasan., *Girindrawardhana, Beberapa Masalah Majapa-* 1978 *hit Akhir.* Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda, Jakarta.

Djajadiningrat, Pangeran Aria Achmad. *Kenang-kenangan Pa-*

1913 *ngeran Aria Achmad Djajadiningrat.* Balai Poestaka. Weltevreden.

Drewes, G.W.J. "Sech Joesoef Makassar". *Djawa,* 6 Jaargang, 1926 2.

Ekadjati, E. Suhardi. *Perdjuangan Bagus Rangin* (1806– 1812). 1968 Skripsi Sardjana Muda, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung.

--------- "Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat", 1975 *Sejarah Jawa Barat.* Proyek Penunjang Peningkatan Kebudayaan Nasional Propinsi Jawa Barat Bandung.

--------- "Ki Bagus Rangin, Tilikan Sjarah," *Mangle* 1976 (majalah berbahasa Sunda), XIX, 551,21 Oktober 1976.

--------- *Ceritera Dipati Ukur.* Desertai, Universitas 1979 Indonesia, Jakarta.

Hageman, J. "Geschiedenis der Soendalanden," *TBG,* XVI. 1967.

Halkema, van den Hee F.A.C. *Memorie van overgave aftereden Resident Priangan (oost).*

Drewas, G.W.J. *Drie Javaansche Goeroe's.* Hun Leven, Onder-1925 richt en Messiasprediking. Disertasi, Leiden.

Hardjowidjojo, Dharmono. *Benarkah Orang-orang Portugis* 1970 *Melancarkan Perang Agama Terhadap Umat Islam Selama Kehadiran Mereka di Indonesia?* Prasaran dalam Seminar Sejarah Nasional, II, Jogyakarta.

Haruna Djaja, Tb. *Pakem Banten.*

Hatta, Moh. *Sekitar Proklamasi,* Tinta Mas, Jakarta. 1969

Hilman, Iman. *Pemberontakan Raksa Pradja Tahun 1942 : 1969 Suatu Studi Kasus.* Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.

Kartodirdjo, Sartono. *The Peasnt's Revolt of Banten in 1888,*
1966 Its Conditions, Course and Sequel, A Case Study. of Social Movements in Indonesia. VKI, 50 Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage.

--------- *Pergerakan Sosial Dalam Sejarah Indonesia*
1967 Pidato Dies Natalis Ke-18 UGM. Yogyakarta.

--------- Social Movements of Java In The XIX th cen-
1968 turies *An Analitical Framework, The Tjiomas Rebellion of 1866 : A Case Study, Institut.*

--------- *Social Movements of Java In The XIX th cen-*
1978 *turies* An Analitical Framework, The Tjiomas Rebellion of 1866 : A Case Study, Instituto Italiano Per La Storia Dei Movimenti Sociali Libraire Droz-Geneve.

Kemp. P.H.van der. *Pemberontakan Cirebon Tahun 1818.*
1979 *(Terjemahan B. Pandjaitan), Yayasan Idayu, Jakarta.*

Kusen. *Asal-usul Nama Desa Panongan,* Djatitujuh.
1967

Kwantes, R.C. *De Ontwikkling van de Nationalistische Be-*
1975 *weging In Nederlandsch-Indie,* Eerstestuk, 1917–1923. H.D. Tjenk Willink, Groningen.

Kusumasumantri, Iwa. *Sejarah Revolusi Indonesia,* Djilid I,
1964 Grafika, Jakarta.

Leupe, P.A. "Beschrijving der Kaart, voorstellende de belege-
1859 ring van de stad Batavia 1628". *BKI,* V.

--------- "Verhael van de belegeringhe der Stadt Ba-
1855 tavia in 't coninchryck van Jaccatra, Anno 1628, den 22 Augustij. *BKI* , III.

Leur J.C. van, *Indonesian Trade and Society* 2nd edition,
1960 Sumur Bandung, Bandung.

MIchrab, Halwany. *Sekitar Ekskavasi Pemugaran Arkeologi*
1979 *dan Persiapan Site Museum Banten Lama.*

Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Unit II Banten, Jakarta.

Mucharam, "Kiai Tapa.', *Sari* (majalah berbahasa Sunda),
1966 *V, 68.*

Natanegara, Rd. Asik. "Sadjarah Soemedang Ti Djaman Koem-
1938 peni Toeg Nepi Ka Kiwari, *Volksalmanak*
1939 *Soenda,* Balai Poestaka, Batavia-centrum.

Oats, William A. *The Afdeeling B : An Indonesian Case Study,* ISAS, vol. IX, Nr. 1.

Olthof. *Babad Tanah Djawi,* Martinus Nijhoff, 's–Gravenhage.
1941.

Pluvier, J.M. *Het Indonesische Nationalistische Bronen Boe-*
1972 *ken voor Het Geschiedenis Onderwijs,* J. H. Gottimex, Haarlem.

Rusjan, Tubagus. *Sedjarah Banten.* Tjetakan pertama, Arief,
1954 Djakarta.

Sandick, R.A. van. *Leed en Lief vit Bantam.* Zutphen, W.J.
1892 Thieme.

Stapel F.W. *Geschiedenis van Nederlandsch–indie,* V. Batavia.
1940

Suhada, Aju Murniati. *Pemberontakan Kiai Tapa (1750 –*
1967 *1751).* Skripsi Sarjana Muda, Fakultas Sastra Unpad, Bandung.

––––––––– *Peristiwa Tjilegon Tahun 1888.* Skripsi Sarjana,
1971 Fakultas Sastra Unpad, Bandung.

Sulaeman, Setiawaty. *A mission of two ambassadors from Ban-*
1975 *ten to London 1681.* Yayasan Kanisius.

Suryadi, Didi, *Tinjauan Sejarah Sekitar Berdirinya Divisi Sili-*
1967 *wangi :* 20 Mei 1946. Skripsi Fakultas Sastra, Unpad, Bandung.

––––––––– *Peristiwa Cimareme, 1919,* Sebuah Studi Kasus
1978 Mengenai Gerakan Masyarakat Petani Di Pede-

saan Priangan Jawa Barat. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Suryomihardjo, Abdurrachman. *Pembinaan Bangsa dan Masalah Historiografi.* Yayasan Idayu, Jakarta.
1979

Sutaarga, Moh. Amir. *Prabu Siliwangi. Panitia Museum Sejarah Tugu Nasional, Jakarta.*
1964

Tjandrasasmita, Uka. Sultan Ageng Tirtayasa. Proyek IDSN, Departemen P.K., Jakarta.
1981

Tudjimah. *Sjech Jusuf.* Prasaran dalam Seminar Sejarah Nasional, II, Yogyakarta.
1970

Veth, P.J. *Java.* Tweede druk, Haarlem,
1898

Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara* (Sejarah Indonesia). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
1967

Yong Mun Cheong *Conflicts Within The Priyayi World of The Parahyangan In West Java, 1914 – 1927.* Institute of Southeast Asia Studies, Field Report Series, No. 1 Singapore.
1973

B. SURAT KABAR DAN MAJALAH

Bintang Surabaya, Djuni – Desember 1888, Surabaya.

Chabar Hindia Olanda, Djuni – Desember 1888, Batavia.

Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch – Indie, 1919 – 1920.

Indische Nederland Het Surabaya, Djuni – Desember 1888, Surabaya

Java Vode, Djuni – Desember 1888, Batavia.
Tijdschrift, 1920 – 1923.

Mailrapport No. 703. Geh. 1931, ARA, Den Haag.

Memorie van overgave van den aftreden Resident van Midden Priangan den Heer P.R.W. Gesseler Verschuir,
1930

1926 – 1927. Mailrapport, No. 648x, Den Haag.
Neratja, 1919 – 1920.
Padjadjaran, 1919–1920.
Sinar Terang, Djuni – Desember 19888, Surabaya.
Surabaiasch Handelsblad, Djuli – Desember 1888, Surabaya
Verbaal, 10 – 11 October 1919, No. 27, Geheim, No. 64/3x, Mailrapport, No. 510x/1919, Den Haag.
Bataviasch Handelsblad, Batavia, 11 Djuli 1888, hal III, kolom 2